

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

2025 - 2029



SETDA KOTA PEKALONGAN

Jl. Mataram No. 1, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan guna mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029 mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan harapan dapat menghadirkan kebijakan strategis yang tepat guna dan berdaya guna dalam mewujudkan sistem birokrasi yang efektif, profesional dan berdaya saing.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029. Besar harapan Kami agar Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 19 September 2025


Sekretaris Daerah
Kota Pekalongan
M. HONDIANTOMO, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690310 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	12
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	16
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	16
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	16
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	37
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	41
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	71
2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan	72
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja	74
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab	75
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	92
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	92
2.2.2 Isu Strategis	96
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	108
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029	108
3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029	109
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029	111
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029	118
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	122
4.1 Uraian Program	122

4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	126
4.3	Daftar Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah	143
4.4	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan	148
4.5	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	149
4.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	150
4.7	Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang Mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	151
BAB V PENUTUP		152

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	38
Tabel II-2 Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan	38
Tabel II-3 Data Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	40
Tabel II-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 s.d 2024	42
Tabel II-5 Pencapaian Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	70
Tabel II-6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 s.d 2025	76
Tabel II-7 Kesesuaian Masalah Pokok dengan Ruang Lingkup Tugas Pokok Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	95
Tabel II-8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	102
Tabel III-1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	110
Tabel III-2 Strategi Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	115
Tabel III-3 Arah Kebijakan Renstra	120
Tabel IV-1 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan	127
Tabel IV-2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	143
Tabel IV-3 Indikator Utama Pembangunan	148
Tabel IV-4 Indikator Kinerja Utama	149
Tabel IV-5 Indikator Kinerja Kunci	150
Tabel IV-6 Indikator yang Mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	151

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II-1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan berkualitas sangat diperlukan guna tercapainya kegiatan pembangunan yang efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, serta RKPD. Berkenaan dengan perencanaan pada Perangkat Daerah bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan bentuk dari penjabaran dan teknis pelaksanaan tujuan ,sasaran serta indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang didalamnya memuat visi, misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas yaitu membantu Walikota dalam penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota Pekalongan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan ke dalam perencanaan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang memuat program dan kegiatan.
3. Sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekalongan.
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Kota Pekalongan;
5. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Setda Kota Pekalongan;

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

Bab ini memaparkan Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

1. Subbab Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yang memuat:

- a. Tugas fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan;
- b. Sumber daya Sekretariat Daerah Kota Pekalongan;
- c. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dalam pemberian pelayanan;
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan; dan
- c. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yang memuat:

- a. Permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan; dan
- b. Isu Strategis.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yang memuat :

1. Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025;
3. Strategi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memaparkan program, kegiatan, sub kegiatan dan kegiatan penyelenggaraan bidang urusan yang memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program perioritas Pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : Penutup

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

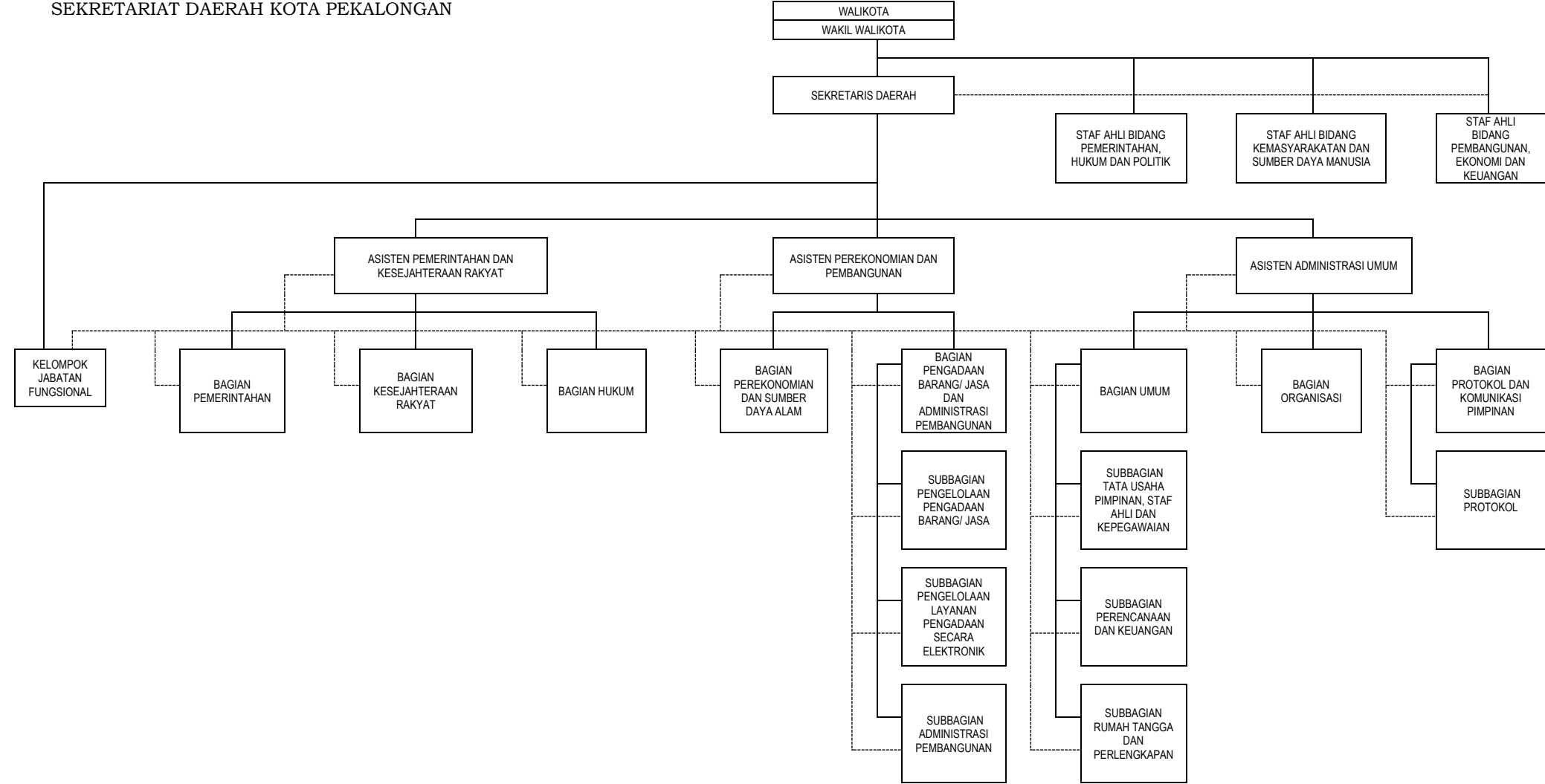
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota Pekalongan. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota Pekalongan., struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, nampak pada bagan berikut :

GAMBAR II-1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah;

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi

- a. pengoordinasian perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, dan administrasi umum;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- d. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- e. pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
- f. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat ;

- b. perumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang hukum;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- g. pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar pelayanan (SP);
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1) Bagian Pemerintahan;

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama serta otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang pemerintahan ;
- b. perumusan bahan kebijakan daerah bidang pemerintahan ;
- c. penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan dan pengelolaan administrasi kewilayahan ;
- d. penyelenggaraan fasilitasi kerja sama daerah dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah ;
- e. perumusan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan dan kerja sama serta otonomi daerah ;
- f. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan serta evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) ;
- g. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. perumusan program kerja di bidang pemerintahan;

Susunan Organisasi Bagian Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. perumusan bahan kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat ;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual ;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi di bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat ;
- e. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) ;
- f. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Bagian Hukum;

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang hukum ;
- b. perumusan bahan kebijakan daerah bidang hukum;

- c. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
- d. penyelenggaraan fasilitasi bantuan hukum daerah ;
- e. penyelenggaraan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum ;
- f. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) ;
- g. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan daerah dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pengadaan barang/ jasa dan administrasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perekonomian dan sumber daya alam, pengadaan barang/ jasa dan administrasi pembangunan ;
- b. perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, pengadaan barang/ jasa dan administrasi pembangunan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengadaan barang/ jasa dan administrasi pembangunan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar pelayanan (SP);
- f. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. perumusan bahan kebijakan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD serta pembentukan BLUD dan pendirian BUMD;

- d. penyelenggaraan pengendalian dan distribusi perekonomian, pengawasan ekonomi mikro kecil menengah, dan koordinasi, sinkronisasi serta evaluasi kebijakan daerah di bidang sumber daya alam;
- e. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- f. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa, pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik dan administrasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang pengadaan barang/ jasa dan administrasi pembangunan;
- b. perumusan bahan kebijakan daerah bidang pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan pengadaan barang/ jasa;

- d. penyelenggaraan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan serta advokasi pengadaan barang/ jasa;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pembangunan;
- f. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- g. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan, membawahi :

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa;

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan.

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa;
- b. menyusun bahan kebijakan daerah bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa;
- c. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/ jasa;
- d. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/ jasa;
- e. menyusun bahan strategi pengadaan barang/ jasa;
- f. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- g. melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa;
- h. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/ sektoral;

- i. melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- j. melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang/ jasa Pemerintah;
- k. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- m. melaksanakan kegiatan verifikasi atas kelengkapan/ persyaratan pengajuan SPM LS pengadaan barang/ jasa;
- n. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan.

Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang layanan pengadaan secara elektronik;
- b. menyusun bahan kebijakan daerah bidang layanan pengadaan secara elektronik;
- c. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;

- d. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa;
- f. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- g. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
- h. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- i. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak;
- j. melaksanakan pengelolaan informasi manajemen barang/ jasa hasil pengadaan;
- k. melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan barang/ jasa melalui e-tendering dan e-purchasing atau e-katalog;
- l. menyusun bahan pembinaan pengadaan barang/ jasa;
- m. melaksanakan advokasi pengadaan barang/ jasa;
- n. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

c) Subbagian Administrasi Pembangunan.

Subbagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan.

Subbagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang administrasi pembangunan;

- b. menyusun bahan kebijakan daerah bidang administrasi pembangunan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
- f. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;
- g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan;
- h. menyusun rencana pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pengadaan barang/ jasa;
- i. melaksanakan pembinaan serta fasilitasi pengiriman pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengelola pengadaan barang/ jasa;
- j. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- l. menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- m. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- n. melaksanakan tata usaha bagian;

- o. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan kebijakan, perumusan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang umum, organisasi dan protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. perumusan kebijakan daerah bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan daerah bidang umum;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang umum;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang organisasi;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang protokol dan komunikasi pimpinan;
- g. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- i. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1) Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang umum;
- b. perumusan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum;
- c. penyelenggaraan administrasi tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
- e. penyelenggaraan fasilitasi kerumahtanggaan dan perlengkapan Sekretariat Daerah;
- f. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- g. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Umum membawahi :

a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan kearsipan Sekretariat Daerah;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretariat Daerah, staf ahli, dan rapat-rapat dinas;
- f. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan keuangan;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan dan keuangan;
- c. menyusun bahan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah yang meliputi menyusun rencana strategis (Renstra), rencana kinerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);

- d. menyusun bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi RKA, DPA, DPPA Sekretariat Daerah;
- e. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah;
- f. menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
- g. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
- h. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
- i. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- j. melaksanakan pengelolaan pertanggungjawaban; perbendaharaan, anggaran dan
- k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
- n. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang rumah tangga dan perlengkapan;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang rumah tangga dan perlengkapan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota serta Sekretariat Daerah;
- d. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;
- e. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat Daerah;
- f. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Walikota, Wakil Walikota serta Sekretariat Daerah;
- g. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretariat Daerah dan kendaraan dinas operasional serta sewa kendaraan;
- h. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan wisma tamu;
- i. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Walikota dan Wakil Walikota serta Sekretariat Daerah;
- j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

Bagian Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang organisasi;
- b. perumusan bahan kebijakan daerah bidang organisasi;
- c. penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana;
- e. penyelenggaraan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi serta koordinasi penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- f. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- g. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. perumusan bahan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi keprotokolan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan;
- e. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- f. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas Subbagian Protokol dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Sub Bagian Protokol

Subbagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Subbagian Protokol mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang protokol;
- b. menyusun bahan kebijakan daerah bidang protokol;
- c. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah;
- d. menyusun bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- e. menyusun bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;

- f. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan tata usaha bagian;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
- i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

5. Staf Ahli Walikota

Staf Ahli Walikota terdiri dari tiga Staf Ahli yang meliputi :

- a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli menyelenggarakan fungsi :

- a. pengidentifikasian permasalahan-permasalahan strategis yang ada di Pemerintah Kota Pekalongan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan alternatif pemecahan masalah;
- c. pemberian pertimbangan berupa saran, pendapat dan masukan kepada Walikota baik diminta maupun tidak diminta;
- d. pelaksanaan evaluasi kebijakan Walikota yang dipandang perlu; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.

Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Optimalisasi kinerja organisasi yang secara terstruktur akan dicapai dalam kelembagaan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan tidak dapat dilepaskan dari upaya penataan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia sebagai bagian dalam manajemen organisasi, keberadaannya sangat sentral dan strategis dalam menopang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sangat beralasan kondisi terkini dari sumber daya manusia perlu untuk dilihat dan dikaji sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam kaitannya dengan penyesuaian besaran volume kegiatan dalam sebuah organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan didukung oleh 105 orang ASN yang tersebar di masing-masing bagian Secara rinci ASN yang ada di Sekretariat Daerah Kota Pekalongan berdasarkan golongan ruang dan pendidikan sampai dengan bulan 01 Agustus 2025.

TABEL II-1
JUMLAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NO	Keterangan	Tingkat Pendidikan							Gender		Total (Orang)
		SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3	L	P	
1	Sekretaris Daerah						1		1		1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra					1			1		1
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan					1			1		1
4	Asisten Administrasi Umum						1		1		1
5	Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik						1		1		1
6	Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan					1			1		1
7	Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia					1			1		1
8	Bagian Umum	3	4	6	4	9			15	11	26
9	Bagian Prokompim		2			8	1		6	5	11
10	Bagian Kesra		2	1		7	1		7	4	11
11	Bagian Pemerintahan		1	2		5	1		3	6	9
12	Bagian Hukum		1	1		8	2		5	7	12
13	Bagian Organisasi					9	1		3	7	10
14	Bagian Perekonomian		2	7					6	3	9
15	Bagian PBJ dan Minbang		1	1		16	1		9	10	19
	TOTAL	3	13	18	4	66	10		61	53	114

TABEL II-2
KOMPOSISI PEGAWAI ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
BERDASARKAN GOLONGAN

NO	Keterangan	Golongan (Orang)				NON ASN	Total (Orang)
		II	III	IV	PPPK		
1	Sekretaris Daerah			1			1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra			1			1
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan			1			1
4	Asisten Administrasi Umum			1			1
5	Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik			1			1
6	Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan			1			1
7	Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia			1			1
8	Bagian Umum	12	13	1		114	140
9	Bagian Prokompim		8	1	2	13	24
10	Bagian Kesra	2	7	1	1	1	12
11	Bagian Pemerintahan	2	5	1	1	1	10
12	Bagian Hukum	1	10	1		2	14
13	Bagian Organisasi		9	1		1	11
14	Bagian Perekonomian		6	1	2	1	10
15	Bagian PBJ dan Minbang		18	1		1	20
	TOTAL	17	76	15	6	134	248

Berdasarkan data pada tabel II-2 terlihat bahwa dilingkungan Sekretariat Daerah lebih didominasi oleh ASN golongan III yaitu sebanyak 76 orang sementara PNS golongan II sebanyak 17 orang, golongan IV sebanyak 15 orang, PPPK sebanyak 6 orang dan Non ASN sebanyak 134 orang. Tingkat Pendidikan sebagian besar ASN memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 66 orang, dan Magister (S2) sebanyak 10 orang, terdapat 4 orang lulusan Diploma 4 (D4), 18 orang lulusan Diploma 3 (D3), 13 orang lulusan SMA dan 3 orang lulusan SMP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah memiliki sumberdaya aparatur yang relatif memadai, jika asumsinya adalah golongan berbanding lurus dengan tingkat kemampuan. Ketersediaan sumberdaya aparatur yang demikian, diharapkan dapat menjamin keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Sekretariat Daerah.

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah komponen penting dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas, baik dalam konteks pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun masyarakat umum. Sarana merujuk pada alat atau fasilitas langsung yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas, sedangkan prasarana mengacu pada infrastruktur dasar yang mendukung keberlangsungan aktivitas tersebut. Berikut adalah alasan mengapa sarana dan prasarana memiliki peran penting. Sarana dan prasarana bukan sekadar fasilitas, tetapi merupakan elemen strategis yang memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan kemajuan suatu komunitas atau organisasi. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas bagi individu, organisasi, maupun pemerintah. Untuk menunjang Sarana dan Prasarana Pegawai Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, maka diperlukan fasilitas yang cukup memadai, agar setiap kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini beberapa sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah :

- a. Aset Tanah yang tercatat di Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebanyak 2 unit senilai 6.417.604.000;
- b. Aset Peralatan dan Mesin yang tercatat di Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebanyak 2.375 buah senilai 25.639.229.596;
- c. Aset Gedung dan Bangunan yang tercatat di Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebanyak 21 unit senilai 18.743.362.242 ;
- d. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tercatat di Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebanyak 5 unit senilai 78.356.000;
- e. Aset Tetap lainnya yang tercatat di Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebanyak 456 buah senilai 209.327.800
- f. Aset lainnya yang tercatat di Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebanyak 45 buah senilai 2.366.018.695

Gambaran secara lengkap tentang kondisi Sarana dan Prasarana per-31 Juni 2025 pada Sekretariat Daerah Kota Pekalongan seperti pada tabel berikut

TABEL II.3
DATA SARANA DAN PRASARANA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	TANAH	2	
	TANAH	2	UNIT
2	PERALATAN DAN MESIN	2.375	
	ALAT BESAR	10	BUAH
	ALAT ANGKUTAN	99	BUAH
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	3	BUAH
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.692	BUAH
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	167	BUAH
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	BUAH
	ALAT LABORATORIUM	29	BUAH
	KOMPUTER	371	BUAH
	ALAT KESELAMATAN KERJA	1	BUAH
	PERALATAN OLAH RAGA	2	BUAH
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	21	
	BANGUNAN GEDUNG	21	UNIT
4	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	5	
	BANGUNAN AIR	1	UNIT
	JARINGAN	4	UNIT
5	ASET TETAP LAINNYA	456	
	BAHAN PERPUSTAKAAN	416	BUAH
	BARANG BERCORAK	40	BUAH
6	ASET LAINNYA	45	
	ASET TIDAK BERWUJUD	5	BUAH
	ASET LAIN-LAIN (RB)	27	BUAH
	ASET NON AKTIF	13	BUAH

2.1.2.3 Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan adalah seluruh bentuk dana atau anggaran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan operasional pemerintahan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber daya keuangan memegang peranan penting dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas pencapaian sasaran strategis, karena menjadi dasar pembiayaan atas seluruh kegiatan pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan administrasi pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan adalah tingkat keberhasilan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan kepada kepala daerah dan seluruh perangkat daerah, yang diukur berdasarkan efektivitas, efisiensi, ketepatan, kualitas, dan kepuasan pengguna layanan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022–2024), Sekretariat Daerah Kota Pekalongan menunjukkan tren kinerja yang cukup baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang sebagian besar mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2022 sampai 2024

TABEL II.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2022 S.D 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
	BAGIAN UMUM																			
I	Indikator Program :Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	99,71	99,55	N/A	N/A	100,00	99,71	99,55
A	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	99,71	99,55	N/A	N/A	100,00	99,71	99,55
1	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Renja yang disusun				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
2	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan yang disusun pada Bagian Hukum				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan yang disusun pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan yang disusun pada Bagian Pemerintahan				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan yang disusun pada Bagian PBJ dan Minbang				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan yang disusun pada Bagian Perekonomian dan SDA				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan yang disusun pada Bagian Organisasi				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan yang disusun pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan yang disusun pada Bagian Umum				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Dokumen	N/A	N/A	15,00	15,00	15,00	N/A	N/A	15,00	15,00	15,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				Dokumen	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				Dokumen	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen SAKIP (Penetapan dan Perubahan) yang disusun pada Bagian Hukum				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen SAKIP (Penetapan dan Perubahan) yang disusun pada Bagian Pemerintahan				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen SAKIP (Penetapan dan Perubahan) yang disusun pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen SAKIP (Penetapan dan Perubahan) yang disusun pada Bagian PBJ dan Minbang				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen SAKIP (Penetapan dan Perubahan) yang disusun pada Bagian Perekonomian dan SDA				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen SAKIP (Penetapan dan Perubahan) yang disusun pada Bagian Organisasi				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen SAKIP (Penetapan dan Perubahan) yang disusun pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen SAKIP (Penetapan dan Perubahan) yang disusun pada Bagian Umum				Dokumen	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				Dokumen	N/A	N/A	5,00	5,00	5,00	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	80,00	80,00	80,00
B	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
4	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Orang	N/A	N/A	117,00	104,00	110,00	N/A	N/A	117,00	104,00	104,00	N/A	N/A	100,00	100,00	94,55
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				bulan	N/A	N/A	14,00	14,00	14,00	N/A	N/A	14,00	14,00	14,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
5	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Dokumen	N/A	N/A	96,00	96,00	96,00	N/A	N/A	96,00	96,00	96,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Hukum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Pemerintahan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian PBJ dan Minbang				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Perekonomian dan SDA				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Organisasi				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Umum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
6	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Laporan	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada Bagian Hukum				Laporan	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada Bagian Pemerintahan				Laporan	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				Laporan	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada Bagian PBJ dan Minbang				Laporan	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada Bagian Perekonomian dan SDA				Laporan	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada Bagian Organisasi				Laporan	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Laporan	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada Bagian Umum				Laporan	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
II	Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum,dan jasa penunjang urusan pemerintahan				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	84,71	107,32	99,86	N/A	N/A	84,71	107,32	99,86
C	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
7	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				Paket	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah keikutsertaan dalam karnaval Batik				Paket	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pakaian dinas yang diadakan				stel	N/A	N/A	65,00	65,00	65,00	N/A	N/A	65,00	65,00	65,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
D	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
8	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Paket	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
9	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Paket	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Hukum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Pemerintahan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Kesejahteraan Rakyat				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian PBJ dan Minbang				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Perekonomian dan SDA				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Organisasi				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Umum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Hukum				unit	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Pemerintahan				unit	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				unit	N/A	N/A	3,00	3,00	3,00	N/A	N/A	3,00	3,00	3,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian PBJ dan Minbang				unit	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Perekonomian dan SDA				unit	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Organisasi				unit	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				unit	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
10	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Umum				unit	N/A	N/A	10,00	10,00	10,00	N/A	N/A	10,00	10,00	10,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				Paket	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
11	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Paket	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Hukum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Pemerintahan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian PBJ dan Minbang				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Perekonomian dan SDA				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada pada Bagian Organisasi				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Umum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
12	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				Paket	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Hukum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Pemerintahan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian PBJ dan Minbang				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Perekonomian dan SDA				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Organisasi				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Umum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
13	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				bulan	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Hukum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Pemerintahan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian PBJ dan Minbang				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Perekonomian dan SDA				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Organisasi				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Umum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
14	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				Laporan	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
15	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				laporan	N/A	N/A	2.122,00	2.980,00	3.000,00	N/A	N/A	1.661,00	2.825,00	2.898,00	N/A	N/A	78,28	94,80	96,60
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Hukum				orang	N/A	N/A	120,00	170,00	N/A	N/A	N/A	120,00	167,00	147	N/A	N/A	100,00	98,24	N/A
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Pemerintahan				orang	N/A	N/A	70,00	100,00	N/A	N/A	N/A	60,00	87,00	115	N/A	N/A	85,71	87,00	N/A
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				orang	N/A	N/A	170,00	150,00	N/A	N/A	N/A	304,00	143,00	182	N/A	N/A	178,82	95,33	N/A

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian PBJ dan Minbang				orang	N/A	N/A	45,00	150,00	N/A	N/A	N/A	25,00	138,00	162	N/A	N/A	55,56	92,00	N/A
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Perekonomian dan SDA				orang	N/A	N/A	70,00	105,00	N/A	N/A	N/A	115,00	102,00	88	N/A	N/A	164,29	97,14	N/A
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Organisasi				orang	N/A	N/A	70,00	75,00	N/A	N/A	N/A	50,00	72,00	127	N/A	N/A	71,43	96,00	N/A
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				orang	N/A	N/A	87,00	130,00	N/A	N/A	N/A	87,00	127,00	180	N/A	N/A	100,00	97,69	N/A
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Umum				orang	N/A	N/A	1.490	2.100	N/A	N/A	N/A	900	1.989	1897	N/A	N/A	60	95	N/A
16	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
17	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Laporan	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Hukum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Pemerintahan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian PBJ dan Minbang				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Perekonomian dan SDA				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Organisasi				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Umum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
18	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Laporan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
19	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Laporan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
III	Indikator Program :Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	97,62	N/A	N/A	100,00	100,00	97,62
F	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	97,62	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
20	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				unit	N/A	N/A	12,00	12,00	74,00	N/A	N/A	12,00	12,00	73,00	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	N/A	N/A	N/A	12,00	12,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				unit	N/A	N/A	74,00	74,00	74,00	N/A	N/A	74,00	74,00	73,00	N/A	N/A	100,00	100,00	98,65
21	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				unit	N/A	N/A	7,00	7,00	7,00	N/A	N/A	7,00	7,00	7,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				unit	N/A	N/A	7,00	7,00	7,00	N/A	N/A	7,00	7,00	7,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
22	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				unit	N/A	N/A	12,00	12,00	190,00	N/A	N/A	12,00	12,00	179,00	N/A	N/A	100,00	100,00	94,21
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Hukum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Pemerintahan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian PBJ dan Minbang				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Perekonomian dan SDA				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Organisasi				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Umum				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
IV	Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	45,84	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
G	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
23	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				orang	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah				bulan	N/A	N/A	14,00	14,00	14,00	N/A	N/A	14,00	14,00	14,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
24	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				orang	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan				kali	N/A	N/A	2,00	2,00	2,00	N/A	N/A	1,00	0,00	0,00	N/A	N/A	50,00	0,00	0,00
H	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	91,67	N/A	N/A	100,00	100,00	91,67
25	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				Paket	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	10,00	N/A	N/A	100,00	100,00	83,33
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	10,00	N/A	N/A	100,00	100,00	83,33
26	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				Paket	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
BAGIAN PROKOMPIM																				
I	Indikator Program :Persentase pelayanan keprotokoleran				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
A	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, fasilitasi komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
1	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				Laporan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokoleran dalam kegiatan kedinasan				Bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
2	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan				Laporan	N/A	N/A	181,00	181,00	191,00	N/A	N/A	181,00	181,00	191,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
	Jumlah dokumentasi kinerja KDH dan WKDH yang terbit pada media massa regional dan lokal				kali	N/A	N/A	170,00	N/A	N/A	N/A	N/A	170,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A
	Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun				kali	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A
3	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				Laporan	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
BAGIAN ORGANISASI																				
I	Indikator Program :Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	103,55	100,00	166,67	N/A	N/A	103,55	100,00	166,67
A	Indikator Kegiatan : Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	103,55	100,00	166,67	N/A	N/A	103,55	100,00	166,67
1	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	6,00	N/A	N/A	N/A	N/A	300,00
	Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disusun				Dokumen	N/A	N/A	1,00	2,00	N/A	N/A	N/A	1,00	2,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun				Dokumen	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
2	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Jumlah OPD yang mengusulkan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SIDa)				orang	N/A	N/A	8,00	8,00	N/A	N/A	N/A	9,00	8,00	N/A	N/A	N/A	112,50	100,00	N/A
	Jumlah OPD yang menyusun Peta Proses Bisnis (SIDa)				orang	N/A	N/A	1,00	10,00	N/A	N/A	N/A	1,00	10,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Jumlah OPD yang menyusun SOP (SIDa)				orang	N/A	N/A	14,00	3,00	N/A	N/A	N/A	14,00	3,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Jumlah OPD yang terfasilitasi Penyusunan SP (SIDa)				orang	N/A	N/A	18,00	2,00	N/A	N/A	N/A	18,00	2,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Jumlah unit kerja yang disurvei IKM (SIDa)				orang	N/A	N/A	N/A	76,00	N/A	N/A	N/A	N/A	76,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Nilai Persepsi Kinerja Unit Pelayanan (Indeks)				Indeks	N/A	N/A	84,00	N/A	N/A	N/A	N/A	88,00	N/A	N/A	N/A	N/A	104,76	N/A	N/A
3	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	46,00	N/A	N/A	N/A	N/A	46,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disusun				Dokumen	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Jumlah dokumen LKJIP Kota Pekalongan yang disusun				Dokumen	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Jumlah kegiatan pembinaan internalisasi nilai-nilai budaya kerja yang dilaksanakan				Kegiatan	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Jumlah laporan capaian kinerja OPD yang disusun				Laporan	N/A	N/A	31,00	31,00	N/A	N/A	N/A	31,00	31,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pendampingan penerapan ZI menuju WBK/WBBM				Satker	N/A	N/A	N/A	11,00	N/A	N/A	N/A	N/A	11,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																			
	BAGIAN PEMERINTAHAN																			
I	Indikator Program :Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	Indikator Kegiatan : Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
1	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				Dokumen	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
2	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Dokumen	N/A	N/A	N/A	3,00	3,00	N/A	N/A	N/A	3,00	3,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
	Jumlah bulan perawatan/pemeliharaan patok tapal batas wilayah				bulan	N/A	N/A	N/A	12,00	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah dokumen Monografi Kelurahan yang disusun				Dokumen	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah Kegiatan Lomba K 3 yang diselenggarakan				kegiatan	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah Kegiatan Sarasehan K 3 yang dilaksanakan				kegiatan	N/A	N/A	N/A	15,00	N/A	N/A	N/A	N/A	15,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah Kelurahan yang dilakukan Pembinaan Administrasi				kelurahan	N/A	N/A	N/A	27,00	N/A	N/A	N/A	N/A	27,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah Rakor dan Sosialisasi Bidang Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				kali	N/A	N/A	N/A	12,00	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah Unsur Rupabumi yang diperbaharui di Kota Pekalongan				unit	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
3	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
B	Indikator Kegiatan : Persentase efektivitas kerja sama daerah				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
4	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				Dokumen	N/A	N/A	70,00	20,00	20,00	N/A	N/A	70,00	20,00	20,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
BAGIAN KESRA																				
I	Indikator Program :Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
A	Indikator Kegiatan : Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
1	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	120,00	N/A	N/A	N/A	N/A	120,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
	Jumlah Guru TPQ/MADIN Kota Pekalongan yang difasilitasi jasa tenaga pendidik, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan				orang	N/A	N/A	7830,00	7870,00	N/A	N/A	N/A	7819,00	7852,00	N/A	N/A	N/A	99,86	99,77	N/A
	Jumlah kegiatan Fasilitasi Haji				kegiatan	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) tingkat Kota Pekalongan				kegiatan	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah kegiatan Hari Santri Nasional				kegiatan	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Jumlah kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenasah				kegiatan	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah kegiatan PHBI				kegiatan	N/A	N/A	5,00	5,00	N/A	N/A	N/A	5,00	5,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Jumlah Kyai yang difasilitasi jasa/insentif				orang	N/A	N/A	N/A	300,00	N/A	N/A	N/A	N/A	300,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan hibah				lembaga	N/A	N/A	116,00	138,00	N/A	N/A	N/A	116,00	129,00	N/A	N/A	N/A	100,00	93,48	N/A

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Jumlah petugas TKHD dan TPHD kegiatan fasilitasi BPIH Kota Pekalongan				orang	N/A	N/A	N/A	3,00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe jenazah (non-PNS) yang difasilitasi jasa/insentif				orang	N/A	N/A	8955,00	9082,00	N/A	N/A	N/A	8953,00	9077,00	N/A	N/A	N/A	99,98	99,94	N/A
2	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	21,00	N/A	N/A	N/A	N/A	21,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
	Jumlah lembaga yang difasilitasi pemberian bantuan sosial berupa beras kepada panti asuhan, yayasan dan pondok pesantren				lembaga	N/A	N/A	312,00	320,00	N/A	N/A	N/A	286,00	320,00	N/A	N/A	N/A	91,67	100,00	N/A
	Jumlah Takmir musholla dan Lebe jenazah non PNS yang mendapat santunan kematian				orang	N/A	N/A	2342,00	2351,00	N/A	N/A	N/A	2342,00	2351,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
3	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00	N/A	N/A	N/A	N/A	76,00	N/A	N/A	N/A	N/A	95,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Jumlah bulan kegiatan fasilitasi BP4				bulan	N/A	N/A	12,00	12,00	N/A	N/A	N/A	12,00	12,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Jumlah kegiatan fasilitasi Houli Habib				kegiatan	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah kegiatan Istigasah Hari Jadi				kegiatan	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
	Jumlah kegiatan Khotmil Quran Hari Jadi				kegiatan	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah kegiatan Pengajian Akbar				kegiatan	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah kegiatan Pengajian Rutin/Ngaji Bareng				kegiatan	N/A	N/A	N/A	11,00	N/A	N/A	N/A	N/A	11,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah kegiatan Senam Aerobik Jumat Pagi di Lapangan Setda dan Minggu Pagi (bersama masyarakat) di Lapangan Mataram				kegiatan	N/A	N/A	45,00	45,00	N/A	N/A	N/A	40,00	45,00	N/A	N/A	N/A	88,89	100,00	N/A
BAGIAN HUKUM																				
I	Indikator Program :Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	122,22	N/A	N/A	100,00	100,00	122,22
A	Indikator Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	122,22	N/A	N/A	100,00	100,00	122,22
1	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				Produk Hukum Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	9,00	N/A	N/A	N/A	N/A	11,00	N/A	N/A	N/A	N/A	122,22
	Jumlah kajian peraturan perundang undangan daerah yang disusun				kajian	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah produk hukum daerah yang disusun (SIDA)				Produk Hukum	N/A	N/A	N/A	9,00	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00	N/A	N/A	N/A	N/A	133,33	N/A
2	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				kasus	N/A	N/A	N/A	N/A	21,00	N/A	N/A	N/A	N/A	18,00	N/A	N/A	N/A	N/A	85,71
	Jumlah laporan RANHAM/Kota peduli HAM di Kota Pekalongan yang disusun				laporan	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Jumlah masyarakat yang mengikuti fasilitasi pelayanan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat				orang	N/A	N/A	N/A	500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah pelayanan advokasi dan bantuan hukum dilingkungan Pemerintah Pekalongan yang dilaksanakan				kali	N/A	N/A	N/A	3,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A
	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani				laporan	N/A	N/A	N/A	12,00	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	33,33	N/A
	Jumlah perkara hukum masyarakat miskin yang terselesaikan				laporan	N/A	N/A	N/A	6,00	N/A	N/A	N/A	N/A	6,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
3	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2285,00	N/A	N/A	N/A	N/A	152,33
	Jumlah pengadaan buku perundang-undangan yang diadakan				buah	N/A	N/A	N/A	11,00	N/A	N/A	N/A	N/A	11,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
BAGIAN PEREKONOMIAN																				
I	Indikator Program : Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
A	Indikator Kegiatan : Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
	- Jumlah BLUD yang dimonitoring				BLUD	N/A	N/A	N/A	16,00	N/A	N/A	N/A	N/A	16,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	- Jumlah BUMD yang difasilitasi				BUMD	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
2	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
	- Jumlah Penyedia Gas Elpiji yang dimonitoring				orang	N/A	N/A	N/A	6,00	N/A	N/A	N/A	N/A	6,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	- Jumlah Penyedia Pupuk Bersubsidi yang dimonitoring				orang	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	- Jumlah bulan pelaksanaan Rakor Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan				bulan	N/A	N/A	N/A	12,00	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	- Jumlah rakor bidang ekonomi yang dilaksanakan				kegiatan	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
3	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
	- Jumlah barang cetak kegiatan aktivasi dan publikasi branding yang diadakan				Dokumen	N/A	N/A	N/A	4.485,00	N/A	N/A	N/A	N/A	4.485,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	- Jumlah Rakor TPAKD yang dilaksanakan				kegiatan	N/A	N/A	N/A	3,00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	- Jumlah Rakor Monev Pemantauan Pengelolaan KUR yang dilaksanakan				kegiatan	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	- Jumlah Rakor Money Komite Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan				kegiatan	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
B	Indikator Kegiatan : Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT				bulan	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
4	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
	- Jumlah OPD pengelola DBHCHT yang dimonitoring				orang	N/A	N/A	N/A	6,00	N/A	N/A	N/A	N/A	6,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
BAGIAN PBJ																				
I	Indikator Program :Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)				Indeks	N/A	N/A	6,00	7,00	6,00	N/A	N/A	10,51	7,06	9,60	N/A	N/A	175,17	100,86	160,00
A	Indikator Kegiatan : Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
1	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
	Jumlah pekerjaan tender fisik yang dilaksanakan 100 % (pekerjaan)				kali	N/A	N/A	50,00	N/A	N/A	N/A	N/A	56,00	N/A	N/A	N/A	N/A	112,00	N/A	N/A
	Jumlah FGD yang dilaksanakan (kali)				kegiatan	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	Jumlah Money yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun (kali)				kegiatan	N/A	N/A	N/A	12,00	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
	<i>Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan (kali)</i>				kegiatan	N/A	N/A	3,00	3,00	N/A	N/A	N/A	3,00	3,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A
II	Indikator Program :Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	87,50	97,50	100,00	N/A	N/A	87,50	97,50	100,00
B	Indikator Kegiatan : Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan				Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	87,50	97,50	100,00	N/A	N/A	87,50	97,50	100,00
3	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
	<i>Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (IKK Outcome) (persen)</i>				kegiatan	N/A	N/A	N/A	40,00	N/A	N/A	N/A	N/A	39,00	N/A	N/A	N/A	N/A	97,50	N/A
	<i>Jumlah Sosialisasi Terkait Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan (kali)</i>				kegiatan	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	<i>Jumlah pengadaan barang/jasa (tender/seleksi) yang difasilitasi Bagian PBJ (pekerjaan)</i>				kegiatan	N/A	N/A	80,00	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00	N/A	N/A	N/A	N/A	87,50	N/A	N/A
4	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
	<i>Jumlah Sewa Bandwitch yang dilaksanakan dalam satu tahun (pekerjaan)</i>				laporan	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A
	<i>Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (IKK Outcome) (persen)</i>				Persen	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	92,27	N/A	N/A	N/A	N/A	92,27	N/A
	<i>Jumlah pengadaan (tender/seleksi) melalui sistem LPSE (pekerjaan)</i>				Persen	N/A	N/A	80,00	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00	N/A	N/A	N/A	N/A	87,50	N/A	N/A

Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Dari sisi kinerja keuangan selama kurun waktu 2020-2024, kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Pencapaian Realisasi Keuangan
Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	n/a	13.262	14.787	14.848	16.080	n/a	12.805	13.887	14.080	14.944	n/a	96,56	93,91	94,83	92,93	5,05	3,99
2	Belanja Barang/Jasa	n/a	30.674	34.175	36.382	36.389	n/a	29.572	32.667	34.681	34.637	n/a	96,41	95,59	95,32	95,19	4,47	4,13
3	Belanja Modal	n/a	2.063	1.466	2.549	702	n/a	1.958	1.444	2.455	674	n/a	94,89	98,47	96,33	95,96	-6,89	-7,13

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam memberikan layanan administratif, koordinatif, fasilitatif, dan analitis guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan terdiri dari berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal pemerintahan daerah.

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kelompok sasaran utama Sekretariat Daerah adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan daerah.

Layanan yang diberikan mencakup :

- Fasilitasi administrasi perkantoran;
- Ketatausahaan dan jadwal kegiatan pimpinan;
- Pelayanan rumah tangga, perlengkapan, pakaian dinas dan kendaraan dinas;
- Fasilitasi kegiatan keprotokolan, pendokumentasian dan komunikasi pimpinan.

2. Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan memberikan layanan koordinasi, fasilitasi, dan dukungan kebijakan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Pelayanan mencakup :

- Fasilitasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- Dukungan dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja;
- Koordinasi lintas sektoral dan vertikal;
- Pelayanan administrasi kepegawaian, kesejahteraan rakyat, pemerintahan, perekonomian, hukum, pengadaan barang dan jasa

3. DPRD Kota Pekalongan yang Sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan juga menjadi

penghubung dan penyedia layanan administratif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan, terutama terkait

- Koordinasi penyampaian dokumen perencanaan dan keuangan daerah;
 - Dukungan protokoler dan pendokumentasian dalam kegiatan resmi daerah;
 - Fasilitasi ketatausahaan dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif;
4. Instansi Vertikal dan Pemerintah Atas (Provinsi/Pusat) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan memfasilitasi hubungan dan koordinasi antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan :
- Instansi vertikal di tingkat Kota ;
 - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - Kementerian/Lembaga di tingkat pusat layanan meliputi penyampaian data, fasilitasi kebijakan pusat, penyusunan laporan, dan penyesuaian regulasi.
5. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya (Tidak Langsung) Meskipun tidak memberikan pelayanan publik secara langsung, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan berkontribusi terhadap pelayanan publik melalui :
- Penguatan sistem manajemen pemerintahan;
 - Dukungan komunikasi publik dan pelayanan informasi;
 - Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah;
 - Pelayanan pengaduan masyarakat

2.1.5 Mitra dalam Pemberian Pelayanan

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan Sekretariat Daerah tidak bekerja sendiri.

Dalam pelaksanaannya Sekretariat Daerah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis yang telah lama terlibat dalam mendukung tugas dan fungsinya. Mitra-mitra ini berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Pihak-pihak mitra yang telah bekerja sama:

1. Instansi Vertikal dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat
Kemendagri, Bappenas, Kementerian PAN-RB, BPKP, KPK, BKN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Keuangan. Berperan dalam pembinaan, pengawasan, harmonisasi kebijakan, serta dukungan teknis terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Menjadi mitra legislatif dalam proses perumusan kebijakan, pengawasan pelaksanaan program, dan penganggaran pembangunan daerah.
3. Inspektorat Daerah
Sebagai mitra dalam pengawasan internal, peningkatan integritas, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
4. Badan/Dinas Teknis Lain di Lingkup Pemerintah Daerah
Menjalin koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan program lintas sektor, serta dalam fasilitasi kebijakan Kepala Daerah.
5. Lembaga Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian)
Terlibat dalam penanganan aspek hukum pemerintahan dan perlindungan hukum terhadap kebijakan daerah.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
Berperan dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan ikut mengawasi transparansi serta akuntabilitas layanan publik.
7. Media Massa
Mendukung diseminasi informasi publik, peliputan kegiatan pemerintahan, dan penyampaian kebijakan daerah secara terbuka kepada masyarakat.

8. Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

Menyediakan kajian akademik dan analisis kebijakan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan ilmu pengetahuan.

9. Dunia Usaha dan Swasta

Terlibat dalam program-program kemitraan pemerintah-swasta (public-private partnership) terutama dalam penyediaan infrastruktur, layanan publik, dan peningkatan ekonomi daerah.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan entitas usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dibentuk untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah. Dalam konteks pelayanan Sekretariat Daerah, BUMD berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Setda secara tidak langsung.

Adapun dukungan BUMD kepada Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebagai berikut

- a. BUMD memberikan kontribusi langsung kepada PAD berupa Deviden, pajak dan retribusi.

Melalui pengelolaan usaha yang profesional, BUMD diharapkan menyumbang laba yang dapat digunakan untuk mendanai pelayanan publik. Sekretariat Daerah, melalui fungsi koordinasi keuangan daerah, mendorong akuntabilitas dan efisiensi BUMD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

- b. BUMD berperan dalam penguatan UMKM, ekonomi lokal, kolaborasi dalam Program Sosial dan Tanggung Jawab Sosial (CSR).

BUMD juga berperan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Sekretariat Daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara BUMD dengan OPD atau masyarakat untuk pelaksanaan program sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga penanganan bencana.

c. Dukungan terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah.

Sekretariat Daerah memiliki fungsi koordinasi lintas sektor, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam hal ini, BUMD didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, seperti:

- Infrastruktur dasar (melalui BUMD energi dan air bersih),
- Layanan keuangan daerah (melalui BPR milik daerah),
- Pariwisata dan perdagangan daerah.

Setda berperan dalam menjamin sinergi antara BUMD dan perangkat daerah melalui koordinasi dan kebijakan lintas sektor.

d. Penyediaan Data dan Informasi untuk Pengambilan Kebijakan.

Dalam perumusan kebijakan daerah, termasuk rekomendasi kepada kepala daerah, Sekretariat Daerah memerlukan dukungan data dan informasi dari berbagai pihak, termasuk BUMD. Informasi mengenai kondisi usaha, tantangan pelayanan, dan proyeksi keuangan BUMD menjadi bahan masukan penting dalam proses perencanaan strategis.

e. Menyediakan pelayanan publik yang murah dan merata

BUMD berperan dalam menyelenggarakan layanan publik yang strategis, seperti di sektor air minum, energi, transportasi, dan pangan. Sekretariat Daerah, sebagai koordinator pemerintahan, seringkali memfasilitasi penguatan peran BUMD agar BUMD menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional dan berkelanjutan melalui:

- Pembinaan kebijakan korporasi daerah,
- Dukungan regulasi dan administrasi,
- Mediasi dalam hubungan antara BUMD dan instansi lain.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab

Sekretariat Daerah Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai kerja sama daerah. Berikut adalah Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 s.d 2025 :

TABEL II.6
KERJASAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2022 S.D 2025

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
1	• Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan • Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	• Nomor : 445/0001.006/2022 • Nomor : 019.6/60/MoU/2022 Tanggal 03 Januari 2022	Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
2	• Sekretariat DPRD Kota Pekalongan • Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	• Nomor : 175/01 • Nomor : 2.025A/C.06.04/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022	Penyelenggaraan Pendalaman Tugas dan Pengkajian/Penelaahan Anggota DPRD Kota Pekalongan
3	• Sekretariat DPRD Kota Pekalongan • Rumah Sakit Telogorejo Semarang	• Nomor : 175/0003 • Nomor : 01C/DIR-PKS/K/2022 Tanggal 03 Januari 2022	Medical Check Up Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022
4	• Sekretariat DPRD Kota Pekalongan • Harian Umum Radar Pekalongan	• Nomor : 175/0005/I/2022 • Nomor : 03/B/RADAR-PKL/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022	Penyelenggaraan Publikasi dan Advertorial Kegiatan DPRD Kota Pekalongan
5	• Sekretariat DPRD Kota Pekalongan • Radar Pekalongan Online	• Nomor : 175/0005/I/2022 • Nomor : 05/B/RADAR PKL ONLINE/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022	Agenda Setting DPRD Kota Pekalongan dan Radar Pekalongan Online Tahun Anggaran 2022
6	• Sekretariat DPRD Kota Pekalongan • Harian Suara Merdeka	• Nomor : 175/0006/I/2022 • Nomor : 002/SM-PWK-PKL/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022	Publikasi di Harian Suara Merdeka Untuk Sekretariat DPRD Kota Pekalongan
7	• Sekretariat DPRD Kota Pekalongan • Info Sekitar Pekalongan Online	• Nomor : 175/0007/I/2022 • Nomor : 01/02/ISP PKL ONLINE/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022	Agenda Setting DPRD Kota Pekalongan dan Info Sekitar Pekalongan Online Tahun 2022
8	• Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan • Universitas Gunadarma	• Nomor : 415.4/0019/I/2022 • Nomor : 01.A/WAREK-IV/UG/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022	Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Pemerintah Kota Pekalongan
9	• Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	• Nomor : 800/1061.25/2022 • Nomor : 800/195.2 Tanggal 02 Februari 2022	Fasilitasi Pengembangan Manajemen Kepegawaian Tahun 2022
10	• Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan • Rumah Sakit H.A. Zaky Djunaid Kota Pekalongan	• Nomor : 475/0148/II/2022 • Nomor : 059/PKS-RSZD/II/2022 Tanggal 02 Februari 2022	Pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW)

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
11	● Rumah Sakit Holistic Kota Pekalongan ● Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan	● Nomor : 01.A/PKS/RSKH/II/2022 ● Nomor : 019.6/55/MoU/2022 Tanggal 03 Februari 2022	Pelayanan Rujukan Pasien
12	● Pemerintah Kota Pekalongan ● Institut Teknologi Bandung	● Nomor : 420/363 ● Nomor : 003A/IT1.A/KS.00/2022 Tanggal 07 Februari 2022	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pembangunan Kota Pekalongan
13	● Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pekalongan ● Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret	● Nomor : 074/313.1/2022 ● Nomor : 576/UN27.22/HK.07.00/2022 Tanggal 18 Februari 2022	Uji Kompetensi Melalui Penggalan Potensi Dalam Rangka Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022
14	● Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ● Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri	● Nomor : 893.3/805.1 ● Nomor : PKS/183/II/2022 Tanggal 21 Februari 2022	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022
15	● PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. ● Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan	● Nomor : JRB.R07.Br.PIB/081/2022 ● Nomor : 556/0382.A Tanggal 25 Februari 2022	Penyediaan Layanan Perbankan Secara Non Tunai Dalam Pembayaran Retribusi Objek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan
16	● Yayasan Mentari Sehat Indonesia ● Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan	● Nomor : 116/MSI/II/2022 ● Nomor : 019.6/53/MoU/2022 Tanggal 01 Maret 2022	Upaya Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis Resistan Obat Tahun 2021-2023
17	● Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ● Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	● Nomor : 228.1/HK.07.00/FIKES/III/2022 ● Nomor : 980/795.1 Tanggal 08 Maret 2022	Program Peningkatan Aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kesehatan
18	● Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan ● PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan	● Nomor : 900/0886/03/2022 ● Nomor : 050/PAS.04/007/2022 Tanggal 16 Maret 2022	Pengelolaan Uang Dalam Bentuk Deposito
19	● Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan ● Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan	● Nomor : 019.6/73/MoU/2022 ● Nomor : 699/002/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Bagi RSUD Benda Kota Pekalongan

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
20	• LPPL Radio Kota Batik • Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan	• Nomor : 002/RKB/SPK/I/2022 • Nomor : 475/0408/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022	Penayangan Talk Show dan Penayangan ILM di LPPL Radio Kota Batik Pekalongan
21	• PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan • Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	• Nomor : 0158/SDU.07/007/2022 • Nomor : 019.6/62/MoU/2022 Tanggal 22 Maret 2022	Kantor Kas Bank Jateng di RSUD Bendan Kota Pekalongan
22	• Pemerintah Kota Pekalongan • PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pekalongan	• Nomor : 973/961 • Nomor : 0001.MoU/HKM.02.01/C0350000/2022 Tanggal 25 Maret 2022	Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, Penerangan Jalan Umum dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Pekalongan
23	• Pemerintah Kota Pekalongan • Universitas Gadjah Mada	• Nomor : 420.4/1065 • Nomor : 2997/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2022 Tanggal 01 April 2022	Kerja Sama Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi
24	• Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan • RSUD Bendan Kota Pekalongan	• Nomor : 118/In.30/F.IV/HM.01/04/2022 • Nomor : 019.6/59/MoU/2022 Tanggal 01 April 2022	Pembelajaran dan Praktek Kerja Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah
25	• Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>) • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 115/KMT/MOU/APR/2022 • Nomor : 130/1266 Tanggal 20 April 2022	Pelaksanaan Proyek <i>Safekeeping-Surviving-Sustaining Towards Resilience: 3S Approach To Build Coastal City Resilience To Climate Change Impacts And Natural Disasters</i> (Melindungi-Mempertahankan-Melestarikan Menuju Ketahanan : Pendekatan 3S Untuk Membangun Ketahanan Kota Pesisir Terhadap Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah) Melalui Pendanaan <i>Adaptation Fund</i> (AF) di Kota Pekalongan
26	• Bappeda Kota Pekalongan • Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>)	• Nomor : K272/PKS/SGS/Mei/2022 • Nomor : 074/1569 Tanggal 25 Mei 2022	Pelaksanaan Proyek <i>Adaptation Fund</i> (AF) Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Pekalongan
27	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan • Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>)	• Nomor : K256/PKS/SGS/Mei/2022 • Nomor : 800/0879/2022 Tanggal 25 Mei 2022	Pelaksanaan Proyek <i>Adaptation Fund</i> (AF) Untuk Sektor Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
28	• Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan • Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>)	• Nomor : K274/PKS/SGS/Mei/2022 • Nomor : 050/0600/V/2022 Tanggal 25 Mei 2022	Pelaksanaan Proyek <i>Adaptation Fund</i> (AF) Untuk Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pekalongan
29	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>)	• Nomor : K275/PKS/SGS/Mei/2022 • Nomor : 980/1744 Tanggal 25 Mei 2022	Pelaksanaan Proyek <i>Adaptation Fund</i> (AF) Untuk Sektor Kesehatan di Kota Pekalongan
30	• Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan • Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>)	• Nomor : K277/PKS/SGS/Mei/2022 • Nomor : 415.4/046 Tanggal 25 Mei 2022	Pelaksanaan Proyek <i>Adaptation Fund</i> (AF) Untuk Sektor Komunikasi dan Informatika di Kota Pekalongan
31	• Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan • Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>)	• Nomor : K278/PKS/SGS/Mei/2022 • Nomor : 410/1216/2022 Tanggal 25 Mei 2022	Pelaksanaan Proyek <i>Adaptation Fund</i> (AF) Untuk Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kota Pekalongan
32	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan • Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>)	• Nomor : K276/PKS/SGS/Mei/2022 • Nomor : 600/845/V/2022 Tanggal 25 Mei 2022	Pelaksanaan Proyek <i>Adaptation Fund</i> (AF) Untuk Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Pekalongan
33	• Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan • Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>)	• Nomor : K273/PKS/SGS/Mei/2022 • Nomor : 556/0860 Tanggal 25 Mei 2022	Pelaksanaan Proyek <i>Adaptation Fund</i> (AF) Untuk Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kepemudaan di Kota Pekalongan
34	• Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan • Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>)	• Nomor : K279/PKS/SGS/Mei/2022 • Nomor : 523/0996 Tanggal 25 Mei 2022	Pelaksanaan Proyek <i>Adaptation Fund</i> (AF) Untuk Sektor Perikanan di Kota Pekalongan
35	• Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan • Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan	• Nomor : 1279/PEN.6/PKS/05/2022 • Nomor : 050/0607 Tanggal 27 Mei 2022	Penyelenggaraan Pelatihan Ekspor Bagi UKM Kota Pekalongan dengan Tema Bagaimana Memulai Ekspor
36	• Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah	• Nomor : 06/GORUT-MOU/V/2022 • Nomor : 130.4/3210 Tanggal 30 Mei 2022	Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Gorontalo Utara

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
37	• Jaya Konstruksi - BRP - Apta KSO • RSUD Bendan Kota Pekalongan	• Nomor : 003/PKS/JBA/III/2022 • Nomor : 019.6/63/MoU/2022 Tanggal 30 Mei 2022	Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan Bagi Karyawan Proyek Pengendalian Banjir dan Rob Sungai Loji - Banger Paket III
38	• Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 06/GORUT-PKS/V/2022 • Nomor : 475/1303 Tanggal 31 Mei 2022	Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Motihelumo, Kawasan Transmigrasi Sumalata, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
39	• Bappeda Kota Pekalongan • Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung	• Nomor : 070/1649 • Nomor : 7580/IT1.C01/KS.00/2022 Tanggal 02 Juni 2022	Kegiatan Riset Unggulan Daerah "Pemetaan Jaringan Drainase Berbasis Spasial di Kota Pekalongan"
40	• Bappeda Kota Pekalongan • Tim Peneliti Universitas Semarang	• Nomor : 070/1650 • Nomor : 1183/USM.H4.FT/G/2022 Tanggal 02 Juni 2022	Kegiatan Riset Unggulan Daerah "Study Penganangan Genangan dan Banjir dengan Menggunakan Pipa Resapan Horizontal di Wilayah Pekalongan Barat"
41	• Bappeda Kota Pekalongan • Tim Peneliti Universitas Diponegoro	• Nomor : 070/1651 • Nomor : 100/UN7.F3.5.10/KS/VI/2022 Tanggal 02 Juni 2022	Kegiatan Riset Unggulan Daerah "Studi Penyusunan Zona Risiko Kerentanan Air Tanah Terhadap Pencemaran Menggunakan Metode <i>Groundwater, Occurance, Overlaying, Lithology Depth Of Groundwater</i> (GOD) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan"
42	• Bappeda Kota Pekalongan • Tim Peneliti Universitas Pekalongan	• Nomor : 070/1652 • Nomor : 205/C.06.01/LPPM/VI/2022 Tanggal 02 Juni 2022	Kegiatan Riset Unggulan Daerah "Pengolahan Limbah Batik Menggunakan Bakteri Indegenous Sebagai Upaya Pemulihan Indeks Kualitas Air Di Kota Pekalongan"
43	• Bappeda Kota Pekalongan • Tim Peneliti Universitas Diponegoro	• Nomor : 070/1653 • Nomor : 012/UN7.F3.5.4/PP/X/2022 Tanggal 02 Juni 2022	Kegiatan Riset Unggulan Daerah "Penerapan Konsep Water Sensitive Urban Design untuk Mewujudkan Permukiman Pesisir Kota Pekalongan Yang Tangguh"
44	• Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan • Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekalongan	• Nomor : 474/0850/2022 • Nomor : 27/BP4.PKL/VI/2022 Tanggal 06 Juni 2022	Penyelenggaraan Program Penyuluhan, Konsultasi, Mediasi, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pendataan Dalam Rangka Penguatan Keluarga di Kota Pekalongan

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
45	• Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan • Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan	• Nomor : 474/0849/2022 • Nomor : 2043/KKU.34/I/Hm01/6/2022 Tanggal 06 Juni 2022	Penyelenggaraan Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Guna Percepatan Penurunan Stunting Dalam Kerangka Program Bangga Kencana
46	• Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan • Rumah Sakit Hermina Pekalongan	• Nomor : 019.6/65/MoU/2022 • Nomor : 648/PR/RSHPKL/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022	Pelayanan Rujukan Pasien
47	• Pemerintah Kota Pekalongan • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan	• Nomor : 560/3583.1 • Nomor : 38B/06/2022 Tanggal 20 Juni 2022	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Kota Pekalongan
48	• Universitas Jenderal Soedirman • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : T/377/UN23.HK.06.00/2022 • Nomor : 420/3587 Tanggal 21 Juni 2022	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan
49	• Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI) • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 076/MAN/BTR/V.2022 • Nomor : 660/3647 Tanggal 24 Juni 2022	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan
50	• Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan • Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan	• Nomor : 1530.a/PEN.6/PKS/06/2022 • Nomor : 050/0607 Tanggal 24 Juni 2022	Penyelenggaraan Pelatihan Ekspor Bagi UKM Kota Pekalongan dengan Tema <i>Export Costing and Pricing</i>
51	• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 988/VI-02/0622 • Nomor : 440/3686 Tanggal 28 Juni 2022	Perubahan/Addendum Atas Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
52	• Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan • Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	• Nomor : 012/PKS-RS/BR/VI/2022 • Nomor : 019.6/75/MoU/2022 Tanggal 30 Juni 2022	Pelayanan TB Dots dan HIV Aids
53	• Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan • PT. Cito Putra Utama (Laboratorium Klinik Cito)	• Nomor : 024/RSUH/PKS-CITO/VIII/2022 • Nomor : 21417/CPU023.7/MKT.VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
54	• Bappeda Kota Pekalongan • Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada	• Nomor : 070/1691 • Nomor : 5247/UN1/FTP/SET-D/HM/2022 - Tanggal 06 Juli 2022	Mitigasi Dampak Banjir dan Rob terhadap Lahan Pertanian di Kota Pekalongan
55	• Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan • PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan	• Nomor : 900/1640/07/2022 • Nomor : 063/HT.01.04/007/2022 - Tanggal 06 Juli 2022	Perubahan Atas Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Uang Dalam Bentuk Deposito
56	• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat	• Nomor : 810/1779.1/2022 • Nomor : 2404/hk.03.01/BPSDM - Tanggal 11 Juli 2022	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022
57	• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan • Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret	• Nomor : 074/1793.1/2022 • Nomor : 2686/UN27.22/HK.07.00/2022 - Tanggal 12 Juli 2022	Uji Kelayakan dan Kepatutan (Assessment) Bagi Calon Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan Tahun 2022
58	• Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan • Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan	• Nomor : DL.01.00/1903/SJ-DAG.12/PKS/08/2022 • Nomor : 050/0128 - Tanggal 01 Agustus 2022	Penyelenggaraan Pelatihan Ekspor bagi UKM Kota Pekalongan dengan tema Akses dan Survey Pasar Ekspor Melalui Internet
59	• Rumah Sakit Umum Daerah Kaje Kabupaten Pekalongan • Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan	• Nomor : 445/22/2022 • Nomor : 019.6/81/MoU/2022 - Tanggal 01 Agustus 2022	Pelayanan Rujukan Pasien
60	• Politeknik Negeri Jakarta • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 0133/PL3.D/HK.05.00/2022 • Nomor : 420/4242 - Tanggal 05 Agustus 2022	Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Jakarta (PSDKU PNJ) Kampus Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
61	• Klinik Pratama Kartika 10/ Pekalongan • Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan	• Nomor : PKS/12/VIII/2022 • Nomor : 019.6/79/MoU - Tanggal 15 Agustus 2022	Pelayanan Rujukan Pasien
62	• Pemerintah Kabupaten Pemalang • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 130.13/03/KB/TAPEM/2022 • Nomor : 100/4473 - Tanggal 24 Agustus 2022	Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
63	- PT. Mumpuni Abhinaya Management - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : 57/VIII/MAM/2022 - Nomor : 130/4488 - Tanggal 25 Agustus 2022	Penyelenggaraan Pekan Batik Nusantara Tahun 2022
64	- PT. Mumpuni Abhinaya Management - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan	- Nomor : 58/VIII/MAM/2022 - Nomor : 050/0851 - Tanggal 25 Agustus 2022	Pelaksanaan Pekan Batik Nusantara Tahun 2022 di Kota Pekalongan
65	- Universitas Diponegoro - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : 165/UN7.A/KS/2022 - Nomor : 420/4706.1 - Tanggal 15 September 2022	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Pembangunan Kota Pekalongan
66	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pekalongan	- Nomor : 074/1096 - Nomor : 362/C.06.01/LPPM/IX/2022 - Tanggal 26 September 2022	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan
67	- Pengadilan Agama Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : W11-A9/1913/HM.01.1/X/2022 - Nomor : 180/4945 - Tanggal 03 Oktober 2022	Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan
68	- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan - Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang	- Nomor : 523.2/2077/2022 - Nomor : 08/UN7.F10/KS/X/2022 - Tanggal 10 Oktober 2022	Upaya Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (<i>Ecosystem Approach To Fisheries Management</i> , EAFM) di Perairan Kota Pekalongan
69	- Pemerintah Kota Pekalongan - Pemerintah Kota Surakarta	- Nomor : 130/5095 - Nomor : TM.00.07/4168.1/2022 - Tanggal 13 Oktober 2022	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
70	- Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan - PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan	- Nomor : 900/3481/X/2022 - Nomor : 069/HT.01.04/04/007/2022 - Tanggal 26 Oktober 2022	Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Uang Dalam Bentuk Deposito
71	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan	- Nomor : 530/2884/XI/2022 - Nomor : 515/C.06.01/FEB/XI/2022 - Tanggal 10 November 2022	Penguatan dan Pengembangan Program Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
72	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pekalongan - Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah	- Nomor : 800/2778.1/2022 - Nomor : 522.312/11852 - Tanggal 25 November 2022	Fasilitasi Quasi Assessment Program (QAP) Bagi Pejabat Pengawas/Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
73	• Pemerintah Kabupaten Pemalang • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 130.13/07/PKS/TAPEM/2022 • Nomor : 470/1567 Tanggal 13 Desember 2022	Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
74	• Pemerintah Kabupaten Pemalang • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 130.13/08/PKS/TAPEM/2022 • Nomor : 130.13/552 Tanggal 13 Desember 2022	Penanganan Kebakaran dan Darurat Kebakaran
75	• Pemerintah Kabupaten Pemalang • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 130.13/09/PKS/TAPEM/2022 • Nomor : 462/2561 Tanggal 13 Desember 2022	Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar
76	• PT. Global Usadha Arana • Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	• Nomor : 001/GUA-Legal/IV/2023 • Nomor : 980/0312 • Tanggal 10 April 2023	Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
77	• PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pekalongan • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : W05/1/004 • Nomor : 500.12.6/1491 • Tanggal 18 April 2023	Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan Dalam Pengembangan <i>Smart City</i> dan <i>Ecosystem</i> di Kota Pekalongan
78	• PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pekalongan • Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	• Nomor : 001/pkl/pks/2023 • Nomor : 900.1.4.3/1143 Tanggal 18 April 2023	Pengelolaan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Kota Pekalongan
79	• PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pekalongan • Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan	• Nomor : 002/pkl/pks/2023 • Nomor : 000.4.7.2/0198 Tanggal 18 April 2023	Penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Layanan Jasa Perbankan
80	• Universitas Indraprasta PGRI • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 173/R/PKS/UNINDRA/VI/2023 • Nomor : 400.14.5.4/2199 Tanggal 18 Juni 2023	Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan
81	• Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Universitas Indraprasta PGRI • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	• Nomor : 174/R/PKS/UNINDRA/VI/2022 • Nomor : 800.2/1308.2 Tanggal 18 Juni 2023	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan
82	• Pemerintah Kota Pekalongan • PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta UP3 Pekalongan	• Nomor : 10.2.2.3/2593 • Nomor : 0001.MoU/HKM.02.01/F03050000/2023 Tanggal 17 Juli 2023	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pajak Penerangan Jalan/Pajak Barang Jasa Tertentu dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Pekalongan
83	• Universitas Muhammadiyah Yogyakarta • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 1262/C.4-VIII/VIII/2023 • Nomor : 100.2.2.3/2775 Tanggal 01 Agustus 2023	Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kota Pekalongan Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
84	• Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta • Bappeda Kota Pekalongan	• Nomor : 390/C.6-III/PKS-LPM/VIII/2023 • Nomor : 000.9/2406 Tanggal 02 Agustus 2023	Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Mahasiswa dan Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
85	• Direktorat Jenderal Pajak • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : KEP-130/PJ.08/2023 • Nomor : KEP-97/PK.5/2023 • Nomor : 100.3.7.1/3015 Tanggal 22 Agustus 2023	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Pekalongan
86	• Universitas Pancasakti Tegal • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 092/KS/C-3/UPS/XI/2023 • Nomor : 100.2.2.3/4407 Tanggal 07 November 2023	Tri Dharma Perguruan Tinggi
87	• Universitas Al-Irsyad Cilacap • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 3447/386/03.13 • Nomor : 100.2.2.3/4421 Tanggal 08 November 2023	Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi
88	• Fakultas Farmasi, Sains, dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap • Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	• Nomor : 3448/386.1/03.13 • Nomor : 400.7.21.1/3942 Tanggal 08 November 2023	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
89	• Pemerintah Kota Pekalongan • Pemerintah Kabupaten Pekalongan • Pemerintah Kabupaten Batang	• Nomor : 300.3/529.1 • Nomor : 364.1/PKS.08/XI/2023 • Nomor : 019.6/03/PKS/2023 Tanggal 29 November 2023	Penanganan Kebakaran
90	• Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan • Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	• Nomor : 1066/C.06.01/XII/2023 • Nomor : 900.1.4.3/4337.1 Tanggal 12 Desember 2023	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
91	• Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan • Bappeda Kota Pekalongan	• Nomor : 1067/C.06.01/FIK/XII/2023 • Nomor : 000.9/5064 Tanggal 18 Desember 2023	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
92	• Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan • Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	• Nomor : 1068/C.06.01/FIK/XII/2023 • Nomor : 460.3/2383 Tanggal 12 Desember 2023	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
93	• Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan	• Nomor : 1069/C.06.01/FIK/XII/2023 • Nomor : 400.1.4.5.4/3169 Tanggal 12 Desember 2023	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
94	• Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan • Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	• Nomor : 1070/C.06.01/FIK/XII/2023 • Nomor : 800/0215 Tanggal 12 Desember 2023	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
95	- Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan - BPBD Kota Pekalongan	- Nomor : 1071/C.06.01/FIK/XII/2023 - Nomor : 300.2/003/MoU/XII/2023 - Tanggal 12 Desember 2023	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
96	- Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan - DPMPPA Kota Pekalongan	- Nomor : 1072/C.06.01/FIK/XII/2023 - Nomor : 000.4.7.2/1256 Tahun 2023 - Tanggal 12 Desember 2023	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
97	- Universitas Negeri Semarang - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : T/11674/UN37/HK.07.00/2024 - Nomor : 100.2.2.3/2482 - Tanggal 14 Juni 2024	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pembangunan Kota Pekalongan
98	- Pemerintah Kota Surakarta - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : PE.02/01941/VI/2024 - Nomor : 500.13/1455/2024 - Tanggal 20 Juni 2024	Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
99	- Pemerintah Kota Pekalongan - Pemerintah Provinsi Jawa Barat	- Nomor : 100.2.2.3/3900 - Nomor : 42/DG.02.02.01/PEMOTDA - Tanggal 09 Juli 2024	Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik
100	- Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : 199/STMIK.WP/KL/2024 - Nomor : 100.2.2.3/3906 - Tanggal 09 Juli 2024	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pembangunan Kota Pekalongan
101	- Universitas Alma Ata - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : 010/B/MoU/UAA/VII/2024 - Nomor : 100.2.2.3/4128 - Tanggal 22 Juli 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi
102	- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : 1040/PM.04/K.JT-31/08/2024 - Nomor : 100.2.2.3/4782 - Tanggal 27 Agustus 2024	Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pekalongan
103	- Pemerintah Kota Pekalongan - Kepolisian Resor Pekalongan Kota	- Nomor : 100.2.2.3/4879 - Nomor : NK/19/IX/2024 - Tanggal 02 September 2024	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Pekalongan
104	- Pemerintah Kota Pekalongan - Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan	- Nomor : 100.2.2.3/4880 - Nomor : - Tanggal 02 September 2024	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Pekalongan
105	- Pemerintah Kota Pekalongan - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I	- Nomor : 100.2.2.3/4881 - Nomor : NK-2/WPJ.10/2024 - Tanggal 02 September 2024	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Pekalongan
106	- Pemerintah Kota Pekalongan - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pekalongan	- Nomor : 100.2.2.3/4882 - Nomor : 192/KTR/VI-02/0924 - Tanggal 02 September 2024	Penyelenggaraan Layanan BPJS Kesehatan di Mal Pelayanan Publik Kota Pekalongan

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
107	- Pemerintah Kota Pekalongan - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan	- Nomor : 100.2.2.3/4883 - Nomor : PER/32/092024 - Tanggal 02 September 2024	Penyelenggaraan Layanan BPJS Ketenagakerjaan Pada Mal Pelayanan Publik di Kota Pekalongan
108	- Pemerintah Kota Pekalongan - Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	- Nomor : 100.2.2.3/4884 - Nomor : 7/PKS-33.75.UP.04.07/IX/2024 - Tanggal 02 September 2024	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Pekalongan
109	- Pemerintah Kota Pekalongan - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Koordinator Pekalongan	- Nomor : 100.2.2.3/4885 - Nomor : B.3446-KC-RO-SMG-LOG/10/2024 - Tanggal 02 September 2024	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Pekalongan
110	- Pemerintah Kota Pekalongan - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Koordinator Pekalongan	- Nomor : 100.2.2.3/0126/2024 - Nomor : B.3443-KC-RO-SMG-COG/10/2024 - Tanggal 02 September 2024	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Pekalongan
111	- Pemerintah Kota Pekalongan - PT. Pos Indonesia (Persero)	- Nomor : 100.2.2.3/4886 - Nomor : 0551/Penjualan/PK/0924 - Tanggal 02 September 2024	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Pekalongan
112	- Pemerintah Kota Pekalongan - PT. Pos Indonesia (Persero)	- Nomor : 100.2.2.3/0127/2024 - Nomor : 0552/Penjualan/PK/0924 - Tanggal 02 September 2024	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Pekalongan
113	- Pemerintah Kota Pekalongan - PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan	- Nomor : 100.2.2.3/0125/2024 - Nomor : 015/HT.01.04/007/2024 - Tanggal 02 September 2024	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Pekalongan
114	- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan	- Nomor : 1057/PM.04/K.JT-31/09/2024 - Nomor : 800/1156/2024 - Tanggal 02 September 2024	Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN dan Non ASN Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
115	- Ombudsman Republik Indonesia - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : 68/ORI-MOU/IX/2024 - Nomor : 100.2.2.3/4907 - Tanggal 03 September 2024	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
116	- Universitas Bhamada Slawi - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : 028/Univ.BHAMADA/KL/IX/2024 - Nomor : 100.2.2.3/5026 - Tanggal 09 September 2024	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pembangunan Kota Pekalongan

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
117	- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan - Universitas Indraprasta PGRI	- Nomor : 100.3.7/2425/2024 - Nomor : 163/WR/MOA/UNINDRA/X/2024 Tanggal 05 Oktober 2024	Pengembangan dan Pelestarian Budaya
118	- Pemerintah Kota Pekalongan - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	- Nomor : 100.2.2.3/5685 - Nomor : 100.3.7.1/101/2024 Tanggal 14 Oktober 2024	Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik
119	- Universitas Muhammadiyah Gombong - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : 040.1/PKS/II.3.AU/XII/2024 - Nomor : 100.2.2.3/6654 Tanggal 09 Desember 2024	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan
120	- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : 100.3.7.1/126/2024 - Nomor : 100.2.2.3/6704/2024 Tanggal 12 Desember 2024	Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak
121	- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : 529/KTR/VI-02/1224 - Nomor : 100.2.2.3/6888/2024 Tanggal 24 Desember 2024	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
122	- PT. Taspen (Persero) - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : Mou-1/DIR/2025 - Nomor : 100.2.2.3/274/2025 Tanggal 20 Januari 2025	Peningkatan Layanan Taspen dan Kepersetaan Program Anak Usaha Taspen Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
123	- Universitas 17 Agustus 1945 Semarang - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : 2.040/C.06.04/I/2025 - Nomor : 100.2.2.3/273/2025 Tanggal 20 Januari 2025	Pelaksanaan TRIDARMA Perguruan Tinggi Di Pekalongan
124	- Kepolisian Resor Pekalongan Kota - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : NK/3/III/2025 - Nomor : 100.2.2.3/953/2025 Tanggal 03 Maret 2025	Pemeriksaan Administrasi Seleksi Penerimaan Calon Anggota POLRI Pada Tingkat POLRES Pekalongan Kota
125	- Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>) - Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	- Nomor : K0016/PKS/ESG/Jan/2025 - Nomor : 400.10.2/01/2025 Tanggal 10 Januari 2025	Pelaksanaan Proyek <i>Adaption Fund(AF)</i> Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pembangunan <i>Urban Farming</i> Di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan
126	- Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>) - Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	- Nomor : K0017/PKS/ESG/Jan/2025 - Nomor : 400.10.2/02/2025 Tanggal 10 Januari 2025	Pelaksanaan Proyek <i>Adaption Fund(AF)</i> Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pembangunan <i>Urban Farming</i> Di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
127	• Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>) • Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	• Nomor : K0018/PKS/ESG/Jan/2025 • Nomor : 400.10.2/02/2025 - Tanggal 10 Januari 2025	Pelaksanaan Proyek <i>Adaption Fund(AF)</i> Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pembangunan <i>Urban Farming , Budidaya Perikanan,Ekowisata dan Penanaman Mangrove</i> Di Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
128	• Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>) • Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	• Nomor : K0019/PKS/ESG/Jan/2025 • Nomor : 400.10.2/02/2025 - Tanggal 10 Januari 2025	Pelaksanaan Proyek <i>Adaption Fund(AF)</i> Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pembangunan <i>Urban Farming</i> Di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
129	• Kemitraan (<i>The Partnership For Governance Reform</i>) • Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan	• Nomor : K0020/PKS/ESG/Jan/2025 • Nomor : 400.10.2/02/2025 - Tanggal 10 Januari 2025	Pelaksanaan Proyek <i>Adaption Fund(AF)</i> Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pembangunan <i>Urban Farming</i> Di Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
130	• PT . Taspen (Persero) • Kota Pekalongan	• Nomor : Jan-12/C.4.4.5/012025 • Nomor : 900.1/271/2025 - Tanggal : 20 Januari 2025	Implementasi Sistem Informasi Manajemen gaji (SIM GAJI).
131	• Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan • PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan	• Nomor : 900.1.3/461/2025 • Nomor : 022/HT.01.04/007/2025 - Tanggal : 06 Februari 2025	Pengelolaan Uang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2029 Dalam Bentuk Deposito.
132	• Mercy Corps Indonesia • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 135/GOI/MCI/IV/2025 • Nomor : 100.2.2.3/1755/2025 - Tanggal : 05 Mei 2025	Implementasi Program Mercy Corps Indonesia.
133	• Universitas Muhammadiyah Purwokerto • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : C7.III/17-S.Pj/UMP/V/2025 • Nomor : 100.2.2.3/1899/2025 - Tanggal : 14 Mei 2025	Pelaksanaan TRIDARMA Perguruan Tinggi.
134	• PT. Hade Dinamis Sejahtera • Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan	• Nomor : 015/HOS-CKR/V/2025 • Nomor : 499/500.7.2/2025 - Tanggal : 16 Mei 2025	Penggunaan Sarana dan Prasarana Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kertoharjo Kota Pekalongan.
135	• PT. Indo Prima Beef • Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan	• Nomor : 0001/MKT-IPB/V/2025 • Nomor : 498/500.7.2/2025 - Tanggal : 16 Mei 2025	Penggunaan Sarana dan Prasarana Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kertoharjo Kota Pekalongan.

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
136	• Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 011-a/ITSNU.PKL/MoU/V/2025 • Nomor : 100.2.2.3/2038/2025 - Tanggal : 22 Mei 2025	Tridarma Perguruan Tinggi.
137	• Institut Widya Pratama Pekalongan • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 194.1/IWIMA/KL/2025 • Nomor : 100.2.2.3/2039/2025 - Tanggal : 22 Mei 2025	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pembangunan Kota Pekalongan.
138	• Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pekalongan Kota • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : MoU/1/VI/2025/PYKB CAB.PKL KOTA • Nomor : 400.3.2/2223 - Tanggal : 05 Juni 2025	Peningkatan Mutu Pendidikan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pekalongan Kota.
139	• Universitas Teknologi Digital Indonesia • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : L.05.1/091/UTDI/MOU/VI/2025 • Nomor : 100.2.2.3/2312/2025 - Tanggal : 10 Juni 2025	Tridarma Perguruan Tinggi.
140	• Pemerintah Kota Pekalongan • PT. Woolu Aksara Maya	• Nomor : 0004.7.3/107/2025 • Nomor : 021/MOU-IPEKALONGANKOTA/AM/V/2025 - Tanggal : 16 Juni 2025	Pemanfaatan Aplikasi <i>iLibrary</i> Untuk Menunjang <i>Smartcity</i> Di Kota Pekalongan.
141	• Pemerintah Kota Pekalongan • Pemerintah Kabupaten Brebes	• Nomor : 100.2.2.3/2556/2025 • Nomor : 28/TAPEM-130.13.1/VI/2025 - Tanggal : 27 Juni 2025	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
142	• Pemerintah Kota Pekalongan • Pemerintah Kabupaten Brebes	• Nomor : 1350/500.1.4/2025 • Nomor : 29/TAPEM-130.13.2/VI/2025 - Tanggal : 27 Juni 2025	Pemanfaatan Data, Penguatan Ketersediaan Dan Distribusi Komoditas Bawang Merah Dalam Upaya Pengendalian Inflasi.
143	• Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah • PT. Bank BPD Jateng Cabang Pekalongan	• Nomor : 900.1.13.1/2221/2025 • Nomor : 012/HT.01.04/007/2025 - Tanggal : 01 Juli 2025	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
144	• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kota Pekalongan • PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	• Nomor : 900.1.3.5/2228/2025 • Nomor : 019/HT.01.04/007/2025 - Tanggal : 01 Juli 2025	Layanan Kasda <i>Online</i> .
145	• Pemerintah Kota Pekalongan • PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan	• Nomor : 900.1.3.5/2227/2025 • Nomor : 017/HT.01.04/007/2025 - Tanggal : 01 Juli 2025	Pengelolaan Kas Daerah
146	• Pemerintah Kota Pekalongan • PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan	• Nomor : 100.2.2.3/2655/2025 • Nomor : 7835/HT.01.04/BKK/2025 - Tanggal : 01 Juli 2025	Fasilitas Perbankan.

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAKATAN	TENTANG
147	• Kepolisian Resor Pekalongan Kota • Pemerintah Kota Pekalongan • Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan • Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan	• Nomor : NK/6/VII/2025 • Nomor : 100.2.2.3/2661/2025 • Nomor : WP.13.PAS.PAS.10.PK.05.08-541 • Nomor : WP.13.PAS.31-TI.04.02-884 Tanggal : 16 Juli 2025	Pelatihan Kepada Eks-Pelaku Kejahatan dan atau Remaja Yang Berpotensi Melakukan Gangguan KAMTIBMAS Di Kota Pekalongan.
148	• Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan • Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : WP.13.PAS.PAS.10.PK.05.02-712 • Nomor : WP.13.PAS.31.TI.04.02-989TH.2025 • Nomor : 100.2.2.3/3024/2025 Tanggal : 23 Juli 2025	Pendampingan Dan Dukungan Sarana Dan Prasarana Pertanian Dan Atau Perikanan Dalam Rangka Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Pekalongan Dan Rutan Kelas IIA Pekalongan.
149	• Universitas Muhammadiyah Semarang • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 0213/UNIMUS.S/SK.DN/2025 • Nomor : 100.2.2.3/31632/2025 Tanggal : 01 Agustus 2025	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
150	• Pemerintah Kota Pekalongan • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan	• Nomor : 100.2.2.3/3419/2025 • Nomor : PER/57/A/08/2025 Tanggal : 13 Agustus 2025	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
151	• Pusat Investasi Pemerintah • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : PRJ-15/IP/2025 • Nomor : 100.2.2.3/3413/2025 Tanggal : 14 Agustus 2025	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Pembiayaan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
152	• Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 981/HK.07.00/RK/IX/2025 • Nomor : 100.2.2.3/3701/2025 Tanggal : 01 September 2025	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
153	• Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan • Pemerintah Kota Pekalongan	• Nomor : 954/HK.07.00/FIKES/IX/2025 • Nomor : B/2448.1/400.14.5.4/2025 Tanggal : 02 September 2025	Program Peningkatan Aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kesehatan.
154	• Fakultas Teknuik Dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan	• Nomor : 0233/HK.07.00/Dek.FT/UMPP/IX/2025 • Nomor : 000.9/3043/2025 Tanggal : 17 September 2025	Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah.
155	• Pemerintah Kota Pekalongan • Direktorat Jenderal Imigrasi Kemeterian Imigrasi Dan Pemasyarakatan	• Nomor : 100.2.2.3/2938/2025 • Nomor : IMI-GR.0501-367 Tanggal : 13 Agustus 2025	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pemalang Di Kota Pekalongan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan strategis. Permasalahan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kondisi eksisting saat ini dengan kondisi yang diharapkan (target), baik dari sisi kinerja kelembagaan, sumber daya, maupun capaian pelayanan. Sementara itu, isu strategis adalah hal-hal pokok, mendesak, berdampak besar, dan perlu segera ditangani atau ditindaklanjuti, yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan profesional. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam hal kompetensi, kedisiplinan, serta pelayanan administrasi dan kepegawaian;
2. Belum optimalnya fasilitasi sarana prasarana aparatur, pengelolaan arsip dinamis dan statis serta pemeliharaan kantor, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan administrasi dan masih digunakannya metode manual yang tidak efisien;
3. Belum terintegrasinya data kepegawaian secara digital, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas SDM dalam mengelola administrasi berbasis teknologi informasi;

4. Belum optimalnya pengelolaan penyusunan administrasi keuangan, serta masih lemahnya inventarisasi aset yang disebabkan oleh keterbatasan dokumen dan informasi aset.
5. Belum optimalnya pengelolaan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah, serta kurangnya efektivitas penyampaian informasi dan pengaturan jadwal kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah, yang menghambat fungsi keprotokolan dan komunikasi pimpinan;
6. Belum terinventarisir secara optimal potensi risiko sosial dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan, sehingga belum terdapat sistem mitigasi risiko yang efektif untuk mencegah konflik horizontal dan isu-isu intoleransi;
7. Belum optimalnya ketersediaan data terkait rumah ibadah, organisasi keagamaan, dan ormas, yang menyebabkan keterbatasan dalam pengambilan kebijakan dan pemberian bantuan sosial keagamaan;
8. Belum optimalnya proses inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, yang masih terkendala oleh ketidakterpaduan data dan minimnya koordinasi antar pihak terkait;
9. Belum optimalnya kerjasama daerah, baik dalam bentuk kemitraan antar pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
10. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, yang ditandai dengan belum terpadu dan efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi lintas sektor serta kurangnya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang menjadi kewenangan daerah;
11. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah, yang menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan hukum pemerintah;

12. Kurangnya tenaga penyusun produk hukum dan tenaga teknis publikasi hukum, serta belum optimalnya kebijakan bantuan hukum dan perlindungan HAM;
13. Belum optimalnya kebijakan teknis dan tenaga teknis penyusun analisis jabatan, penataan kelembagaan, dan reformasi birokrasi, termasuk penilaian zona integritas, AKIP, dan SAKIP;
14. Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal sistem pelaporan, pengukuran, dan evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya berbasis hasil dan akuntabilitas publik;
15. Belum optimalnya penataan perekonomian daerah, yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia (SDM) analisis ekonomi dan lemahnya koordinasi serta pelaporan kegiatan ekonomi lintas Perangkat Daerah;
16. Belum optimalnya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku pengadaan, dinamika regulasi, serta minimnya sarana, prasarana, dan personil UKPBJ yang professional;
17. Kurangnya minat ASN untuk menjadi JF PPBJ akibat beban kerja yang berat dan risiko hukum yang tinggi, serta sulitnya memenuhi persyaratan kompetensi untuk jabatan tersebut.

Masalah pokok ini kemudian dihubungkan kesesuaiannya dengan ruang lingkup tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, sehingga ditemukan masalah yang dijabarkan lagi ke dalam akar masalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel II.7 berikut

TABEL II-7
Kesesuaian Masalah Pokok dengan Ruang Lingkup Tugas Pokok
Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya capaian pelayanan dasar tingkat kota dalam mendukung kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Belum optimalnya ketepatan waktu penyusunan laporan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam pembangunan	Belum optimalnya Administrasi Tata Pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan
		Belum optimalnya Fasilitasi Kerja Sama Daerah
	Belum optimalnya kapasitas dan kemandirian lembaga kemasyarakatan melalui fasilitasi pemerintah daerah dalam peran aktif pembangunan dan pelayanan masyarakat	Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah dalam peran aktif pembangunan dan pelayanan masyarakat
	Belum optimalnya kualitas Reformasi Hukum	Belum optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang sesuai dengan Ketentuan
Belum optimalnya kinerja pengelolaan barang/jasa serta kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah dalam mendukung percepatan realisasi APBD	Belum optimalnya kontribusi pengelolaan keuangan dan intermediasi ekonomi dalam mendukung pertumbuhan daerah	Belum optimalnya Kebijakan Perekonomian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
		Belum optimalnya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
	Belum optimalnya akuntabilitas dan profesionalisme pengadaan barang/jasa pemerintah	Belum optimalnya Administrasi Pembangunan yang sesuai dengan ketentuan
		Belum optimalnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas
Belum optimalnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah dalam mendukung kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Belum optimalnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui pelayanan administrasi yang andal, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Belum optimalnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Belum optimalnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan
		Belum optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan
		Belum optimalnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat guna
		Belum optimalnya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat guna
		Belum optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)
	Belum optimalnya kualitas layanan administrasi keuangan, operasional, dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah
		Belum optimalnya fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
	Belum optimalnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel	Belum optimalnya kapasitas dan kinerja organisasi perangkat daerah melalui pencapaian tingkat kematangan organisasi yang lebih tinggi secara berkelanjutan
	Belum optimalnya kualitas pelayanan keprotokoleran	Belum optimalnya Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang sesuai dengan ketentuan

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah permasalahan atau tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menuntut perhatian, kebijakan, dan tindakan strategis dalam jangka menengah hingga panjang. Isu strategis muncul sebagai hasil dari identifikasi faktor internal dan eksternal, termasuk dinamika lingkungan, kebijakan nasional, aspirasi masyarakat, serta kemampuan dan sumber daya organisasi.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks dan tuntutan perubahan yang cepat, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan harus menyikapi berbagai isu strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sekretariat Daerah Kota Pekalongan menghadapi sejumlah isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Kualitas pelayanan publik yang belum merata dan belum sepenuhnya mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga perlu peningkatan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, taat asas, kolaboratif, dan berintegritas, serta masih terbatasnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance;
3. Belum optimalnya peran keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang strategis.
4. Belum optimalnya penataan perekonomian daerah, yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia (SDM) analisis ekonomi dan lemahnya koordinasi serta pelaporan kegiatan ekonomi lintas Perangkat Daerah sehingga perlu peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian.
5. Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal sistem pelaporan realisasi belanja daerah, pengukuran, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum sepenuhnya berkualitas sangat baik;
6. Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan daerah, kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku pengadaan, dinamika regulasi, serta minimnya sarana, prasarana, dan personil UKPBJ yang profesional;
7. Belum optimalnya fasilitasi sarana prasarana aparatur, pengelolaan arsip dinamis dan statis serta pemeliharaan kantor, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan, aset daerah (BMD), dan digitalisasi arsip serta perencanaan program berbasis elektronik, yang harus diperkuat untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

8. Pengelolaan bantuan hibah di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang masih memerlukan optimalisasi agar tepat sasaran dan akuntabel.
9. Keterbatasan dalam menghasilkan produk hukum daerah yang adaptif dan harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi, serta kebijakan bantuan hukum dan perlindungan HAM yang belum optimal.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan potensi untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, secara potensi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yang dapat dikembangkan antara lain :

1. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi
2. Penerapan kemajuan teknologi informasi pada tatanan manajemen dan dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat Daerah
3. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem pengadaan barang/jasa, sistem pelaporan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Pekalongan yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan sehingga memudahkan Sekretariat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian.
5. Kota Pekalongan dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religious dengan penduduk yang ramah tamah memudahkan Sekretariat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi menyusun

rancangan, mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan daerah yang meliputi urusan keagamaan, sosial, kemasyarakatan.

6. Hubungan kerjasama antara Kota Pekalongan dengan Kabupaten/Kota lain menjadi pendorong bagi Kota Pekalongan dan aparaturnya untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan potensi yang ada.
7. Adanya pertumbuhan pada sektor perbankan yang dapat meningkatkan pendanaan pada investasi UMKM dan ekonomi kerakyatan sehingga memudahkan Sekretariat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi perumusan kebijakan daerah pada sektor pembinaan dan pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan di Kota Pekalongan.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks dan tuntutan perubahan yang cepat, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan harus menyikapi berbagai isu strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal (Nasional dan Regional) yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Secara nasional, terdapat berbagai isu strategis yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi pembangunan daerah agar selaras dan mendukung pencapaian tujuan nasional, di antaranya:

1. Belum optimalnya kemampuan aparaturnya dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi tantangan dalam reformasi birokrasi.
2. Belum optimalnya kemampuan aparaturnya dalam mengimplementasikan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.
3. Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan publik.

4. Rendahnya efektivitas pembinaan, inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan di bidang keagamaan yang menjadi bagian penting dalam harmonisasi sosial dan keberagaman masyarakat.
5. Investasi yang belum dikelola secara terpadu serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah (BMD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
6. Kebutuhan digitalisasi dan penyusunan program kerja yang berbasis kewenangan dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan.
7. Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam pengadaan berkelanjutan dan kurangnya integrasi regulasi lingkungan dalam proses pengadaan daerah.
8. Peningkatan tuntutan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang harus mengikuti dinamika nasional agar mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang kuat.
9. Belum optimalnya pemanfaatan produk lokal dalam sistem pengadaan daerah sebagai upaya mendorong ekonomi lokal dan kemandirian.

Dalam lingkungan regional menghadirkan tantangan tersendiri yang memerlukan kolaborasi antar daerah dan penyesuaian kebijakan yang sinergis, yaitu:

1. Rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur di tingkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pelayanan publik yang responsif.
2. Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengimplementasikan prinsip dan efektifitas tata kelola pemerintahan.
3. Belum efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan daerah dan belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat regional.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan

5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah serta lemahnya penyelesaian perkara hukum non-litigasi yang berdampak pada kepastian hukum dan iklim investasi daerah.
6. Terbatasnya basis ekonomi daerah yang dapat berperan sebagai penggerak utama dinamika perekonomian regional.
7. Minimnya infrastruktur pendukung pengadaan berkelanjutan dan tingginya ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap tekanan lingkungan dan ekonomi.
8. Belum optimalnya penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan.

Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah adalah pernyataan yang menggambarkan permasalahan utama, tantangan, atau hal-hal penting yang harus segera diatasi atau dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Isu strategis disusun berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi aktual yang mencakup aspek internal dan eksternal, serta mempertimbangkan arah kebijakan nasional, rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Isu strategis berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang bersifat prioritas, dan menjadi pijakan dalam menentukan arah pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Data Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan secara rinci dapat dilihat pada tabel II.8

TABEL II.8
TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH			ISU STRATEGIS DAERAH PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Hubungan kerjasama antara Kota Pekalongan dengan Kabupaten/Kota lain menjadi pendorong bagi Kota Pekalongan dan aparatur untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan potensi yang ada	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, yang ditandai dengan belum terpadu dan efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi lintas sektor serta kurangnya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang menjadi kewenangan daerah;		Belum optimalnya kualitas layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengimplementasikan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.	Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengimplementasikan prinsip dan efektifitas tata kelola pemerintahan	Kualitas pelayanan publik yang belum merata dan belum sepenuhnya mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga perlu peningkatan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan.
Adanya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi	Kurangnya tenaga penyusun produk hukum dan tenaga teknis publikasi hukum, serta belum optimalnya kebijakan bantuan hukum dan perlindungan HAM, belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah		Rendahnya kepatuhan hukum masyarakat dan penyelenggara negara sehingga harus dilakukan reformasi hukum, rendahnya kebijakan terhadap HAM, rendahnya produk hukum yang menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi	Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah serta lemahnya penyelesaian perkara hukum non-litigasi	Keterbatasan dalam menghasilkan produk hukum daerah yang adaptif dan harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi, serta kebijakan bantuan hukum dan perlindungan HAM yang belum optimal.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH			ISU STRATEGIS DAERAH PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kota Pekalongan dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religious dengan penduduk yang ramah tamah memudahkan Sekretariat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi menyusun rancangan, mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan daerah yang meliputi urusan keagamaan, sosial, kemasyarakatan.	Belum terinventarisir secara optimal potensi risiko sosial dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan, belum optimalnya ketersediaan data terkait rumah ibadah, organisasi keagamaan, dan ormas, yang menyebabkan keterbatasan dalam pengambilan kebijakan dan pemberian bantuan sosial keagamaan, belum optimalnya proses inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan		Tuntutan peningkatan kualitas Pembinaan dan pelayanan Bidang Keagamaan, kesejahteraan masyarakat	Rendahnya efektivitas pembinaan, inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan di bidang keagamaan yang menjadi bagian penting dalam harmonisasi sosial dan keberagaman masyarakat.	Adanya Pembinaan, inventarisasi, verifikasi dan pemberian bantuan bidang keagamaan	Pengelolaan bantuan hibah di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang masih memerlukan optimalisasi agar tepat sasaran dan akuntabel
Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Pekalongan yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan dan adanya pertumbuhan pada sektor perbankan yang dapat meningkatkan pendanaan pada investasi UMKM dan ekonomi kerakyatan sehingga memudahkan Sekretariat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi perumusan kebijakan daerah pada sektor pembinaan dan pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan di Kota Pekalongan.	Belum optimalnya penataan perekonomian daerah, yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia (SDM) analis ekonomi dan lemahnya koordinasi serta pelaporan kegiatan ekonomi lintas Perangkat Daerah;		Belum terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, berkelanjutan dan belum tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Investasi yang belum dikelola secara terpadu serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.	Terbatasnya basis ekonomi daerah yang dapat berperan sebagai penggerak utama dinamika perekonomian regional, minimnya infrastruktur pendukung pengadaan berkelanjutan dan tingginya ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap tekanan lingkungan dan ekonomi.	Belum optimalnya penataan perekonomian daerah, yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia (SDM) analis ekonomi dan lemahnya koordinasi serta pelaporan kegiatan ekonomi lintas Perangkat Daerah sehingga perlu peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH			ISU STRATEGIS DAERAH PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem pengadaan barang/jasa dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku pengadaan, dinamika regulasi, serta minimnya sarana, prasarana, dan personil UKPBJ yang professional; Kurangnya minat ASN untuk menjadi JF PPBJ akibat beban kerja yang berat dan risiko hukum yang tinggi, serta sulitnya memenuhi persyaratan kompetensi untuk jabatan tersebut.		Tuntutan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik, dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan	Belum optimalnya pemanfaatan produk lokal dalam sistem pengadaan daerah sebagai upaya mendorong ekonomi lokal dan kemandirian.	Belum optimalnya penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan.	Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan daerah, kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku pengadaan, dinamika regulasi, serta minimnya sarana, prasarana, dan personil UKPBJ yang professional

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH			ISU STRATEGIS DAERAH PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Penerapan kemajuan teknologi informasi pada tatanan manajemen dan dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat Daerah	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, belum optimalnya fasilitasi sarana prasarana aparatur, pengelolaan arsip dinamis dan statis serta pemeliharaan kantor, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan administrasi dan masih digunakannya metode manual yang tidak efisien, Belum terintegrasinya data kepegawaian secara digital, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas SDM dalam mengelola administrasi berbasis teknologi informasi; Belum optimalnya pengelolaan penyusunan administrasi keuangan, serta masih lemahnya inventarisasi aset yang disebabkan oleh keterbatasan dokumen dan informasi aset		Tuntutan pelayanan publik berbasis digital dan efisiensi tata kelola ASN secara nasional, transformasi digital ASN dan sistem pelayanan publik secara nasional, Globalisasi kompetensi ASN dan adaptasi teknologi, Kebutuhan global akan tata kelola administrasi yang informatif, komunikatif dan akuntabel	Kebutuhan digitalisasi dan penyusunan program kerja yang berbasis kewenangan dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan, Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam pengadaan berkelanjutan dan kurangnya integrasi regulasi lingkungan dalam proses pengadaan daerah.	Rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur di tingkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pelayanan publik yang responsif.	Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal sistem pelaporan realisasi belanja daerah, pengukuran, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum sepenuhnya berkualitas sangat baik, Belum optimalnya fasilitasi sarana prasarana aparatur, pengelolaan arsip dinamis dan statis serta pemeliharaan kantor, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan, aset daerah (BMD), dan digitalisasi arsip serta perencanaan program berbasis elektronik, yang harus diperkuat untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH			ISU STRATEGIS DAERAH PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Adanya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi, Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem pelaporan, pengukuran dan evaluasi kinerja	Belum optimalnya kebijakan teknis dan tenaga teknis penyusun analisis jabatan, penataan kelembagaan, dan reformasi birokrasi, termasuk penilaian zona integritas, AKIP, dan SAKIP, Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal sistem pelaporan, pengukuran, dan evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya berbasis hasil dan akuntabilitas publik		Transformasi tata kelola memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi untuk mencegah dan menanggulangi tindakan tindak yang merugikan masyarakat langkah reformasi ini diharapkan dapat menjamin terciptanya situasi yang kondusif bagi jalannya pembangunan dalam berbagai bidang, Kualitas layanan publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang efektif, efisien dan berjangkau	Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi tantangan dalam reformasi birokrasi.	Belum efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan daerah dan belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat regional	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, taat asas, kolaboratif, dan berintegritas, serta masih terbatasnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH			ISU STRATEGIS DAERAH PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Adanya komitmen dalam melaksanakan tuntutan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, pengelolaan peliputan dan dokumentasi kegiatan	Belum optimalnya pengelolaan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah, serta kurangnya efektivitas penyampaian informasi dan pengaturan jadwal kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah, yang menghambat fungsi keprotokolan dan komunikasi pimpinan;		Tuntutan keprotokolan, komunikasi pimpinan	Peningkatan tuntutan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang harus mengikuti dinamika nasional agar mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang kuat.	Belum optimalnya penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Belum optimalnya peran keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang strategis.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran dari misi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan yang ingin dicapai dalam jangka menengah, yakni selama periode lima tahun perencanaan. Tujuan strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam memastikan visi Kota Pekalongan “ Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”.

Adapun tujuan Sekretariat Daerah adalah rumusan umum mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, yang mencerminkan arah strategis dan fokus kinerja Sekretariat Daerah. Tujuan ini berorientasi pada pencapaian hasil yang mendukung visi Kota Pekalongan “ Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata.
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat.
4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal.
8. Meningkatkan Keamanan dan Kondusivitas Wilayah.
9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi organisasi ke dalam rumusan yang lebih operasional dan terukur, sebagai arah pencapaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan disusun berdasarkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi serta memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan menetapkan 2 (dua) tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
2. Mempercepat realisasi APBD.

3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai selama periode lima tahun, yang mengarah pada hasil spesifik dan terukur. Sasaran ini berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan indikator kinerja dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dirumuskan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya capaian pelayanan dasar tingkat kota
2. Meningkatnya kinerja pengelolaan barang/jasa serta kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah
3. Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel III-1 berikut:

Tabel III-1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta mempercepat realisasi APBD	Meningkatnya capaian pelayanan dasar tingkat kota	Rata-rata capaian standar pelayanan	Persen	99,51	100	100	100	100	100	100	
			Persentase capaian fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Persen	99,51	100	100	100	100	100	100	
			Indeks Reformasi Hukum	Persen	96,76	96,77	96,78	96,79	96,80	96,81	96,82	
		Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase OPD dengan pelaporan kinerja sangat baik	Persen	63,33	63,33	63,33	63,33	66,67	66,67	66,67	
			Nilai SAKIP OPD	Nilai	81,50	81,75	82,02	82,04	82,06	82,08	82,10	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan barang/jasa serta kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Persen	0,49	0,34	0,38	0,42	0,49	0,57	0,64	
			Persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa	Persen	77,35	77,85	78,35	78,85	79,35	79,85	80,35	

3.3 Strategi Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan arah kebijakan operasional yang disusun secara sistematis untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Strategi ini menjadi kerangka acuan dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Strategi per kepala bagian di Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Bagian Umum

Strategi :

- a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan mengoptimalkan skala prioritas, urgensi dalam layanan administrasi perkantoran serta dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. Memastikan ketersediaan sarana prasarana kantor yang representatif;
- c. Meningkatkan pengelolaan aset dan pemeliharaan sarana prasarana kantor.
- d. Meningkatkan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- e. Memperkuat sistem pelaporan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel.

2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Strategi :

- a. Meningkatkan profesionalisme layanan keprotokolan;
- b. Meningkatkan kualitas publikasi dan informasi kegiatan kepala daerah;
- c. Mengembangkan akses komunikasi publik yang inklusif dan berbasis digital.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Strategi :

- a. Meningkatkan koordinasi program keagamaan dan sosial kemasyarakatan guna optimalisasi proses inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan
- b. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
- c. Mengembangkan sistem monitoring evaluasi program kesejahteraan secara partisipatif.

4. Bagian Pemerintahan

Strategi :

- a. Meningkatkan koordinasi dan aksesibilitas layanan antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. Menyusun dan memutakhirkan data kewilayahan serta fasilitasi penyelesaian batas wilayah;
- c. Mengoptimalkan fasilitasi kerja sama antar daerah dan luar negeri.

5. Bagian Hukum

Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah;
- b. Mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi hukum berbasis digital;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM hukum melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

6. Bagian Organisasi

Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata laksana kelembagaan;
- b. Mendorong evaluasi kelembagaan berbasis kinerja dan kebutuhan daerah;
- c. Mengembangkan sistem manajemen kinerja dan inovasi birokrasi.

7. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Strategi :

- a. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengelolaan kebijakan perekonomian daerah;
- b. Memfasilitasi pengembangan investasi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
- c. Mengembangkan sistem data informasi dan pelaporan kegiatan perekonomian daerah yang terintegrasi.

8. Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan

Strategi :

- a. Mendorong pelaksanaan pengadaan secara transparan, efisien, dan akuntabel;
- b. Meningkatkan kompetensi SDM pengadaan melalui pelatihan dan sertifikasi;
- c. Mengembangkan sistem informasi pengadaan secara digital dan real-time.
- d. Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi program pembangunan;
- e. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan laporan pembangunan;

Dalam pelaksanaan mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025–2029, ditetapkan tahapan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan selama periode perencanaan. Tahapan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya konsistensi arah pembangunan kelembagaan pengawasan serta keterukuran capaian dari tahun ke tahun.

Tahap I (Tahun 2026) difokuskan pada penyusunan dan perwujudan tata Kelola pemerintahan, manajemen dan perencanaan pembangunan dan peningkatan kapasitas pelayanan dasar tingkat kota untuk mendukung pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Tahap II (Tahun 2027) diarahkan pada peningkatan pelaksanaan tata Kelola pemerintahan, manajemen dan perencanaan pembangunan yang telah dibangun pada tahap sebelumnya.

Tahap III (Tahun 2028) ditandai dengan optimalisasi pelaksanaan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pada tahapan sebelumnya.

Tahap IV (Tahun 2029) berfokus pada penguatan kualitas tata Kelola pemerintahan, manajemen dan perencanaan pembangunan.

Tahap V (Tahun 2030) merupakan tahap pemantapan dan keberlanjutan.

Tahapan impementasi yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana tertuang dalam tabel III-2

Tabel III-2
Strategi Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital	Penguatan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi kinerja, integritas, manajemen talenta, transformasi arsitektur dan kolaborasi digital, BMD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)	Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan pendekatan partisipatif dan transparansi publik, pengelolaan layanan digital, mitigasi risiko korupsi, pemutakhiran data dan optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta penguatan corporate university dalam pengembangan ASN yang mendukung perwujudan ekonomi sirkular dan Pembangunan yang berkelanjutan	Penguatan tata kelola SDM, keuangan daerah, dan optimalisasi pengamanan BMD untuk mendukung Pembangunan infrastruktur daerah	Optimalisasi perwujudan profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta perwujudan single platform digital dalam rangka perwujudan Fondasi Mina Batik

	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Strategi Renstra OPD	Mewujudkan lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas dan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas, kolaboratif serta berkomitmen reformasi birokrasi, sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Peningkatan kualitas pelayanan dasar tingkat kota dalam mendukung kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi, dan sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);	Optimalisasi kualitas, berintegritas dan berkolaborasi dalam pelayanan dasar tingkat kota guna mendukung kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi, dan sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);	Penguatan lingkungan tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar tingkat kota yang berintegritas, tangkas, kolaboratif serta berkomitmen reformasi birokrasi, sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pemantapan lingkungan tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar tingkat kota yang berintegritas, tangkas, kolaboratif serta berkomitmen reformasi birokrasi, sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berkelanjutan dalam mendukung kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
	Menyusun program dan manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi aparatur secara profesional dan berbasis digital melalui penguatan sistem informasi kepegawaian, peningkatan kompetensi ASN, pengelolaan arsip dinamis dan statis secara digitalisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung birokrasi yang efektif, transparan, dan berintegritas;	Meningkatkan tata kelola layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan secara profesional, responsif, dan terintegrasi guna mendukung efektivitas koordinasi pimpinan daerah serta memperkuat informasi kebijakan pemerintah secara tepat dan strategis;	Optimalisasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, mendorong budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik, serta memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan penilaian pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja organisasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat;	Penguatan manajemen, efektivitas pembinaan, inventarisasi data, tugas dan fungsi kelembagaan serta sistem monitoring dan evaluasi melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta berbasis data dan teknologi;	Perwujudan kualitas manajemen administrasi, layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, pemantapan sistem SAKIP, arsip dinamis dan statis secara digitalisasi untuk mewujudkan kinerja organisasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat serta berkelanjutan;

	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menyusun perencanaan pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem informasi dan peningkatan kapasitas SDM.	Percepatan realisasi APBD dengan mengoptimalkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, peningkatan kapasitas SDM pengadaan, serta penguatan pengawasan dan evaluasi proses pengadaan;	Optimalisasi peningkatan kualitas perencanaan, akuntabilitas dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem informasi dan peningkatan kapasitas SDM.	Penguatan manajemen pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian serta penguatan pengawasan dan evaluasi proses pengadaan;	Pemantapan berkelanjutan pelaksanaan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (*Renstra*) Sekretariat Daerah merupakan rumusan umum mengenai pendekatan dan prioritas kebijakan yang akan diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administratif, serta menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Pekalongan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi aparatur secara profesional dan berbasis digital melalui penguatan sistem informasi kepegawaian, peningkatan kompetensi ASN, pengelolaan arsip dinamis dan statis secara digitalisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung birokrasi yang efektif, transparan, dan berintegritas;
2. Menyusun program kerja berbasis elektronik sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memperhatikan dampak lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk transparansi dan efisiensi;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, penataan administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem informasi dan peningkatan kapasitas SDM.
4. Meningkatkan tata kelola layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan secara profesional, responsif, dan terintegrasi guna

mendukung efektivitas koordinasi pimpinan daerah serta memperkuat informasi kebijakan pemerintah secara tepat dan strategis;

5. Meningkatkan efektivitas pembinaan, inventarisasi, dan verifikasi penerima hibah dan bantuan di bidang keagamaan dan sosial masyarakat melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta berbasis data dan teknologi, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bermanfaat;
6. Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif dan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi, penerapan good governance dan sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Meningkatkan kualitas penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, memperkuat penyelesaian permasalahan hukum melalui pendampingan dan bantuan hukum, serta mengoptimalkan analisis dan evaluasi regulasi untuk mendukung kepastian hukum dan efektivitas kebijakan daerah;
8. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, mendorong budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik, serta memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan penilaian pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja organisasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat;
9. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah, sambil menjaga kestabilan inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dan penguatan sektor ekonomi local;
10. Mempercepat realisasi APBD dengan mengoptimalkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, peningkatan kapasitas SDM pengadaan, serta penguatan pengawasan dan evaluasi proses pengadaan;

Tabel III.3
Arah Kebijakan Renstra

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi aparatur secara profesional dan berbasis digital melalui penguatan sistem informasi kepegawaian, peningkatan kompetensi ASN, pengelolaan arsip dinamis dan statis secara digitalisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung birokrasi yang efektif, transparan, dan berintegritas;	
2		Menyusun program kerja berbasis elektronik sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memperhatikan dampak lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk transparansi dan efisiensi;	
3		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, penataan administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem informasi dan peningkatan kapasitas SDM.	
4		Meningkatkan tata kelola layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan secara profesional, responsif, dan terintegrasi guna mendukung efektivitas koordinasi pimpinan daerah serta memperkuat informasi kebijakan pemerintah secara tepat dan strategis;	
5		Meningkatkan efektivitas pembinaan, inventarisasi, dan verifikasi penerima hibah dan bantuan di bidang keagamaan dan sosial masyarakat melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta berbasis data dan teknologi, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bermanfaat;	
6		Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif dan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi, penerapan good governance dan sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);	

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)
7		Meningkatkan kualitas penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, memperkuat penyelesaian permasalahan hukum melalui pendampingan dan bantuan hukum, serta mengoptimalkan analisis dan evaluasi regulasi untuk mendukung kepastian hukum dan efektivitas kebijakan daerah	
8		Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, mendorong budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik, serta memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan penilaian pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja organisasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat;	
9		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah, sambil menjaga kestabilan inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dan penguatan sektor ekonomi local;	
10		Mempercepat realisasi APBD dengan mengoptimalkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, peningkatan kapasitas SDM pengadaan, serta penguatan pengawasan dan evaluasi proses pengadaan;	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif, mengelola program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan secara umum.

Adapun tujuan Sekretariat Daerah adalah rumusan umum mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, yang mencerminkan arah strategis dan fokus kinerja Sekretariat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi organisasi ke dalam rumusan yang lebih operasional dan terukur, sebagai arah pencapaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan disusun berdasarkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi serta memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan menetapkan 2 (dua) tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
2. Mempercepat realisasi APBD.

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai selama periode lima tahun, yang mengarah pada hasil spesifik dan terukur. Sasaran ini berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan indikator kinerja dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dirumuskan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya capaian pelayanan dasar tingkat kota
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan barang / jasa serta kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah.

Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian visi misi pemerintah daerah dan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

4.1.1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini berfokus pada penataan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan administrasi pemerintahan, fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dan penguatan sistem hukum daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan:

- 1) Administrasi Tata Pemerintahan: meliputi penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Fasilitasi Kerja Sama Daerah; meliputi Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; meliputi Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.

- 4) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; meliputi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

4.1.2 Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini bertujuan mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan kebijakan perekonomian, pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian ekonomi mikro kecil, fasilitasi dan pengawasan program pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, energi, dan lingkungan hidup. Program ini fokus pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; meliputi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
- 2) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; meliputi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.
- 3) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; meliputi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- 4) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; meliputi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

4.1.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini meliputi kegiatan administratif dan teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan. Program ini mencakup berbagai kegiatan administratif dan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; meliputi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; meliputi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah; meliputi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; meliputi Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; meliputi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 8) Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; meliputi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
- 9) Penataan Organisasi; meliputi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- 10) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan; meliputi Fasilitas Keprotokolan, Fasilitas Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka Pencapaian visi misi pemerintah daerah dan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan telah dirancang kegiatan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, kegiatan pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah serta kegiatan administratif dan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah yang tercakup dalam 3 Program Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026. Adapun rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan tersaji dalam tabel IV.1

Tabel IV-1
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH							54.507.743.000		54.399.409.000		55.057.210.000		60.045.523.000		61.334.227.000	Urusan
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							35.483.683.000		37.426.904.000		37.257.879.000		39.442.705.000		41.760.537.000	Program
	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui pelayanan administrasi yang andal, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	16.246.931.000	100	17.032.508.000	100	17.871.305.000	100	18.761.934.000	100	19.691.708.000	Outcome Program
4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							56.851.000		56.851.000		56.851.000		56.851.000		61.851.000	Kegiatan
	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	56.851.000	100	56.851.000	100	56.851.000	100	56.851.000	100	61.851.000	Output Kegiatan
4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																Sub Kegiatan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	2	2.842.000	2	2.842.000	2	2.842.000	2	2.842.000	3	7.842.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	2.009.000	2	2.009.000	2	2.009.000	2	2.009.000	2	2.009.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	15	15	52.000.000	15	52.000.000	15	52.000.000	15	52.000.000	15	52.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							16.190.080.000		16.975.657.000		17.814.454.000		18.705.083.000		19.629.857.000	Kegiatan
	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	16.190.080.000	100	16.975.657.000	100	17.814.454.000	100	18.705.083.000	100	19.629.857.000	Output Kegiatan
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																Sub Kegiatan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	115	119	110	15.990.368.000	110	16.775.945.000	110	17.614.742.000	110	18.495.479.000	110	19.420.253.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	197.850.000	12	197.850.000	12	197.850.000	12	207.742.000	12	207.742.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	1	1	1	1.862.000	1	1.862.000	1	1.862.000	1	1.862.000	1	1.862.000	Output Sub Kegiatan
	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui pelayanan	Persentase ketersediaan layanan administrasi	Persen	100	100	100	12.453.443.000	100	12.633.670.000	100	12.120.238.000	100	12.994.015.000	100	13.346.941.000	Outcome Program
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							87.250.000		87.250.000		87.250.000		90.000.000		90.000.000	Kegiatan
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	87.250.000	100	87.250.000	100	87.250.000	100	90.000.000	100	90.000.000	Output Kegiatan
4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																Sub Kegiatan
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	1	87.250.000	1	87.250.000	1	87.250.000	1	90.000.000	1	90.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							8.646.163.000		8.815.616.000		8.182.779.000		9.021.256.000		9.248.820.000	Kegiatan
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat guna	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	8.646.163.000	100	8.815.616.000	100	8.182.779.000	100	9.021.256.000	100	9.248.820.000	Output Kegiatan
4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																Sub Kegiatan
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	70.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	1.020.725.000	4	1.175.000.000	4	1.175.000.000	4	1.233.750.000	4	1.250.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																Sub Kegiatan
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	4	170.000.000	4	170.000.000	4	170.000.000	4	175.000.000	4	175.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																Sub Kegiatan
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	1.492.925.000	4	1.413.761.000	4	1.413.761.000	4	1.429.400.000	4	1.429.400.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																Sub Kegiatan
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	13	66.825.000	13	101.825.000	13	101.825.000	13	101.825.000	13	101.825.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																Sub Kegiatan
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	83.345.000	2	83.445.000	2	83.445.000	2	89.700.000	2	89.700.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	4	1.085.258.000	4	1.139.500.000	4	1.139.500.000	4	1.139.500.000	4	1.139.500.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3000	3000	2400	4.582.085.000	2400	4.582.085.000	2400	3.949.248.000	2400	4.697.081.000	2400	4.908.395.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.720.030.000		3.730.804.000		3.850.209.000		3.882.759.000		4.008.121.000	Kegiatan
	Tersedianya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat guna	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	3.720.030.000	100	3.730.804.000	100	3.850.209.000	100	3.882.759.000	100	4.008.121.000	Output Kegiatan
4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	27.600.000	4	27.600.000	4	27.600.000	4	28.900.000	4	28.900.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																Sub Kegiatan
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	1.182.000.000	12	1.211.000.000	12	1.241.000.000	12	1.272.000.000	12	1.304.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																Sub Kegiatan
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	2.510.430.000	12	2.492.204.000	12	2.581.609.000	12	2.581.859.000	12	2.675.221.000	Output Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui pelayanan administrasi yang andal, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	3.055.204.000	100	3.610.253.000	100	3.037.020.000	100	3.374.651.000	100	4.322.358.000	Outcome Program
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.055.204.000		3.610.253.000		3.037.020.000		3.374.651.000		4.322.358.000	Kegiatan
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	3.055.204.000	100	3.610.253.000	100	3.037.020.000	100	3.374.651.000	100	4.322.358.000	Output Kegiatan
4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan																Sub Kegiatan
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	74	70	70	1.674.740.000	70	1.715.909.000	70	1.733.068.000	70	1.819.721.000	70	1.910.707.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	7	979.964.000	7	1.493.844.000	7	903.452.000	7	1.134.430.000	7	1.991.151.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	190	190	150	400.500.000	150	400.500.000	150	400.500.000	150	420.500.000	150	420.500.000	Output Sub Kegiatan
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan, operasional, dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	2.513.376.000	100	2.573.534.000	100	2.573.534.000	100	2.573.534.000	100	2.573.534.000	Outcome Program
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							833.376.000		893.534.000		893.534.000		893.534.000		893.534.000	Kegiatan
	Tercapainya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah	Persen	100	100	100	833.376.000	100	893.534.000	100	893.534.000	100	893.534.000	100	893.534.000	Output Kegiatan
4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																Sub Kegiatan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2	812.876.000	2	862.534.000	2	862.534.000	2	862.534.000	2	862.534.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	4	4	2	20.500.000	3	31.000.000	3	31.000.000	3	31.000.000	3	31.000.000	Output Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							1.680.000.000		1.680.000.000		1.680.000.000		1.680.000.000		1.680.000.000	Kegiatan
	Tercapainya fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	1.680.000.000	100	1.680.000.000	100	1.680.000.000	100	1.680.000.000	100	1.680.000.000	Output Kegiatan
4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																Sub Kegiatan
	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	12	960.000.000	12	960.000.000	12	960.000.000	12	960.000.000	12	960.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	12	720.000.000	12	720.000.000	12	720.000.000	12	720.000.000	12	720.000.000	Output Sub Kegiatan
	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	97,74	97,74	97,74	257.715.000	97,74	270.413.000	97,75	283.930.000	97,76	298.127.000	97,76	313.530.000	Outcome Program
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi							257.715.000		270.413.000		283.930.000		298.127.000		313.530.000	Kegiatan
	Meningkatnya kapasitas dan kinerja organisasi perangkat daerah melalui pencapaian tingkat kematangan organisasi yang lebih tinggi secara berkelanjutan	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks	42,47	42,75	43	257.715.000	43,25	270.413.000	43,5	283.930.000	43,75	298.127.000	44	313.530.000	Output Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	6	2	2	60.428.000	2	63.450.000	2	66.618.000	2	69.950.000	2	73.448.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	2	2	106.607.000	2	111.938.000	2	117.535.000	2	123.411.000	2	129.582.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	36	36	36	90.500.000	36	95.025.000	36	99.777.000	36	104.766.000	36	110.500.000	Output Sub Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokoleran	Persentase pelayanan keprotokoleran		Persen	100	100	100	957.014.000	100	1.306.526.000	100	1.371.852.000	100	1.440.444.000	100	1.512.466.000	100
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							957.014.000		1.306.526.000		1.371.852.000		1.440.444.000		1.512.466.000	Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ketercapaian kinerja Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Pendokumentasian	Persen	100	100	100	957.014.000	100	1.306.526.000	100	1.371.852.000	100	1.440.444.000	100	1.512.466.000	Output Kegiatan
4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	12	12	229.345.000	12	297.915.000	12	312.810.000	12	328.451.000	12	344.873.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tertelaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan	191	201	191	429.769.000	196	641.111.000	201	673.167.000	206	706.825.000	211	742.166.000	Output Sub Kegiatan
4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan																Sub Kegiatan
	Tertelaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	12	12	297.900.000	12	367.500.000	12	385.875.000	12	405.168.000	12	425.427.000	Output Sub Kegiatan
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							18.129.904.000		15.895.530.000		16.681.856.000		19.441.498.000		18.371.370.000	Program
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah dalam pembangunan melalui penyusunan laporan tepat waktu	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	Persen	100	100	100	495.983.000	100	656.055.000	100	680.407.000	100	2.639.977.000	100	729.775.000	Outcome Program
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan							403.801.000		469.055.000		488.407.000		2.442.977.000		527.775.000	Kegiatan
	Telaksananya Administrasi Tata Pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Persen	100	100	100	403.801.000	100	469.055.000	100	488.407.000	100	2.442.977.000	100	527.775.000	Output Kegiatan
4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan																Sub Kegiatan
	Tertelaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	1	1	82.910.000	1	87.055.000	1	91.407.000	1	95.977.000	1	100.775.000	Output Sub Kegiatan
4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	3	3	179.906.000	3	195.000.000	3	205.000.000	3	215.000.000	3	225.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	2	2	2	140.985.000	2	187.000.000	2	192.000.000	2	197.000.000	2	202.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah							92.182.000		187.000.000		192.000.000		197.000.000		202.000.000	Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen	100	100	100	92.182.000	100	187.000.000	100	192.000.000	100	197.000.000	100	202.000.000	Output Kegiatan
4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri							92.182.000		187.000.000		192.000.000		197.000.000		202.000.000	Sub Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	20	20	20	92.182.000	20	187.000.000	20	192.000.000	20	197.000.000	20	202.000.000	Output Sub Kegiatan
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian lembaga kemasyarakatan melalui fasilitasi pemerintah daerah sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat	Persentase capaian fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Persen	100	100	100	17.272.112.000	100	14.778.110.000	100	15.537.016.000	100	16.331.366.000	100	17.162.935.000	Outcome Program
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							17.272.112.000		14.778.110.000		15.537.016.000		16.331.366.000		17.162.935.000	Kegiatan
	Terlaksananya fasilitasi pemerintah daerah sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Persen	100	100	100	17.272.112.000	100	14.778.110.000	100	15.537.016.000	100	16.331.366.000	100	17.162.935.000	Output Kegiatan
4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	120	112	34	16.340.704.770	34	13.981.193.068	34	14.699.174.685	34	15.450.688.966	34	16.237.415.194	Output Sub Kegiatan
4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	21	22	17	438.443.800	17	375.134.825	17	394.399.268	17	414.563.440	17	435.672.397	Output Sub Kegiatan
4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	80	67	31	492.963.430	31	421.782.107	31	443.442.047	31	466.113.594	31	489.847.409	Output Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum (IUP)		Indeks	96,76	96,77	96,78	361.809.000	96,79	461.365.000	96,8	464.433.000	96,81 Indeks	470.155.000	96,82	478.660.000	Outcome Program
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							361.809.000		461.365.000		464.433.000		470.155.000		478.660.000	Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang sesuai dengan	Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah,	Persen	100	100	100	361.809.000	100	461.365.000	100	464.433.000	100	470.155.000	100	478.660.000	Output Kegiatan
4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																Sub Kegiatan
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	9	9	9	75.630.000	9	108.510.000	9	108.510.000	9	108.510.000	9	108.510.000	Output Sub Kegiatan
4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	6	6	6	196.823.000	6	252.000.000	6	255.068.000	6	260.790.000	6	269.295.000	Output Sub Kegiatan
4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	1200	1200	1200	89.356.000	1200	100.855.000	1200	100.855.000	1200	100.855.000	1200	100.855.000	Output Sub Kegiatan
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							894.156.000		1.076.975.000		1.117.475.000		1.161.320.000		1.202.320.000	Program
	Meningkatnya kontribusi pengelolaan keuangan dan intermediasi ekonomi dalam mendukung pertumbuhan daerah	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	0,66	0,20	0,3	516.390.000	0,4	524.175.000	0,6	532.475.000	0,8	541.320.000	1	550.320.000	Outcome Program
	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB		Persen	0,33%	0,34	0,35		0,36		0,37		0,38		0,39		

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB		Persen	0,47	0,48	0,49		0,5		0,51		0,52		0,53		
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							157.670.000		165.455.000		173.755.000		182.600.000		191.600.000	Kegiatan
	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persen	100	100	100	157.670.000	100	165.455.000	100	173.755.000	100	182.600.000	100	191.600.000	Output Kegiatan
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	2	2	30.109.000	2	31.615.000	2	33.200.000	2	35.000.000	2	36.600.000	Output Sub Kegiatan
4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	4	4	65.965.000	4	69.265.000	4	72.750.000	4	76.400.000	4	80.200.000	Output Sub Kegiatan
4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	1	1	61.596.000	1	64.575.000	1	67.805.000	1	71.200.000	1	74.800.000	Output Sub Kegiatan
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							358.720.000		358.720.000		358.720.000		358.720.000		358.720.000	Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Kegiatan Koordinasi DBHCHT	Persen	100	100	100	358.720.000	100	358.720.000	100	358.720.000	100	358.720.000	100	358.720.000	Output Kegiatan
4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	2	2	358.720.000	2	358.720.000	2	358.720.000	2	358.720.000	2	358.720.000	Output Sub Kegiatan
	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengadaan barang/jasa pemerintah	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	3	3	3	377.766.000	3	552.800.000	3	585.000.000	3	620.000.000	3	652.000.000	Outcome Program
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							57.350.000		62.000.000		68.000.000		75.000.000		81.000.000	Kegiatan
	Terlaksananya Administrasi Pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	Persen	100	100	100	57.350.000	100	62.000.000	100	68.000.000	100	75.000.000	100	81.000.000	Output Kegiatan
4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program																Sub Kegiatan
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	2	2	2	30.566.000	2	32.000.000	2	35.000.000	2	39.000.000	2	42.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Laporan	2	2	2	26.784.000	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.000.000	2	39.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							320.416.000		490.800.000		517.000.000		545.000.000		571.000.000	Kegiatan
	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	Persen	100	100	100	320.416.000	100	490.800.000	100	517.000.000	100	545.000.000	100	571.000.000	Output Kegiatan
4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																Sub Kegiatan
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	4	4	62.484.000	4	225.800.000	4	242.000.000	4	255.000.000	4	265.000.000	Output Sub Kegiatan
4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																Sub Kegiatan
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4		4	257.932.000	4	265.000.000	4	275.000.000	4	290.000.000	4	306.000.000	Output Sub Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Tabel IV-2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	Administrasi Tata Pemerintahan	
			Penataan Administrasi Pemerintahan	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
		Persentase capaian fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	
		Indeks Reformasi Hukum (IUP)	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Return on Asset (RoA) BUMD; Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB; dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
		Tingkat Kematangan UKPBJ	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
		Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kegiatan Penataan Organisasi	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
		Persentase pelayanan keprotokoleran	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			Fasilitasi Keprotokolan	
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Tabel IV-3
Indikator Utama Pembangunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,76	96,77	96,78	96,79	96,8	96,81	96,82	Rilis nilai dari Kemenkum HAM RI (rilis tahun N) / Bagian Hukum
2	Return on Aset (ROA) BUMD (IUP)	Persen	0,66	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00	PDAM dan Bank Pekalongan (Bagian Perekonomian dan SDA)
3	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (IUP)	Persen	N/A	22,21 - 22,41	22,26 - 22,86	22,31 - 23,31	22,36 - 23,76	22,41 - 24,21	22,46 - 24,66	Target RPJP Tahun 2025-2029 sebesar 22,41 - 24,21 (Bagian Perekonomian dan SDA)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (IUP)	Persen	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	Target RPJP Tahun 2025-2029 sebesar 36,01 (Bagian Perekonomian dan SDA)
5	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB (IUP)	Persen	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Pekalongan (Bagian Perekonomian dan SDA)
6	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB (IUP)	Persen	0,47	0,48	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	Total Kredit pada Bank Pekalongan (Bagian Perekonomian dan SDA)
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,31	87,31	87,33	87,34	87,35	87,36	87,37	Bagian Organisasi

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel IV-4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase OPD dengan pelaporan kinerja sangat baik	Persen	63,33	63,33	63,33	63,33	66,67	66,67	66,67	Nilai bersumber dari olah data LHE AKIP OPD yang dirilis oleh Inspektorat
2	Nilai SAKIP OPD	Indeks	81,50	81,75	82,02	82,04	82,06	82,08	82,10	Nilai bersumber dari hasil penilaian AKIP OPD oleh Inspektorat
3	Rata-rata capaian standar pelayanan minimal	Persen	99,51	100	100	100	100	100	100	Nilai bersumber dari aplikasi E-SPM
4	Persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa	Persen	77,35	77,85	78,35	78,85	79,35	79,85	80,35	
5	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian	Persen	0,49	0,34	0,38	0,42	0,49	0,57	0,64	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV-5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	5,05	5,08	5,09	5,11	5,12	5,13	5,14	1) Semakin tinggi nilai IKAD menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai IKAD juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan 2) Sumber data : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS)
2	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Semua proyek konstruksi di perencanaan 5 tahunan mendatang direncanakan selesai di tahun berjalan

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel IV-6
Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,76	96,77	96,78	96,79	96,8	96,81	96,82	Rilis nilai dari Kemenkum HAM RI (rilis tahun N) / Bagian Hukum
2	Return on Aset (ROA) BUMD (IUP)	Persen	0,66	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00	PDAM dan Bank Pekalongan (Bagian Perekonomian dan SDA)
3	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (IUP)	Persen	N/A	22,21 - 22,41	22,26 - 22,86	22,31 - 23,31	22,36 - 23,76	22,41 - 24,21	22,46 - 24,66	Target RPJP Tahun 2025-2029 sebesar 22,41 - 24,21 (Bagian Perekonomian dan SDA)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (IUP)	Persen	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	Target RPJP Tahun 2025-2029 sebesar 36,01 (Bagian Perekonomian dan SDA)
5	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB (IUP)	Persen	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Pekalongan (Bagian Perekonomian dan SDA)
6	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten / Kota per PDRB (IUP)	Persen	0,47	0,48	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	Total Kredit pada Bank Pekalongan (Bagian Perekonomian dan SDA)
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,31	87,31	87,33	87,34	87,35	87,36	87,37	Bagian Organisasi

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM DAERAH) Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029. Renstra digunakan sebagai panduan kerja selama 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran visi, misi dan program tahun 2025-2029 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

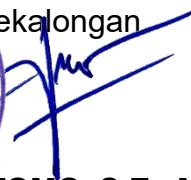
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kota Pekalongan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan sebaik – baiknya ;
2. Sekretariat Daerah Kota Pekalongan berkewajiban untuk Menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan 2025 – 2029 dan RPJM Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029 ;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, maka dijabarkan ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2025 – 2030 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

Renstra merupakan komitmen bersama untuk terus berinovasi, berkoordinasi, dan memberikan yang terbaik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan Masyarakat, Sehubungan dengan hal tersebut seluruh jajaran Sekretariat Daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan Renstra ini dengan penuh komitmen, disiplin, dan berinovasi untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Revisi Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini menjadi landasan kuat dalam mengawal perubahan dan kemajuan Kota Pekalongan menuju masa depan yang lebih baik. Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan 2025 - 2029, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 19 September 2025


Sekretaris Daerah
Kota Pekalongan

MURTANTOMO, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690310 199603 1 002



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 – 2029



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb

Puji syukur kami panjatkan, Tim Penyusun dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, sebagai landasan dan eksistensi Inspektorat Daerah guna mendukung terwujudnya Kota Pekalongan yang Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 memuat lima bab, yaitu; (1) Pendahuluan; (2) Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah (3). Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; (4) Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan (5) Penutup.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb

Pekalongan, 19 September 2025

Plt. Inspektur

Kota Pekalongan



SRI MULYANI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 196710031997032001

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN	8
2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	8
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	8
2.1.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	13
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	22
2.1.5. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan (Jika ada)	24
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	24
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.2.2. Isu Strategis	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	35
3.2. Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	36
3.3. Strategi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	37
3.4. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
4.1 Uraian Program	41

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	43
4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	49
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama pembangunan Inspektorat Daerah	52
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah	52
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	53
4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	54
4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	54
BAB V PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel II- 1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai	14
Tabel II- 2 Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	15
Tabel II- 3. Prasarana dan Sarana Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025	15
Tabel II- 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	18
Tabel II- 5. Pencapaian Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	19
Tabel II- 6. Isu Strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	33
Tabel III- 1 Tujuan dan Sasaran Renstra	37
Tabel III- 2. Strategi Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	38
Tabel III- 3. Arah Kebijakan Renstra	39
Tabel IV- 1. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	43
Tabel IV- 2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas	50
Tabel IV- 3 Indikator Utama Pembangunan	52
Tabel IV- 4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	52
Tabel IV- 5. Indikator Kinerja Kunci	54
Tabel IV- 6. Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	54
Tabel IV- 7. Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran.....	2
Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.....	13
Gambar 4. 1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

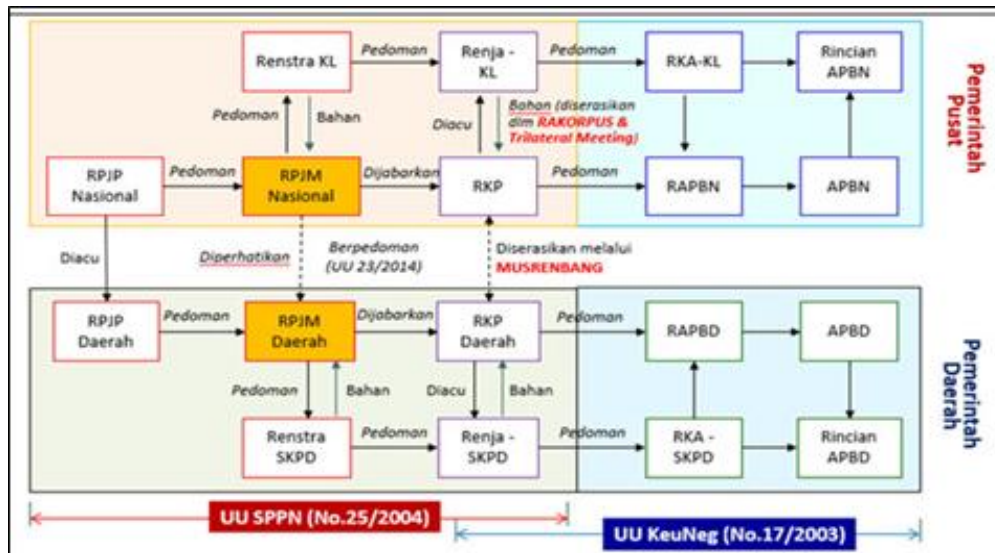
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan atau Renja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik, dan Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik. Dalam penyusunan dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan tahapannya berjalan bersamaan dengan penyusunan rancangan RPJMD secara simultan. Hal ini dikarenakan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Inspektorat Daerah Kota Pekalongan yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pada dasarnya, Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan harus dapat menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, yaitu (1) kemana pelayanan organisasi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas organisasi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan serta tolok ukur pencapaiannya.

Hubungan antara Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dengan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat ditunjukkan dengan gambar sebagaimana di bawah ini :

Gambar 1. 1 Hubungan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran



Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah potensi daerah dan kearifan lokal serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Selanjutnya sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2025-2029 yang merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota & Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, meliputi penjelasan tahapan penyusunan, penjelasan tata cara, pembaharuan sistematika dan penjelasan substansi, jadwal dan timeline, dan hal lain yang belum diatur/dijelaskan regulasi sebelumnya (periodesasi, penyelarasan, kinerja, cascading dll).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Berdasarkan hal tersebut, serta dengan telah dilantiknnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka Inspektorat Daerah Kota Pekalongan berkewajiban untuk melakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 untuk menjamin keterkaitan, sinkronisasi dan implementasi dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 antara tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dengan RPJMD Kota Pekalongan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini yaitu :

- a. pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;
- b. rencana pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan; dan
- c. mengoptimalkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

- 2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

- 2.1.1. Tugas Fungsi Dan Struktur Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
- 2.1.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
- 2.1.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.1.5. Mitra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam Pemberian Pelayanan
- 2.2. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025
- 3.3. Strategi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
- 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
- 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

4.7.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4.8.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

BAB V PENUTUP

Memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN

DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

a. Tugas Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan penguatan terhadap peran Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota selain melaksanakan peran pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya tetapi juga berperan untuk pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2021 adalah membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Fungsi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/ atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, administrasi keuangan dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan dan penyusunan laporan tahunan; dan

- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
- Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2021, terdiri atas:
- 1) Inspektur
Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
 - 2) Sekretariat
Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - a) Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - penyelenggaraan pengelolaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
 - penyelenggaraan pengelolaan keuangan dengan melaksanakan pemverifikasian pengelolaan administrasi keuangan, fungsi akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
 - pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
 - pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah;
 - pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);

- pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kesekretaritan, sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi dan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- 1) Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, analisis dan evaluasi;
 - melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - melaksanakan pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan;
 - melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
 - menyusun bahan profil perangkat daerah;
 - mengelola data dan informasi pengawasan;
 - menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
 - mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
- 2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kegiatan bidang administrasi umum dan keuangan;
 - melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;

- melaksanakan tata usaha Inspektorat Daerah dan pembinaannya yang meliputi pengelolaan kegiatan administrasi umum antara lain kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- melaksanakan perbendaharaan meliputi penyusunan bahan dan mengoordinasikan laporan keuangan;
- melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan;
- menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3) Inspektur Pembantu I

Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pada perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Pembantu I menyelenggarakan fungsi :

- pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pengoordinasian perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- penyelenggaraan pelaksanaan joint audit dengan aparat pengawas internal dan eksternal lainnya;
- penyelenggaraan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Inspektur Pembantu II

Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pada perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Pembantu II menyelenggarakan fungsi :

- pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pengoordinasian perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- penyelenggaraan pelaksanaan joint audit dengan aparat pengawas internal dan eksternal lainnya;
- penyelenggaraan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Inspektur Pembantu III

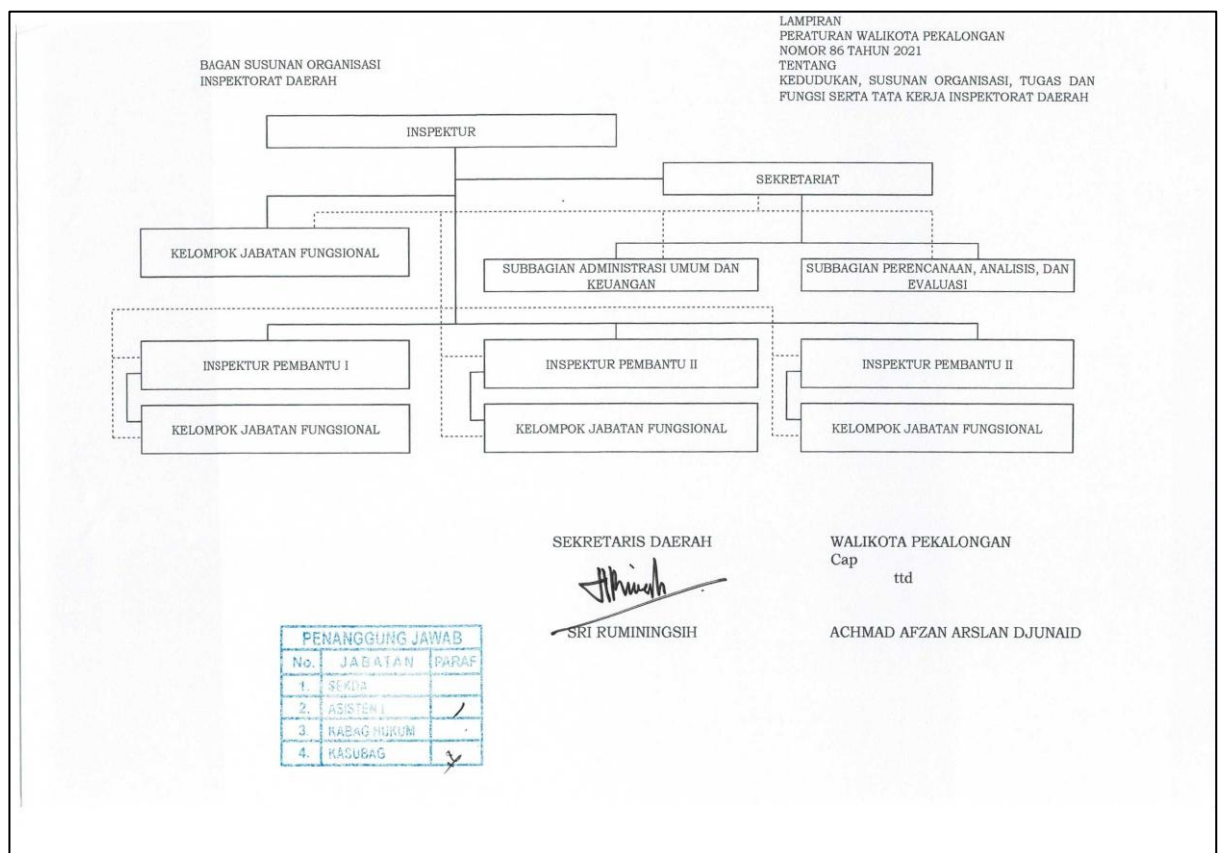
Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah dan tugas perbantuan pada perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Pembantu III menyelenggarakan fungsi :

- pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terkait tindak pidana korupsi dan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- penyelenggaraan pengawasan internal melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terkait pencegahan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- penyelenggaraan penanganan laporan dan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- pelaksanaan joint audit dengan aparat pengawas internal dan eksternal lainnya;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;

- penyelenggaraan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembagian Rumpun Urusan Kerja pada Inspektorat Pembantu I, II, dan III didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan. Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan berdasarkan lampiran Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan



2.1.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) APIP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sampai dengan 31 Agustus 2025, sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang Pegawai Kontrak.

Jabatan Struktural	Jumlah
Eselon II	0
Eselon III (Sekretaris & 3 irban)	4
Eselon IV	2
Jumlah	6

Pegawai Sekretariat	Jumlah
Fungsional Umum	5
Fungsional Tertentu	0
Non ASN	2
Jumlah	7

JF Auditor	Jumlah
Madya	2
Muda	7
Pertama	10
Jumlah	19

Menurut Pendidikan	Jumlah
S-2	8
S-1	26
D-IV	1
D-III	1
SMA	1
SD	1
Jumlah	38

JF PPUPD	Jumlah
Madya	2
Muda	1
Pertama	5
Jumlah	8

Jumlah Pegawai	Jumlah
ASN	35
CPNS	3
Non ASN	2
Jumlah	40

Golongan	a	b	c	d	Jumlah
IV	3	4	1	0	8
III	11	7	4	6	28
II	1			1	2
Jumlah	15	11	5	7	38

Tabel II- 1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN						GENDER		TOTAL (ORANG)
		SD	SLTA	D3	S-1	S-2	S3	L	P	
1	Sekretariat	1	2	1	5			4	4	10
2	Irban I				7	2		3	6	9
3	Irban II				9	4		3	10	13
4	Irban III				7	1		5	3	8

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, Agustus 2025

Tabel II- 2 Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPK	NON ASN	
1	Sekretariat	2	5	1		2	10
2	Irban I		7	2			9
3	Irban II		10	3			13
4	Irban III		6	2			8

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, Agustus 2025

Dilihat dari jumlah pegawai yang ada, seluruh jabatan eselon III (Inspektur Pembantu) maupun jabatan eselon IV (Kasubbag) telah terpenuhi seluruhnya. Namun untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Inspektorat Daerah Kota Pekalongan masih memerlukan dukungan personil berupa auditor dengan keterampilan teknis khusus seperti teknik sipil, arsitektur dan akuntansi. Selain itu diperlukan peningkatan keterampilan auditor yang ada saat ini melalui pendidikan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan pelatihan-pelatihan teknis audit lainnya. Berdampingan dengan fungsional auditor, maka keberadaan fungsional PPUPD juga diperlukan dalam rangka mendukung pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

1) Sarana Prasarana (Aset/Modal) Aparatur

Jumlah sarana-prasarana aparatur Inspektorat Daerah Kota Pekalongan per 30 Juni 2025, dapat dilihat pada tabel II-3.

Tabel II- 3. Prasarana dan Sarana Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Scanner	2	unit
2	Printer	29	unit
3	Hard Disk	5	unit
4	Note Book	14	unit
5	Lap Top	22	unit
6	P.C Unit	4	unit
7	Infrared Thermometer	1	unit
8	Concrete Hammer Test	1	unit
9	Facsimile	1	unit
10	Pesawat Telephone	1	unit
11	Camera Conference	1	unit
12	Handphone	2	unit
13	Thermometer Badan	2	unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
14	Layar Film/Projector	5	unit
15	Camera Electronic	2	unit
16	Voice Recorder	5	unit
17	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	unit
18	1 Set (2 mic, 1transmitter)	1	unit
19	Almari Kayu	12	unit
20	Kursi Kerja	14	unit
21	Meja Rapat	7	unit
22	Meja Kerja	10	unit
23	Alat Pemdam Kebakaran	3	unit
24	Drink Jar	2	unit
25	Dispenser	8	unit
26	Sound System	2	unit
27	Loudspeaker	3	unit
28	Televisi	2	unit
29	Lemari Es	1	unit
30	A.C. Spilt	16	unit
31	Kursi Putar	18	unit
32	Kursi Tamu	1	unit
33	Kursi Rapat	12	unit
34	Mesin Absensi	2	unit
35	Alat Penghancur Kertas	1	unit
36	Filing Cabinet Besi	21	unit
37	Meteran Laser	5	unit
38	Meteran sorong Togachi	2	unit
39	Sepeda Motor	10	unit
40	Station Wagon	4	unit
41	Core Drill	1	unit

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester 1 Tahun 2025, 2025

Dari jumlah sarana prasarana yang ada, dapat dijelaskan kondisinya cukup memadai dalam menunjang kinerja APIP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan. Namun untuk optimalisasi kinerja yang semakin bertambah, maka ke depan akan direncanakan peningkatan sarana berbasis teknologi seperti jaringan internet, *electronic data base* dan pengelolaan website Inspektorat Daerah guna mendukung pelayanan yang lebih baik termasuk layanan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), serta dalam rangka kenyamanan kerja aparatur dan pelayanan masyarakat perlu

dilakukan renovasi bangunan gedung yang ada saat ini atau membangun unit gedung baru yang lebih representatif, guna memfasilitasi pelaksanaan rapat dengan ruang yang memadai, ruang pengaduan masyarakat, ruang pemeriksaan khusus dan ruang arsip yang memadai.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah selaku APIP Pemerintah Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) mengalami beberapa kali perubahan indikator kinerja utama. Secara umum pada indikator kinerja utama yang digunakan secara terus menerus menunjukkan trend positif, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun-tahun awal, capaian kinerja cenderung belum optimal sehingga sebagian rasio capaian berada di bawah 100%. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai periode adaptasi Inspektorat Daerah sebagai perangkat daerah dalam menyesuaikan strategi pelaksanaan program dengan target indikator yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, tren capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan adanya perjalanan peningkatan bertahap dari kondisi awal yang belum optimal menuju konsistensi capaian di akhir periode Renstra. Pola fluktuatif yang terjadi di tengah periode mencerminkan tantangan implementasi, namun juga menunjukkan kemampuan adaptasi Inspektorat Daerah dalam melakukan perbaikan secara konsisten. Dengan demikian, tabel ini bukan hanya menggambarkan data capaian, tetapi juga merefleksikan dinamika proses pembelajaran kelembagaan dalam mencapai target pembangunan daerah secara lebih efektif dan akuntabel. Adapun matrikulasi realisasi dan capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021-2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II- 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Indikator Kepuasan Masyarakat	V			Indeks		80.38	80.63	80.88	81.13				90.24	92.26		0%	0%	112%	114%
2	Nilai SAKIP OPD			V	Nilai		84.50	85.50	86.50	84.60		83.16	85.65	84.60	84.60		98%	100%	98%	100%
3	Maturitas SPIP		V		Nilai		3.1	3.2	3.4	3.6			3.022	3.002	3.005		0%	94%	88%	83%
4	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi			V	Persen		48.39	58.06	67.74	77.42		48.39	58.06	66.67	73.33		100%	100%	98%	95%
5	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/ WBBM		V		OPD		3	4	5	6		2	2	3	3		67%	50%	60%	50%
6	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/ WBBM			V	OPD		11	12	13	14	3	5	8	14	26		45%	67%	108%	186%

1. Kinerja Keuangan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

Dari sisi kinerja keuangan selama kurun waktu 2021-2024, kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II- 5. Pencapaian Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN	5,810,186	5,717,611.00	6,025,233.00	6,849,707	4,665,348.781	5,346,992.591	5,558,305.48	6,386,814.43	80.30%	93.52%	92.25%	93.24%	1978.98%	1939.41%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,291,286	5,296,511.00	5,697,872.00	6,467,215	4,265,330.481	4,966,515.49	5,235,100.38	6,039,756.33	80.61%	93.77%	91.88%	93.39%	1737.92%	1703.14%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,500	14,300.00	11,000.00	15,465	20,262.30	12,713.90	10,991.40	14,574.30	94.24%	88.91%	99.92%	94.24%	-58.68%	-65.37%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,500	1,300.00	2,500.00	2,030	9,574.90	1,300.00	2,491.40	1,936.40	91.19%	100.00%	99.66%	95.39%	-80.67%	-79.78%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,500	1,500.00	1,500.00	1,435	1,456.90	1,500.00	1,500.00	1,340.60	97.13%	100.00%	100.00%	93.42%	-4.33%	-7.98%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,500	11,500.00	7,000.00	12,000	9,230.50	9,913.90	7,000.00	11,297.30	97.16%	86.21%	100.00%	94.14%	26.32%	22.39%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,950,830	4,727,086.00	5,004,870.00	5,615,545	3,946,008.241	4,494,532.95	4,585,461.40	5,247,954.46	79.70%	95.08%	91.62%	93.45%	33.23%	60.20%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,917,330	4,695,586.00	4,965,570.00	5,572,215	3,914,508.241	4,463,032.95	4,546,161.40	5,204,959.46	79.61%	95.05%	91.55%	93.41%	13.32%	32.97%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32,000	30,000.00	37,800.00	42,000	30,000.00	30,000.00	37,800.00	41,670.00	93.75%	100.00%	100.00%	99.21%	31.25%	38.90%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,500	1,500.00	1,500.00	1,330	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,325.00	100.00%	100.00%	100.00%	99.62%	-11.33%	-11.67%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	40,500.00	147,838.00	190,300	-	40,499.82	141,394.77	180,618.40	#DIV/0!	100.00%	95.64%	94.91%	507.87%	471.78%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	5,000.00	5,000.00	5,000	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	#DIV/0!	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	5,000.00	8,000.00	6,000	-	5,000.00	7,997.00	5,740.10	#DIV/0!	100.00%	99.96%	95.67%	20.00%	14.80%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	30,500.00	134,838.00	179,300	-	30,499.818	128,397.77	169,878.30	#DIV/0!	100.00%	95.22%	94.75%	487.87%	456.98%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	172,645	288,225.00	304,166.00	268,710	163,188.715	288,188.36	294,146.98	260,616.30	94.52%	99.99%	96.71%	96.99%	216.19%	215.41%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500	2,500.00	5,000.00	5,000	2,500.00	2,500.00	4,998.14	4,970.42	100.00%	100.00%	99.96%	99.41%	100.00%	98.82%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,644.836	70,500.00	75,820.00	61,166	46,644.836	70,500.00	71,832.00	58,293.95	100.00%	100.00%	94.74%	95.30%	31.13%	24.97%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,500.00	8,500.00	7,000.00	3,362	10,500.00	8,500.00	7,000.00	3,026.17	100.00%	100.00%	100.00%	90.01%	-67.98%	-71.18%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,000	42,000.00	32,000.00	44,807	37,417.639	42,000.00	31,992.00	41,296.43	83.15%	100.00%	99.98%	92.17%	-0.43%	10.37%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,500	12,875.00	12,875.00	12,875	10,626.24	12,838.36	12,868.25	12,138.70	85.01%	99.72%	99.95%	94.28%	3.00%	14.23%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,900.00	3,000.00	2,500.00	2,500	2,900.00	3,000.00	2,145.00	2,159.00	100.00%	100.00%	85.80%	86.36%	-13.79%	-25.55%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52,600.00	148,850.00	168,971.00	139,000	52,600.00	148,850.00	163,311.59	138,731.63	100.00%	100.00%	96.65%	99.81%	164.26%	163.75%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,700	62,488.00	78,656.00	94,360	48,656.278	61,316.01	72,792.11	84,634.50	82.89%	98.12%	92.54%	89.69%	139.56%	178.57%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500	2,500.00	3,500.00	3,500	2,716.50	2,498.80	3,053.00	3,266.30	60.37%	99.95%	87.23%	93.32%	-22.22%	20.24%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,000	30,388.00	34,800.00	47,400	24,939.778	29,217.21	29,802.16	38,733.88	71.26%	96.15%	85.64%	81.72%	35.43%	55.31%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19,200	29,600.00	40,356.00	43,460	21,000.000	29,600.00	39,936.95	42,634.32	109.38%	100.00%	98.96%	98.10%	126.35%	103.02%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,611	163,912.00	151,342.00	282,835	87,214.947	69,264.451	130,313.71	251,358.38	99.55%	42.26%	86.11%	88.87%	899.76%	842.55%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57,610.760	105,126.00	119,842.00	139,085	57,610.760	10,479.015	98,853.11	109,286.81	100.00%	9.97%	82.49%	78.58%	141.42%	89.70%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,000	35,000.00	6,500.00	114,950	14,986.20	34,999.436	6,467.90	113,298.81	99.91%	100.00%	99.51%	98.56%	666.33%	656.02%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000	23,786.00	25,000.00	28,800	14,617.987	23,786.00	24,992.70	28,772.76	97.45%	100.00%	99.97%	99.91%	92.00%	96.83%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	160,500	140,250.00	94,201.00	131,431	140,875.30	132,376.30	91,232.40	119,917.50	87.77%	94.39%	96.85%	91.24%	82.14%	116.59%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	147,500	129,250.00	87,203.00	116,503	129,737.30	121,549.00	84,298.60	105,232.90	87.96%	94.04%	96.67%	90.33%	87.19%	112.90%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8,000	17,000.00	10,000.00	23,375	7,168.00	17,000.00	9,999.00	21,968.80	89.60%	100.00%	99.99%	93.98%	192.19%	206.48%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	9,000	15,000.00	10,000.00	9,600	8,971.00	13,600.40	8,920.00	9,429.00	99.68%	90.67%	89.20%	98.22%	6.67%	5.11%
Reviu Laporan Kinerja	-	10,000.00	10,000.00	10,000	-	10,000.00	9,999.00	9,960.90	#DIV/0!	100.00%	99.99%	99.61%	0.00%	-0.39%
Reviu Laporan Keuangan	13,000	15,000.00	10,000.00	10,000	10,592.40	14,150.00	9,590.70	9,996.80	81.48%	94.33%	95.91%	99.97%	-23.08%	-5.62%
Kerjasama Pengawasan Internal	68,500	14,250.00	21,388.00	31,388	61,508.90	14,250.00	21,336.00	28,705.80	89.79%	100.00%	99.76%	91.45%	-54.18%	-53.33%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	49,000	58,000.00	25,815.00	32,140	41,497.00	52,548.60	24,453.90	25,171.60	84.69%	90.60%	94.73%	78.32%	-34.41%	-39.34%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13,000	11,000.00	6,998.00	14,928	11,138.00	10,827.30	6,933.80	14,684.60	85.68%	98.43%	99.08%	98.37%	-5.05%	3.69%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	13,000	5,000.00	3,064.00	6,000	11,138.00	5,000.00	2,999.90	5,904.20	85.68%	100.00%	97.91%	98.40%	-53.85%	-46.99%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	6,000.00	3,934.00	8,928	-	5,827.30	3,933.90	8,780.40	#DIV/0!	97.12%	100.00%	98.35%	48.80%	50.68%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	358,400	280,850.00	233,160.00	251,061	259,143.00	248,100.80	231,972.70	227,140.60	72.31%	88.34%	99.49%	90.47%	158.92%	119.68%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	84,200	28,000.00	23,612.00	30,848	44,713.00	16,311.00	23,178.00	23,659.00	53.10%	58.25%	98.16%	76.70%	-105.90%	-111.11%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	31,500	25,000.00	18,850.00	27,848	29,340.00	15,566.00	18,760.00	20,994.00	93.14%	62.26%	99.52%	75.39%	-11.59%	-28.45%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	52,700	3,000.00	4,762.00	3,000	15,373.00	745.00	4,418.00	2,665.00	29.17%	24.83%	92.78%	88.83%	-94.31%	-82.66%
Pendampingan dan Asistensi	274,200	252,850.00	209,548.00	220,213	214,430.00	231,789.802	208,794.70	203,481.60	78.20%	91.67%	99.64%	92.40%	264.82%	230.79%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9,466.00	17,462	-	-	9,428.00	16,169.20	#DIV/0!	#DIV/0!	99.60%	92.60%	84.47%	71.50%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	253,200	90,150.00	13,026.00	23,400	193,805.00	77,172.000	13,018.90	20,537.00	76.54%	85.60%	99.95%	87.76%	-90.76%	-89.40%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	21,000	60,000.00	90,140.00	78,261	20,625.00	53,817.802	90,139.00	73,445.00	98.21%	89.70%	100.00%	93.85%	272.67%	256.10%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	102,700.00	96,916.00	101,090	-	100,800.00	96,208.80	93,330.40	#DIV/0!	98.15%	99.27%	92.32%	-1.57%	-7.41%

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan sebagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi layanan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh Wali Kota yang dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun perangkat daerah yang menjadi ruang lingkup pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kota Pekalongan terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
- 2) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
- 3) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan Inspektorat Daerah tipe B;
- 4) Dinas Daerah Kota Pekalongan, terdiri atas:
 - a) Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b) Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, permukiman, dan bidang pertanahan;
 - e) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
 - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- h) Dinas Pertanian dan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - i) Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - j) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k) Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - l) Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - m) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - n) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - o) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - p) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - q) Dinas Kelautan dan Perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - r) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- 5) Badan Daerah Kota Pekalongan, terdiri atas:
- a) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
 - b) Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Kecil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Namun demikian, terdapat pula Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi kelompok sasaran atas layanan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, serta juga kelompok sasaran atas layanan yang

diselenggarakan Inspektorat Daerah sesuai tugas dan fungsinya selaku APIP, meliputi Pengawas Eksternal (BPK), Pengawas Intern lainnya (BPKP, Itjen Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah) maupun Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan).

2.1.5. Mitra Inspektorat Daerah Pekalongan dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kota Pekalongan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai instansi, baik dari unsur internal pemerintahan maupun eksternal. Mitra internal meliputi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Itprov) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Itprov berperan dalam pembinaan teknis kepada Inspektorat Daerah, khususnya dalam hal sinkronisasi kebijakan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Sementara itu, BPKP berfungsi sebagai pembina utama APIP di tingkat nasional, yang memberikan dukungan melalui asistensi teknis, penguatan kapabilitas APIP, penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pembinaan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Inspektorat Daerah juga menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, yaitu Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). APH berperan dalam penanganan kasus hukum terkait temuan pengawasan yang memiliki indikasi tindak pidana, serta menjadi mitra dalam Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan. Melalui kerja sama ini, dilakukan harmonisasi antara pendekatan preventif oleh APIP dan pendekatan represif oleh APH guna mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan meminimalisir potensi penyimpangan. Adapun BPK merupakan lembaga auditor eksternal negara yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Hasil pemeriksaan BPK menjadi masukan penting bagi Inspektorat dalam menyusun rencana pengawasan dan tindak lanjut atas rekomendasi audit, sehingga tercipta sinergi antara pengawasan eksternal dan internal.

Melalui kerja sama yang erat dengan seluruh mitra tersebut, Inspektorat Daerah Kota Pekalongan berupaya meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis permasalahan dan isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau

diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah dalam jangka menengah. Di sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah juga digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Masalah adalah ketika kenyataan yang terjadi atau realita fakta (*das sein*), yang tidak sesuai dengan yang diharapkan (*das sollen*). Dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan serta harapan, juga antara realitas dan ekspektasi.

Permasalahan pelayanan dari Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan kesenjangan antara sasaran yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan rencana strategis Inspektorat Daerah, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah yang juga dapat dengan permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan.

Hasil analisis permasalahan daerah yang merupakan penjabaran Arah Kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 Tahap I, ditemukan masalah pokok di Kota Pekalongan yang menjadi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah, yaitu Belum Optimalnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif. Hal tersebut akan diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi di Kota Pekalongan sudah cukup tinggi, yaitu 87.31. Namun masih ditemukan beberapa faktor yang masih bisa ditingkatkan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang lebih akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif.

Masalah pokok ini kemudian dihubungkan kesesuaiannya dengan ruang lingkup tugas pokok Inspektorat Daerah Kota Pekalongan,

sehingga ditemukan masalah yang dijabarkan lagi ke dalam akar masalah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengawasan serta upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek integritas, tindak lanjut hasil pemeriksaan, maupun kepatuhan terhadap kebijakan teknis pengawasan serta kolaboratif dalam implementasi tata kelola pemerintah.

Permasalahan yang muncul lebih spesifik adalah belum optimalnya penguatan integritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Integritas menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pengawasan, sehingga permasalahan pada aspek ini berimplikasi terhadap belum optimalnya efektivitas pengendalian internal dan capaian kinerja pengawasan daerah.

Akar masalah dapat ditelusuri dari beberapa aspek. Pertama, belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan dengan tujuan tertentu. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara rekomendasi hasil pemeriksaan dengan implementasinya di lapangan. Kedua, belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, serta pemeriksaan oleh BPK dan APIP. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya koordinasi, komitmen, dan kesadaran perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola.

Selain itu, masih terdapat permasalahan berupa belum optimalnya pemenuhan kebijakan teknis pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan pedoman pengawasan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah, sehingga tujuan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan belum tercapai secara maksimal.

2.2.2. Isu Strategis

Perumusan isu strategis pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Isu Strategis pada Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pokok yang dihadapi Inspektorat Daerah adalah belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas, dan kolaboratif. Hal ini mencerminkan bahwa proses pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai kendala mendasar, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Isu strategis yang muncul dari permasalahan tersebut adalah belum optimalnya penguatan integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh masih belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan, tetapi juga

disebabkan oleh keterbatasan implementasi kebijakan teknis pengawasan. Akibatnya, rekomendasi hasil pemeriksaan sering kali belum dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga berpotensi menurunkan tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan akuntabilitas keuangan, serta rekomendasi BPK dan APIP menunjukkan masih adanya celah tata kelola yang dapat menghambat peningkatan akuntabilitas kinerja. Serta hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum dapat berdampak dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah. Hal ini menjadi isu strategis karena menyangkut kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas pemerintah daerah.

Lebih jauh, belum optimalnya pemenuhan kebijakan teknis pengawasan memperlihatkan belum adanya sistem pengawasan yang benar-benar terintegrasi dengan sistem pemerintahan digital. Dalam era transformasi digital, pengawasan berbasis data dan teknologi informasi merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan efektivitas serta efisiensi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan integritas, percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis digital menjadi isu strategis yang perlu dirumuskan dalam perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025–2029.

b) Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional)

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda pembangunan global yang telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pencapaian SDGs merupakan agenda nasional sekaligus daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dalam kerangka pelaksanaan SDGs, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan

penting pada Pilar Hukum dan Tata Kelola, yang memiliki keterkaitan erat dengan Tujuan 16 SDGs yaitu Mewujudkan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*). Pilar ini menekankan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas kinerja, pemberantasan korupsi, serta penguatan kelembagaan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan responsif.

Beberapa isu strategis Inspektorat Daerah yang terkait pada Pilar Hukum dan Tata Kelola dapat dirumuskan sebagai isu global antara lain adalah:

1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
Masih terdapat kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian internal yang berimplikasi pada meningkatnya risiko penyalahgunaan anggaran dan rendahnya efektivitas program pembangunan.
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum sepenuhnya konsisten di seluruh perangkat daerah, sehingga menuntut penguatan fungsi evaluasi kinerja berbasis hasil untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan target SDGs.
3. Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas Aparatur
Masih terdapat potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Inspektorat Daerah dituntut untuk memperkuat upaya pencegahan, pembinaan, serta pengawasan berbasis risiko.
4. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Kompetensi dan profesionalisme APIP masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penerapan audit berbasis risiko, pemanfaatan teknologi pengawasan, dan pemahaman isu pembangunan berkelanjutan.
5. Pemanfaatan Teknologi dalam Sistem Pengawasan
Digitalisasi pengawasan internal masih terbatas. Pemanfaatan aplikasi, data terintegrasi, dan sistem monitoring berbasis teknologi perlu diperluas guna mendukung transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengawasan.
6. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pengawasan
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah masih rendah. Padahal, partisipasi publik merupakan salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang inklusif sesuai amanat SDGs.

Selain itu pada penerapan Standar Global Internal Audit 2024 membawa konsekuensi strategis bagi fungsi pengawasan, khususnya bagi auditor internal di lingkungan pemerintahan daerah.

Standar ini tidak lagi menempatkan auditor internal sebatas penyedia *assurance*, tetapi menuntut kompetensi yang lebih luas dalam bidang *strategic advisory* dan pelaksanaan *risk-based audit*. Artinya, auditor internal harus mampu bertransformasi menjadi mitra strategis manajemen dalam memberikan rekomendasi yang bernilai tambah, sekaligus memastikan bahwa setiap proses pengawasan berorientasi pada risiko yang paling kritikal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Bagi inspektorat daerah, perubahan standar ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Auditor dituntut untuk memiliki kapasitas analitis yang lebih mendalam, keterampilan komunikasi strategis, serta pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen risiko dan tata kelola. Kemampuan dalam memberikan *advisory* yang bersifat strategis akan memperkuat posisi inspektorat sebagai penggerak peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah, bukan hanya sebagai pihak yang mengidentifikasi kelemahan. Sementara itu, penerapan *risk-based audit* menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa sumber daya pengawasan difokuskan pada area yang memiliki potensi risiko tinggi dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kesenjangan kompetensi auditor internal dalam dua aspek tersebut yaitu *strategic advisory* dan *risk-based audit* menjadi isu strategis yang harus segera diatasi melalui program peningkatan kapasitas, sertifikasi profesional, serta modernisasi metodologi pengawasan. Tanpa upaya yang terarah, inspektorat berisiko tertinggal dalam mengikuti standar global, sehingga efektivitas pengawasan tidak maksimal dan nilai tambah bagi tata kelola daerah menjadi terbatas.

Sedangkan isu nasional didasarkan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sekaligus sebagai fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan. Di dalam RPJMN dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam

delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu perubahan kepemimpinan pemerintahan membawa dinamika baru dalam tata kelola, kebijakan, dan arah pembangunan. Dalam konteks tersebut, ekspektasi terhadap peran pengawasan internal semakin meningkat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuntut agar aparat pengawasan tidak lagi sekadar menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan (*compliance*), melainkan juga berperan aktif dalam memberikan aspek *strategic*, *insight*, dan *foresight* sebagaimana ditekankan dalam agenda AAPI 2024.

Dari aspek *strategic*, pengawasan internal diharapkan mampu memastikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan perangkat daerah selaras dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inspektorat tidak hanya mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga memetakan area risiko strategis serta memberikan rekomendasi perbaikan yang

mendorong efektivitas pencapaian tujuan pembangunan. Dengan demikian, pengawasan berperan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berorientasi hasil.

Pada aspek *insight*, pengawasan internal dituntut mampu menghasilkan analisis mendalam yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Auditor internal harus dapat menginterpretasikan data, tren, dan temuan audit menjadi informasi yang bernilai tambah, bukan sekadar laporan formalitas. *Insight* ini menjadi penting agar pimpinan daerah memperoleh gambaran komprehensif tentang kondisi tata kelola dan mampu melakukan intervensi kebijakan secara tepat.

Sedangkan pada aspek *foresight*, bahwa agar pengawasan internal berfungsi sebagai radar dini yang mampu mengantisipasi risiko di masa depan. Hal ini mencakup kemampuan proyeksi terhadap dinamika lingkungan strategis, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, hingga potensi risiko sosial-ekonomi. Dengan *foresight*, inspektorat dapat memberikan peringatan dini dan rekomendasi preventif, sehingga permasalahan dapat diminimalisir sebelum menjadi krisis yang mengganggu keberlanjutan pembangunan.

Isu strategis yang muncul adalah masih adanya kesenjangan kapasitas auditor dalam memenuhi tiga peran tersebut, baik dari sisi sumber daya manusia, metodologi, maupun dukungan teknologi. Tanpa transformasi kapasitas, inspektorat berisiko hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif, bukan strategis. Oleh karena itu, langkah prioritas yang perlu diambil meliputi penguatan kompetensi strategis auditor, pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis data, serta penyusunan kerangka kerja pengawasan yang adaptif terhadap dinamika kebijakan pemerintahan.

c) **Potensi daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan**

Kota Pekalongan dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi unggulan di bidang industri kreatif, khususnya batik, perikanan tangkap dan budidaya, serta perdagangan dan jasa. Potensi ini menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam perspektif kewenangan Inspektorat Daerah, pengelolaan potensi tersebut lebih ditekankan pada aspek tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan pengawasan agar pemanfaatan potensi daerah berjalan efektif, efisien, serta berkeadilan.

Pertama, potensi besar yang dapat dikembangkan adalah penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Melalui

pembinaan dan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Daerah berperan strategis dalam memastikan program pembangunan daerah, seperti pengembangan UMKM batik, revitalisasi kawasan pesisir, dan peningkatan layanan publik benar-benar selaras dengan perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Kedua, Kota Pekalongan memiliki potensi dalam penguatan sistem pengendalian internal pemerintah. Dengan perputaran ekonomi daerah yang tinggi, terutama dari sektor batik dan perikanan, risiko penyalahgunaan keuangan dan inefisiensi program perlu diantisipasi. Inspektorat Daerah berperan untuk mengembangkan mekanisme pengawasan berbasis risiko, memperkuat *early warning system*, serta mendorong penerapan teknologi informasi dalam audit dan pengawasan. Upaya ini penting untuk menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Ketiga, terdapat potensi besar dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Melalui peningkatan kompetensi SDM, penguatan metodologi audit, serta optimalisasi fungsi konsultasi, Inspektorat Daerah dapat memberikan nilai tambah bagi layanan perangkat daerah dalam perbaikan tata kelola. Peningkatan kapabilitas APIP ini sejalan dengan agenda nasional untuk mewujudkan pengawasan yang tidak hanya bersifat kepatuhan (*compliance*), tetapi juga kinerja (*performance*), sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dengan demikian, potensi daerah Kota Pekalongan dalam kewenangan Inspektorat Daerah terletak pada penguatan sistem tata kelola, pengendalian internal, dan akuntabilitas kinerja. Optimalisasi potensi tersebut menjadi prasyarat penting untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Tabel II- 6. Isu Strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Belum optimalnya kualitas layanan publik yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah	-	1. Pilar Hukum dan Tata Kelola, yang memiliki keterkaitan dengan Tujuan 16 SDGs: Mewujudkan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (<i>Peace, Justice, and Strong Institutions</i>)	1. Implementasi asta cita dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pengawas intern untuk menjadi <i>trusted advisor</i> bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi	Kualitas penyelenggaraan layanan publik urusan pengawasan di Inspektorat Daerah yang belum optimal
Pengembangan mekanisme pengawasan berbasis risiko, memperkuat <i>early warning system</i> , serta mendorong penerapan teknologi informasi dalam audit dan pengawasan	Penanaman budaya pengendalian di lingkungan kerja, pemahaman risiko, serta implementasi monitoring dan evaluasi yang belum berjalan konsisten	-	2. Standar Global Internal Audit 2024 menuntut auditor internal untuk memiliki kompetensi dalam <i>Strategic Advisory</i> dan <i>risk-based audit</i>	2. Ekspektasi Kepala Pemerintahan pada peran pengawasan internal berupa aspek <i>strategic, insight & foresight</i> (AAPI 2024)		Belum optimalnya penanaman budaya pengendalian di lingkungan kerja, pemahaman risiko serta belum kuatnya budaya integritas di lingkungan perangkat daerah
Melalui pembinaan dan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai upaya memastikan program	Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP belum memberikan dampak optimal	-			Pengawasan bermanfaat memberikan wawasan baru yang strategis dan tinjauan	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum sepenuhnya konsisten

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
pembangunan daerah selaras dengan perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas	atas kinerja pada perangkat daerah				ke depan dengan berbagai alternatif (<i>foresight</i>) untuk kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Daerah	di seluruh perangkat daerah
Peningkatan kompetensi SDM, penguatan metodologi audit, serta optimalisasi fungsi konsultasi dapat memberikan nilai tambah bagi layanan perangkat daerah dalam perbaikan tata kelola	Perkembangan era transformasi digital, pengawasan berbasis data dan teknologi informasi merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan efektivitas serta efisiensi tata kelola pemerintahan	-				Kualitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat <i>compliance</i> (kepatuhan), tetapi juga <i>performance</i> (kinerja)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan / sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, perumusan tujuan strategis diarahkan untuk memperkuat peran Inspektorat sebagai mitra kerja perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan keuangan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Dengan landasan tersebut, ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis utama yang mencerminkan arah pengembangan organisasi, yaitu peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Tujuan 1: Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Publik.

Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah daerah sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, transparan, serta sesuai ketentuan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Upaya pencapaian tujuan ini ditempuh melalui peningkatan kesadaran risiko, penguatan fungsi pengawasan melekat, pembinaan berkelanjutan terhadap perangkat daerah dalam implementasi SPIP, penguatan kapasitas SDM aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan standar layanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan perangkat daerah dan masyarakat. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut diukur dengan nilai level Maturitas SPIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Inspektorat Daerah. Nilai level Maturitas SPIP yang mencerminkan sejauh mana perangkat daerah mampu membangun, menerapkan, dan mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif. Semakin tinggi nilai maturitas, semakin baik pula kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan semakin tinggi capaian IKM, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap kinerja Inspektorat sebagai lembaga pengawas yang profesional, modern, dan akuntabel

Peningkatan kualitas layanan publik memberikan landasan bagi terbentuknya kepercayaan masyarakat serta kepuasan perangkat daerah terhadap peran Inspektorat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam memperkuat implementasi sistem pengendalian internal. Sebaliknya, keberhasilan dalam meningkatkan maturitas SPIP akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dengan

demikian tujuan tersebut membentuk siklus yang berkelanjutan, yaitu layanan publik yang berkualitas mendorong implementasi pengendalian internal yang lebih baik, sementara pengendalian internal yang kuat memperkuat kepercayaan dalam tata kelola pemerintahan.

3.2. Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025–2029, ditetapkan sejumlah sasaran yang lebih terukur dan operasional. Sasaran ini menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan, dengan indikator kinerja yang jelas serta target yang ditetapkan setiap tahun. Dengan adanya sasaran tersebut, arah pembangunan pembinaan dan pengawasan internal dapat lebih fokus, konsisten, dan dapat diukur capaian keberhasilannya.

Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran tersebut diukur melalui **Nilai SAKIP OPD** pada Inspektorat Daerah. Pencapaian sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan setiap perangkat daerah memiliki sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terarah, transparan, dan berorientasi pada hasil, termasuk bagi Inspektorat Daerah. Melalui pembinaan dan evaluasi SAKIP yang berkelanjutan, Inspektorat Daerah berupaya meningkatkan keselarasan antara program dengan tujuan pembangunan daerah, sehingga kinerja setiap perangkat daerah dapat semakin akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan prinsip *good governance*, sehingga perangkat daerah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Pekalongan.

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan

Sasaran tersebut dengan indikator kinerja berupa **Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Kapabilitas APIP)**. Sasaran ini menekankan pentingnya peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah yang profesional dan kompeten. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan metodologi pengawasan berbasis risiko, serta sertifikasi dan pelatihan auditor internal. Dengan target mempertahankan Kapabilitas APIP pada Level 3, Inspektorat tidak hanya berperan sebagai pengawas kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekalongan.

Dengan dua sasaran utama tersebut, Inspektorat Daerah Kota Pekalongan berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas serta berintegritas.

Tabel III- 1 Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah daerah dalam rangka Meningkatkan kualitas layanan publik		Maturitas SPIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan	Kapabilitas APIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	
			IKM OPD	90.44	90.54	90.64	90.74	90.84	90.94	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	84.70	84.75	84.80	84.85	84.90	85.00	

3.3. Strategi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, strategi pembangunan lima tahun ke depan diarahkan pada penguatan kualitas layanan publik, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, penguatan sistem pengendalian internal pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan.

Pada tujuan **meningkatkan kualitas layanan publik**, strategi ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur Inspektorat, pengembangan sistem layanan berbasis digital, serta penyempurnaan standar pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh perangkat daerah maupun masyarakat.

Selanjutnya, untuk tujuan **meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah daerah**, strategi pembangunan dititikberatkan pada penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah. Strategi ini meliputi peningkatan kesadaran risiko di lingkungan pemerintah daerah, pengembangan mekanisme pengendalian berbasis teknologi, serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi agar SPIP dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

Pada sasaran **meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**, strategi diarahkan pada peningkatan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja, optimalisasi fungsi evaluasi akuntabilitas secara berkala, serta integrasi sistem pengendalian internal dengan sistem akuntabilitas kinerja.

Sedangkan untuk sasaran **meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan**, strategi difokuskan pada peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melalui pemenuhan standar kompetensi auditor, sertifikasi, dan penguatan kelembagaan. Strategi lain yang ditempuh meliputi pengembangan metodologi pengawasan berbasis risiko (*risk based audit*), penerapan konsultasi yang konstruktif, serta penguatan koordinasi dengan BPKP, KPK, dan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan.

Tabel III- 2. Strategi Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
	1	2	3	4	5
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berakarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital	Penguatan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi kinerja, integritas, manajemen talenta, transformasi arsitektur dan kolaborasi digital, BMD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)	Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan pendekatan partisipatif dan transparansi publik, pengelolaan layanan digital, mitigasi risiko korupsi, pemutakhiran data dan optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta penguatan corporate university dalam pengembangan ASN yang mendukung perwujudan ekonomi sirkular dan Pembangunan yang berkelanjutan	Penguatan tata kelola SDM, keuangan daerah, dan optimalisasi pengamanan BMD untuk mendukung Pembangunan infrastruktur daerah	Optimalisasi perwujudan profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta perwujudan single platform digital dalam rangka perwujudan Fondasi Mina Batik
Strategi Renstra OPD	Pengawasan dan pembinaan yang berdampak dalam mengoptimalkan pengusulan unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	Pengawasan dan pembinaan yang berdampak dalam mengoptimalkan pengusulan unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	Pengawasan dan pembinaan yang berdampak dalam mengoptimalkan pengusulan unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	Pengawasan dan pembinaan yang berdampak dalam mengoptimalkan pengusulan unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	Pengawasan dan pembinaan yang berdampak terwujudnya zona integritas di lingkungan pemerintah kota pekalongan.
	Penguatan kebijakan dan regulasi integritas yang mendukung pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.	Peningkatan pemahaman SDM tentang nilai-nilai integritas bagi pegawai di Pemerintah Kota Pekalongan.	Mengoptimalkan hasil Survei Penilaian Integritas dalam mitigasi (pencegahan) resiko korupsi di Pemerintah Kota Pekalongan.	Mendorong perbaikan tata kelola perangkat daerah dalam mendukung pengendalian internal dan penegakan integritas	Terwujudnya perbaikan tata kelola dan penguatan pengendalian internal yang menunjukkan peningkatan nilai integritas di Pemerintah Kota Pekalongan.

3.4. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Dalam mendukung pencapaian strategi tersebut, arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan pada periode 2025–2029 difokuskan pada langkah-langkah implementatif yang berkesinambungan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka **meningkatkan kualitas layanan publik**, arah kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi; digitalisasi layanan pengawasan dan konsultasi; penyusunan standar operasional prosedur (SOP) layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat; serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik sebagai sarana evaluasi dan peningkatan mutu layanan.

Pada tujuan **meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah daerah**, arah kebijakan difokuskan pada percepatan peningkatan nilai maturitas SPIP melalui penguatan kapasitas perangkat daerah dalam manajemen risiko, pembenahan proses bisnis internal pemerintah daerah, serta penerapan aplikasi pendukung yang dapat mempermudah proses pengendalian internal. Selain itu, arah kebijakan juga mencakup pendampingan intensif, evaluasi rutin, serta sinergi dengan instansi pembina dalam rangka memperkuat implementasi SPIP di setiap perangkat daerah.

Untuk sasaran **meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah**, arah kebijakan meliputi penguatan peran Inspektorat sebagai *quality assurance* dalam implementasi SAKIP OPD termasuk bagi peningkatan SAKIP OPD Inspektorat Daerah, penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi berdasarkan capaian akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Sedangkan untuk sasaran **meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan**, arah kebijakan ditetapkan pada penyusunan *roadmap* peningkatan kapabilitas APIP, walaupun diupayakan untuk tetap kapabilitas APIP berada pada Level 3. Penerapan audit berbasis risiko untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, penguatan peran APIP sebagai mitra strategis perangkat daerah, serta pembenahan tata kelola internal Inspektorat agar semakin profesional, independen, dan berintegritas.

Tabel III- 3. Arah Kebijakan Renstra

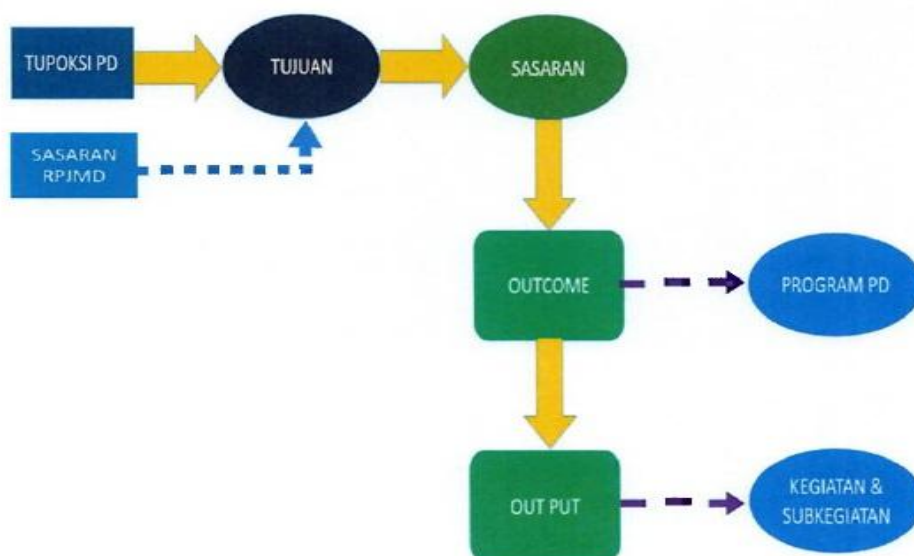
NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4
	Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah daerah dalam rangka Meningkatkan kualitas layanan publik	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* yang nomenklaturnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.

Adapun kerangka dasar dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 4. 1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra



Proses perumusan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 diawali dari Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi PD) Inspektorat Daerah serta keterkaitannya dengan Sasaran RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, yang menjadi landasan utama dalam merumuskan arah pembangunan. Kedua aspek ini berfungsi sebagai pijakan awal untuk menetapkan tujuan Inspektorat Daerah sesuai mandat dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Selanjutnya, dari tujuan yang ditetapkan, diturunkan menjadi sasaran yang lebih spesifik. Sasaran ini merupakan hasil antara yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah dalam periode perencanaan, sekaligus sebagai penghubung

antara tujuan yang bersifat umum dengan hasil nyata yang diharapkan. Dengan demikian, sasaran menjadi titik kunci dalam menjembatani kebijakan yang bersifat makro dengan rencana aksi yang lebih operasional.

Tahapan berikutnya adalah penjabaran sasaran ke dalam *Outcome* yang bersifat lebih terukur, yang menunjukkan hasil jangka menengah dari pelaksanaan kebijakan dan program. *Outcome* tersebut kemudian dipetakan ke dalam Program Perangkat Daerah (Program PD) sebagai wadah strategis yang menjadi arah bagi penyusunan kegiatan dan subkegiatan. Setiap program yang dirumuskan harus mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian *outcome* yang telah ditetapkan.

Akhirnya, program perangkat daerah tersebut dijabarkan menjadi *Output* yang diwujudkan melalui Kegiatan dan Subkegiatan. Dengan demikian, kerangka perumusan ini menggambarkan hubungan logis dan sistematis antara tupoksi perangkat daerah, tujuan, sasaran, *outcome*, program, hingga kegiatan dan subkegiatan sebagai bentuk nyata implementasi Renstra.

Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan ini disusun dan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Hal ini dikarenakan bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, yaitu sebagai pijakan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2030.

4.1 Uraian Program

Dalam kerangka pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025–2029, program-program yang dirumuskan menjadi instrumen utama pencapaian sasaran dan tujuan strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan. Setiap program diarahkan secara spesifik, namun saling berkontribusi terhadap pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini ditujukan untuk memastikan terselenggaranya fungsi administratif dan penunjang bagi seluruh perangkat daerah. Indikator keberhasilan meliputi:

- a) Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah;
- b) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
- c) Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah.

Melalui capaian indikator tersebut, program ini berkontribusi langsung terhadap sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, karena akuntabilitas hanya dapat terwujud bila laporan kinerja tersedia dengan baik, layanan administrasi berjalan lancar, serta pengelolaan aset dilakukan secara transparan. Selanjutnya, sasaran ini mendukung tujuan meningkatkan kualitas layanan publik, sebab pelayanan publik yang prima bergantung pada tertib administrasi dan tata kelola internal yang baik

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus utama program ini adalah pengawasan dan evaluasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Indikator yang digunakan antara lain:

- a) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selesai ditindaklanjuti; dan
- b) Persentase temuan hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang selesai ditindaklanjuti.

Program ini mendorong perbaikan berkelanjutan dengan memastikan bahwa setiap hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti. Hal tersebut memperkuat sasaran meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tujuan meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Program ini berorientasi pada aspek pencegahan, dengan memberikan dukungan kebijakan, asistensi, dan pendampingan agar perangkat daerah lebih siap mengelola risiko tata kelola. Indikator yang digunakan adalah Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD), yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun sistem antikorupsi. Dengan adanya kebijakan yang tepat dan asistensi yang memadai, program ini memperkuat sasaran meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan, sekaligus mendukung tujuan meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel IV- 1. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Tercapainya keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	6,567,400,000	100	6,406,601,000	100	6,406,601,000	100	6,406,601,000	100	6,406,601,000	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	150,457,000	100	150,457,000	100	150,457,000	100	150,457,000	100	150,457,000	
Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	6	37,030,000	6	37,030,000	6	37,030,000	6	37,030,000	7	37,030,000	
Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	1,435,000	2	1,435,000	2	1,435,000	2	1,435,000	2	1,435,000	
Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	11	15	22	111,992,000	22	111,992,000	22	111,992,000	22	111,992,000	22	111,992,000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	6,416,943,000	100	6,256,144,000	100	6,256,144,000	100	6,256,144,000	100	6,256,144,000	
Sub keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36	39	39	6,370,443,000	39	6,209,644,000	39	6,209,644,000	39	6,209,644,000	39	6,209,644,000	
Sub keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sub keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	1,891,496,000	100	1,891,496,000	100	1,891,496,000	100	1,891,496,000	100	1,891,496,000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100	100	765,500,000	100	765,500,000	100	765,500,000	100	765,500,000	100	765,500,000	
Sub Keg Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	2	9,500,000	2	9,500,000	2	9,500,000	2	9,500,000	2	9,500,000	
Sub Keg Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	26	26	27	6,000,000	27	6,000,000	27	6,000,000	27	6,000,000	27	6,000,000	
Sub Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	36	36	36	750,000,000	36	750,000,000	36	750,000,000	36	750,000,000	36	750,000,000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	711,496,000	100	711,496,000	100	711,496,000	100	711,496,000	100	711,496,000	
Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	
Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	376,696,000	4	376,696,000	4	376,696,000	4	376,696,000	4	376,696,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sub Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	
Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Ijumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	55,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	
Sub Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	12,500,000	2	12,500,000	2	12,500,000	2	12,500,000	2	12,500,000	
Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	1,300,000	2	1,300,000	2	1,300,000	2	1,300,000	2	1,300,000	
Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDFormulasi	Laporan	90	90	90	250,000,000	90	250,000,000	90	250,000,000	90	250,000,000	90	250,000,000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	414,500,000	100	414,500,000	100	414,500,000	100	414,500,000	100	414,500,000	
Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	3,500,000	4	3,500,000	4	3,500,000	4	3,500,000	4	3,500,000	
Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	366,000,000	12	366,000,000	12	366,000,000	12	366,000,000	12	366,000,000	
Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	7,111,547,000	100	7,111,547,000	100	7,111,547,000	100	7,111,547,000	100	7,111,547,000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	338,616,000	100	338,616,000	100	338,616,000	100	338,616,000	100	338,616,000	
Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	17	17	144,000,000	17	144,000,000	17	144,000,000	17	144,000,000	17	144,000,000	
Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	2	144,616,000	2	144,616,000	2	144,616,000	2	144,616,000	2	144,616,000	
Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	46	70	80	50,000,000	85	50,000,000	90	50,000,000	95	50,000,000	100	50,000,000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	6,772,931,000	100	6,772,931,000	100	6,772,931,000	100	6,772,931,000	100	6,772,931,000	
Sub Keg Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan yang Disediakan	unit	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Sub Keg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	1	1	6,772,931,000	1	6,772,931,000	1	6,772,931,000	1	6,772,931,000	1	6,772,931,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tercapainya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selesai ditindaklanjuti	persen	59.72	80.00	81	230,000,000	82	230,000,000	83	230,000,000	84	230,000,000	85	230,000,000	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terwujudnya Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	persen	100	100	100	230,000,000	100	230,000,000	100	230,000,000	100	230,000,000	100	230,000,000	
Sub Keg Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	10	33	97	50,000,000	97	50,000,000	97	50,000,000	97	50,000,000	97	50,000,000	
Sub Keg Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	118	150	42	50,000,000	42	50,000,000	42	50,000,000	42	50,000,000	42	50,000,000	
Sub Keg Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	98	57	71	50,000,000	71	50,000,000	71	50,000,000	71	50,000,000	71	50,000,000	
Sub Keg Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	110	107	97	50,000,000	97	50,000,000	97	50,000,000	97	50,000,000	97	50,000,000	
Sub Keg Kerja Sama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	3	2	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tercapainya temuan hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang selesai ditindaklanjuti	Persentase temuan hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang selesai ditindaklanjuti	persen	46.34	50.00	53	70,000,000	55	70,000,000	57	70,000,000	60	70,000,000	65	70,000,000	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	persen	100	100	100	70,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	
Sub Keg Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	3	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	
Sub Keg Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	13	12	55,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tercapainya Indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD)	Indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD)	Indeks	96,03	96	96.05	500,000,000	96.25	350,000,000	96.5	350,000,000	96.75	350,000,000	97	350,000,000	
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya OPD yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Persentase OPD yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	persen	100	100	100	500,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	
Sub Keg Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat daerah	30	30	30	150,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	
Sub Keg Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	10	21	21	100,000,000	21	100,000,000	21	100,000,000	21	100,000,000	21	100,000,000	
Sub Keg Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	15	19	19	100,000,000	19	100,000,000	19	100,000,000	19	100,000,000	19	100,000,000	
Sub Keg Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	Perangkat daerah	3		3	150,000,000		-		-		-		-	

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 bahwa tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan RPJMD merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah yaitu secara cascading kinerja mendukung pada Tujuan 1 yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945*. Tujuan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan misi 1, yaitu *Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945*. Tujuan RPJMD tersebut diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tujuan tersebut, sasaran RPJMD yang dirumuskan adalah *Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital*. Sasaran tersebut diukur dengan indikator sasaran salah satunya berupa Indeks Integritas Nasional (IIN).

Tabel IV- 2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terpenuhinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan saran temuan dan rekomendasi		
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Sub Keg Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Sub Keg Reviu Laporan Kinerja	
			Sub Keg Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Sub Keg Reviu Laporan Keuangan	
			Sub Keg Kerja Sama Pengawasan Internal	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terpenuhinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) PPengawasan dengan Tujuan Tertentu yang sesuai dengan saran temuan dan rekomendasi		
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Sub Keg Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			Sub Keg Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tercapainya Indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD) sesuai dengan yang di targetkan		
			Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	
			Sub Keg Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	
			Sub Keg Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan	
			Sub Keg Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	

Kegiatan program di Inspektorat Daerah pada dasarnya memiliki peran yang erat kaitannya dengan upaya mendukung peningkatan Indeks Integritas Nasional (IIN). Hal ini dikarenakan fungsi utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah memastikan tata kelola

pemerintahan daerah berjalan secara akuntabel, transparan, serta sesuai dengan prinsip integritas.

Pertama, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah berkontribusi langsung terhadap pencegahan praktik penyimpangan dan korupsi. Melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring maupun bentuk pengawasan lainnya, Inspektorat Daerah dapat mendeteksi potensi permasalahan sejak dini, memberikan rekomendasi perbaikan, serta mendorong perangkat daerah untuk menjalankan tata kelola pemerintahan sesuai aturan. Dengan demikian, kegiatan ini sejalan dengan dimensi upaya pencegahan dalam kerangka integritas nasional.

Kedua, Inspektorat Daerah juga melaksanakan kegiatan pembinaan, pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah. Kegiatan ini penting karena tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga edukatif dalam berbagai upaya perbaikan tata kelola. Pembinaan, pendampingan dan asistensi berfokus pada peningkatan pemahaman aparatur terkait integritas, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Hal ini berkontribusi pada penguatan budaya integritas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan peningkatan indeks pencegahan korupsi daerah, yang menjadi indikator penting dalam penilaian Indeks Integritas Nasional (IIN).

Ketiga, melalui penguatan kapabilitas APIP dan penerapan manajemen risiko, Inspektorat Daerah mampu meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih proaktif. Kegiatan pengembangan kapasitas auditor internal, sertifikasi, hingga penerapan teknologi pengawasan berbasis digital mendukung transparansi dan akuntabilitas. Upaya tersebut memberi dampak sistemik terhadap perbaikan tata kelola, sehingga secara tidak langsung mendorong peningkatan skor IIN bagi Pemerintah Kota Pekalongan.

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama pembangunan Inspektorat Daerah

Tabel IV- 3 Indikator Utama Pembangunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Integritas Nasional	angka	82.42	82.42	82.92	83.42	83.92	84.42	84.92	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 diukur melalui tiga indikator kinerja utama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD, Nilai SAKIP OPD, serta Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Masing-masing indikator mencerminkan kualitas layanan pengawasan, akuntabilitas kinerja, serta kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel IV- 4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	IKM OPD	Indeks	92.26	90.44	90.54	90.64	90.74	90.84	90.94	
2	Nilai SAKIP OPD	Nilai	87.5	84.7	84.75	84.8	84.85	84.9	85	
3	Kapabilitas APIP	Level	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	

1. IKM OPD (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Inspektorat Daerah)

Target IKM OPD pada tahun 2025 dimulai dari 90.44 dan meningkat secara konsisten hingga 90,94 pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Inspektorat Daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan responsivitas

perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya. Kenaikan yang terukur setiap tahun juga mengindikasikan adanya strategi perbaikan berkelanjutan yang menitikberatkan pada efisiensi, transparansi, dan integritas layanan.

2. Nilai SAKIP OPD (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Inspektorat Daerah)

Nilai SAKIP OPD ditargetkan dari 84,7 pada tahun 2025 menjadi 85 pada tahun 2030. Kenaikan ini memang relatif kecil, namun mencerminkan fokus pada konsolidasi kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang lebih akurat dan efektif. Artinya, target SAKIP diarahkan untuk mempertahankan kualitas akuntabilitas yang sudah tinggi, sembari melakukan penguatan kelembagaan agar hasil pengawasan semakin berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan.

3. Kapabilitas APIP

Target kapabilitas APIP ditetapkan pada level 3 sepanjang periode 2025–2030. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah menargetkan konsistensi pada level kapabilitas “terdefinisi” sesuai standar BPKP, di mana fungsi pengawasan sudah mampu memberikan *assurance*, *consulting*, dan evaluasi dengan kerangka kerja yang sistematis. Fokus capaian ini adalah mempertahankan standar kualitas audit dan pengawasan yang mapan, serta memperkuat sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal daerah agar tetap terjaga.

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya indikator kinerja kunci sebagai tolok ukur capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan demikian IKK berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang memastikan setiap perangkat daerah memiliki ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik sebagai laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel IV- 5. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	

Inspektorat Daerah Kota Pekalongan terdapat rumusan 1 (satu) IKK, yaitu Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang ditetapkan pada nilai Indeks Level 3 secara konsisten sepanjang periode Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Penetapan ini menegaskan komitmen Inspektorat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan pengendalian internal serta peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV- 6. Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
N I H I L										

4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel IV- 7. Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
N I H I L										

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan mulai dari Tahun 2025 sampai dengan 2029, serta pada tahun 2030 yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.

Inspektorat Daerah Kota Pekalongan akan melakukan Upaya optimal untuk mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan melalui pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Melalui rumusan Rencana Strategis ini, Inspektorat Daerah Kota Pekalongan telah mempersiapkan diri untuk berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

SDM Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini guna menunjang terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pekalongan.

Pekalongan, 19 September 2025

Plt. Inspektur
Kota Pekalongan



SRI MULYANI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 196710031997032001



**PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN**



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DPUPR



Tahun 2025-2029

kota pekalongan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyiapkan Rencana Strategis.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran-saran dan masukan dari semua pihak.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 19 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKALONGAN



DAMONIC SUGIARTO, ST.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710304 199903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.4. Kinerja Keuangan DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	22
2.1.5. Kelompok sasaran layanan	28
2.1.6. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan.....	28
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	29
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.2.2. Isu Strategis	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	35
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	35
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	36
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
4.1 Uraian Program.....	39
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	41
4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	68
4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan.....	72
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	73
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	73
4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	74
4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	75
BAB V PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jumlah Pegawai dan Tenaga Kontrak DPUPR Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	17
Tabel II. 2 Jumlah Pegawai DPUPR Berdasarkan Pangkat/Golongan	17
Tabel II. 3 Jumlah Sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan.....	17
Tabel II. 4 Pencapaian Kinerja Sasaran dan Program Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan.....	20
Tabel II. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan	22
Tabel II. 6 Isu Strategis PD	32
Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan	35
Tabel III. 2 Strategi Renstra PD	36
Tabel III. 3 Arah Kebijakan Renstra DPUPR Kota Pekalongan.....	38
Tabel IV. 1 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan	41
Tabel IV. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	68
Tabel IV. 3 Indikator Kinerja Utama Pembangunan	72
Tabel IV. 4 Indikator Kinerja Utama PD	73
Tabel IV. 5 Indikator Kinerja Kunci.....	73
Tabel IV. 6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	74
Tabel IV. 7 Indikator yang mendukung Renstra Kementerian & Renstra Provinsi.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi DPUPR Kota Pekalongan.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program yang dilaksanakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan harus terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan perlu membuat suatu perencanaan yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan). Rencana Strategis ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut. Pada akhirnya keputusan tersebut harus dapat dievaluasi dan diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana teknis yang berada dibawah Pemerintah Kota Pekalongan dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pekalongan. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Pekalongan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senantiasa menghadapi tantangan akan peningkatan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Pekalongan sejalan dengan perkembangan Kota.

Pembangunan infrastruktur Kota Pekalongan tetap memperhatikan dan mempedomani visi dan misi Kota untuk menciptakan keseimbangan Kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Hasil reuiu Renja Perangkat Daerah oleh Inspektorat, menyangkut penyesuaian cascading kinerja dan Penambahan kegiatan baru akibat dari kebijakan Pusat dan Provinsi serta dalam kerangka percepatan capaian program pada renstra.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan DPUPR Kota Pekalongan untuk periode 5 (lima) tahun yang menurut tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk dalam isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun. Proses Penyusunan Renstra yaitu perumusan nilai-nilai strategis/ analisa stake holder, menentukan visi dan misi, analisa lingkungan (SWOT), menentukan isu strategis, strategis pelaksanaan program-program strategis, perumusan rencana aksi/ rencana kerja.

Keterkaitan Renstra DPUPR Kota Pekalongan dengan RPJMD antara lain mengenai menurunkan dampak bencana, baik rob, banjir, kebakaran, ataupun bencana lainnya; Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan; Meningkatkan kualitas pelayanan irigasi; Meningkatkan dan memperkuat daya tarik wisata Kota Pekalongan melalui pembangunan infrastruktur pendukung kepariwisataan serta penataan kawasan-kawasan strategis perkotaan;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015;
 25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19) ;
38. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud :
 - a. Sebagai dokumen induk perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
 - b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami tujuan, strategi dan arah kebijakan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan.

2. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Kota Pekalongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu Strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Program, Kegiatan, Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan meliputi perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan di bidang infrastruktur, pekerjaan umum, dan penataan ruang, bertujuan untuk mendukung pembangunan dan layanan publik di daerah. Pelayanan ini mencakup pengelolaan, perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur publik.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, bagian kedua Tugas dan Fungsi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bangunan.

DPUPR dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas

Tugas dan Fungsi

Tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sumber daya air;

- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang bina marga;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang cipta karya;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tata ruang dan bangunan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- h. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- i. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambaran Umum Satuan Kerja/ Sub Unit Badan Publik Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Tugas pokok dan fungsi:

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- e. pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban melaksanakan keuangan;
- f. melaksanakan fungsi akuntansi;
- g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
- h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
- i. mengelola data dan informasi;
- j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;

- e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja bidang sumber daya air;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang sumber daya air;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air dan sistem drainase;
- d. penyelenggaraan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah;
- e. penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sekunder dan tersier;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- g. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kebijakan di bidang bina marga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang bina marga;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang bina marga;

- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang bina marga;
- d. penyelenggaraan pengelolaan jalan di Daerah;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jembatan di Daerah;
- f. penyelenggaraan, pengelolaan peralatan di bidang kebinamargaan;
- g. penyelenggaraan pengujian laboratorium bina marga;
- h. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur pada permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan infrastruktur persampahan serta pembinaan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang Cipta Karya ;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang Cipta Karya ;
- c. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman;
- d. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah;
- e. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
- f. penyelenggaraan pengembangan sistem dan infrastruktur persampahan di Daerah;
- g. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- h. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
- i. penyelenggaraan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- j. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Bangunan

Bidang Tata Ruang dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kebijakan di bidang tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang tata ruang dan bangunan;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang tata ruang dan bangunan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang dan bangunan;
- d. penyelenggaraan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang daerah;
- h. penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- i. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
- j. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.

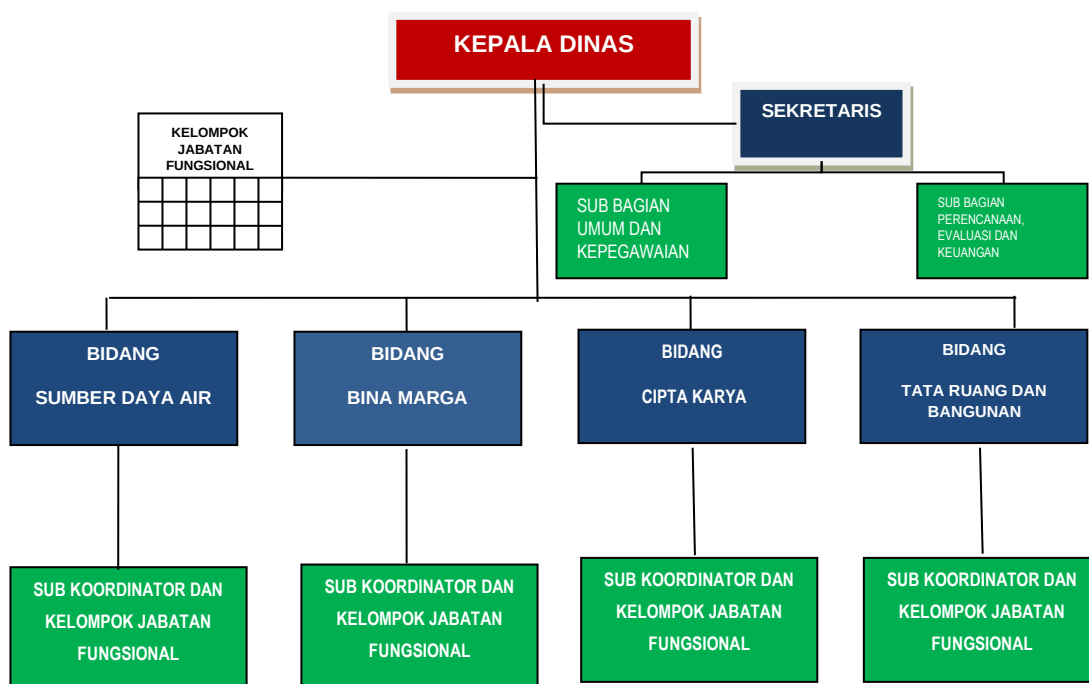
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.

Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dapat digambarkan pada Gambar pada halaman berikut:

Gambar II. 1 Struktur Organisasi DPUPR Kota Pekalongan



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan didukung dengan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan per 31 Desember 2024 mempunyai pegawai sebanyak 57 orang, terdiri dari 43 orang laki-laki dan 14 orang perempuan, serta didukung dengan

tenaga kontrak sebanyak 124 orang, terdiri dari 111 orang laki-laki dan 13 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II. 1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
DPUPR Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN						GENDER		TOTAL (ORANG)
		SD	SLTP	SLTA	D3	S-1	S-2	L	P	
1	SEKRETARIAT		1	10	2	12	1	19	7	26
2	BINA MARGA		1	3	3	10	1	15	3	18
3	SUMBER DAYA AIR	13	17	68	2	10	0	108	2	110
4	CIPTA KARYA			3	1	8	1	8	5	13
5	TATARUANG DAN BANGUNAN			4	0	10	1	7	8	15

Sumber DPUPR Kota Pekalongan, Agustus 2025

Tabel II. 2 Jumlah Pegawai DPUPR Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	NON ASN	
1	SEKRETARIAT	2	5	2	1	15	25
2	BINA MARGA	6	6	1	1	6	20
3	SUMBER DAYA AIR	8	9	0	0	94	109
4	CIPTA KARYA	0	4	2	0	7	13
5	TATARUANG DAN BANGUNAN	0	2	8	0	3	13

Sumber DPUPR Kota Pekalongan, Agustus 2025

Tabel II. 3 Prasarana dan Sarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Gedung Kantor	1	unit
2.	Gedung Workshop Bina Marga	1	unit
3.	Wheel Excavator	1	unit
4.	Crawler Excavator + Attachment	2	unit
5.	Dump Truck	1	unit
6.	Asphalt Mixing Plant	1	unit
7.	Macadam Roller / Three Wheel Roller (2 ½ - 4 ton)	2	unit
8.	Macadam Roller / Three Wheel Roller (6-8 ton)	4	unit
9.	Vibrator Roller	3	unit
10	Stamper	1	unit
11.	Concrete Mixer	4	unit

12.	Concrete Breaker	1	unit
13.	Loader Lain-lain	1	unit
14.	Truck Crane	1	unit
15.	Portable Compressor	1	unit
16.	Transportable Water Pump	7	unit
17.	Portable Water Pump	229	unit
18.	Stationary Water Pump	47	unit
19.	Sumersible Pump	38	unit
20.	Pompa Air	13	unit
21.	Jack	1	unit
22.	Station Wagon	3	unit
23.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	unit
24.	Pick Up	4	unit
25.	Sepeda Motor	23	unit
26.	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	4	unit
27.	Mobil Tinja	1	unit
28.	Truck Sampah	1	unit
29.	Gerobak Dorong	5	unit
30.	Angkutan Barang Lain-lain	2	unit
31.	Mesin Gerinda	2	unit
32.	Mesin Kompresor	1	unit
33.	Mesin Las Listrik	1	unit
34.	Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	3	unit
35.	Overhead Crane	6	unit
36.	Mesin Penghitung Uang	1	unit
37.	Lemari Besi/Metal	8	unit
38.	Lemari Kayu	22	unit
39.	Rak Besi	17	unit
40.	Filing Cabinet Besi	38	unit
41.	Brandkas	2	unit
42.	Lemari Kaca	1	unit
43.	White Board	4	unit
44.	Alat Penghancur Kertas	7	unit
45.	Mesin Absensi	7	unit
46.	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2	unit
47.	Meja Rapat	20	unit
48.	Kursi Rapat	149	unit
49.	Kursi Tamu	2	unit
50.	Kursi Putar	38	unit
51.	Kursi Lipat	21	unit
52.	Lemari Pakaian	1	unit
53.	Meja Tulis	4	unit
54.	Mesin Pemotong Rumput	16	unit
55.	Lemari Es	5	unit
56.	A.C. Window	22	unit
57.	A.C. Split	8	unit
58.	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	unit

59.	Treng Air/Tandon Air	2	unit
60.	Televisi	10	unit
61.	Sound System	16	unit
62.	Unit Power Supply	1	unit
63.	Camera Video	6	unit
64.	Camera film	1	unit
65.	Tiang Bendera	1	unit
66.	Tangga Aluminium	6	unit
67.	Dispenser	2	unit
68.	Handy Cam	5	unit
69.	Gordyin/Kray	8	unit
70.	Universal Testing Machine (Alat)	42	unit
71.	P.C Unit	16	unit
72.	Lap Top	37	unit
73.	Note Book	5	unit
74.	Hard Disk	5	unit
75.	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	unit
76.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	unit
77.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	unit

Sumber DPUPR Kota Pekalongan, 30 Juni 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 diperoleh dari menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Selengkapanya dapat dilihat pada Table 2.4

Tabel II. 4 Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra DPUPR					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Indeks kepuasan masyarakat			√	Indeks		77.62	77.87	78.12	78.37	N/A	83.65	84.40	85.72	85.50	N/A	107,76	108.51	109.73	103.65
2	Nilai Sakip OPD			√	Indeks		82.50	83.50	84.50	84.45	N/A	83.65	84.10	84.45	81.25	N/A	N/A	100.7	99.94	96.21
3	Persentase layanan pengelolaan air limbah domestik	√	√	√	Persen		N/A	90.76	90.97	91.18	N/A	N/A		105	90.65	N/A	N/A	N/A	115.42	99.42
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	√	√	√	Persen		98.40	98.60	98.80	100	N/A	N/A	99.69	100	74.13	N/A	N/A	101.08	101.21	74.13
5	Luas genangan banjir dan rob		√	√	Hektar		1537	1230	1027	909	N/A	N/A	980.14	880.83	379.02	N/A	N/A	79.68	116.59	239.83
6	Persentase luas Kawasan kota rawan banjir dan rob yang terlindungi oleh infrastruktur		√	√	Persen		66.89	73.5	77.88	80.42	N/A	N/A	33.93	77.88	91.83	N/A	N/A	46.16	100	114.19

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra DPUPR					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	pengendali banjir																			
7	Persentase penduduk yang mendapatkan akses layanan air minum	√	√	√	Persen		100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100
8	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	√	√	√	Persen		85,766	87,092	88,389	100	N/A	N/A	86.07	100	100	N/A	N/A	98.82	113.14	100
9	Persentase prasarana persampahan dalam kondisi baik			√			33.33	40.28	47.22	54.17	N/A	N/A	0	20	75.85	N/A	N/A	0	42.35	140.02
10	Pengembangan sarana persampahan			√	Persen		N/A	20	40	60	N/A	N/A	0	20	60	N/A	N/A	0	50	100
11	Persentase keterhubungan jalan			√	Persen		97.20	97.20	97.20	96.19	N/A	N/A	100	100	100	N/A	102.88	102.88	102.88	103.96
12	persentase peningkatan kemantapan jalan dan jembatan perkotaan		√	√	Persen		1,09	1,09	1,09	2.19	N/A	N/A	4.73	2.19	2.85	N/A	N/A	433	200.80	130.11
13	Jumlah regulasi bidang perencanaan tata ruang dan			√	Regulasi		4	6	7	7	N/A	N/A	1	3	3	N/A	N/A	16.66	42.85	42.85

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra DPUPR					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	pemanfaatan ruang																			
14	Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang			√	Persen		96.19	96.20	96.21	99.89	N/A	N/A	99.95	99.89	99.45	N/A	N/A	103.8	103.82	99.56

Sumber : DPUPR, 2025

2.1.4. Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Dari sisi kinerja keuangan selama kurun waktu 2020-2024, kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25,026.36	12,266.36	13,718.97	13,844.25	13,272.81	23,802.88	24,106.81	10,881.65	12,494.40	11,299.60	95.11	196.53	79.32	90.25	85.13	(10.59)	(12.08)
1	Pereencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.70	26.37	18.65	16.00	16.95	25.13	26.14	15.52	15.95	15.31	97.79	99.12	83.20	99.66	90.30	(8.74)	(9.47)
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.00	10.50	2.50	2.50	2.90	7.97	10.50	2.46	2.50	2.90	99.60	99.98	98.40	99.98	100.00	(7.24)	-6.80
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	8.00	1.62	1.50	1.50	2.05	7.49	1.62	1.47	1.50	2.05	93.61	100.00	97.71	100.00	100.00	(12.62)	(12.22)
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.70	14.25	14.65	12.00	12.00	9.67	14.02	11.59	11.95	10.36	99.74	98.39	79.12	99.55	86.30	7.91	4.33

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,283.71	7,428.96	6,307.77	6,303.99	6,926.65	7,492.41	6,937.21	5,284.96	6,026.03	6,422.47	90.45	93.38	83.78	95.59	92.72	(3.90)	(2.66)
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,185.71	7,332.34	6,224.47	6,202.69	6,824.95	7,400.97	6,855.88	5,223.86	5,951.50	6,337.79		93.50	83.92	95.95	92.86	(3.96)	(2.69)
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98.00	95.00	81.80	99.80	99.80	91.44	79.75	59.60	73.03	82.79	93.31	83.95	72.86	73.18	82.95	1.26	(0.54)
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.62	1.50	1.50	1.90		1.57	1.50	1.50	1.90		96.91	100.00	99.99	100.00	(2.20)	7.40
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.00	35.80	65.00	35.58	35.58	49.95	35.80	47.60	35.19	31.29	99.90	99.99	73.23	98.91	87.96	1.97	(8.13)
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.00	35.80	65.00	35.58	35.58	49.95	35.80	47.60	35.19	31.29	99.90	99.99	73.23	98.91	87.96	1.97	(8.13)
4	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18.80	17.75	17.80			12.21	17.75	17.43			64.95	100.00	97.89	(2.65)	21.78
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			5.00	5.00	5.00			2.50	5.00	5.00			50.00	100.00	100.00	-	50.00
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			13.80	12.75	12.80			9.71	12.75	12.43			70.36	100.00	97.07	(3.61)	14.38
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.00	471.82	544.60	677.38	649.15	447.11	466.13	477.52	665.62	631.73	98.26	98.79	87.68	98.26	97.32	9.83	10.25
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.50	3.50	7.00	3.50	8.00	3.48	3.42	5.79	3.49	7.80	99.29	97.69	82.69	99.83	97.47	44.64	37.81
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.00	110.00	194.60	265.00	294.15	123.27	106.42	185.72	259.88	278.00	98.62	96.75	95.44	98.07	94.51	28.02	26.94
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.00	110.00	110.00	134.00	114.00	124.82	109.92	102.51	133.70	113.96	96.76	99.93	93.19	99.78	99.97	(1.96)	(0.75)
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.00	24.00	30.00	30.00	30.00	18.78	23.99	13.16	29.99	29.96	93.91	99.96	43.88	99.97	99.85	11.25	27.58
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.50	2.50	3.00	2.50	3.00	2.33	2.47	2.46	2.49	2.75	93.36	98.80	82.00	99.60	91.50	5.83	4.22
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.00	221.82	200.00	237.38	200.00	174.42	219.91	167.87	236.07	199.27	99.67	99.14	83.93	99.45	99.64	4.97	6.86
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,239.17	1,295.86				1,836.30	1,252.60				82.01	96.66		(42.13)	(31.79)
-	Pengadaan Alat Besar			2,239.17	1,295.86				1,836.30	1,252.60				82.01	96.66		(42.13)	(31.79)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,447.40	3,495.68	3,674.44	4,713.14	4,750.64	15,048.25	3,126.65	2,629.09	3,963.84	3,537.35	97.42	89.44	71.55	84.10	74.46	(10.80)	(13.78)

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.40	2.70	3.00	3.00	3.00	2.16	2.63	2.54	2.98	1.80	90.02	97.28	84.60	99.32	59.98	5.90	(1.00)
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,320.00	2,680.00	3,440.15	4,285.35	4,302.60	14,922.82	2,348.85	2,447.54	3,557.68	3,122.64	97.41	87.64	71.15	83.02	72.58	(7.29)	(11.73)
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.00	812.98	231.30	424.80	445.04	123.27	775.17	179.01	403.18	412.91	98.62	95.35	77.39	94.91	92.78	141.81	144.89
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	764.55	808.40	850.54	784.54	876.04	740.03	628.72	578.46	517.42	644.03	96.79	77.77	68.01	65.95	73.52	3.71	(2.28)
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	406.20	579.20	560.62	559.29	575.04	384.03	403.61	353.67	299.99	354.38	94.54	69.68	63.09	53.64	61.63	10.49	(1.08)
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	60.00	67.00	70.00	86.00	86.00	59.81	66.81	63.64	85.85	85.92	99.69	99.72	90.92	99.82	99.91	9.75	10.48
-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	248.35	112.20	169.92	89.25	155.00	246.87	110.22	118.03	84.08	151.49	99.41	98.23	69.46	94.21	97.73	5.70	0.78
-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	49.31	48.08	43.12	47.50	52.23	98.62	96.16	86.24	94.99	87.05	5.00	1.83
B	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	369.90	9,582.01	9,494.01	8,220.88	11,132.01	318.14	7,265.00	5,121.27	7,746.39	10,365.01	86.01	75.82	53.94	94.23	93.11	627.88	559.79
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	369.90	7,710.23	7,579.61	6,367.85	9,417.10	318.14	5,573.09	4,114.28	5,944.13	8,750.69	86.01	72.28	54.28	93.35	92.92	503.65	429.33
-	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	369.90			682.17	2,555.00	318.14			679.06	2,484.45	86.01			99.54	97.24	274.54	265.87
-	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		4,071.48	4,853.40	3,419.23	3,980.95		2,751.24	3,219.83	3,047.40	3,501.55		67.57	66.34	89.13	87.96	2.03	8.86
-	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			522.38	370.16	600.00			272.92	366.36	587.68			52.25	98.97	97.95	16.48	47.32
-	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		3,638.75	2,203.83	1,896.29	2,281.15		2,821.86	621.52	1,851.31	2,177.01		77.55	28.20	97.63	95.43	(11.03)	107.73
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1		1,871.78	1,914.40	1,853.03	1,714.91	.00	1,691.91	1,006.99	1,802.26	1,614.32		90.39	52.60	97.26	94.13	(2.79)	9.36

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		1,871.78	1,914.40	1,853.03	1,714.91		1,691.91	1,006.99	1,802.26	1,614.32		90.39	52.60	97.26	94.13	(2.79)	(36.89)
C	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		.00	4,218.38	405.00	1,545.08	.00	.00	1,573.24	381.74	1,469.36			37.29	94.26	95.10	95.55	104.59
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota			4,218.38	405.00	1,545.08	.00	.00	1,573.24	381.74	1,469.36			37.29	94.26	95.10	95.55	104.59
-	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			4,218.38	405.00	1,545.08			1,573.24	381.74	1,469.36			37.29	94.26	95.10	95.55	104.59
D	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional				725.00	952.45				720.84	945.85				99.43	99.31	31.37	31.22
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota				725.00	952.45				720.84	945.85				99.43	99.31	31.37	31.22
-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				725.00	952.45				720.84	945.85				99.43	99.31	31.37	31.22
E	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah			25.14	1,427.31	2,454.74	.00	.00	19.10	1,391.22	1,489.27			75.99	97.47	60.67	2,825	(14)
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota			25.14	1,427.31	2,454.74	.00	.00	19.10	1,391.22	1,489.27			75.99	97.47	60.67	2,825	(14)
-	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			25.14	90.80				19.10	85.91				75.99	94.61		261.23	349.75
-	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				1,336.51	2,454.74				1,305.32	1,489.27				97.67	60.67	83.67	(100.00)
F	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		7,343,95	34,360,41	4,884.41	4,542.02	1,422.99	3,887.12	4,406.31	4,631.33	4,346.58		52.93	12.82	94.82	95.70	91.69	46.37
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1,509.93	7,343,95	34,360,41	4,884.41	4,542.02	1,422.99	3,887.12	4,406.31	4,631.33	4,346.58	94.24	52.93	12.82	94.82	95.70	165.36	46.37

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		4,719.52	2,135.46	2,102.70	4,059.00		3,887.12	4,406.31	1,984.65	3,907.88		82.36	206.34	94.39	96.28	12.25	18.43
-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1,509.93		120.00	2,781.71	483.02	1,422.99			2,646.68	438.70	94.24		0.00	95.15	90.83	(82.64)	(83.42)
G	Program Penataan Bangunan Gedung		2,539.50	2,949.23	2,081.74	1,537.75			148.65	2,007.46	1,492.90		0.00	5.04	96.43	97.08	(13.14)	(51.85)
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		2,539.50	2,949.23	2,081.74	1,537.75			148.65	2,007.46	1,492.90		0.00	5.04	96.43	97.08	(13.14)	(51.85)
-	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1,643.46	1,226.80				1,607.67	1,197.76				97.82	97.63	(25.35)	(25.50)
-	Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				124.28	100.00				114.01	94.60					94.60	100.00	100.00
-	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			327,525	314.00	210.95			148.65	285.79	200.55			45.39	91.02	95.07	100.00	100.00
H	Program Penyelenggaraan Jalan	4,678.25	20,029.56	32,127.11	20,201.40	27,351.23	4,267.03	17,867.16	20,907.49	19,915.34	25,426.35	91.21	89.20	65.08	98.58	92.96	96.70	89.67
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	4,678.25	20,029.56	32,127.11	20,201.40	27,351.23	4,267.03	17,867.16	20,907.49	19,915.34	25,426.35	91.21	89.20	65.08	98.58	92.96	96.70	89.67
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalanserta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		164.50	56.30	64.50	64.50		162.05	2.80	63.88	60.72		98.51	4.97	99.04	94.13	(17.07)	692.76
-	Rekonstruksi Jalan	2,628.60	11,052.31	27,668.80	14,629.27	20,191.74	2,381.89	9,985.33	18,072.06	14,557.92	18,913.56	90.61	90.35	65.32	99.51	93.67	115.43	102.67

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-	Pemeliharaan Rutin Jembatan	718.43	246.52	289.93	543.30	302.28	566.11	169.21	193.96	465.05	272.70	78.80	68.64	66.90	85.60	90.22	(1.26)	10.73
-	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	125.00	125.00	125.00	126.10	141.40	124.72	124.86	124.92	124.98	138.48	99.78	99.89	99.94	99.11	97.93	3.25	2.75
-	Rehabilitasi Jalan	1,206.23	753.80	1,183.00	832.52	2,106.98	1,194.31	750.51	388.13	829.08	2,002.34	99.01	99.56	32.81	99.59	95.03	35.72	42.42
-	Pemeliharaan Rutin Jalan		7,687.43	2,804.08	4,005.71	4,544.33		6,675.19	2,125.61	3,874.43	4,038.56		86.83	75.80	96.72	88.87	(2.41)	6.12
I	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	153.76	154.76	206.00	218.01	102.36	148.62	151.02	117.60	213.23	90.01	96.66	97.59	57.09	97.81	87.93	(3.36)	0.75
1	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	100.00	100.00	125.00	165.39	65.28	95.05	96.55	113.35	163.04	60.03	95.05		90.68	98.58	91.95	(0.81)	(0.09)
-	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	100.00	100.00	100.00	136.34		95.05	96.55	98.05	135.43		95.05	96.55	98.05	99.33	#DIV/0 !	(15.92)	(14.69)
-	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			25.00	29.05	65.28			15.30	27.61	60.03			61.20	95.05	91.95	70.45	12.35
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	53.76	54.76	81.00	52.62	37.08	53.58	54.48	4.26	50.20	29.98	99.67	99.49	5.25	95.39	80.85	(3.69)	237.22
-	Penyediaan Data dan Informasi JasaKonstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	53.76	54.76	81.00	52.62	37.08	53.58	54.48	4.26	50.20	29.98	99.67	99.49	5.25	95.39	80.85	(3.69)	237.22
J	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		300.00	1,251.57	462.60	479.76	.00	288.52	1,017.65	451.71	469.16		96.17	81.31	97.65	97.79	85.95	(53.11)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah Kabupaten/Kota		300.00	1,000.07	25.00	117.29	.00	288,520,000	935,240,000	17.74	115.24		96.17	93.52	70.96	98.25	168.34	57.22
-	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		300.00	1,000.07	25.00	117.29		288,520,000	935,240,000	17.74	115.24		96.17	93.52	70.96	98.25	168.34	57.22
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			119.93	.00	323.71	.00	.00	.00	.00	315.22			0.00		97.38	100.00	100.00
-	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			119.93		323.71			.00		315.22			0.00		97.38	100.00	100.00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			131.57	437.60	38.76	.00	.00	82.41	433.97	38.70			62.64	99.17	99.85	70.73	(95.57)
-	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			131.57	437.60	38.76			82.41	433.97	38.70			62.64	99.17	99.85	70.73	(95.57)

Sumber : DPUPR, 2025

2.1.5. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan DPUPR adalah masyarakat umum serta entitas pemerintah dan swasta yang membutuhkan layanan terkait infrastruktur, penataan ruang, meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, dan fasilitas umum lainnya. Pengguna jalan dan jembatan untuk akses transportasi dan pergerakan, Penduduk yang memerlukan akses terhadap air bersih, sanitasi, persampahan dan pengolahan limbah.

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Pekalongan, maka perlu adanya mitra kerja dalam pemberian pelayanan meliputi mitra non Pemerintah, mitra masyarakat.

a. Mitra Pemerintah

Kerjasama dengan OPD di Lingkungan Kota Pekalongan misalkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait perizinan. Kerjasama dengan Kementerian PUPR untuk koordinasi Program, pendanaan dan penerapan kebijakan Nasional ditingkat Daerah. Koordinasi dengan BMKG untuk data Cuaca dan Mitigasi Bencana.

b. Mitra non Pemerintah

Kemitraan dengan universitas atau Lembaga riset untuk melakukan study kelayakan, penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dibidang Pekerjaan Umum, kerjasama dengan Perusahaan swasta dengan skema CSR yang mendukung bidang Pekerjaan Umum.

c. Mitra Masyarakat.

Keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam proses perencanaan pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur melalui forum Musrembang.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan Isu Strategis merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pencapaian kinerja perangkat daerah.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Pekalongan dalam pelayanan sebagai berikut :

1. Dalam Bidang Bina Marga khusus Jalan dan jembatan masih terbatasnya kualitas jaringan jalan dan jembatan, yang menjadikan faktor penghambatnya adalah Kapasitas jalan dan jembatan tidak sebanding dengan jumlah pengguna jalan sehingga terkadang mengalami hambatan jalan,

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a) Beberapa ruas jalan yang berada di daerah atau tergenang sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap kerusakan jalan dan jembatan;
 - b) Belum optimalnya fungsi jaringan drainase baik drainase jalan maupun sistem jaringan drainase kota;
 - c) Air rob (banjir air laut) menggenangi sejumlah ruas jalan, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan peninggian jalan supaya air rob tidak menggenangi jalan;
 - d) Adanya double track perlintasan sebidang yang melintasi jalan utama di Kota Pekalongan
 - e) Diberlakukannya pengalihan jalan nasional dan banyaknya kendaraan berat jurusan luar kota memilih melewati jalan kota, upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan peningkatan jalan terhadap jalan yang dimaksud.
2. Dalam bidang Sumber Daya Air Terjadi genangan air di lingkungan permukiman dalam waktu yang relatif lama dalam hal ini sering terjadi banjir dan rob.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Belum optimalnya penanggulangan permasalahan banjir dan rob, mengacu pada permasalahan sistem drainase primer yang bersumber dari lima sungai yaitu Sungai Meduri, Sungai Brengi, Sungai Loji, Sungai Banger, dan Sungai Gabus
 - b. Besarnya investasi pendanaan untuk penyediaan infrastruktur pengendali banjir.
3. Dalam bidang Tata Ruang dan Bangunan Belum optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang.
 - b. Belum adanya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang menjadi dasar perijinan, sehingga saat ini baru mengandalkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Dalam bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
 - b. Masih rendahnya rasio kepatuhan PBG Kab/Kota
5. Dalam bidang Ciptakarya belum optimalnya pengembangan cakupan layanan air bersih karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar
- a) kondisi jaringan perpipaan yang sudah tua dan tertanam di bawah konstruksi jalan sehingga perlu perbaikan dan peremajaan
 - b) pemanfaatan air bawah tanah berpotensi menambah percepatan laju penurunan muka tanah

- c) Belum optimalnya sarana dan prasarana penyediaan air limbah domestik

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu Strategis berkaitan dengan infrastruktur sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan dengan berkomitmen pemerintah untuk penanggulangan kerusakan jalan, jembatan dan penanganan rob serta merehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan
2. Pemenuhan ketersediaan sarana pengendali rob dan banjir dengan Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi jawa tengah serta kabupaten pekalongan untuk secara sinergi melakukan penanganan banjir dan rob. Mengoptimalkan peran serta pihak diluar pemerintah (masyarakat dan swasta) untuk bersama-sama terlibat aktif dalam penanganan banjir dan rob.
3. Ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan

Tabel II.6 Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Jalan dan Jembatan dalam peningkatan mobilitas dan aksesibilitas	Belum optimalnya kualitas dan kondisi jalan kota	Memastikan bahwa pembangunan jalan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan	Strategi yang adaptif dan mitigatif pada infrastruktur jalan agar kokoh dan terawat dengan baik terkait dengan perubahan iklim	Prioritas pemerintah untuk membangun dan memelihara jalan nasional secara merata seluruh Indonesia	Tantangan dan prioritas pengembangan infrastruktur jalan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan pembangunan antar wilayah	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan dengan berkomitmen pemerintah untuk penanggulangan kerusakan jalan, jembatan dan penanganan rob serta merehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan
Memperluas akses air minum yang aman dan berkelanjutan	Belum optimalnya penyediaan air minum, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas	Memperluas akses air minum yang aman dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meminimalisir terhadap dampak perubahan iklim yang mengakibatkan krisis air bersih	Tandatangan ketersediaan air bersih yang belum merata	Rencana kebijakan Daerah agar dapat memastikan ketersediaan air minum yang berkelanjutan	Belum optimalnya pasokan air baku, debit mata air yang menurun kebutuhan air minum yang terus meningkat
Pembangunan prasaranan dan sarana, pengolahan air limbah domestik, penanganan lumpur tinja serta penyediaan pelayanan sanitasi yang aman serta berkelanjutan	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sanitasi domestik	Meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan dalam pengembangan pengolahan air limbah domestik yang berkelanjutan	Pengelolaan air limbah domestik yang kurang layak berdampak buruk terhadap kesehatan manusia	Pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan limbah domestik yang tidak terolah menyebabkan penurunan kualitas air dan kesehatan masyarakat skala regional	Pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan limbah domestik yang tidak terolah menyebabkan penurunan kualitas air dan kesehatan masyarakat skala regional	Belum maksimalnya pengelolaan air limbah domestik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembangunan pengelolaan sampah	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana persampahan	Memastikan agar masalah sampah dapat diatasi secara sistematis dan tidak merugikan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di masa depan	produksi sampah yang sangat besar akibat pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi, menyebabkan pencemaran lingkungan, ancaman kesehatan, dan berkontribusi pada perubahan iklim global	Pengelolaan persampahan yang tidak efektif, dan dampak buruk terhadap lingkungan serta kesehatan publik	Meningkatnya timbulan sampah hingga melebihi kapasitas TPA	Belum maksimalnya ketersediaan prasarana pengolahan sampah
Optimalisasi dan revitalisasi infrastruktur sarpras pengendali banjir	Belum optimalnya kualitas sarpras pengendali banjir dan drainase	Memastikan kebijakan dan program yang dirancang dalam pengendalian banjir dan rob tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara jangka panjang	Dampak perubahan iklim membuat infrastruktur yang ada perlu adaptasi untuk memadai fungsinya infrastruktur pengendali banjir	Ancaman perubahan iklim turut berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas banjir rob di wilayah pesisir	Keragangannya masyarakat terhadap pompa air yang bukan solusi jangka Panjang sehingga perlu evaluasi dan optimalisasi strategi infrastruktur	Pemenuhan ketersediaan sarana pengendali rob dan banjir dengan Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah serta kabupaten pekalongan untuk secara sinergi melakukan penanganan banjir

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dan rob. Mengoptimalkan peran serta pihak diluar pemerintah (masyarakat dan swasta) untuk bersama-sama terlibat aktif dalam penanganan banjir dan rob.
terwujudnya pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup dan ekonomi melalui penataan kawasan dan desain bangunan yang hijau dan efektif	Belum optimalnya pengawasan penataan ruang, bangunan Gedung dan jasa konstruksi	keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, risiko bencana, degradasi kualitas lingkungan, ketahanan sumber daya alam, dan keterbukaan informasi pembangunan berkelanjutan	Desain bangunan dan tata ruang perkotaan yang tidak memper timbang kan konteks lingkungan dapat memper parah dampak pemanasan global dan perubahan iklim	masalah perizinan yang tumpang tindih, pelanggaran tata ruang, ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan pembangunan gedung, serta konflik kepentingan politik yang menghambat pelaksanaan kebijakan	pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memicu bencana ekologis seperti banjir dan penurunan muka tanah (regional)	belum terintegrasinya penanganan bertahap untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang efektif dan berkeadilan (isu strategis)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029
 Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan adalah : Meningkatkan ketersediaan sarpras perkotaan dan Keterwujudan penataan ruang dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029
 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan adalah:

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatkan ketersediaan sarpras perkotaan		Persentase sarpras perkotaan dalam kondisi baik	Persen	-	-	36.01	36.79	37.54	38.42	40.31	
		Tersedianya jalan kota kondisi mantap	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP)	Persen	-	-	79,26	79,49	79,73	79,97	80,21	
		Tersedianya jaringan air minum perpipaan	Persentase Rumah yang terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di daerah Kabupaten/Kota	Persen	-	-	0	0	0	0.16	0.32	
		Tersedianya akses sanitasi rumah tangga yang aman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman	Persen	-	-	0.96	1.16	1.35	1.55	1.74	
		Meningkatnya pengembangan sarana persampahan	Persentase pemenuhan prasarana persampahan	Persen	-	-	84.85	87.88	90.91	93.94	100	

		Tersedianya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik	Persentase wilayah kota yang bebas dari genangan banjir / rob	Persen	-	-	94.24	94.89	95.44	96.44	99.47	
	Meningkatkan keterwujudan penataan ruang		Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap ijin yang diberikan sesuai rencana tata ruang dan memenuhi persyaratan teknis bangunan	Persen	-	-	82	83	85	87	89	
		Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang, Bangunan Gedung	Persentase pengawasan penataan ruang, bangunan gedung dan jasa konstruksi	Persen	-	-	76	77	78	79	80	
	Meningkatkan kualitas layanan publik		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD	indeks	91.20	91.20	85,70	85,80	85,90	86,00	86,10	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	indeks	81.25	81.25	84,67	84,69	84,71	84,73	84,75	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel III. 2 Strategi Renstra PD

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik"

		keselamatan masyarakat			
Strategi Tahunan RPJMD	Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas	Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perwujudan infrastruktur perkotaan yang mendukung pengembangan wilayah	Pengembangan wilayah yang terintegrasi untuk meningkatkan perekonomian dengan pendekatan ekonomi sirkular intra dan antarwilayah	Peningkatan dan penguatan infrastruktur perkotaan untuk mewujudkan fondasi mina batik	Penguatan infrastruktur perkotaan untuk memantapkan perwujudan fondasi Mina Batik
Strategi Renstra OPD	1. Menunjang prasarana Pendidikan pada ruas jalan kota di Kota Pekalongan 2. Penataan sistem drainase perkotaan 3. Peningkatan koordinasi penyediaan sumber air baku permukaan (sedang dilakukan kajian oleh Blue Deal, peluang mengusulkan kegiatan melalui Mercy ZCRA) 4. Peningkatan koordinasi perwujudan tujuan Rencana Tata Ruang Kota Pekalongan	1. Rekonstruksi jalan kota di Kota Pekalongan 2. Peningkatan koordinasi penanganan Sub Sistem Breksi Meduri 3. Peningkatan debit air baku permukaan 4. Penerapan standar teknis Kawasan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	1. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses Pelabuhan Perikanan On Shore dan rekonstruksi jalan kota di Kota Pekalongan 2. Penanganan Sub Sistem Breksi Meduri 3. Jaringan distribusi (pembangunan JDU) 4. Pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan program pengembangan shopping tourism dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).	1. Peningkatan koordinasi pembangunan jalan akses Pelabuhan Perikanan On Shore dan rehabilitasi saluran pematang jalan kota 2. Peningkatan koordinasi inisiatif energi alternatif dalam operasional sarana pengendali banjir 3. Peningkatan layanan 4. Pengembangan minapolitan dan pengembangan kawasan Pekalongan Baru sebagai pendukung shopping tourism.	1. Peningkatan koordinasi pembangunan jalan lingkar utara 2. Penggunaan energi alternatif dalam operasional sarana pengendali banjir 3. Penyediaan air perpipaan siap minum (pembangunan zona air minum prima) 4. Penguatan pengembangan minapolitan dan Pengembangan kawasan Pekalongan Baru sebagai pendukung shopping tourism 5. Peningkatan Fasilitas Pejalan Kaki dan Perlengkapan Jalan di Kawasan Wisata Mina Batik Kota Pekalongan

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Tabel III. 3 Arah Kebijakan Renstra PD

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan berkualitas	
		Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perwujudan infrastruktur perkotaan yang mendukung pengembangan wilayah	
		Pengembangan wilayah yang terintegrasi untuk meningkatkan perekonomian dengan pendekatan ekonomi sirkular intra dan antarwilayah	
		Peningkatan dan penguatan infratraktur perkotaan untuk mewujudkan fondasi mina batik	
		Penguatan infrastruktur perkotaan untuk memantapkan perwujudan fondasi Mina Batik	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota; pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 100 persen.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota, meliputi: penyediaan alternatif sumber air baku permukaan (sungai/embung maupun air laut dengan teknologi desalinasi), jaringan distribusi, hingga titik pelayanan (Sambungan Rumah/SR). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu rumah yang terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan di daerah Kab/Kota sebesar 35,62 Persen.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kegiatan pengembangan sistem pengelolaan persampahan di daerah kab/Kota yang dilaksanakan sebesar 82,86 persen.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik di daerah Kab/Kota yang dilaksanakan sebesar 1,74 persen RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 | Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 373

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase drainase dalam kondisi mantap sebesar 44,87 persen.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus program adalah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota,

- pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Prosentase perijinan yang memenuhi persyaratan teknis bangunan sebesar 90 persen.
7. Program Penyelenggaraan Jalan Fokus program adalah penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase peningkatan kemantapan jalan sebesar 0,3 persen.
 8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pembinaan jasa konstruksi dengan kinerja baik sebesar 100 persen.
 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Fokus program adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota; koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota; koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; koordinasi penyelenggaraan penataan ruang. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang sebesar 84 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

Tabel IV. 1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				67.318.9 85.000		56.961.90 4.000		65.465.09 0.000		56.013.194. 000		37.502.0 00.000		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	terlaksananya pengeloalan sumber daya air yang optimal	Indikator Program :Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	13.611.55 8.000	100	13.700.000. 000	100	13.800.000. 000	100	13.900.000.00 0	100	14.000.00 0.000	100
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	Unit	34	39	39	12.264.74 8.000	39	11.900.000. 000	39	11.870.000. 000	39	11.827.000.00 0	39	11.900.00 0.000	39
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Terbangunnya stasiun pompa banjir	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit	5	0	1	3.000.000 .000	1	1.850.000.0 00	1	1.055.000.0 00	0	0	0	0	3
Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Terehabilitasin ya stasiun pompa banjir	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit	7	10	6	979.238.0 00	7	1.000.000.0 00	8	1.100.000.0 00	10	1.390.500.000	8	1.100.000 .000	39

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terpeliharanya tanggul dan tebing sungai	Indikator Sub Kegiatan : Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara a	KM	0	0	1.3	2.862.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Terpeliharanya stasiun pompa banjir	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	34	39	39	5.122.790.000	39	5.650.000.000	39	6.215.000.000	39	6.836.500.000	39	7.100.000.000	39
Normalisasi/Restorasi Sungai	Ternormalisasi kanya sungai	Indikator Sub Kegiatan : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	KM	0	0.4	0	0	0.2	300.000.000	0.2	300.000.000	0.2	300.000.000	0.2	300.000.000	0.8
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Tertingkatnya bangunan perkuat tebing	Indikator Sub Kegiatan : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM	0	0	0.136	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.136
Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Terehabilitasin ya polder/kolam retensi	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit	0	1	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasin ya tanggul suangi	Indikator Sub Kegiatan : Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM	0	0	0	0	1.3	2.900.000.000	1.3	3.000.000.000	1.3	3.100.000.000	1.3	3.200.000.000	5.2

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dan tersier dalam kondisi Mantap	Persen	83.39	84.21	19.27	1.346.810.000	20.27	1.800.000.000	21.27	1.930.000.000	22.27	2.073.000.000	23.27	2.100.000.000	23.27
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Tertingkatnya jaringan irigasi permukaan	Indikator Sub Kegiatan : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0	0	0	0	0.1	500.000.000	0.1	500.000.000	0.1	500.000.000	0.1	500.000.000	0.4
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasin ya jaringan irigasi permukaan	Indikator Sub Kegiatan : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	1.1	0.138	0.31	1.346.810.000	0.3	1.300.000.000	0.3	1.430.000.000	0.3	1.573.000.000	0.3	1.600.000.000	1.51
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	terlaksananya pengelolaan dan pemngembangan sistem drainase yang optimal	Indikator Program :Panjang Infrastruktur Jaringan perpipaan air minum	km	529615,90	534438,90	535938,90	1.324.112.000	537438,90	1.200.000.000	538938,90	1.200.000.000	540438,90	1.200.000.000	541938,90	1.200.000.000	541938,90
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Jumlah Sambungan Rumah dari PDAM sampai	SR		27000	27100	1.324.112.000	27200	1.200.000.000	27300	1.200.000.000	27400	1.200.000.000	27500	1.200.000.000	27500

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		dengan tahun N														
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Teroptimalisas ikannya sistem penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	0	0	1	330.412.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terlayannya sambungan rumah oleh perluasan Sistem Air Minu (SPAM) jaringan perpipaan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	500	993.700.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	0
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	terlaksananya pengembanga n sistem dan pengelolaan persampahan regional yang optimal	Indikator Program :Persentase penambahan sarpras persampahan	Persen	0	0	16.67	617.685.000	33.33	850.000.000	50	850.000.000	66.67	920.000.000	100	920.000.000	100

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Jumlah sarpras persampahan yang diadakan	Unit	24	27	28	617.685.000	29	850.000.000	30	850.000.000	31	920.000.000	33	920.000.000	33
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Terbanggunya TPA/TPSP/SPA /TPS-3R/TPS	Indikator Sub Kegiatan : Kapasitas TPA/TPST/SPA /TPS3R yang dibangun	Ton/hari	0	1.22	0.41	617.685.000	0.41	650.000.000	0.41	650.000.000	0.41	700.000.000	0.41	700.000.000	0.41
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	unit	0	0											
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem pengolahan air limbah	Indikator Program :Persentase rumah yang terlayani Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah	Persen	88.21	88.5	88.66	1.895.415.000	88.71	1.235.000.000	88.76	1.290.000.000	88.81	1.295.000.000	88.86	500.000.000	88.86

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kabupaten/Kota														
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Persentase rumah yang terlayani Pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik di daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100	1.895.415.000	100	1.235.000.000	100	1.290.000.000	100	1.295.000.000	100	500.000.000	100
Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Teroptimalisasikannya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Meningkatnya kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Indikator Sub Kegiatan : Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	M³/Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	150	83.125.000	150	85.000.000	150	90.000.000	150	95.000.000	150	100.000.000	150

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya Isntalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Indikator Sub Kegiatan : Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M³/Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya sarana pengangkutan lumpur tinja	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	0	1	0	0	1	750.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	0	0	4
Penyediaan Unit pengolahan setempat	Termilikinya fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit penolahan setempat anaerob pada rumah tangga	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesua i SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	68086	68316	116	1.812.290.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	68692

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	terlaksananya pengelolaan dan pemngembangan sistem drainase yang optimal	Indikator Program :Persentase drainase dalam kondisi mantap	Persen	69.48	39.96	40.94	2.244.722.000	41.92	2.468.190.000	42.91	2.600.000.000	43.89	2.800.000.000	44.87	3.000.000.000	44.87
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Mantap	Meter	172142	2E+05	41695	2.244.722.000	42695	2.468.190.000	43695	2.600.000.000	44695	2.800.000.000	45695	3.000.000.000	45695
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Tertingkatkan na sistem drainase perkotaan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	0	0	0	0	2	718.190.000	2	575.000.000	2	600.000.000	2	700.000.000	8
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasin ya sistem drainase perkotaan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	8	8	8	1.568.952.000	8	1.000.000.000	8	1.200.000.000	8	1.300.000.000	8	1.300.000.000	8
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Terpeliharanya sistem drainase perkotaan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Ternelihara	Sub Sistem Drainase Perkotaan	8	8	8	675.770.000	8	750.000.000	8	825.000.000	8	900.000.000	8	1.000.000.000	8

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	terpenuhinya persyaratan teknis bangunan pada bangunan gedung di Kota	Indikator Program :Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan	persen	84,31	85	86	1.215.180 .000	87	1.160.000.0 00	88	1.160.000.0 00	89	1.160.000.000	90	1.160.000 .000	90
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Indikator Kegiatan : Jumlah permohonan perijinan bangunan gedung	Pengajua n			100	1.215.180 .000	110	1.160.000.0 00	110	1.160.000.0 00	120	1.160.000.000	120	1.160.000 .000	560
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya bangunan gedung untuk kepentingan strategis Kabupaten/Ko ta	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Ko ta yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan	6	8	5	1.075.180 .000	5	1.000.000.0 00	5	1.000.000.0 00	5	1.000.000.000	5	1.000.000 .000	5
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersusunnya dokumen kebijakan terkait penyelenggara	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kebijakan	dokumen	2	2	2	25.000.00 0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.00 0	10

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	an banguna gedug	terkait Penyelenggara an Bangunan Gedung														
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusnya dokumen pembangunan , pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkara n banguna gedung untuk kepentingan strategi daerah Kabupaten/Ko ta	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pembangunan , Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkara n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Ko ta	Dokumen	0	0	0	0	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	40
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik.	Terlaksannya penerbitan Persetujuan banguna Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG) Rencana Teknis Pembongkara n bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkara n Bangunan Gedung	Dokumen	0	130	86	115.000.000	96	120.000.000	97	120.000.000	107	120.000.000	108	120.000.000	494

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penilai Teknis (TPT) penilik dan pendataan Bangunan gedung melalui SIMBG	(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Terwujudnya penyelenggara an Penyelenggara an jalan dan Jembatan Kabupaten/Ko ta yang optimal	Indikator Program :Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Persen	1.09	-5.48	0.3	45.816.49 3.000	0.3	35.140.714. 000	0.3	43.894.090. 000	0.3	33.854.194.00 0	0.3	15.990.00 0.000	0.3
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	KM	126.98	118.8	119.1	45.816.49 3.000	119.46	35.140.714. 000	119.82	43.894.090. 000	120.18	33.854.194.00 0	120.54	15.990.00 0.000	120.54
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusnya dokumen rencana kebijakan, strategi dan teknis pengembanga n jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggara an jalan dan jembatan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembanga n jaringan jalan serta perencanaan teknis penvelenggara	Dokumen	2	3	2	60.000.00 0	1	70.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.00 0	1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		an jalan dan jembatan yang disusun														
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya survey kondisi jalan/jembata n	Indikator Sub Kegiatan : Panjang Jalan/Jembata n yang Disurvey Kondisinya	KM	153.61	150.3	150	140.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	160.000.000	150	160.000.000	150
Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya jalan secara rutin	Indikator Sub Kegiatan : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	2.76	2	2	4.109.680.000	2	4.300.000.000	2	4.300.000.000	2	4.500.000.000	2	4.500.000.000	2
Pembangunan Jalan	Terlaksannya panjang jalan yang dibangun sampai perkerasan	Indikator Sub Kegiatan : Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	KM	0.25	0	0	0	0.1	1.500.000.000	0.1	1.500.000.000	0.1	2.000.000.000	0.1	2.000.000.000	0.4
Rehabilitasi Jalan	Terlaksannya panjang jalan yang direhaiitasi	Indikator Sub Kegiatan : Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	0.65	0.55	1.1	2.900.000.000	0.25	2.000.000.000	0.25	2.000.000.000	0.25	2.000.000.000	0.25	2.000.000.000	2.1
Penggantian Jembatan	Terlaksannya panjang jembatan yang dilakukan penggantian	Indikator Sub Kegiatan : Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Meter	0	0	20	2.150.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.500.000.000	10	2.500.000.000	60

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya panjang jalan yang direkontruksi	Indikator Sub Kegiatan : Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	5	2.1	4.41	36.202.573.000	2.64	24.620.714.000	3.51	33.374.090.000	2.27	21.864.194.000	0.5	4.000.000.000	13.33
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharaan secara rutin jembatan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	8	5	5	254.240.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	terwujudnya pengembangan jasa kontruksi yang optimal	Indikator Program :Persentase jasa kontruksi dengan kinerja baik	Persen	100	98.67	98.67	58.280.000	98.57	233.000.000	98.57	246.000.000	98.46	259.000.000	98.46	272.000.000	98.46
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Indikator Kegiatan : Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kegiatan	NA	NA	2	26.960.000	2	108.000.000	2	116.000.000	2	124.000.000	2	132.000.000	10
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terfasilitasinya a sertifikat pada tenaga kerja kontruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	36	37	0	0	40	75.000.000	40	80.000.000	40	85.000.000	40	90.000.000	40
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Terbinanya lembaga atau jasa kontruksi	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah	Lembaga	4	4	4	26.960.000	4	33.000.000	4	36.000.000	4	39.000.000	4	42.000.000	4

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kelembagaan Jasa Konstruksi		Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya														
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Terselenggara nya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta	dokumen	2	2	2	31.320.00 0	2	125.000.000	2	130.000.000	2	135.000.000	2	140.000.0 00	2
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen data dan informasi jasa kontruksi cakuan Kabuoaten/kot a	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Ko ta yang Disediakan	Dokumen	2	0	2	31.320.00 0	2	125.000.000	2	130.000.000	2	135.000.000	2	140.000.0 00	2
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	terwujudnya Penyelenggara an Penataan Ruang yang optimal	Indikator Program :Nilai kinerja penyelenggara an penataan ruang	Nilai	82,64	82,64	83,00	535.540.0 00	83,00	975.000.000	83,50	425.000.000	83,50	625.000.000	84,00	460.000.0 00	84,00
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Persentase pemenuhan syarat penyusunan rencana tata ruang	Persen	NA	25,00	25,00	0	50,00	25.000.000	75,00	100.000.000	100,00	200.000.000	100,00	35.000.00 0	100,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksanya persetujuan substansi RTRW Kabupten/Kot a	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Ko ta	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1
Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan gubernur hasil evaluasi	Indikator Sub Kegiatan : Dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	1
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersusunnya perda RTRW Kabuaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Ko ta	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya sosialisasi kebjakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang	laporan	0	0	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	1	35.000.000	2
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Prosentase pemenuhan dokumen pendukung	Persen	NA	NA	50,00	210.000.000	100,00	500.000.000	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		rencana tata ruang														
Penyusunan Peta Dasar	Tersusunnya peta dasar	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta	0	0	1	210.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersusunnya RTRW Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	2	500.000.000	0	0	0	0	0	0	2
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	Dokumen			2	300.540.000	2	425.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	400.000.000	10
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	2	2	2	250.540.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dokumen	2	2	2	50.000.000	2	75.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Tersedia dan terlaksananya pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pemanfaatan Ruang	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Pemanfaatan Ruang	Sistem Informasi	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	1	100.000.000	1
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Kegiatan : Prosentase kesesuaian pelaksanaan KKPR dan/atau pernyataan mandiri UMK	Persen	NA	NA	91,00	25.000.000	92,00	25.000.000	93,00	25.000.000	94,00	125.000.000	95,00	25.000.000	95,00
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersusunnya dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	20	22	24	25.000.000	30	25.000.000	36	25.000.000	42	25.000.000	48	25.000.000	180
Penilaian Perwujudan RTR	Tersusunnya dokumen tekstual dan spasial hasil perwujudan RTR	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1
Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		Indikator Kegiatan : Jumlah	Dokumen			2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		laporan pelaksanaan forum penataan ruang														
Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Terfasiitasi atau terekomendasi kannya penataan ruang dilingkungan Kabupaten/Ko ta	Indikator Sub Kegiatan : Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Ko ta	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Terwujudnya perencanaan, penganggaran , keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Program :Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	6.735.512 .000	100	6.875.600.0 00	100	7.026.750.0 00	100	7.126.900.000	100	7.227.100 .000	100

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	610.080.000	100	706.800.000	100	723.850.000	100	725.400.000	100	728.500.000	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	5.220.000	2	5.300.000	2	5.350.000	2	5.400.000	2	5.500.000	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	2.460.000	2	2.500.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	15	15	12.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	perundangan															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	201.572.240.000	100	205.527.800.000	100	210.043.400.000	100	213.043.500.000	100	216.043.600.000	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		57	59	59	6.618.552.000	59	6.750.000.000	59	6.900.000.000	59	7.000.000.000	59	7.100.000.000	59
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	1	2.280.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Tersusunnya laporan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah	Laporan	0	0	0	0	4	5.300.000	4	5.400.000	4	5.500.000	4	5.600.000	4

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	keuangan triwulanan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					13.420.00 0		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.00 0	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	166.840.0 00	100	310.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	100	310.000.0 00	100
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	2	5.000.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan peurndnag- undangan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	orang	180	60	180	8.420.000	180	12.500.000	180	12.500.000	180	12.500.000	180	12.500.00 0	180

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perundang-Undangan														
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	14.884.690.000	100	18.782.000.000	100	21.207.000.000	100	22.132.000.000	100	23.057.000.000	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komonen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	3.650.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	182.500.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	0	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	134.636.000	4	140.000.000	4	145.000.000	4	150.000.000	4	155.000.000	4

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4	21.900.00 0	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.00 0	4
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peratura perundang- undangan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	2.190.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggara nya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	78	50	50	146.000.0 00	50	225.000.000	50	250.000.000	50	275.000.000	50	300.000.0 00	50
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen n	0	9	9	7.300.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.00 0	9
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian penyediaan jasa	Persen	100	100	100	185.139.0 71.000	100	197.894.811 .000	100	207.410.311 .000	100	223.857.311.0 00	100	240.304.3 11.000	100

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	sesuai ketentuan	penunjang urusan pemerintah daerah														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	2.190.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	5.778.290.000	12	6.154.338.000	12	6.423.188.000	12	6.923.088.000	12	7.422.988.000	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	404.299.000	12	454.299.000	12	504.299.000	12	554.299.000	12	604.299.000	12
Indikator Program :Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		2.400.000.000		2.044.950.000		1.489.850.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggara nya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundangan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen			100	0	100	0	100	3.400.000.000	100	2.689.900.000	100	2.134.700.000	100
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas opersional/lapangan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	2	1.000.000.000	1	644.950.000	1	644.850.000	4
Pengadaan Alat Besar	Tersedianya alat besar	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	2	1.400.000.000	2	1.400.000.000	1	845.000.000	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggara nya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persen	100	100	100	21.182.496.000	100	24.850.000.000	100	25.600.000.000	100	27.100.000.000	100	27.100.000.000	100

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	akuntabel dan sesuai ketentuan perundangan	pemerintah daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan terbayar pajaknya	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	41	41	43	571.848.000	45	630.000.000	45	630.000.000	45	680.000.000	45	680.000.000	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpeliharanya alat berat	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	9	43.670.000	9	125.000.000	9	125.000.000	9	125.000.000	9	125.000.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannva	Unit	1	1	1	101.597.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	0

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET. `
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangnan lainnya	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	123	36.500.000	123	50.000.000	123	75.000.000	123	75.000.000	123	75.000.000	0
Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.110.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat daerah yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat daerah	Persen	100	100	100	50.220.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan rekonsiliasi dan barang milik derah pada skpd	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2	25.110.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2

4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV. 2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	
			Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
			Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
			Normalisasi/Restorasi Sungai	
			Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
			Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di daerah kab/kota		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase penambahan sarpras persampahan		
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah yang terlayani Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	

		Kab/Kota	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
			Penyediaan Unit pengolahan setempat	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi mantap		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan		
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan		
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Pembangunan Jalan	
			Rehabilitasi Jalan	

			Penggantian Jembatan	
			Rekonstruksi Jalan	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi dengan kinerja baik		
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang		
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
			Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Peta Dasar	
			Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
			Penilaian Perwujudan RTR	
			Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	
			Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	

10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Alat Besar	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Terwujudnya layanan administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat daerah peraturan perundangan		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

Sumber : DPUPR, 2025

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel IV. 3 Indikator Utama Pembangunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	0	0	0	0	0	0,16	0,32	
2	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	84,50	79,02	79,26	79,49	79,73	79,97	80,21	
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	0,58	0,77	0,96	1,16	1,35	1,55	1,74	

Sumber : DPUPR, 2025

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel IV. 4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	84,50	79,02	79,26	79,49	79,73	79,97	80,21	
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	0	0	0	0	0	0,16	0,32	
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	0,58	0,77	0,96	1,16	1,35	1,55	1,74	
4	Persentase pemenuhan prasarana persampahan	Aduan	72,73	81,82	84,85	87,88	90,91	93,94	100	
5	Persentase wilayah kota yang bebas dari genangan banjir / rob	Persen	91,83	91,83	94,24	94,89	95,44	96,44	99,47	
6	Persentase pengawasan penataan ruang bangunan gedung dan jasa konstruksi	Persen	0	88,77	89,22	89,52	90,02	90,32	90,82	
7	Nilai SAKIP OPD	Indeks	81,25	84,55	84,67	84,69	84,71	84,73	84,75	

Sumber : DPUPR, 2025

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV. 5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUNAN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	100,00	92,83	92,83	93,52	94,25	94,84	99,47	
5	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	18,99	25,63	15,59	22,76	27,42	34,59	35,30	
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	84,50	79,02	79,26	79,49	79,73	79,97	80,21	
7	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	80,07	86,43	87,12	88,57	89,80	92,05	98,81	

Sumber : DPUPR, 2025

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV. 6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Prosentase rumah yang terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kab/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase rumah yang terlayani Pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik di daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : DPUPR, 2025

4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian (SDGs)

Tabel IV-7

Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase Rumah Tangga Tidak mem[unyai Jamban (Tidak ada fasilitas)	Persen	21,52							
3	Kondisi Mantap Jalan Kab/Kota	km	126.98	118.75	119.10	119.46	119.82	120.18	120.54	

Sumber : DPUPR, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kota Pekalongan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan berkewajiban melaksanakan program-program dalam Renstra DPUPR Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. DPUPR berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan perpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra DPUPR tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan; dan
4. Renstra DPUPR Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2025-2030 sesuai dengan tupoksi DPUPR Kota Pekalongan.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan, tanggungjawab serta kerjasama yang erat dari seluruh jajaran DPUPR Kota Pekalongan untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra ini, mendukung tercapainya Visi “Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”.

Pekalongan, 19 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKALONGAN



BAMBANG SUGIARTO, ST.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710304 199903 1 011

RENCANA STRATEGIS BAPPERIDA

2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan, Tim Penyusun dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, sebagai landasan dan eksistensi Bapperida guna mendukung terwujudnya Kota Pekalongan yang Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen RENSTRA Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 memuat lima bab, yaitu; (1) Pendahuluan; (2) Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Bapperida (3). Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; (4) Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan (5) Penutup.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima Kasih.

Pekalongan, 19 September 2025

KEPALA BAPPERIDA
KOTA PEKALONGAN



CAYEKTI WIDIGDO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750729 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPERIDA KOTA PEKALONGAN	6
2.1 GAMBARAN PELAYANAN BAPPERIDA KOTA PEKALONGAN	6
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	13
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
3.1 TUJUAN RENSTRA BAPPERIDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025-2029	28
3.2 SASARAN RENSTRA BAPPERIDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025-2029	29
3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029	31
3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029	32
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	34
4.1 URAIAN PROGRAM	34
4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN	35
4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	72
4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	84
4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH	84
4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	85
BAB V PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bapperida Kota Pekalongan	13
Tabel II-2 Komposisi Pegawai Bapperida Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan	15
Tabel II-3 Prasarana dan Sarana BAPPERIDA Kota Pekalongan Tahun 2025	15
Tabel II-4 Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan	17
Tabel II-5 Pencapaian Realisasi Keuangan Bapperida Kota Pekalongan	20
Tabel II-6 Keterkaitan Masalah Pokok Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, Masalah dan Akar Masalah	22
Tabel II-7 Keterkaitan Masalah Pokok Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja daerah, Masalah dan Akar Masalah	23
Tabel II-8 Keterkaitan Masalah Pokok Belum Optimalnya Kinerja Riset Dan Inovasi Daerah, Masalah dan Akar Masalah	24
 Tabel III- 1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Bapperida dalam pencapaian Visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029	30
Tabel III- 2 Strategi Bapperida	31
Tabel III- 3 Arah Kebijakan Renstra Bapperida	32
 Tabel IV-1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	35
Tabel IV-2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	72
Tabel IV-3 Indikator Utama Pembangunan	84
Tabel IV-4 Indikator Kinerja Utama PD.....	84
Tabel IV-5 Indikator Kinerja Kunci	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Struktur Organisasi Bapperida Kota Pekalongan	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra yang merupakan perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah, digunakan untuk menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra juga merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Dengan melihat gambaran di atas, maka Renstra mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Operasional RPJM Daerah.
2. Pedoman dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
4. Kontrak kinerja kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.
5. Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

RENSTRA disusun dalam serangkaian pentahapan yang sejalan dengan proses penyusunan RPJM DAERAH. Penyusunan Renstra dimulai dengan Persiapan Penyusunan yang didalamnya mencakup pekerjaan-pekerjaan pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja

tim penyusun, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya tim penyusun melakukan penyusunan Rancangan Awal Renstra yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJM DAERAH. Penyusunan rancangan awal Renstra ini mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJM DAERAH, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJM DAERAH. Rancangan awal ini selanjutnya disempurnakan menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Dan pada tahapan akhir, Rancangan Renstra disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah tidak mempunyai visi dan misi secara eksplisit, namun dirumuskan tujuan yang dikonstruksikan untuk mendukung perwujudan visi dan misi Kepala Daerah. Tujuan Renstra BAPPERIDA Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya Misi pertama RPJM Daerah Tahun 2025-2029, yaitu **Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945**. Selanjutnya secara terstruktur, dijabarkan ke dalam sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian target yang ditetapkan.

Renstra Bapperida Kota Pekalongan juga disusun dengan memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, dan juga Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renstra Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Bapperida selama lima tahun yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BAPPERIDA adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 5).
12. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 21B Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

1.3.1 Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang harus dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2025-2029, serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Renstra Bapperida Kota Pekalongan disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Bapperida Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pekalongan
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida Kota Pekalongan
3. Menjadi pedoman penyusunan renja yang merupakan penjabaran operasional dari Renstra untuk menentukan kegiatan, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam satu tahun
4. Menjadi dasar evaluasi Renja/RKPD
Dalam penyusunannya Renja selalu merujuk pada Renstra sehingga dalam pelaksanaan evaluasi Renja/ RKPD menjadi dasar atas evaluasi Renja/RKPD.
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

1.4 Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa sistematika penyusunan Renstra Bapperida tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan gambaran pelayanan perangkat daerah yang meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah. Selain itu bab ini juga menjelaskan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang disertai dengan strategi dan arah kebijakan Tahun 2025-2029.

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab ini menguraikan kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah. Bab ini juga menjelaskan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPERIDA KOTA PEKALONGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Bapperida Kota Pekalongan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapperida Kota Pekalongan

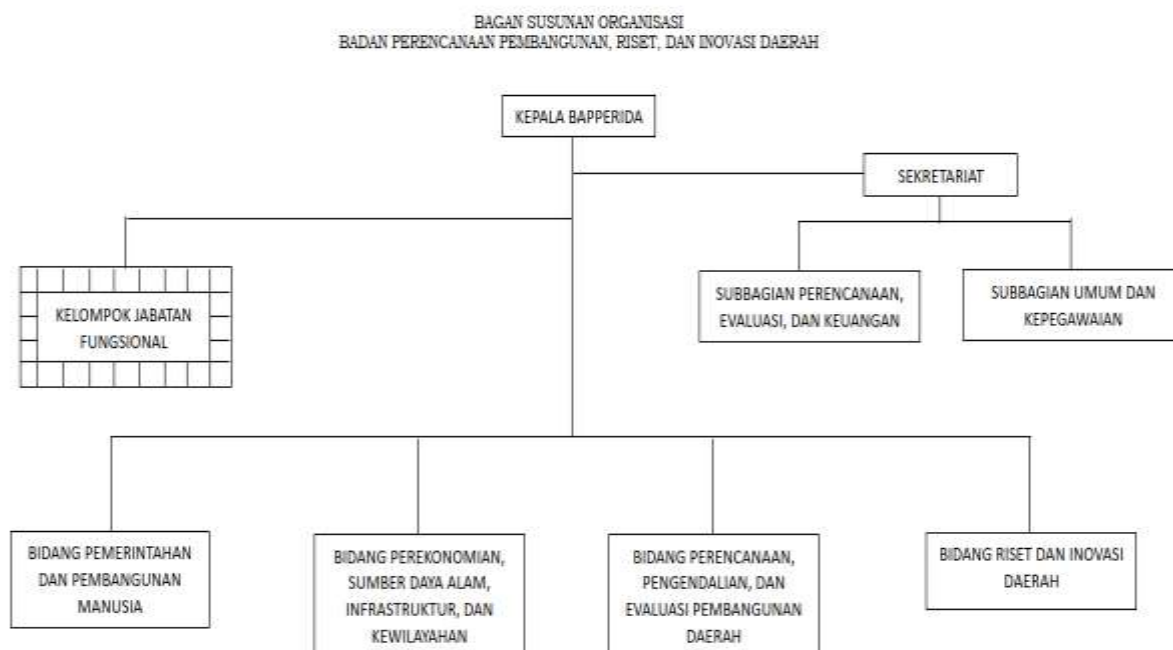
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 21B Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kota Pekalongan merupakan Organisasi Perangkat yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bapperida menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pengoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan dari perangkat daerah provinsi dan/atau instansi pemerintah pusat;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kesekretariatan;
9. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bapperida Kota Pekalongan terdiri dari Kepala Bapperida yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi

Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Wilayah, dan Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Penyusunan Program serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Bapperida Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar II-1
Struktur Organisasi Bapperida Kota Pekalongan

Sebagaimana Gambar II-1, masing-masing unsur dari organisasi Bapperida Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas :

Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik daerah, dan keuangan, serta pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Bapperida.

b. Fungsi :

- 1) pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Bapperida;
- 2) penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Bapperida;

- 3) perencanaan dan pengoordinasian pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur yang meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan fungsi Bapperida, baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, maupun data;
- 4) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, dan urusan akuntansi serta pelaporan keuangan;
- 5) pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan, kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan aset, serta urusan perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
- 6) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan, serta evaluasi kinerja aparatur;
- 7) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 8) pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa di lingkup Bapperida; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, mempunyai tugas:
 - menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi, dan keuangan;
 - menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - mengoordinasikan dan menyusun dokumen perencanaan, RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN; melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi;
 - mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun;
 - menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;

- mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
 - mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
 - mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi barang milik daerah, meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana;
 - mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor lainnya;
 - mengelola dan menyusun laporan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan
 - mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a. Tugas:

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

b. Fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJM DAERAH, dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- 2) pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 3) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan kementerian/lembaga/perangkat daerah di provinsi lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 5) pengoordinasian evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 6) pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 7) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

a. Tugas

Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan.

b. Fungsi

- 1) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJM DAERAH, dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- 2) penganalisaan dan pengkajian perencanaan kewilayahan;
- 3) pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- 4) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah di provinsi lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;

- 6) pengoordinasian evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- 7) pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- 8) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Tugas

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

- 1) pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- 2) pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- 3) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- 4) perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- 5) pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- 6) pengevaluasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- 7) pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 8) pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- 9) penyajian dan pengelolaan data informasi pembangunan daerah;
- 10) pengelolaan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- 11) penyusunan, pelaksanaan, serta analisis evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 12) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

a. Tugas

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan, yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

b. Fungsi

- 1) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- 2) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- 3) pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- 5) pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- 6) pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- 7) pengoordinasian pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- 8) pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 9) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPERIDA Kota Pekalongan per 1 Maret 2025, tercatat sebanyak 41 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

1. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Bapperida Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan adalah:

Tabel II-1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Bapperida Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN				GENDER		TOTAL (ORANG)
		SLTA	D3	S-1	S-2	L	P	
1	Sekretariat	5	3	3	2	10	3	13
2	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	4	2	3	3	6
3	Perekonomian, Sumber Daya Alam,	-	-	4	3	4	3	7

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN				GENDER		TOTAL (ORANG)
		SLTA	D3	S-1	S-2	L	P	
	Infrastruktur dan Kewilayahahn							
4	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	5	1	3	4	7
5	Riset dan Inovasi Daerah	1	-	3	2	2	4	6
6	Fungsional Perencana Ahli Madya	-	-	1	1	2	-	2
Jumlah (Orang)		6	4	20	11	24	17	41
Persentase (%)		15	10	49	27	59	41	

Sumber: BAPPERIDA Kota Pekalongan, Agustus 2025

Berdasarkan Tabel II-1 , diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMA sebanyak 6 orang atau 15% dan tertinggi adalah Magister (S2) sebanyak 11 orang atau 27% dari total pegawai Bapperida sebanyak 41 orang. Persentase tertinggi jenjang pendidikan adalah tingkat pendidikan S1 sejumlah 20 orang (49%).

Bapperida Kota Pekalongan memiliki 2 orang Fungsional Perencana Ahli Madya yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama. Guna melaksanakan tugas pokok bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat 6 orang berstatus jabatan sebagai Fungsional Perencana yang ditugaskan pada Bidang PPM, PPEPD dan PSWAIW. Sementara itu untuk melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan terdapat 2 orang fungsional peneliti pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bapperida didukung oleh SDM sesuai dengan pendidikan dan bidang tugasnya masing-masing.

SDM Bapperida Kota Pekalongan telah mencerninkan partisipasi gender yang tercermin dari persentase pegawai Bapperida dari jumlah 41 pegawai merupakan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang (41%) dan laki-laki sebanyak 24 orang (59%).

2. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bapperida Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III sebanyak 19 oarang atau 64%. Secara lengkap komposisi pegawai Bapperida berdasarkan golongan dapat dilihat pada

Tabel II-2
Komposisi Pegawai Bapperida Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	NON ASN	
1	Sekretariat	3	3	2	1	4	13
2	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	4	1	-	1	6
3	Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	5	1	-	1	7
4	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	4	1	1	-	7
5	Riset dan Inovasi Daerah	-	3	1	-	2	6
6	Fungsional Perencana Ahli Madya	-	-	2	-	-	2
Jumlah (Orang)		4	19	8	2	8	41
Persentase (%)		10	46	20	5	20	

Sumber: BAPPERIDA Kota Pekalongan, Agustus 2025

2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bapperida Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel II-3
Prasarana dan Sarana BAPPERIDA Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	23	Unit
2	Printer	28	Unit
3	Notebook / Laptop	44	Unit
4	LCD Proyektor	6	Unit
5	Mesin Ketik	2	Unit
6	AC	16	Unit
7	Televisi	6	Unit
8	Sound System	2	Unit
9	Filling Cabinet	36	Unit
10	Lemari display	1	Unit
11	White board	1	Unit
12	Kendaraan Roda 4	3	Unit
13	Kendaraan Roda 2	12	Unit
14	Drone	1	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
15	Perekam suara	2	Unit
16	Kamera	2	Unit
17	Mesin penghancur kertas	6	Unit
18	Scanner mobile	2	Unit
19	Eksternal Hardisk	6	Unit
20	Witeboard Interaktif	1	Unit
21	Dispenser	2	Unit
22	Clip on	1	Unit
23	Air Purifier	2	Unit
24	Ruang Rapat	2	Ruang

Sumber: BAPPERIDA Kota Pekalongan, Agustus 2025

Bapperida Kota Pekalongan secara umum memiliki ruangan yang terbagi sesuai peruntukannya. Bapperida Kota Pekalongan secara struktur terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan (PSDAIW), Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA). Masing-masing ruang pada bidang dilengkapi dengan ruang Kepala Bidang dan ruang rapat yang menyatu dengan ruang pegawai. Selain itu Bapperida memiliki 2 ruang rapat utama yaitu ruang rapat Pangripta dan ruang rapat Abhipraya.

Guna optimalisasi kinerja dan pelayanan Bapperida dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran dan kendaraan dinas baik perorangan maupun kendaraan dinas operasional. Jumlah kendaraan dinas perorangan roda 2 sebanyak 12 unit dan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit.

2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah. Kinerja Bapperida pada Renstra Tahun 2021-2026 fokus pada pelayanan publik, kualitas dokumen perencanaan, serta kualitas penelitian dan pengembangan dalam mendukung kinerja RPJM Daerah. Pada Tabel 2.5 berikut ini disajikan data Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

1. Kinerja Bapperida Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Dokumen Renstra Bapperida Tahun 2021-2026, kinerja IKU, Program dan Kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel II-4
Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Pekalongan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bappeda Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai SAKIP OPD			√	Indeks	86,00	87,00	88,00	89,00	88,60	86,03	87,07	88,10	88,50	88,50	100,3	100,8	100,1	99,43	99,89
a.	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah		√		persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b.	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		√		persen	100	100	100	100	100	100	100	102.73	100.08	100.34	100	100	102.73	100.08	100.34
c.	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		√		persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD			√	persen	100	100	100	100	100	100	97,33	99,19	100	100	100	97,33	99,19	100	100
a.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu		√		persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bappeda Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
b.	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu		√		persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
c.	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu		√		persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
d.	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah		√		persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
e.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian		√		persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
f.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud		√		persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase laporan hasil litbang			√	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
a.	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan		√		persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bappeda Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
b.	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)		√		Skor	70.93	72,00	73,00	73,00	74,00			76.60	-	-			106,3	-	-
c.	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJM DAERAH		√		persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: BAPPERIDA Kota Pekalongan, 2025

2. Kinerja Keuangan Bapperida Tahun 2020-2024

Dari sisi kinerja keuangan selama kurun waktu 2020-2024, kinerja keuangan Bapperida ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Pencapaian Realisasi Keuangan Bapperida Kota Pekalongan

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Ang-garan	Real-i-sasi
A	Belanja Langsung	8503,43	7440,75	7057,09	7641,96	7447,03	7230,86	6666,71	6655,08	7261,28	6853,47	85,03%	89,60%	94,30%	95,02%	92,03%	-2,98	39,10
1	Belanja Pegawai	5802,70	4959,27	4449,34	4342,69	4798,98	4853,98	4341,32	4143,77	4117,20	4320,28	83,65%	87,54%	93,13%	94,81%	90,02%	-4,18	37,84
2	Belanja Barang/Jasa	2677,05	2433,20	2564,41	3110,69	2606,09	2354,20	2279,27	2468,56	2965,43	2492,14	87,94%	93,67%	96,26%	95,33%	95,63%	0,34	41,86
3	Belanja Modal	23,69	48,29	43,34	188,58	41,95	22,68	46,12	42,75	178,66	41,06	95,78%	95,51%	98,63%	94,74%	97,87%	87,74	107,38

Sumber: BAPPERIDA Kota Pekalongan, 2025

2.2.4 Kelompok sasaran layanan

Bapperida sebagai unit kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan memiliki kelompok sasaran sasaran:

1. Pemerintah Daerah Internal
 - Kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) sebagai pengguna utama hasil perencanaan.
 - Perangkat daerah lain (dinas/badan/kantor) yang membutuhkan sinkronisasi program dengan rencana pembangunan.
2. Masyarakat
 - Warga umum sebagai penerima manfaat pembangunan.
 - Kelompok masyarakat sipil/organisasi kemasyarakatan yang ikut serta dalam musrenbang, forum konsultasi publik, atau usulan program.
3. Dunia Usaha dan Swasta
 - Investor dan pelaku usaha yang membutuhkan kepastian arah pembangunan daerah.
 - Asosiasi bisnis atau UMKM yang terlibat dalam kerja sama pembangunan ekonomi lokal.
4. Akademisi dan Lembaga Penelitian
 - Universitas, lembaga riset, maupun pakar yang menjadi mitra dalam pengumpulan data, kajian, serta inovasi pembangunan.
5. Pemerintah Pusat dan Lembaga Vertikal
 - Kementerian/lembaga pusat yang butuh sinkronisasi program pembangunan daerah dengan prioritas nasional.
 - Lembaga pengawasan seperti BPK atau KPK terkait akuntabilitas perencanaan
 - Instansi vertikal seperti BPS dalam rangka sinkronisasi data.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO
 - Organisasi lokal maupun internasional yang berfokus pada isu sosial, lingkungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya Bapperida Kota Pekalongan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi

faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Pekalongan.

Masalah pokok, masalah dan akar masalah yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapperida diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Hasil pemetaan masalah pokok belum optimalnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat Bapperida sebesar .. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) masalah yang dijabarkan lagi ke dalam akar masalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-6
Keterkaitan Masalah Pokok Belum optimalnya kualitas pelayanan publik,
Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya keselarasan perencanaan pembangunan, kinerja dan keuangan perangkat daerah	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Belum optimalnya administrasi keuangan perangkat daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
		Belum optimalnya Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Belum optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah	Belum optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

2. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja daerah

Hasil pemetaan masalah pokok belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja daerah diukur dengan indikator rata-rata skor perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja tingkat kota. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata skor perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja tingkat kota sebesar .. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam 6 (enam) masalah yang dijabarkan lagi ke dalam akar masalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-7
Keterkaitan Masalah Pokok Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja daerah, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja daerah	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan pendanaan
		Belum optimalnya satu data informasi guna perencanaan pembangunan daerah yang akurat
	Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia	Belum optimalnya pelaksanaan analisis data melalui forum satu data
	Belum optimalnya evaluasi kinerja dan pelaporan perangkat daerah	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah
	Belum optimalnya konsistensi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia,	Belum optimalnya perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan sumberdaya manusia
		Belum optimalnya kegiatan koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Belum optimalnya konsistensi perencanaan pembangunan bidang perekonomian	Belum optimalnya perencanaan bidang perekonomian
		Belum optimalnya kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya konsistensi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah	Belum optimalnya perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan
		Belum optimalnya kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

3. Belum optimalnya kualitas riset dan inovasi

Hasil pemetaan masalah pokok belum optimalnya kinerja riset dan inovasi daerah diukur dengan indikator indeks inovasi daerah. Berdasarkan data tahun 2024, indikator indeks inovasi daerah telah mencapai 77,07, namun demikian riset dan inovasi daerah belum merata pada seluruh urusan pemerintah daerah dan kolaborasi lintas *stakeholder* belum maksimal. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam 2 (dua) masalah yang dijabarkan lagi ke dalam akar masalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-8
Keterkaitan Masalah Pokok Belum Optimalnya Kinerja Riset Dan Inovasi Daerah, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kinerja Riset Dan Inovasi daerah	Belum optimalnya kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	Belum optimalnya kegiatan riset sesuai arah kebijakan RPJM Daerah
	Belum optimalnya implementasi inovasi daerah	Belum optimalnya pembangunan budaya inovasi daerah

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

2.3.2 Isu Strategis

Berdasarkan masalah di Bapperida, serta dengan memperhatikan isu strategis nasional, Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis Kota Pekalongan, isu strategis Bapperida Kota Pekalongan adalah:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tata kelola pemerintahan dalam era global dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan menembus batas. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan

pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara cepat dan akurat. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik.

2. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan fondasi utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Perencanaan yang baik harus mampu mencerminkan visi dan misi daerah, sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana pembangunan disusun secara sistematis, berbasis data yang akurat, serta mempertimbangkan potensi dan tantangan yang ada. Tanpa perencanaan yang berkualitas, program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran, tumpang tindih, dan kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam penyusunannya, perencanaan pembangunan yang berkualitas harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, hingga akademisi. Keterlibatan multipihak ini akan memperkaya perspektif, memperkuat legitimasi, serta memastikan bahwa rencana pembangunan benar-benar inklusif. Selain itu, perencanaan yang baik harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memberi manfaat jangka pendek, tetapi juga menjamin kesejahteraan generasi mendatang.

Perencanaan yang berkualitas juga menuntut adanya integrasi antara perencanaan jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Hal ini penting untuk memastikan kesinambungan program dan konsistensi pencapaian target pembangunan daerah. Dengan integrasi yang baik, setiap kegiatan pembangunan akan saling mendukung dan mengarah pada tujuan bersama.

Oleh karena itu, kualitas perencanaan pembangunan daerah bukan sekadar dokumen formalitas, tetapi merupakan instrumen strategis yang menentukan arah, efektivitas, dan efisiensi pembangunan. Semakin tinggi kualitas perencanaan, semakin besar pula peluang bagi daerah untuk meningkatkan daya saing, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Perencanaan yang berkualitas juga memperhatikan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Inklusif berarti pembangunan dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan pemerataan.

Sementara itu, keberlanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan masa kini dengan kelestarian sumber daya bagi generasi mendatang. Hal ini mencakup tata kelola lingkungan yang baik, pengendalian tata ruang, transportasi ramah lingkungan, serta penyediaan hunian dan pelayanan publik yang layak.

3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Akuntabilitas pembangunan daerah merupakan prinsip penting yang menjamin setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga menyangkut transparansi proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah daerah dapat menunjukkan bahwa setiap sumber daya yang digunakan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Akuntabilitas juga mendorong tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Masyarakat akan merasa yakin bahwa pemerintah bekerja secara transparan, adil, dan berorientasi pada pelayanan. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting yang akan mendukung kelancaran berbagai program pembangunan.

Akuntabilitas pembangunan erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi, transparansi semakin terjaga dan kualitas pembangunan semakin meningkat. Partisipasi ini menjadikan pembangunan lebih inklusif serta sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan wujud komitmen moral pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara bijak, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui akuntabilitas yang kuat, pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Riset dan Inovasi

Riset dan inovasi merupakan dua aspek penting yang harus menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui riset, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Data yang dihasilkan dari riset menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar relevan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tanpa riset yang memadai, kebijakan sering kali hanya berdasarkan asumsi, sehingga berisiko tidak efektif bahkan membebani anggaran daerah.

Di sisi lain, inovasi menjadi kunci untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan. Inovasi memungkinkan pemerintah daerah menghadirkan terobosan baru dalam pelayanan publik, baik melalui pemanfaatan teknologi digital, penyederhanaan proses birokrasi, maupun pengembangan model layanan yang lebih inklusif. Dengan inovasi, pelayanan dapat menjadi lebih cepat, transparan, efisien, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Kombinasi riset dan inovasi pada akhirnya akan memperkuat daya saing daerah. Pemerintah daerah tidak hanya menjalankan tugas administratif semata, melainkan juga mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Riset menghadirkan dasar pengetahuan yang kuat, sedangkan inovasi mendorong penerapan solusi kreatif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, riset dan inovasi harus dipandang sebagai investasi strategis bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola yang modern, responsif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029, Bapperida Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bapperida Kota Pekalongan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bapperida Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, yaitu **“Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja tingkat kota, kualitas riset dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik”**.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi 1 RJPM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 yaitu Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Secara spesifik, tujuan Bapperida mendukung Tujuan kota ke-1 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 21B Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan. Dalam hal ini Bapperida Kota Pekalongan diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik melalui penelitian dan pengembangan yang selaras dengan RPJM Daerah dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pekalongan dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Bappeda menetapkan tiga sasaran strategis :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dengan indikator nilai SAKIP Bapperida

2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan.

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan diukur dengan indikator persentase konsistensi perencanaan pembangunan yang dihitung berdasarkan nilai keselarasan antara program RKPD dan RPJMD, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja dengan Renstra serta nilai pengukuran kinerja.

3. Meningkatnya kualitas inovasi daerah

Meningkatnya kualitas inovasi daerah diukur dengan indikator rata-rata kinerja riset dan inovasi yang dihitung dari persentase riset sesuai dengan arah kebijakan RPJMD dan persentase OPD yang memiliki inovasi daerah.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Bapperida dalam pencapaian Visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel III- 1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Bapperida dalam pencapaian
Visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029**

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	84,79	84,89	84,99	85,09	85,19	85,29	85,39	85,39
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Bapperida	Nilai	88,50	88,70	88,82	88,84	88,86	88,88	88,90	88,90
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja daerah tingkat kota		Rata-rata skor perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja tingkat kota	Persen	72,32	73,85	75,39	76,93	78,46	80,00	81,54	81,54
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	indikator persentase konsistensi perencanaan pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan kualitas riset dan inovasi		Indeks inovasi daerah	Indeks	77,07	77,08	77,09	77,10	77,11	77,12	77,13	77,13
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Rata-rata kinerja riset dan inovasi	persen	-	87,93	89,66	89,66	91,38	91,38	91,38	91,38

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif ber

Strategi Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Penahapan pembangunan tersebut merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida.

Tabel III- 2 Strategi Bapperida

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Tema Pembangunan RPJMD	Peningkatan kompetensi aparatur perencana di daerah melalui sosialisasi, pelatihan, serta bimbingan teknis.	Penyempurnaan sistem, mekanisme, dan prosedur penyusunan dokumen perencanaan	Optimalisasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis teknologi digital untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan evaluasi pembangunan, mempermudah integrasi data, dan meningkatkan transparansi.	Evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan, baik dari sisi substansi, ketepatan waktu, maupun relevansi terhadap kebutuhan daerah	Perwujudan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital.	Penguatan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi kinerja, integritas, manajemen talenta, transformasi arsitektur dan kolaborasi digital, BMD, elektrifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)	Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan pendekatan partisipatif dan transparansi publik, pengelolaan layanan digital, mitigasi risiko korupsi, pemutakhiran data dan optimalisasi potensi pendapatan	Penguatan tata kelola SDM, keuangan daerah, dan optimalisasi pengamanan BMD untuk mendukung Pembangunan infrastruktur daerah	Optimalisasi perwujudan profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta perwujudan single platform digital dalam rangka perwujudan Fondasi Mina Batik

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			daerah, serta penguatan corporate university dalam pengembangan ASN yang mendukung perwujudan ekonomi sirkular dan Pembangunan yang berkelanjutan		
Strategi Renstra OPD	Pemetaan Kebutuhan Riset dan Pengembangan Inovasi melalui Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ-PID),	Penyempurnaan system, mekanisme dan penetapan kebijakan penyusunan riset dan pengembangan inovasi berdasarkan dokumen RIPJ PID	Penguatan jejaring dan kerjasama riset dan inovasi baik secara lokal, regional, nasional dan internasional sesuai dengan arah dan prioritas dalam RIPJ-PID	Peningkatan Kualitas dan Hilirisasi Riset serta Pengembangan Inovasi melalui sinergitas perguruan tinggi-BRIN-Kementerian Terkait	Diseminasi Riset dan Pemanfaatan Inovasi kepada masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan daya saing daerah

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Rebstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida dan arah kebijakan RPJMD selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Bapperida. Arah kebijakan RPJMD dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel III- 3 Arah Kebijakan Renstra Bapperida

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJM DAERAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPERIDA	KET.
1.	Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital,	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJM DAERAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPERIDA	KET.
2.	dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.	Penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah	

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.1.1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 persen; skor Satu Data Indonesia (SDI) sebesar 76,44 persen; persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 persen.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase konsistensi perencanaan pembangunan (rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM Daerah, dan kegiatan/sub kegiatan pada Renja-Renstra) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebesar 100 persen; persentase konsistensi perencanaan pembangunan (rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM Daerah, dan kegiatan/sub kegiatan pada Renja-Renstra) bidang perekonomian sebesar 100 persen; persentase konsistensi perencanaan pembangunan (rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM Daerah, dan kegiatan/sub kegiatan pada Renja-Renstra) bidang infrastruktur wilayah sebesar 100 persen.

4.1.2. Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Riset dan Inovasi Daerah

Fokus program adalah invensi dan inovasi Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah sebesar 66,67 persen.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel IV- 1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PERENCANAAN																
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya perencanaa n pembangun an daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Persentas e ketersedia an dokumen perencana an tepat waktu				100	300.000.0 00	100	300.000. 000	100	300.00 0.000	100	350.000. 000	100	400.00 0.000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terwujudnya perencanaa n pembangun an daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Persentas e penyusun an perencana an dan pendanaa n				100	300.000.0 00	100	300.000. 000	100	300.00 0.000	100	300.000. 000	100	300.00 0.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rancanga n Awal RPJM DAERAH/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJM Daerah Maka Rancanga n Teknokrati k)	Dokume n	5	7	5	300.000.0 00	5	300.000. 000	5	300.00 0.000	6	350.000. 000	7	400.00 0.000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya data informasi perencanaa n pembangun an yang akurat dan sesuai ketentuan	Skor Satu Data Indonesia (SDI)				72,44	20.000.00 0	73,44	20.000.0 00	74,44	20.000 .000	75,44	20.000.0 00	76,44	20.000 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	perundanga n															
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya data informasi perencanaan pembangunan yang akurat dan sesuai ketentuan perundanga n	Persentas e pelaksana an analisis data melalui forum satu data				100	20.000.00 0	100	20.000.0 00	100	20.000 .000	100	20.000.0 00	100	20.000 .000	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Analisis Data dan Informasi Perencana an Pembangu nan Daerah	Dokume n	1	1	1	20.000.00 0	1	20.000.0 00	1	20.000 .000	1	20.000.0 00	1	20.000 .000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN	Terwujudnya evaluasi dan pelaporan	Persentas e ketersedia				100	45.155.00 0	100	46.000.0 00	100	46.000 .000	100	46.000.0 00	100	46.000 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	perencanaa n pembangun an daerah yang berkualitas dan sesuai ketentuan perundanga n	an dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu														
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya evaluasi dan pelaporan perencanaa n pembangun an daerah yang berkualitas dan sesuai ketentuan perundanga n	Persentas e pelaksana an evaluasi dan pelaporan bidang perencana an pembangu nan daerah				100	45.155.00 0	100	46.000.0 00	100	46.000 .000	100	46.000.0 00	100	46.000 .000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan		Jumlah Laporan Hasil	Laporan	8	5	4	45.155.00 0	4	46.000.0 00	4	46.000 .000	4	46.000.0 00	4	46.000 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan														
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan sumberdaya manusia yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJM DAERAH, dan Kegiatan/ Sub				100	243.452.000	100	244.792.000	100	244.792.000	100	244.792.000	100	263.188.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia														
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terwujudnya perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan sumberdaya manusia yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan				100	243.452.000	100	244.792.000	100	244.792.000	100	244.792.000	100	263.188.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Pemerinta han	Dokume n	0	0	2	26.280.00 0	2	26.280.0 00	2	26.280 .000	2	26.280.0 00	2	26.280 .000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Pemerinta han yang	Dokume n	1	1	1	14.965.00 0	1	15.000.0 00	1	15.000 .000	1	15.000.0 00	1	15.000 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dikoordinir Penyusun annya (RPJPD, RPJM Daerah dan RKPD)														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisa si Renstra/R enja dengan RKPD/RP JM Daerah pada Bidang Pemerinta han	Dokume n	1	1	1	88.500.00 0	1	89.000.0 00	1	89.000 .000	1	89.000.0 00	1	89.000 .000	
Asistensi Penyusunan Dokumen		Jumlah Laporan Hasil	Laporan	0	0	2	10.512.00 0	2	10.512.0 00	2	10.512 .000	2	10.512.0 00	3	15.768 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Asistensi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Pembangu nan Manusia														
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan	Laporan	1	1	2	14.965.00 0	2	15.000.0 00	2	15.000 .000	2	15.000.0 00	2	15.000 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	1	2	88.230.000	2	89.000.000	2	89.000.000	2	89.000.000	2	89.000.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Terwujudnya perencanaan bidang perekonomian	Persentase konsistensi				100	66.546.000	100	69.016.000	100	69.016.000	100	69.016.000	100	76.024.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	an yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keseluruhan program pada RKPD-RPJM DAERAH, dan Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Perekonomian														
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Terwujudnya perencanaan bidang perekonomian yang	Persentase kegiatan Fasilitas dan Monev				100	66.546.000	100	69.016.000	100	69.016.000	100	69.016.000	100	76.024.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(Sumber Daya Alam)	mendukung perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan														
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	0	0	2	14.016.000	2	14.016.000	2	14.016.000	2	14.016.000	3	21.024.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/R	Dokumen	2	1	1	47.530.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daerah Bidang Perekonomian		enja dengan RKPD/RP JM Daerah pada Bidang Perekono mian														
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya perencanaa n bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaa n pembangun an daerah	Persentas e konsistens i perencana an pembangu nan (Rata- rata nilai keselarasa n program pada RKPD- RPJM DAERAH, dan Kegiatan/				100	202.528.0 00	100	202.528. 000	100	202.52 8.000	100	202.528. 000	100	212.16 4.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) Bidang Infrastruktur Wilayah														
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terwujudnya perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				100	202.528.000	100	202.528.000	100	202.528.000	100	202.528.000	100	212.164.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	Dokumen	0	0	2	10.512.000	2	10.512.000	2	10.512.000	2	10.512.000	3	15.768.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daerah Bidang Infrastruktur		Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah an														
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksana an Monitoring dan Evaluasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat	Dokume n	0	0	1	5.840.000	1	5.840.00 0	1	5.840. 000	1	5.840.00 0	1	5.840. 000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Daerah Bidang Infrastrukt ur														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisa si Renstra/R enja dengan RKPD/RP JM Daerah pada Bidang Infrastrukt ur	Dokume n	2	2	2	136.660.0 00	2	136.660. 000	2	136.66 0.000	2	136.660. 000	2	136.66 0.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusun an Dokumen	Laporan	0	0	2	10.512.00 0	2	10.512.0 00	2	10.512 .000	2	10.512.0 00	3	15.768 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daerah Bidang Kewilayahan		Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah an														
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksana an Monitoring dan Evaluasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah	Laporan	0	0	1	5.256.000	1	5.256.00 0	1	5.256. 000	1	5.256.00 0	1	5.256. 000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Bidang Kewilayah an														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisa si Renstra/R enja dengan RKPD/RP JM Daerah pada Bidang Kewilayah an	Laporan	1	1	1	35.500.00 0	1	35.500.0 00	1	35.500 .000	1	35.500.0 00	1	35.500 .000	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N																
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Terwujudnya Riset dan Inovasi Daerah	Rata-rata kinerja Riset dan Inovasi					942.400.0 00		592.400. 000		962.40 0.000		597.400. 000		602.40 0.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		(Kinerja Riset: Persentase riset sesuai arah Kebijakan RPJM DAERAH. Kinerja Inovasi: Persentase OPD yang memiliki inovasi daerah tahun n-1 dan n-2)														
Invensi dan Inovasi	Tersusunnya Riset dan Inovasi Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Riset dan				100	942.400.000	100	592.400.000	100	962.400.000	100	597.400.000	100	602.400.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Koordinasi Inovasi														
Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaa n untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan	1	1	2	380.000.000	1	30.000.000	2	400.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaa n untuk prakarsa pengemba ngan Riset dan Inovasi di daerah berdasark an	Laporan	5	5	5	175.000.000	5	175.000.000	5	175.000.000	5	175.000.000	5	175.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
permasalahan daerah		kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah														
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Laporan	1	1	1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		(pelatihan perlindung an KI, fasilitas perlindung an KI)														
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pus at/organisasi penelitian lainnya di daerah		Jumlah kegiatan koordinasi pelaksana an penelitian dan pengabdia n kepada masyarak at berbasis penelitian, pengemba ngan, pengkajian , dan penerapan ilmu pengetahu	Laporan	2	1	2	150.000.0 00	2	150.000. 000	2	150.00 0.000	2	150.000. 000	2	150.00 0.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		an dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah														
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	1	1	2	164.000.000	2	164.000.000	2	164.000.000	2	164.000.000	2	164.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk	Laporan	1	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		penataan basis data Riset dan Inovasi														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Terwujudnya perencanaa n, penganggar an, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundanga n	Persentas e keselarasa n perencana an, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah				100	4.826.501. 000	100	4.826.50 1.000	100	4.826. 501.00 0	100	4.826.50 1.000	100	4.831. 501.00 0	
Perencanaan, Penganggaran,	Tersusunnya perencanaa	Persentas e				100	14.916.00 0	100	14.916.0 00	100	14.916 .000	100	14.916.0 00	100	19.916 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n, penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundanga n	ketercapai an perencana an, pengangg aran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Dokume n	2	3	2	1.972.000	2	1.972.00 0	2	1.972. 000	2	1.972.00 0	3	6.972. 000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokume n	2	2	2	1.394.000	2	1.394.00 0	2	1.394. 000	2	1.394.00 0	2	1.394. 000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusun an Dokumen RKA- SKPD														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perubaha n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA- SKPD	Dokume n	15	15	15	11.550.00 0	15	11.550.0 00	15	11.550 .000	15	11.550.0 00	15	11.550 .000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan	Persentas e ketercapai an administra si keuangan				100	4.811.585. 000	100	4.811.58 5.000	100	4.811. 585.00 0	100	4.811.58 5.000	100	4.811. 585.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	peraturan perundanga n	perangkat daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/B ulan	31	33	31	4.774.293. 000	31	4.774.29 3.000	31	4.774. 293.00 0	31	4.774.29 3.000	31	4.774. 293.00 0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokume n	12	12	12	36.000.00 0	12	36.000.0 00	12	36.000 .000	12	36.000.0 00	12	36.000 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	1	1.292.000	1	1.292.000	1	1.292.000	1	1.292.000	1	1.292.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi				100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	pemerintah n yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundanga n	si umum dan jasa penunjang urusan pemerinta h daerah														
Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi kepegawaia n perangkat daerah yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundanga n	Persentas e ketercapai an administra si kepegawai an perangkat daerah				100		100		100		100		100		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kelengkap an														
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentas e ketercapai an administra si umum perangkat daerah				100		100		100		100		100		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	Paket	4	4	4	2.120.000	4	2.120.00 0	4	2.120. 000	4	2.120.00 0	4	2.120. 000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	4	4	4	70.000.00 0	4	70.000.0 00	4	70.000 .000	4	70.000.0 00	4	70.000 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengka pan Kantor yang Disediaka n														
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n	Paket	4	4	4	2.580.000	4	2.580.00 0	4	2.600. 000	4	2.600.00 0	4	2.600. 000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	Paket	4	4	4	40.463.00 0	4	40.463.0 00	4	40.463 .000	4	40.463.0 00	4	40.463 .000	
Penyediaan Barang Cetakn		Jumlah Paket Barang	Paket	13	13	2	15.750.00 0	2	15.750.0 00	2	16.000 .000	2	16.000.0 00	2	16.000 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
dan Penggandaan		Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan														
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	2.580.000	2	2.600.000	2	2.600.000	2	2.600.000	2	2.600.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Paket	325	200	325	212.459.000	325	213.000.000	325	213.000.000	325	213.000.000	325	213.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Konsultasi SKPD														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sesuai ketentuan	Persentas e ketercapai an penyediaa n jasa penunjang urusan pemerinta h daerah				100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	990.000	4	1.000.00 0	4	1.000. 000	4	1.000.00 0	4	1.000. 000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air	Laporan	4	4	4	75.000.00 0	4	75.000.0 00	4	75.000 .000	4	75.000.0 00	4	75.000 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		dan Listrik yang Disediaka n														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	12	92.431.00 0	12	95.000.0 00	12	95.000 .000	12	100.000. 000	12	100.00 0.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundanga n	Persentas e pengadaa n/pemelih araan barang milik daerah				100	280.639.0 00	100	284.000. 000	100	284.00 0.000	100	289.000. 000	100	289.00 0.000	
Pemeliharaan Barang Milik	Terselengga ranya	Persentas e		100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundanga n	pengadaa n/pemelih araan barang milik daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka	Unit	14	15	15	92.648.00 0	15	93.000.0 00	15	93.000 .000	15	93.000.0 00	15	93.000 .000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATO R	SATUA N	BASELI NE 2024	BASELI NE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		n Pajaknya														
Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinann ya	Unit	41	41	41	19.570.00 0	41	20.000.0 00	41	20.000 .000	41	20.000.0 00	41	20.000 .000	

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV- 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
		Skor Satu Data Indonesia (SDI)	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD- RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) bidang Perekonomian	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
		Persentase konsistensi perencanaan pembangunan (Rata-rata nilai keselarasan program pada RKPD-RPJMD, dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja-Renstra) Bidang Infrastruktur Wilayah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
3	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Invensi dan Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			mengatasi permasalahan daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
			Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel IV- 3 Indikator Utama Pembangunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks inovasi daerah	indeks	77,08	77,09	77,10	77,11	77,12	77,13	

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel IV- 4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan	persen	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Rata-rata kinerja Riset dan Inovasi	persen	87,93	89,66	89,66	91,38	91,38	91,38	91,38	
3	Nilai SAKIP OPD	nilai	88,70	88,82	88,84	88,86	88,88	88,90	88,90	

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV- 5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rata-rata skor perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja tingkat kota	persen	73,85	75,39	76,93	78,46	80,00	81,54	
2	Indeks inovasi daerah (IUP)	indeks	77,08	77,09	77,10	77,11	77,12	77,13	
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD	indeks	84,89	84,99	85,09	85,19	85,29	85,39	

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan, diolah, 2025

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 berada pada tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Bapperida Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Bapperida Kota Pekalongan memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM DAERAH) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Bapperida Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian serta pengembangan daerah berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Bapperida Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Bapperida Tahun 2025-2029 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Bapperida Kota Pekalongan sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Strategis Bapperida Kota Pekalongan dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026.

Rencana Strategis Bapperida Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran visi, misi dan program tahun 2025-2029 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapperida Kota Pekalongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dan tugas pokok serta fungsi, maka Bapperida Kota Pekalongan berperan dalam mensukseskan capaian Misi Ketujuh.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. BAPPERIDA Kota Pekalongan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. BAPPERIDA Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra BAPPERIDA Kota Pekalongan 2025-2029 dan RPJM Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra BAPPERIDA Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, maka dijabarkan ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra BAPPERIDA Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode 2025-2030 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPERIDA Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan kewajiban bagi seluruh individu BAPPERIDA Kota Pekalongan mendukung dan melaksanakan untuk kesuksesan pelaksanaan Renstra BAPPERIDA Kota Pekalongan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan 2025-2029, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari BAPPERIDA Kota Pekalongan.

KEPALA BAPPERIDA KOTA PEKALONGAN



CAYEKTI WIDIGDO, AP.,M.Si.

Pemuda Utama Muda

NIP. 19750729 199412 1 001



**PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN**

RENCANA STRATEGIS **RENSTRA**

**Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

2025 – 2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan untuk periode 2025 - 2029. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan mengarahkan pengelolaan sumber daya manusia aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Rencana Strategis BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah. Selain itu, dokumen ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pekalongan.

Penyusunan dokumen Renstra ini melibatkan berbagai pihak, baik dari internal BKPSDM Kota Pekalongan maupun instansi terkait lainnya. Kami berharap, melalui penyusunan Renstra ini, dapat tercipta sistem manajemen ASN yang lebih efektif dan efisien, yang akan mempercepat proses reformasi birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari semua pihak yang berkepentingan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan dalam menciptakan birokrasi yang lebih berkualitas dan mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan. Semoga apa yang tercantum dalam dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi pembangunan SDM di Pemerintah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 19 September 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKALONGAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.4 Kinerja Keuangan BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	30
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan	31
2.2 Permasalahan dan Isu Stategis Perangkat Daerah	31
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.2.2 Isu Strategis.....	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.....	38
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	38
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	39
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	41
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN.....	47
4.1 Uraian Program	47
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	49
4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	59
4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan	62

4.5 Target Keberhasilan pencapaian ujian dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	62
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	62
4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	63
4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	63
BAB V PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BKPSDM Kota Pekalongan	11
Tabel II-2 Komposisi Pegawai BKPSDM Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan	11
Tabel II-3 Sarana dan Prasarana BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025	12
Tabel II-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Pekalongan	16
Tabel II-5 Pencapaian Realisasi Keuangan BKPSDM Kota Pekalongan	30
Tabel II-6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	31
Tabel II-7 Isu Strategis Perangkat Daerah	35
Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD	38
Tabel III-2 Strategi Renstra PD	40
Tabel III-3 Arah Kebijakan Rencana Perangkat Daerah	45
Tabel IV-1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	49
Tabel IV-2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	59
Tabel IV-3 Indikator Utama Pembangunan	62
Tabel IV-4 Indikator Kinerja Utama PD.....	62
Tabel IV- 5 Indikator Kinerja Kunci	62
Tabel IV-6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	63
Tabel IV-7 Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Struktur Organisasi BKPSDM Kota Pekalongan	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Pekalongan menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan profesional. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang dan terstruktur guna memastikan bahwa setiap tahapan pengembangan SDM dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Seiring dengan dinamika perkembangan daerah dan kebutuhan organisasi pemerintah, perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Pekalongan menjadi sangat penting. Renstra ini akan menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas ASN. Penyusunan Renstra BKPSDM Kota Pekalongan tahun 2025 - 2029 ini bertujuan untuk menciptakan SDM yang mampu menjawab tantangan perubahan dan tuntutan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Renstra BKPSDM Kota Pekalongan tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan berbagai faktor, antara lain perubahan regulasi, tantangan dan peluang dalam pengelolaan ASN, serta hasil evaluasi kinerja dan capaian yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan Renstra ini adalah penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang semakin ditekankan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), BKPSDM Kota Pekalongan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan reformasi birokrasi dan sistem merit, serta

meningkatkan kapasitas kelembagaan guna mendukung pengembangan SDM yang berkualitas.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pekalongan tahun 2025-2029 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam

Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Wali Kota yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan kepegawaian dan Pengembangan SDM yang harus dilaksanakan Oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan dalam waktu Tahun 2025 - 2029.

2. Tujuan

Dokumen Renstra BKPSDM Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Program, Kegiatan, Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian serta pengembangan kompetensi aparatur. Pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM mencakup berbagai aspek pengelolaan sumber daya manusia aparatur, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan karier, pelatihan dan pendidikan, hingga penataan organisasi serta pembinaan kedisiplinan pegawai. Dengan berfokus pada peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur, BKPSDM berupaya untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

BKPSDM mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan SDM yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKPSDM menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
- b. perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;

- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengadaan, informasi dan pembinaan pegawai;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang mutasi dan promosi ASN;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengembangan SDM dan kompetensi ASN;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai;
- d. Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
- e. Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi ASN;
- f. UPTB; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar II-1
Struktur Organisasi BKPSDM Kota Pekalongan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh BKPSDM Kota Pekalongan, merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur. Pemanfaatan sumber daya ini diarahkan agar seefisien dan seefektif mungkin dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Gambaran mengenai pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikannya sebagaimana Tabel II-1 berikut:

Tabel II-1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BKPSDM Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN							GENDER		TOTAL (ORANG)
		SD	SMP	SLTA	D3	S-1	S-2	S-3	L	P	
1	Sekretariat	1	0	6	3	6	1	0	12	5	17
2	Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai	0	0	1	1	5	1	0	1	7	8
3	Pengembangan SDM dan Kompetensi ASN	0	0	0	1	4	1	0	4	2	6
4	Mutasi dan Promosi ASN	0	0	1	0	6	1	0	3	5	8
JUMLAH		1	0	8	5	21	4	0	20	19	39

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, Agustus 2025

Berdasarkan Tabel II-1 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan SI dan S2 dengan jumlah dengan persentase 64,10%.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan didukung sumber daya manusia sejumlah 39 orang terdiri dari 29 orang ASN dan 10 orang non ASN. Jumlah ASN BKPSDM Kota Pekalongan dapat diperinci sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II-2
Komposisi Pegawai BKPSDM Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	NON ASN	
1	Sekretariat	2	5	2	1	7	17
2	Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai	1	4	1	1	1	8
3	Pengembangan SDM dan Kompetensi ASN	1	2	1	1	1	6
4	Mutasi dan Promosi ASN	0	7	0	0	1	8
JUMLAH		4	18	4	3	10	39

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, Agustus 2025

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, BKPSDM Kota Pekalongan dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang yang berpengaruh

langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana cukup memadai namun perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Beberapa jenis Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pekalongan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II-3
Sarana dan Prasarana BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	A.C. Sentral	1	Unit
2	A.C. Split	11	Unit
3	A.C. Window	23	Unit
4	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Unit
5	Alat Pemadam/Portable	3	Unit
6	Alat Penghancur Kertas	2	Unit
7	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	2	Unit
8	Audio Mixing Portable	1	Unit
9	Bangku Tunggu	2	Unit
10	Bracket Standing Peralatan	1	Unit
11	Brandkas	1	Unit
12	Camera + Attachment	1	Unit
13	Camera Electronic	1	Unit
14	Capture Card	1	Unit
15	Dispenser	5	Unit
16	Facsimile	1	Unit
17	Filing Cabinet Besi	18	Unit
18	Gerobak Tarik	1	Unit
19	Gordyin/Kray	80	Unit
20	Handy Cam	1	Unit
21	Hard Disk	1	Unit
22	Headphone	2	Unit
23	Infrared Thermometer	1	Unit
24	Kabel Listril	2	Unit
25	Kipas Angin	32	Unit
26	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	Unit
27	Kursi Besi/Metal	75	Unit
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	19	Unit
31	Kursi Rapat	163	Unit
32	Kursi Tamu	1	Unit
33	Kursi Tangan	2	Unit
34	Lap Top	11	Unit
35	Lemari Besi/Metal	14	Unit
36	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	Unit
37	Lemari Es	1	Unit
38	Lemari Kaca	1	Unit
39	Lemari Kayu	4	Unit
40	Lemari Pakaian	22	Unit
41	Local Area Network (LAN)	1	Unit
42	Loudspeaker	3	Unit
43	Megaphone	3	Unit
44	Meja Kerja Kayu	2	Unit
45	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	28	Unit
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	Unit
49	Meja Komputer	1	Unit
50	Meja Makan Besi	2	Unit
51	Meja Rapat	44	Unit
52	Meja Resepsionis	1	Unit
53	Mesin Absensi	3	Unit
54	Mesin Bor Tangan	1	Unit
55	Mesin Gerinda Tangan	1	Unit
56	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	Unit
57	Mesin Pemotong Rumput	2	Unit
58	Microphone	6	Unit
59	Microphone/Wireless MIC	4	Unit
60	Mimbar/Podium	1	Unit
61	Modem	1	Unit
62	Monitor	2	Unit
63	Note Book	18	Unit
64	P.C Unit	9	Unit
65	Papan Nama Instansi	1	Unit
66	Papan Pengumuman	1	Unit
67	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit
68	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
69	Peralatan Olah Raga Lainnya lain-lain	1	Unit
70	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	Unit
71	Pompa Lain-lain	2	Unit
72	Portable Generating Set	1	Unit
73	Power Amplifier	1	Unit
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	Unit
75	Proyektor + Attachment	4	Unit
76	Rak Besi	13	Unit
77	Rak Kayu	2	Unit
78	Rak Piring Alumunium	1	Unit
79	Rotary Filling	4	Unit
80	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	5	Unit
81	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
82	Kendaraan Roda 2	11	Unit
83	Kendaraan Roda 4	2	Unit
84	Server	1	Unit
85	Sofa	2	Unit
86	Sound System	2	Unit
87	Station Wagon	2	Unit
88	Telephone (PABX)	1	Unit
89	Televisi	7	Unit
90	Tempat Tidur Besi	42	Unit
91	Tempat Tidur Kayu	12	Unit
92	Thermometer Badan	2	Unit
93	Tikar	1	Unit
94	Treng Air/Tandon Air	1	Unit
95	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Unit
96	White Board	2	Unit
97	Wireless	3	Unit
98	Wireless Access Point	1	Unit
99	Gedung dan bangunan	2	Unit

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester 1 Tahun 2025, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk Tahun 2023, 2024 dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2024 serta evaluasi s.d.

triwulan IV 2024. Untuk gambaran kinerja Tahun 2021-2026 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II-4.

Tabel II-4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Pekalongan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke					
									2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
I	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat		NIHIL	NIHIL		Index		84,17	84,42	84,67	97,1	83,98	84,13	90,7	97	98,93		99,95%	107,44%	99,70%	101,88%	
A	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP OPD				√	Nilai	n/a	n/a	81,05	83	83	n/a	n/a	82,05	82,75	83,2	n/a	n/a	113,68%	113,68%	100,24%	
i	Program : Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja					Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah					Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	105,35%	100%	100%	n/a	100%	105,35%	100%	100%	
			Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah					Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	95,84 %	100%	100%	n/a	100%	95,84%	100%	100%	
1			Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
2			Kegiatan : Administrasi Keuangan	Persentase ketercapaian administrasi				Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke					
										2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Perangkat Daerah	keuangan perangkat daerah																				
3				Kegiatan : Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah				Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
4				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah				Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	134%	102,36%	106,40%	n/a	100%	134%	102,36%	106,40%	
5				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	
6				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	
II	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN			Indeks Merit System					Index			225	240	327			264,5	327	327			110,21%	136,25%	100%	
B		Sasaran: Meningkatnya		Persentase laporan SKP ASN tepat waktu				√	Persen	n/a	86%	86%	87%	90%	n/a		68%	98,90 %	99,97 %	n/a		79%	113,68%	111,08%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke				
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
ii	kualitas manajemen kinerja																					
	Program : Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan					Persen	n/a	n/a	90%	90%	90%	n/a	n/a	98,96 %	97,41 %	95,61 %	n/a		109,96%	108,23%	106,23%
		Persentase Keterpenuhan Formasi ASN					Persen	n/a	n/a	80%	80%	80%	n/a	n/a	97,33 %	64,35 %	48,14 %	n/a		121,66%	80,44%	60,18%
		Persentase PNS berkembang karir					Persen	n/a	40%	50%	50%	80%	n/a	15,82 %	49,00 %	66,67 %	106,67 %	n/a	39,55%	98,00%	133,33%	133,33%
		Tingkat Pelaporan Kinerja ASN					Persen	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	68,06 %	98,90 %	99,97 %	n/a	n/a	68,06%	98,90%	99,97%
			Persentase Kesesuaian Kompetensi dengan Jabatan				Persen	n/a	78%	n/a	n/a	n/a	n/a	52,19 %	n/a	n/a	n/a	n/a	66,91%	n/a	n/a	n/a
			Persentase ketersediaan data PNS				Persen	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	101,77 %	n/a	n/a	n/a	n/a	101,77 %	n/a	n/a	n/a
			Tingkat kepuasan PNS terhadap administrasi kepegawaian				Persen	n/a	25%	n/a	n/a	n/a	n/a	28,36 %	n/a	n/a	n/a	n/a	113,44 %	n/a	n/a	n/a
	8	Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ketersediaan data PNS				Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%
	9	Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN				Persen	n/a		110%	110%	90%	n/a		65,47 %	47,06 %	95,18 %	n/a		59,52%	42,78%	105,76%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke				
									2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
10			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN berkembang kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional				Persen	n/a		42%	42%	42%	n/a		35,76 %	45,35 %	63,26 %	n/a		85,14%	107,97%	150,62%
11			Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tingkat Disiplin ASN				Persen	n/a		100%	100%	100%	n/a		100%	99,97 %	99,97 %	n/a		100%	99,97%	99,97%
III	Tujuan : Meningkatkan Profesionalisme ASN			Indeks Profesionalitas ASN				Index	60,54	61	62	63	65	50,08	48,88	86,87	86,97	84,38	0,8272	80,13%	140,11%	138,05%	129,82%
C	Sasaran : Meningkatnya kompetensi ASN			Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya			√	Persen	n/a	40%	40%	40%	40%	n/a	6,33 %	113,25 %	68,74 %	75,18 %	n/a	15,82%	283,13%	171,84%	187,94%
lii		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN berkembang kompetensinya				Persen	n/a	28%	100%	100%	100%	n/a	12,08 %	119,81 %	177,02 %	107,99 %	n/a	43,14%	119,81%	177,02%	107,99%
12			Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis				Persen	n/a		100%	100%	100%	n/a		103,91 %	128,42 %	120%	n/a		103,91%	177,02%	120%
13			Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kmopetensi				Orang	n/a		200 orang	40 orang	200 orang	n/a		170 orang	20 orang	193 orang	n/a		85%	50%	96,50%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke				
										2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Manajerial dan Fungsional	manajerial dan fungsional																			
		Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik			Nilai Evaluasi AKIP				Persen	77,50 %	78,50 %	n/a	n/a	n/a	0,7853	100%	n/a	n/a	n/a	0,8272	101%	n/a	n/a	n/a
					Nilai keterbukaan informasi publik				Nilai	850	800	n/a	n/a	n/a	900	920	n/a	n/a	n/a	1,05	115%	n/a	n/a	n/a
1			Program : Pelayanan administrasi perkantoran																					
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat				Bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				Bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke				
										2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kegiatan: Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor				Bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan				Bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				Bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman				Bulan	11 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	11 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke				
										2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kegiatan: Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				Orang/kali	159 orang/ kali	n/a	n/a	n/a	n/a	150 orang/ kali	n/a	n/a	n/a	n/a	94,34%	n/a	n/a	n/a	n/a
2				Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur																				
					Kegiatan : Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dapat dibeli			Buah	0 buah	n/a	n/a	n/a	n/a	0 buah	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
			Kegiatan: Pemeliharaan an rutin/berkala gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Gedung			2 gedung	n/a	n/a	n/a	n/a	2 gedung	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Kegiatan: Pemeliharaan an rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit			15 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	15 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Kegiatan: Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Jumlah gedung yang terpelihara	Gedung			2 gedung	n/a	n/a	n/a	n/a	2 gedung	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	
					Persentase pelaksanaan pemeliharaan	Persen			100%	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke				
										2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					gedung/kantor,kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga																			
					Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat				Gedung	2 gedung	n/a	n/a	n/a	n/a	2 gedung	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor				Unit	21 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	21 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				Bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
3					Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke				
										2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun				Dokumen	6 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	6 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun				Dokumen	0	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a
				Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				Bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
4				Program : Peningkatan Pelayanan Masyarakat																				
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Wali Kota				Bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik				Kali	3 kali	n/a	n/a	n/a	n/a	0 kali	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke				
									2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
5			Program : Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase PNS yang memiliki kompetensi				Persen	3,96%	n/a	n/a	n/a	n/a	0,11	n/a	n/a	n/a	n/a	277,78%	n/a	n/a	n/a	n/a
				Pesentase PNS yang tugas belajar dan ijin belajar				Persen	1,36%	n/a	n/a	n/a	n/a	0,0123	n/a	n/a	n/a	n/a	0,9044	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah				Orang	207 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah				Orang	2 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0,5	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidik				Orang	40 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan : Pelatihan kompetensi tenaga pendidik				Orang	120 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke				
										2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					kompetensi tenaga pendidik																			
					Kegiatan : Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas				Orang	5 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a
					Kegiatan: Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah				Orang	336 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	336 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
					Kegiatan: Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional				Orang	166 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	166 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
6				Program : Penataan dan Pengembangan Aparatur	Pesentase keseusian Kompetensi dengan jabatan				Persen	83,20 %	n/a	n/a	n/a	n/a	0,7263	n/a	n/a	n/a	n/a	0,873	n/a	n/a	n/a	n/a
					Persentase PNS berkembang karir				Persen	13,17 %	n/a	n/a	n/a	n/a	0,1729	n/a	n/a	n/a	n/a	131,28%	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Pengisian Pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan	Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan				Orang	11 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	11 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke				
									2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				perguruan tinggi																			
				Kegiatan : Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir PNS			Orang	0 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah CASN yang lulu seleksi			Orang	207 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	194 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0,9372	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Pelaksanaa n ujian dinas dan Penyesuain ljazah bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan ujian penyesuaian ijazah			Orang	68 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	27 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0,3971	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Koordinasi Penyelesaia n Bidang Kepegawaia n	Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat strukturan dan fungsional			Orang	100 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	120 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1,2	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Seleksi Jabatan ASN	Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi			Orang	2 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a
7			Program : Pelayanan Administrasi Kepagawaian	Tingkat Kepuasan PNS terhadap administrasi kepegawaian				Persen	28,00 %	n/a	n/a	n/a	n/a	0,4005	n/a	n/a	n/a	n/a	143,04%	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke				
										2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kegiatan: Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian	Jumlah data yang disinkronkan/diupdate				Data	3200 data	n/a	n/a	n/a	n/a	3200 data	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan : penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan				Orang	600 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	584 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0,9733	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Pemberiaan Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	umlah PNS yang mendapatkan penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS				Orang	0 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pembinaan dalam kasus-kasus kepegawaian				Orang	2 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	4 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	2	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan : General Check-Up bagi PNS	Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan				Orang	30 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	30 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Sosialisasi Perundang-	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi				Orang	50 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	50 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain Pada Tahun ke				
										2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				undangan di Bidang Kepegawaian	perundang-undangan dibidang kepegawaian																			
					Jumlah kunjungan monitoring dan evaluasi new-normal yang dilaksanakan				Orang	140 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	140 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
8			Program : Pelayanan Informasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Data PNS					Persen	100,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
				Kegiatan: Pembangunan/pembuatan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah pembuatan aplikasi di bidang kepegawaian				Aplikasi	2 aplikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	2 aplikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a
					Pengembangan simpeg yang terintegrasi				Data	3200 data	n/a	n/a	n/a	n/a	3200 data	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a

2.1.4 Kinerja Keuangan BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Dari sisi kinerja keuangan selama kurun waktu 2020-2024, kinerja keuangan BKPSDM ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Pencapaian Realisasi Keuangan BKPSDM Kota Pekalongan

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
A	Belanja Langsung	6281,74	8998,72	8651,88	7318,88	9274,92	5442,22	8171,16	8037,75	7070,98	6226,80	86.64%	90.80%	92.90%	96.61%	67.14%	12.68%	6.14%
1	Belanja Pegawai	3748,74	4031,14	3903,69	3593,80	3825,31	3193,06	3770,65	3588,50	3430,77	3187,44	85.18%	93.54%	91.93%	95.46%	83.32%	0.72%	0.44%
2	Belanja Barang/Jasa	2196,05	4910,24	4683,18	3300,05	5263,49	1918,52	4353,90	4384,53	3227,09	2860,91	87.36%	88.67%	93.62%	97.79%	54.35%	37.23%	22.47%
3	Belanja Modal	336,95	57,34	65,01	425,03	186,11	330,63	46,61	64,72	413,12	178,46	98.12%	81.29%	99.55%	97.20%	95.89%	106.99%	108.61%

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan BKPSDM Kota Pekalongan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, masyarakat umum yang mengikuti seleksi penerimaan ASN, serta instansi terkait yang bekerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi, juga menjadi bagian dari kelompok sasaran. BKPSDM bertanggung jawab dalam memberikan layanan administrasi kepegawaian, pelatihan dan pengembangan kompetensi, pengelolaan data ASN, serta layanan konsultasi dan pendampingan terkait kebijakan manajemen SDM aparatur.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pencapaian kinerja perangkat daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya BKPSDM meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan cascading renstra BKPSDM Kota Pekalongan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah telah diidentifikasi dalam tabel berikut:

Tabel II-6

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam	1. Belum optimalnya persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	1. Belum optimalnya perencanaan

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
	meningkatkan kualitas layanan public	2. Belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian 3. Belum optimalnya administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 4. Belum optimalnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	2. Belum optimalnya penganggaran dan evaluasi kinerja 3. Belum optimalnya administrasi keuangan, administrasi umum, penyedia jasa penunjang urusan Perangkat Daerah 4. Belum optimalnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2	Belum optimalnya tata kelola manajemen ASN dalam mendukung kualitas manajemen ASN	1. Belum optimalnya keterpenuhan formasi ASN dan pelayanan administrasi kepegawaian secara digital	1. Kebijakan perencanaan dan pengadaan pegawai sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi 2. Kebijakan perencanaan dan pengadaan ASN yang berubah-ubah 3. Formasi yang disetujui tidak sama dengan yang diusulkan 4. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan pusat
		2. Belum optimalnya penerapan Manajemen Talenta dalam pengembangan karir ASN	1. Kebijakan terkait implementasi pola karir yang sangat dinamis 2. Belum terlaksananya pemetaan talenta instansi berdasarkan Sistem Informasi 3. Belum optimalnya pengelolaan profil individu pegawai

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
			secara berkelanjutan
		3. Belum optimalnya peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai	1. Masih kurangnya motivasi ASN dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan
		4. Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN dan tingkat disiplin ASN	1. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelaporan kinerja sebagai salah satu indikator dalam manajemen talenta 2. Masih adanya pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian 3. Belum optimalnya penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin secara berjenjang
3	Belum optimalnya kualitas pengembangan kompetensi ASN dalam mendukung kualitas manajemen ASN	1. Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	1. Belum optimalnya penyusunan dokumen hasil analisa kesenjangan kebutuhan pengembangan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan setiap pegawai 2. Kurangnya motivasi dari ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun 3. Keterbatasan fasilitasi pengembangan kompetensi yang sesuai kebutuhan organisasi

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dapat dirumuskan menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kota Pekalongan serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan bidang kepegawaian di masa yang akan datang, antara lain:

1. ASN yang memasuki purna tugas ditambah dengan perubahan kebijakan perencanaan pengadaan ASN mengakibatkan keterbatasan jumlah ASN;
2. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan pemerintah pusat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan data ASN secara efektif;
3. Belum tersedianya profil kompetensi ASN secara menyeluruh berdasarkan hasil penilaian potensi, kompetensi dan kinerja berikut analisis kesenjangannya;
4. Belum terlaksananya pemetaan talenta instansi berdasarkan sistem informasi sehingga identifikasi potensi dan kompetensi ASN belum dilakukan secara tepat;
5. Belum optimalnya peningkatan profesionalisme kompetensi ASN yang disebabkan karena kurangnya motivasi ASN dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan;

6. Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN dikarenakan kurang pemahaman tentang pentingnya pelaporan kinerja sebagai salah satu indikator dalam manajemen talenta;
7. Masih adanya pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian ASN menjadi salah satu tantangan serius dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Belum optimalnya penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin secara berjenjang menyebabkan proses penegakan disiplin menjadi tidak efektif;
9. Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional dikarenakan belum optimalnya penyusunan dokumen hasil analisa kesenjangan kebutuhan pengembangan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan setiap pegawai, kurangnya motivasi dari ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun dan keterbatasan fasilitasi pengembangan kompetensi yang sesuai kebutuhan organisasi.

Tabel II- 7
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Keberadaan tenaga non-ASN yang menjadi bagian dari kebijakan afirmasi pemerintah dalam pengangkatan ASN melalui skema PPPK	Belum optimalnya keterpenuhan formasi ASN	Kebutuhan sistem informasi kepegawaian yang efisien dan hemat sumber daya	Otomatisasi dan digitalisasi sistem kerja ASN	Kebijakan digitalisasi sistem kepegawaian (SPBE)	Keterbatasan infrastruktur dan SDM di daerah	ASN yang memasuki purna tugas ditambah dengan perubahan kebijakan perencanaan pengadaan ASN mengakibatkan keterbatasan jumlah ASN
Potensi integrasi sistem informasi daerah	Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian secara digital	Pentingnya integrasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan	Standar <i>interoperabilitas</i> sistem informasi	Sistem Merit Nasional, Satu Data ASN	Sistem informasi kepegawaian yang belum seragam antar daerah	Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan pemerintah pusat menjadi salah satu kendala dalam

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						pengelolaan data ASN secara efektif
Potensi talenta ASN yang belum tergali secara optimal	Belum optimalnya penerapan Manajemen Talenta dalam pengembangan karir ASN	Penerapan manajemen SDM yang efisien dan berkelanjutan	Perubahan pola kerja menuju <i>agile bureaucracy</i>	Kebijakan Manajemen Talenta Nasional	Minimnya SDM analisis SDM dan pengelola talenta daerah	Belum tersedianya profil kompetensi ASN secara menyeluruh berdasarkan hasil Penilaian potensi, kompetensi dan kinerja berikut analisis kesenjangannya
Pembangunan Sistem Informasi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) guna mengidentifikasi kesenjangan kompetensi jabatan Pembangunan platform pembelajaran digital dalam wadah learning management system untuk memberikan ruang pembelajaran online yang bisa diakses secara mandiri	Belum optimalnya peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai	Peningkatan kapasitas ASN sebagai bentuk investasi pembangunan	Tuntutan kompetensi global berbasis digital dan <i>green skills</i>	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitas dan program pelatihan belum merata antar daerah	Belum terlaksananya pemetaan talenta instansi berdasarkan sistem informasi sehingga identifikasi potensi dan kompetensi ASN belum dilakukan secara tepat
Coaching clinic penyusunan kinerja bagi semua ASN	Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN	Peningkatan akuntabilitas dan efektivitas organisasi	Etika dan budaya kerja global berbasis hasil	Evaluasi kinerja ASN sebagai dasar karier	Implementasi E-kinerja belum seragam	Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelaporan kinerja sebagai salah satu indikator dalam manajemen talenta

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dukungan regulasi daerah tentang disiplin ASN	Belum optimalnya tingkat disiplin ASN	Pencegahan pelanggaran melalui sistem pengawasan berkelanjutan	Nilai-nilai integritas dan transparansi global	Reformasi birokrasi dan penguatan kode etik ASN	Pencegahan pelanggaran melalui sistem pengawasan berkelanjutan	Masih adanya pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian ASN menjadi salah satu tantangan serius dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik Belum optimalnya penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin secara berjenjang menyebabkan proses penegakan disiplin menjadi tidak efektif
Pembangunan Sistem Informasi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) guna mengidentifikasi kesenjangan kompetensi jabatan Pembangunan platform pembelajaran digital dalam wadah learning management system untuk memberikan ruang pembelajaran online yang bisa diakses secara mandiri	Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Kebutuhan ASN kompeten dan tanggap terhadap isu pembangunan berkelanjutan	Kompetensi global berorientasi pada SDGs	Pelatihan berbasis kebutuhan jabatan (PP 17/2020)	Belum semua OPD mengusulkan kebutuhan pelatihan berdasarkan <i>gap analysis</i>	Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional dikarenakan belum optimalnya penyusunan dokumen hasil analisa kesenjangan kebutuhan pengembangan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan setiap pegawai, kurangnya motivasi dari ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun dan keterbatasan fasilitasi pengembangan kompetensi yang sesuai kebutuhan organisasi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Badan Pelayanan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan adalah Meningkatkan kualitas manajemen ASN dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Sasaran Rensta Badan Pelayanan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya tata kelola manajemen ASN
3. Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi ASN

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN						KET.
					2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan kualitas manajemen ASN dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD	Indeks	99,28	99,38	99,48	99,58	99,68	99,78	99,88		
			Nilai Sakip OPD	Nilai	83,20	84	84,02	84,04	84,06	84,08	85,10		
		Meningkatnya tata kelola manajemen ASN	Indeks Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (Merit Sistem)	Indeks	0,81	0,81	0,82	0,82	0,84	0,84	0,85		
			Rata-rata skor nilai merit sistem komponen manajemen ASN	Skor	3,34	3,34	3,39	3,39	3,44	3,44	3,50		
		Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi ASN	Indeks Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (Merit Sistem)	Indeks	0,81	0,81	0,82	0,82	0,84	0,84	0,85		
			Rata-rata skor nilai sistem merit komponen pengembangan kompetensi ASN	Skor	3,20	3,20	3,25	3,25	3,30	3,30	3,35		

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kota Pekalongan tahun 2025 – 2029, maka perlu diperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi kinerja dan pelayanan BKPSDM. Faktor-faktor tersebut antara lain :

Faktor Pendukung

1. Dukungan kebijakan nasional terkait pengembangan kompetensi ASN dan pengangkatan PPPK, yang memberikan landasan hukum dan fasilitasi teknis bagi pengelolaan SDM aparatur.
2. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan digitalisasi sistem kepegawaian serta pelayanan administrasi berbasis elektronik.
3. Semangat reformasi birokrasi dan percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah, yang mendorong perubahan pola kerja menuju birokrasi yang agile dan responsif.
4. Komitmen pimpinan daerah dan BKPSDM dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM.

Faktor Penghambat :

1. Fasilitas pendukung pengembangan kompetensi ASN, yang membatasi pelaksanaan pelatihan dan program peningkatan kapasitas ASN
2. Kurangnya integrasi sistem informasi kepegawaian antara daerah dan pusat, yang menghambat kelancaran pengelolaan data ASN secara efektif.
3. Resistensi perubahan dan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan ASN, sehingga memperlambat adopsi sistem dan inovasi baru.
4. Tingginya angka ASN memasuki masa purna tugas tanpa diiringi pengadaan pengganti yang memadai, menyebabkan kekurangan SDM di beberapa Organisasi Perangkat Daerah

5. Belum optimalnya penerapan manajemen talenta dan sistem merit, yang berakibat pada kurang tepatnya penempatan dan pengembangan ASN sesuai potensi dan kompetensi.
6. Tantangan dalam penegakan disiplin ASN dan pelaporan kinerja, yang berdampak pada efektivitas manajemen kinerja dan kualitas layanan.

Tabel III-2
Strategi Renstra PD

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik”
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital.	Penguatan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi kinerja, integritas, manajemen talenta, transformasi arsitektur dan kolaborasi digital, BMD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)	Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan pendekatan partisipatif dan transparansi publik, pengelolaan layanan digital, mitigasi risiko korupsi, pemutakhiran data dan optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta penguatan corporate university dalam pengembangan ASN yang mendukung perwujudan ekonomi sirkular dan Pembangunan yang berkelanjutan	Penguatan tata kelola SDM, keuangan daerah, dan optimalisasi pengamanan BMD untuk mendukung Pembangunan infrastruktur daerah	Optimalisasi perwujudan profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta perwujudan single platform digital dalam rangka perwujudan Fondasi Mina Batik
Strategi Renstra OPD	Penguatan regulasi dan SDM pengelola kepegawaian guna mendukung penerapan sistem merit dan <i>corporate university</i>	Implementasi manajemen talenta untuk pengembangan ASN	Penguatan implementasi <i>corporate university</i>	Pemantapan <i>corporate university</i>	Perwujudan kompetensi SDM yang berdaya saing

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam penentuan isu-isu strategis untuk Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, sejumlah faktor pelayanan yang memengaruhi kualitas pelayanan ASN dianalisis, mencakup gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah Renstra K/L, sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap pelayanan tersebut.

a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Pelayanan BKPSDM Kota Pekalongan berfokus pada upaya pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berbasis pada prinsip merit. Hal ini tercermin dalam kebijakan pengelolaan ASN yang semakin mengedepankan transparansi, objektivitas, dan kompetensi dalam berbagai aspek, seperti seleksi, promosi, dan mutasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, pelayanan kepegawaian juga diarahkan untuk menggunakan sistem berbasis digital yang memungkinkan proses yang lebih efisien dan terintegrasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan pelayanan Perangkat Daerah akan lebih cepat, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak terkait, baik ASN maupun masyarakat umum. Implementasi sistem merit juga diharapkan dapat menciptakan ASN yang berkualitas, dengan pelayanan yang lebih adil dan setara berdasarkan kemampuan dan prestasi.

b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Badan Kepegawaian Negara;

Berdasarkan sasaran jangka menengah Renstra BKN, beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi di Kota Pekalongan adalah penerapan sistem merit yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur digital, serta terbatasnya pengawasan terhadap sistem merit. Di sisi lain, faktor-faktor pendorong yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepegawaian adalah percepatan digitalisasi, penguatan kapasitas SDM pengelola ASN, dan peningkatan kolaborasi dalam manajemen talenta.

Dengan memperhatikan sasaran jangka menengah dalam Renstra BKN, Kota Pekalongan dapat melakukan langkah-langkah strategis yang sejalan dengan kebijakan BKN, untuk menciptakan pelayanan kepegawaian yang lebih transparan, efisien, dan berbasis merit.

- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi;

Berdasarkan sasaran jangka menengah dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah, faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Kota Pekalongan antara lain adalah distribusi ASN yang belum optimal, dan terbatasnya pengembangan kompetensi ASN. Untuk itu, fokus pada transparansi dan objektivitas rekrutmen, penguatan kompetensi ASN melalui pelatihan, serta pengelolaan data kepegawaian yang terintegrasi menjadi pendorong utama yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepegawaian di Kota Pekalongan.

Dengan mengacu pada sasaran Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan dapat merancang langkah-langkah strategis yang mendukung perbaikan dalam distribusi, kompetensi, dan pengelolaan ASN, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik, efisien, dan berorientasi pada hasil yang maksimal.

- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kota Pekalongan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, namun tidak ada implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Program kota yang diturunkan menjadi program Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kota Pekalongan yang telah

disahkan menjadi Peraturan Daerah. Namun demikian, KLHS tidak memberikan alternatif dan rekomendasi terhadap Program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penentuan isu-isu strategis untuk Renstra Perangkat Daerah tahun rencana dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan perangkat daerah. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, proses ini diawali dengan kajian mendalam terhadap hasil telaahan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, serta refleksi terhadap prioritas dan tujuan jangka menengah yang tertuang dalam Renstra BKN dan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

1. Pemetaan isu berdasarkan sasaran jangka menengah

Penentuan isu strategis juga didasarkan pada sasaran jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BKN dan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sasaran-sasaran tersebut mencakup penguatan sistem merit, pengembangan kompetensi ASN, digitalisasi manajemen ASN, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan data kepegawaian. Isu-isu yang muncul dari pemetaan ini adalah hal-hal yang langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut, seperti perluasan akses pelatihan kompetensi, optimalisasi teknologi dalam sistem informasi kepegawaian, serta reformasi dalam proses rekrutmen dan promosi ASN.

2. Kolaborasi dengan berbagai pihak

Mengingat pentingnya kolaborasi antar pihak dalam memperkuat sistem manajemen ASN yang lebih transparan dan akuntabel, penentuan isu-isu strategis juga melibatkan konsultasi dengan berbagai stakeholder termasuk BKN, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta

instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperoleh dukungan dalam implementasi kebijakan dan program kepegawaian yang akan dijalankan

3. Relevansi dengan peraturan

Penentuan isu-isu strategis tidak terlepas dari perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, baik dalam hal regulasi pengadaan, promosi, dan mutasi ASN, maupun kebijakan terkait transformasi digital dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, setiap isu yang ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah harus tetap sejalan dengan arahan kebijakan nasional yang mengedepankan meritokrasi dan profesionalisme ASN.

Hasil dari penentuan isu-isu strategis ini adalah daftar prioritas yang akan menjadi fokus utama dalam Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. Beberapa isu strategis yang teridentifikasi antara lain:

1. ASN yang memasuki purna tugas ditambah dengan perubahan kebijakan perencanaan pengadaan ASN mengakibatkan keterbatasan jumlah ASN;
2. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan pemerintah pusat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan data ASN secara efektif;
3. Belum tersedianya profil kompetensi ASN secara menyeluruh berdasarkan hasil penilaian potensi, kompetensi dan kinerja berikut analisis kesenjangannya;
4. Belum terlaksananya pemetaan talenta instansi berdasarkan sistem informasi sehingga identifikasi potensi dan kompetensi ASN belum dilakukan secara tepat;
5. Belum optimalnya peningkatan profesionalisme kompetensi ASN yang disebabkan karena kurangnya motivasi ASN dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan;

6. Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN dikarenakan kurang pemahaman tentang pentingnya pelaporan kinerja sebagai salah satu indikator dalam manajemen talenta;
7. Masih adanya pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian ASN menjadi salah satu tantangan serius dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Belum optimalnya penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin secara berjenjang menyebabkan proses penegakan disiplin menjadi tidak efektif;
9. Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional dikarenakan belum optimalnya penyusunan dokumen hasil analisa kesenjangan kebutuhan pengembangan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan setiap pegawai, kurangnya motivasi dari ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun dan keterbatasan fasilitasi pengembangan kompetensi yang sesuai kebutuhan organisasi.

Tabel III-3
Arah Kebijakan Rencana Perangkat Daerah

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.	1. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka 5 (lima) tahun sesuai struktur organisasi, peta jabatan dan analisis jabatan dan beban kerja berdasarkan nama jabatan, kelas jabatan, jumlah dan kebutuhannya dengan penetapan PPK dengan diarahkan kepada jenis jabatan-jabatan tertentu yang bersifat keahlian dan mendukung prioritas pembangunan daerah mendatang. 2. Penyediaan data kepegawaian yang diperbaharui secara lengkap dan real time sesuai jabatan, pendidikan, pangkat, unit kerja 3. Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam jangka 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat dan dan unit kerja. 4. Penyusunan rencana pemenuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun dari jalur pengadaan 5. Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan 6. Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif dengan diarahkan kepada jenis jabatan tertentu yang	

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		bersifat keahlian dan mendukung prioritas pembangunan daerah mendatang 7. Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar. 8. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi. 9. Penyusunan <i>Talent Pool</i> yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja 10. Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi 11. Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai 12. Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN 13. Penyediaan kebijakan tentang pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi 14. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal 15. Mendorong ASN untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing 16. Peningkatan pemahaman ASN tentang pelaporan kinerja melalui coaching dan mentoring 17. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan kompetensi berdasarkan analisis jabatan 18. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kompetensi teknis melalui <i>Learning Management System</i> (LMS) guna memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun 19. Peningkatan kompetensi ASN dengan melalui berbagai metode pembelajaran baik secara klasikal, online maupun blended learning 20. Bekerjasama dengan instansi penyelenggara diklat untuk menyediakan program pengembangan kompetensi teknis sesuai kebutuhan instansi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

a. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

➤ Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN; penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase keterpenuhan formasi ASN sebesar 77 persen; persentase keterisian jabatan manajerial ASN sebesar 90 persen; persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan sebesar 28 persen; persentase pegawai dengan SKP bernilai minimal baik sebesar 95 persen.

b. Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

➤ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah pengembangan kompetensi teknis; sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ASN berkembang kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional sebesar 70 persen.

Program ini mendukung program unggulan kepala daerah yaitu beasiswa studi lanjut bagi tenaga kesehatan. selain itu program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan aparat penegak hukum, OMBUDSMAN, kepolisian, kejaksaan, BPK & KPK, dan untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke

Kabupaten/Kota yang berupa melahirkan pemerintahan yang *good clear government* dan *collaborative governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa.

c. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Fokus program adalah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan perangkat daerah; administrasi kepegawaian perangkat daerah; administrasi umum perangkat daerah; penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah sebesar 100 persen; persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen; persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel IV-1

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUBKE GIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024 (R)	2025 (T)	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	4484,50	100	5156,66	100	5179,22	100	5184,17	100	5185,89	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah	Persen	102,13	100	100		100		100		100		100		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	24,16	100	28,63	100	30,73	100	31,83	100	32,95	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUBKE GIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024 (R)	2025 (T)	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	2	1,74	2	3,78	2	3,78	2	3,78	2	3,78	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	2,46	2	3,66	2	3,76	2	3,86	2	3,98	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	15	15	19,96	15	21,19	15	23,19	15	24,19	15	25,19	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	3795,96	100	4303,53	100	4303,85	100	4304,45	100	4305,05	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	32	28	29	3760,02	29	4257,60	29	4257,60	29	4257,60	29	4257,60	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	34,80	12	44,29	12	44,50	12	45,00	12	45,50	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	1	1	1	1,14	1	1,65	1	1,75	1	1,85	1	1,95	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUBKE GIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024 (R)	2025 (T)	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	5,00	100	9,50	100	5,00	100	5,00	100	5,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	5,00	1	9,50	1	5,00	1	5,00	1	5,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	106,4	100	100	187,89	100	218,00	100	221,45	100	224,70	100	224,70	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	1,19	4	2,50	4	2,50	4	2,75	4	2,75	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	20,00	4	32,00	4	32,00	4	35,00	4	35,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	4	1,50	4	2,50	4	2,75	4	2,75	4	2,75	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUBKE GIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024 (R)	2025 (T)	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	35,37	4	39,00	4	42,00	4	42,00	4	42,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13	13	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	1	2	1,00	2	2,00	2	2,20	2	2,20	2	2,20	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	125	50	100	120,83	125	132,00	125	132,00	125	132,00	125	132,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	401,00	100	432,00	100	452,20	100	452,20	100	452,20	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	1,00	4	2,00	4	2,20	4	2,20	4	2,20	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	12	12	12	200,00	12	200,00	12	220,00	12	220,00	12	220,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUBKE GIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024 (R)	2025 (T)	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	200,00	12	230,00	12	230,00	12	230,00	12	230,00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	100	100	70,49	100	165,00	100	166,00	100	166,00	100	166,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	13	13	47,16	13	52,00	13	52,00	13	52,00	13	52,00	
Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	1	14,20	2	103,00	2	103,00	2	103,00	2	103,00	
Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit	15	10	10	9,13	10	10,00	10	11,00	10	11,00	10	11,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUBKE GIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024 (R)	2025 (T)	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
URUSAN KEPEGAWAIAN																
Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya ASN yang profesional dan berkinerja baik	Persentase keterisian jabatan manajerial ASN	Persen	95,61	90,21	95	880,06	95	1167,58	95	1188,58	90	1209,58	90	1210,58	
		Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	48,14	49,89	70		73		75		76		77		
		Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan	Persen	25,53	26,07	27		27		27		28		28		
		Persentase Pegawai dengan SKP bernilai minimal Baik	Persen	99,83	95	95		95		95		95		95		
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tercapainya ketersediaan data PNS	Persentase ketersediaan data ASN	Persen	100	100	100	417,16	100	435,00	100	435,00	100	435,00	100	435,00	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	1	300,00	1	300,00	1	300,00	1	300,00	1	300,00	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	12	117,16	12	135,00	12	135,00	12	135,00	12	135,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUBKE GIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024 (R)	2025 (T)	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Data Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ketersediaan data talent pool atau pemetaan talenta ASN	Persen	N/A	N/A	85	278,50	85	430,21	85	430,21	80	430,21	80	430,21	
Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	N/A	N/A	1	199,38	1	360,95	1	360,95	1	360,95	1	360,95	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	6	6	12	35,08	12	36,65	12	36,65	12	36,65	12	36,65	
Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	2	3	1	44,04	1	32,61	1	32,61	1	32,61	1	32,61	
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Tercapainya Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)	Persentase ASN yang berkembang kompetensinya	Persen	63,26	80	100	79,40	100	197,87	100	217,87	100	237,87	100	237,87	
Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1	1	1	50,00	1	118,97	1	128,97	1	138,97	1	138,97	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUBKE GIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024 (R)	2025 (T)	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	4	4	4	29,40	4	78,90	4	88,90	4	98,90	4	98,90	
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya disiplin ASN	Tingkat Disiplin ASN	Persen	99,97	100	100	105,00	100	104,50	100	105,50	100	106,50	100	107,50	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	121	130	10	12,00	10	13,00	10	14,00	10	15,00	10	16,00	
Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	7	3	1	93,00	1	91,50	1	91,50	1	91,50	1	91,50	
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase ASN berkembang kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	Persen	13,2	14	50	984,34	55	1710,00	60	1820,00	65	1930,00	70	1930,00	
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Tercapainya Persentase Penyelenggaraan, Pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis	Persentase ASN berkembang kompetensi teknis	Persen	120	100	100	589,34	100	860,00	100	910,00	100	960,00	100	960,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUBKE GIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024 (R)	2025 (T)	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	294	125	210	589,34	220	860,00	230	910,00	250	960,00	270	960,00	
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,	Tercapainya Cakupan Penyelenggaraan	Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional,	Persen	N/A	N/A	7	395,00	7	850,00	23	910,00	70	970,00	71	970,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUBKE GIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024 (R)	2025 (T)	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	TARGET	PAGU Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	kepemimpinan dan prajabatan														
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	1	1	3	395,00	3	850,00	3	910,00	3	970,00	3	970,00	

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV-2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Kegiatan: Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan ajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya ASN yang profesional dan berkinerja baik	Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN	
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Promosi ASN	
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN	
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN	
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center	
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
			Sub Kegiatan: Pembinaan Disiplin ASN	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kompetensi ASN	Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel IV-3
Indikator Utama Pembangunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NIHIL										

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel IV-4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai Sakip OPD	Nilai	83,20	84,00	84,02	84,04	84,06	84,08	85,10	
2	Rata-rata skor nilai merit sistem komponen manajemen ASN	Persen	3,34	3,34	3,39	3,34	3,44	3,44	3,50	
3	Rata-rata skor nilai merit sistem komponen pengembangan kompetensi ASN	Persen	3,20	3,20	3,25	3,25	3,30	3,30	3,35	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV- 5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	69,66	68,87	69,53	70,45	71,15	71,77	72,35	
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	21,06	24,14	27,37	27,36	27,53	27,91	28,76	
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	47,91	45,95	45,91	51,32	56,46	61,11	65,26	

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-6
Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NIHIL										

4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel IV-7
Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (Merit Sistem)	Indeks	0,81	0,81	0,82	0,82	0,84	0,84	0,85	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kota Pekalongan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan secara langsung pada 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pekalongan berkewajiban melaksanakan program - program dalam Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. BKPSDM berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan; dan
4. Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat

meminimalisir pelaksanaan kegiatan menyimpang dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025-2030 sesuai dengan tupoksi BKPSDM Kota Pekalongan.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan, tanggungjawab serta kerjasama yang erat dari seluruh jajaran BKPSDM Kota Pekalongan untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra ini, mendukung tercapainya visi “Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”.

Pekalongan, 19 September 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKALONGAN



RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19720913 199803 1 001



RENCANA STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN 2025-2029



Jalan Sriwijaya No 44 Pekalongan 51111
Telp. (0285) 429451 - 424061

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan mengarahkan pengelolaan sumber daya manusia aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan, yang diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik.

Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan tahun 2025-2029 disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah. Selain itu dokumen ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pekalongan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan dan perumusan program serta kegiatan pengelolaan keuangan daerah untuk periode lima tahun ke depan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak, baik dari internal BPKAD Kota Pekalongan maupun instansi terkait lainnya, dengan harapan agar Renstra ini mampu menghasilkan arah kebijakan dan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Renstra ini juga menjadi landasan dalam penguatan tata kelola di bidang pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi penerimaan, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan dan tertib, serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan sinergi seluruh komponen, dokumen ini diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Strategis ini dapat tersusun dengan baik. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang optimal serta menjadi landasan bagi perencanaan dan implementasi kebijakan yang lebih baik ke depan.

Pekalongan, 19 September 2025
Plt. Kepala Badan Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Pekalongan



RUSMANI BUDIHARJO, A.K.S., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 197209131998031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.1.4 Kinerja Keuangan BPKAD Kota Pekalongan 2020-2024.....	34
2.1.5 Kelompok sasaran layanan	44
2.1.6 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan.....	44
2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD	45
2.1.8 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD	45
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	47
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	47
2.2.2 Isu Strategis	48
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	50
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025- 2029	50
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025- 2029	50
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	51
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
4.1 Uraian Program	54
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	55
4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	69
4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan.....	72

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	73
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	73
4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	74
4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	74
BAB V PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BPKAD Kota Pekalongan	12
Tabel II-2 Komposisi Pegawai BPKAD Kota Pekalongan berdasarkan golongan	12
Tabel II-3 Prasarana dan Sarana BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025	13
Tabel II-4 Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Pekalongan	
Tabel II-5 Pencapaian Realisasi Keuangan BPKAD Kota Pekalongan	34
Tabel II-6 Pencapaian Realisasi Keuangan Menurut Program	35
Tabel II-7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	47
Tabel II-8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	49
Tabel III-1 Teknik dan Sasaran Renstra PD	50
Tabel III-2 Strategi Renstra PD	51
Tabel III-3 Arah Kebijakan Renstra PD	52
Tabel IV-1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	55
Tabel IV-2 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	69
Tabel IV-3 Indikator Utama Pembangunan	72
Tabel IV-4 Indikator Kinerja Umum PD	73
Tabel IV-5 Indikator Kinerja Kunci	73
Tabel IV-6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	74
Tabel IV-7 Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi ...	74

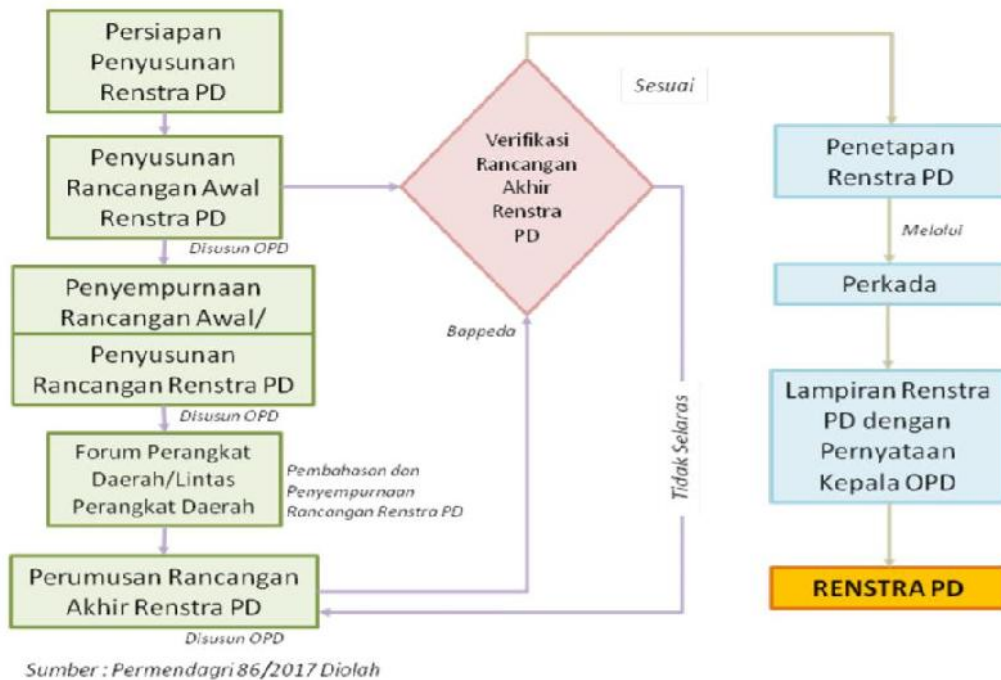
DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017	1
Gambar II-1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan merupakan sebuah organisasi Perangkat Daerah yang juga mempunyai fungsi sebagai Perangkat Daerah serta bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan utamanya yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, diarahkan untuk mewujudkan terciptanya sebuah tata pengelolaan keuangan yang akuntabel serta mendukung sebuah cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat serta dalam rangka mendukung Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 yaitu Pekalongan Kota Mina Batik yang berkelanjutan.



Gambar I-1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana

pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra BPKAD Kota Pekalongan tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra, dan dimulai sejak Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra BPKAD tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar 1.1.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Walikota Pekalongan terpilih. Penyusunan Renstra BPKAD disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

Renstra BPKAD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD sebagai penyusun kebijakan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan BPKAD selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala BPKAD dengan Kepala Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neoptisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015, UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 17 Tahun 2019, PERPU Nomor 1 Tahun 2020 dan UU Nomor 11 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);

33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud
 - a. Merupakan tindak lanjut atas amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
 - b. Merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan di BPKAD Kota Pekalongan sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta perencanaan Pengelolaan Belanja.
 - d. Mendorong tercapainya sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
 - e. Sebagai penjabaran atau implementasi secara operasional visi, misi dan program Wali Kota Pekalongan terpilih.
2. Tujuan
 - a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan BPKAD Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Walikota ke dalam tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kota Pekalongan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;

- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.
- d. Memberikan pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. Tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu Strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang:

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;

3. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
7. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan memberikan pelayanan yang berfokus pada pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah secara transparan dan akuntabel. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BPKAD berfungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, yang meliputi perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset. Sementara itu, sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), BPKAD memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada tahun 2021 dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, terjadi perubahan nomenklatur Badan Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan yang semula Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, pada tahun yang sama (2021) terbit Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah. Susunan organisasi BPKAD terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub bagian Keuangan; dan
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - b. Subbidang Penetapan dan Keberatan.
4. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan
 - a. Subbidang Penagihan dan Penindakan; dan
 - b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan.

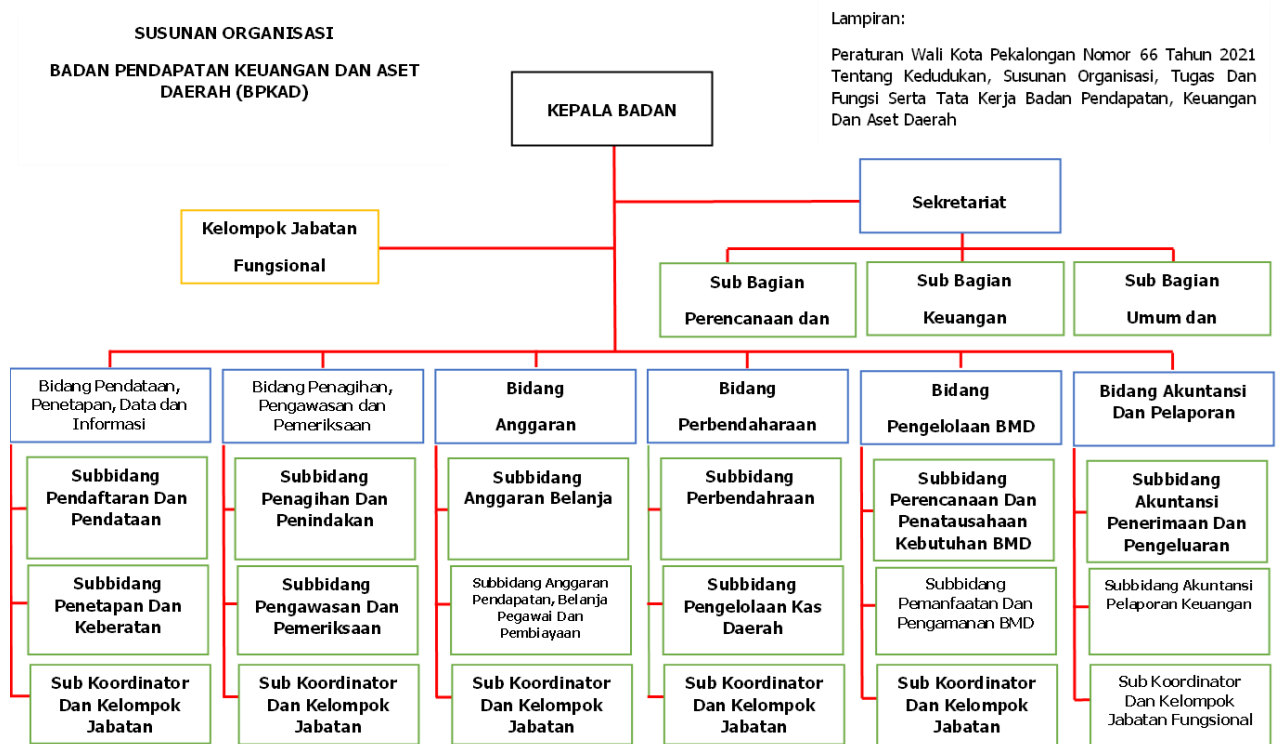
5. Bidang Anggaran
 - a. Subbidang Anggaran Belanja; dan
 - b. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - a. Subbidang Perbendaharaan; dan
 - b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran; dan
 - b. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan.
8. Bidang Pengelolaan BMD
 - a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD; dan
 - b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.
9. UPTB; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021. BPKAD Kota Pekalongan memiliki tugas pokok yaitu pendukung Wali Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Perumusan kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pendataan, penetapan, data dan informasi pendapatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pendapatan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang anggaran;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan dan kas daerah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang akuntansi dan pelaporan;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan BMD;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
10. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
11. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat pada struktur organisasi dibawah ini:



Gambar II-1
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Pekalongan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Pekalongan, didukung oleh berbagai sumber daya yang menjadi fondasi utama pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung operasional dan kegiatan strategis. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ini secara optimal menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN pada BPKAD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 56 orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai PNS berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel II-1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
BPKAD Kota Pekalongan

No	Bidang	Tingkat Pendidikan					Gender		Jumlah
		SMA/ SMK	D-1	D-3	S-1	S-2	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Sekretariat	3	0	0	4	3	4	6	10
2	Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi	1	0		5	1	4	3	7
3	Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan	0	2	1	4	1	5	3	8
4	Anggaran	0	0	0	4	3	4	3	7
5	Perbendaharaan dan kas daerah	1	0	4	3	0	1	7	8
6	Akuntansi dan Pelaporan	0	0	1	6	1	2	6	8
7	Pengelolaan BMD	3	0	0	5	0	7	1	8
	Jumlah (orang)	8	2	6	31	9	29	27	56
	Persentase (%)	14,29	3,57	10,71	55,36	16,07	52	48	100,00

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan Tabel II-1 jumlah pegawai pada BPKAD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 56 orang. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka proporsi yang paling banyak adalah berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 31 orang atau sebesar 55,36%, kemudian pegawai berpendidikan D-3 sebanyak 6 orang atau sebesar 10,71%, pegawai berpendidikan SMA/SMK sebanyak 8 orang atau sebesar 14,29%, pegawai berpendidikan Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 9 orang atau sebesar 16,07%, dan pegawai berpendidikan D-1 sebanyak 2 orang atau sebesar 3,57%.

Apabila dilihat dari jenis kelamin pegawai pada BPKAD Kota Pekalongan, yang terbanyak adalah pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 27 orang atau sebesar 48%, sedangkan jumlah pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 29 orang atau sebesar 52%.

b. Pegawai ASN berdasarkan golongan

Tabel II-2
Komposisi Pegawai BPKAD Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan (Orang)						Total (orang)
		I	II	III	IV	PPPK	Non ASN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sekretariat	0	1	7	2	0	10	20
2	Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi	0	0	6	1	0	8	15

No	Bidang	Golongan (Orang)						Total (orang)
		I	II	III	IV	PPPK	Non ASN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan	0	2	6	0	0	6	14
4	Anggaran	0	0	4	2	1	2	9
5	Perbendaharaan dan Kas Daerah	0	2	5	1	0	4	12
6	Akuntansi dan Pelaporan	0	0	7	1	0	2	10
7	Pengelolaan BMD	0	1	7	0	0	10	18
	Jumlah (orang)	0	6	43	7	1	42	98

Sumber: BPKAD, 2025

Berdasarkan Tabel II-2 dilihat dari golongan ASN-nya, golongan ASN III adalah yang terbanyak yaitu sejumlah 43 orang atau sebesar 73,58%, kemudian untuk ASN golongan II sebanyak 6 orang atau sebesar 13,21% dan golongan IV sebanyak 7 atau sebesar 13,21%. Jumlah PPPK sejumlah 1 orang pada bidang anggaran. Dan jumlah non ASN sejumlah 42 orang. Sehingga jumlah keseluruhan pegawai sejumlah 98 orang.

2. Prasarana dan Sarana

Pada tahun 2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Upaya ini diwujudkan melalui belanja modal yang difokuskan pada pengadaan fasilitas perkantoran, peningkatan sistem teknologi informasi, serta peralatan penunjang kerja guna mendukung kinerja pegawai secara optimal.

Tabel II-3
Prasarana dan Sarana BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sarpras	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
	ALAT BESAR		
1	- Stationary Generating Set	1	unit
2	- Pompa Air	1	unit
3	- Pompa Lain-lain	2	unit
	Jumlah	4	unit
1	- Station Wagon	11	unit
2	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	unit
3	- Truck + Attachment	1	unit
4	- Pick Up	1	unit
5	- Sepeda Motor	33	unit
6	- Gerobak Tarik	4	unit
7	- Gerobak Dorong	1	unit
8	- Lori Dorong	3	unit
9	- Meja Dorong Saji/Trolley Saji	1	unit
	Jumlah	56	unit
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
1	- Mesin Bor	1	unit
2	- Rol Meter	2	unit
3	- Mesin Battery Set / Pengisi Accu	1	unit
4	- Global Positioning System	5	unit

No	Sarpras	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
5	- DCP (Alat Control) Sensor	2	unit
6	- ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	4	unit
	Jumlah	15	unit
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	unit
2	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	unit
3	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2	unit
4	- Mesin Fotocopy Folio	1	unit
5	- Mesin Plate Folio	1	unit
6	- Lemari Besi/Metal	32	unit
7	- Lemari Kayu	10	unit
8	- Rak Besi	1	unit
9	- Rak Kayu	4	unit
10	- Filing Cabinet Besi	19	unit
11	- Brandkas	1	unit
12	- Lemari Sorok	1	unit
13	- Lemari Kaca	25	unit
14	- Lemari Makan	1	unit
15	- CCTV - Camera Control Television System	2	unit
16	- White Board	2	unit
17	- Alat Penghancur Kertas	3	unit
18	- Mesin Absensi	9	unit
19	- Alat Pemotong Kertas	5	unit
20	- Perforator Besar	1	unit
21	- Overhead Projector	1	unit
22	- LCD Projector/Infocus	1	unit
23	- Mesin Antrian	1	unit
24	- Papan Nama Instansi	380	unit
25	- Papan Pengumuman	2	unit
26	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	22	unit
27	- Meja Kerja Besi/Metal	1	unit
28	- Meja Kerja Kayu	5	unit
29	- Kursi Besi/Metal	8	unit
30	- Sice	4	unit
31	- Meja Rapat	122	unit
32	- Meja Telepon	3	unit
33	- Meja Podium	3	unit
34	- Meja Resepsionis	9	unit
35	- Meja Tambahan	1	unit
36	- Meja Panjang	3	unit
37	- Meja Makan Besi	1	unit
38	- Kursi Rapat	9	unit
39	- Kursi Tamu	1	unit
40	- Kursi Putar	8	unit
41	- Meja Komputer	7	unit
42	- Sofa	6	unit
43	- Kursi Tangan	4	unit
44	- Meja Tulis	18	unit
45	- Mesin Pemotong Rumput	3	unit
46	- Alat Pembersih Lain-lain	2	unit
47	- Lemari Es	8	unit
48	- A.C. Window	9	unit
49	- A.C. Split	55	unit

No	Sarpras	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
50	- Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	unit
51	- Kipas Angin	1	unit
52	- Kitchen Set	3	unit
53	- Tabung Gas	1	unit
54	- Rak Piring Alumunium	1	unit
55	- Televisi	20	unit
56	- Video Cassette	1	unit
57	- Loudspeaker	24	unit
58	- Sound System	7	unit
59	- Wireless	3	unit
60	- Megaphone	1	unit
61	- Microphone	2	unit
62	- Microphone Table Stand	2	unit
63	- Camera Video	18	unit
64	- Camera film	2	unit
65	- Tangga Aluminium	4	unit
66	- Dispenser	18	unit
67	- Mimbar/Podium	1	unit
68	- Handy Cam	1	unit
69	- Gordy/Kray	179	unit
70	- Bracket Standing Peralatan	5	unit
71	- Tangki Air	2	unit
72	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	unit
73	- Alat Pemadam/Portable	5	unit
74	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	unit
75	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	17	unit
76	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	36	unit
77	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	unit
78	- Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	unit
79	- Meja Tamu Biasa	1	unit
80	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	unit
81	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	20	unit
82	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	40	unit
83	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	4	unit
84	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	3	unit
85	- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	unit
86	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	26	unit
87	- Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	2	unit
	Jumlah	1.289	unit
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCARAN		
1	- Microphone/Wireless MIC	8	unit
2	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	unit
3	- Proyektor + Attachment	9	unit
4	- Camera Electronic	2	unit
5	- Slide Projector	1	unit
6	- Mesin Cetak Offset Roll	1	unit
7	- Mesin Barcode	1	unit
8	- Telephone (PABX)	1	unit
9	- Intermediate Telephone/Key Telephone	1	unit
10	- Pesawat Telephone	1	unit
11	- Telephone Mobile	8	unit
12	- Handphone	4	unit

No	Sarpras	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
13	- Wireless Amplifier	1	unit
14	- Receiver STL/VHF (FM)	1	unit
15	- Receiver STL/UHF	2	unit
	Jumlah	53	unit
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
1	- Tabung Oksigen	1	unit
	Jumlah	1	unit
	ALAT LABORATORIUM		
1	- Room Humidifier	1	unit
2	- Thermometer Badan	2	unit
3	- Infrared Thermometer	1	unit
	Jumlah	4	unit
	KOMPUTER		
1	- Local Area Network (LAN)	1	unit
2	- P.C Unit	72	unit
3	- Lap Top	46	unit
4	- Note Book	24	unit
5	- Tablet PC	2	unit
6	- Plotter (Peralatan Mainframe)	1	unit
7	- Hard Disk	22	unit
8	- Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	unit
9	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	20	unit
10	- Peralatan Mini Komputer Lain-lain	2	unit
11	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	106	unit
12	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	unit
13	- External	1	unit
14	- External/ Portable Hardisk	8	unit
15	- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	unit
16	- Server	5	unit
17	- Router	2	unit
18	- Modem	1	unit
19	- Wireless Access Point	1	unit
20	- Peralatan Jaringan Lain-lain	3	unit
	Jumlah	323	
	PERALATAN OLAH RAGA		unit
1	- Alat Tennis Meja	1	unit
	Jumlah	1	unit
	TOTAL	1.746	unit

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan BPKAD Kota Pekalongan berdasarkan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah pada periode sebelumnya. Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, serta indikator kinerja pelayanan yang relevan, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Selain itu, capaian juga dapat dianalisis melalui indikator pembangunan lainnya seperti Millennium Development Goals (MDG's) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas dan efisiensi pelayanan yang telah diberikan, serta menjadi dasar perbaikan dan pengambilan kebijakan di masa mendatang.

Tabel II-4
Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Pekalongan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	-	-	V	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
I	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	-	-	-	Persen	9,96	11,91	8,33	8,08	5,06	9,96	11,91	5,79	5,79	5,06	-	-	100	100	100
A	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100
1	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-		100	100	100	-
	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2		-	-	-	100
2	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-		100	100	100	-
	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2		-	-	-	100
3	Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan	-	-	-	Kegiatan	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-		100	100	100	-
4	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-		100	100	100	-
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2		-	-	-	100
5	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	-	-	-	Kali	1	1	1	1	-	1	2	1	1	-		200	100	100	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
6	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	-	-	-	Dokumen	4	4	4	4	-	4	4	4	4	-		100	100	100	-
7	Dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-		100	100	100	-
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2		-	-	-	100
8	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	-	-	-	Kali	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-		100	100	100	-
9	Jumlah Bahan sidang Raperda dan Raperwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	-	-	-	Dokumen	4	4	4	4	-	4	4	4	4	-		100	100	100	-
10	Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-		100	100	100	-
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2		-	-	-	100
11	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12		12	12	-		0	100	100	-
12	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	-	-	-	Kali	16	16	16	16	-	16		16	16	-		0	100	100	-
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2		-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
B	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			0	100	100	0
13	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-		100	100	100	-
14	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan	-	-	-	Dokumen	80	80	80	80	-	80	80	80	80	-		100	100	100	-
15	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	-	-	-	Dokumen	3	3	3	3	-	3	3	3	3	-		100	100	100	-
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	7000	-	-	-	-	7346		-	-	-	105
16	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun	-	-	-	Laporan	30	30	30	30	-	30	30	30	30	-		100	100	100	-
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	24	-	-	-	-	39		-	-	-	163
17	Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai	-	-	-	Kali	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-		100	100	100	-
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	48	-	-	-	-	48		-	-	-	100
18	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota	-	-	-	Data	3200	3120	3120	3120	-	3299	3130	3165	3120	-		100	101	100	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan																			
19	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	-	-	-	Kali	13	14	14	14	-	13	14	14	14	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	100	-	-	-	100
20	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun	-	-	-	Dokumen	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
21	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	Kali	3	3	3	3	-	3	3	3	3	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	Orang	-	-	-	-	200	-	-	-	-	220	-	-	-	-	110
C	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD	-	-	-	Laporan	68	68	68	68	-	68	68	68	68	-	100	100	100	100	-
23	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan	-	-	-	Laporan	-	-	7	7	-	-	-	7	7	-	-	-	100	100	-
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100
24	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	-	-	-	Laporan	13	13	13	13	-	13	13	13	13	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	100
25	Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan	-	-	-	Kali	5	5	5	5	-	5	5	5	5	-	100	100	100	100	-
26	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan	-	-	-	Laporan	7	7	7	7	-	7	7	7	7	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Kuangan Konsolidasi) yang disusun																			
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	100
27	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100	100	100	100	-
28	Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	Kali	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
29	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	-	-	-	Laporan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	12	-	-	-	-	2	-	-	-	-	17
30	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun	-	-	-	Dokumen	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																			
31	Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan	-	-	-	Kali	4	4	4	4	-	4	4	4	4	-	100	100	100	100	-
32	Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun	-	-	-	Laporan	4	4	4	4	-	4	4	4	4	-	100	100	100	100	-
33	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	12	100	100	100	-
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	Orang	-	-	-	-	120	-	-	-	-	120	-	-	-	-	100
34	Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan dana bergulir	-	-	-	Unit kerja	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100	-	-
35	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yg disusun	-	-	-	Laporan	13	13	13	13	-	13	13	13	13	-	100	100	100	100	-
36	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Dana Blud yg disusun	-	-	-	Dokumen	16	16	16	16	-	16	16	16	16	-	100	100	100	100	-
D	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
37	Jumlah bulan penyediaan dana BTT	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100
II	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
E	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0
38	Jumlah buku standar harga yang disusun	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
39	Jumlah buku Analisis Standar Biaya yang disusun	-	-	-	Dokumen	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	100	-	-
40	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100
41	Jumlah papan nama aset	-	-	-	Buah	-	55	55	25	-	-	55	50	55	-	-	100	91	220	-
42	Jumlah patok batas tanah	-	-	-	Buah	600	-	600	300	-	600	-	-	600	-	100	-	-	200	-
43	Jumlah pengajuan sertifikat	-	-	-	Bidang	282	750	800	78	-	282	750	350	78	-	100	100	44	100	-
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100
44	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	-	-	-	Jenis	3	3	3	3	-	3	3	3	3	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
45	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang ter rehabilitasi sedang/berat	-	-	-	Unit	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
46	Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	-	-	-	Unit	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
47	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	-	-	-	Unit	3	3	3	3	0	0	3	0	3	100	100	100	0	100	-
48	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	-	-	-	Kali	1	5	5	5	-	1	5	5	5	100	100	100	100	100	-
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
49	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan	-	-	-	Laporan	65	65	80	80	-	65	65	80	80	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	81	-	-	-	-	81	-	-	-	-	100
	Rasio PAD	-	-	V	Persen	2,12	1,95	1,95	1,98	2,01	2,12	2,20	2,31	2,26	1,84	100	112,82	118,46	113,96	91,39
III	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	-	-	-	Persen	5	5	5	5	5	-	-	6,41	5	4,8	100	100	100	100	100
F	Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	-	-	-	100	100	100	100	100	100	106,7	107,15	100	104,58	107	107	100	105		
50	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Dokumen	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100	-
51	Jumlah kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan	-	-	-	Kali	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100	100	100	-
52	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
53	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	-	-	-	Laporan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
54	Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	-	-	-	Kali	6	6	6	6	-	6	6	8	6	-	100	100	133	100	-
55	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan	-	-	-	Kali	1	1	1	3	-	1	1	12		-	100	100	1200	0	-
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100
56	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan	-	-	-	Surat	5100	3060	3060	3060	-	6196		4202	3060	-		0	137	100	-
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	3500	-	-	-	-	3922	-	-	-	-	112
57	Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah	-	-	-	Wp/wr	8	8	8	8	-	8	8	8	8	-	100	100	1250	100	-
58	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	-	-	-	Kali	50	50	50	50	-	50	50	198	50	-	100	100	396	100	-
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	200	-	-	-	-	283	100	-	-	-	142
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
G	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	-	-	-	Persen		4,50	4,60	4,70	4,80		6	15	4,7	6,35		133	326	100	132
59	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata	-	-	-	Objek	2000	1500	1500	1500	-	2000	1536	1768	1500	-	100	102	118	100	-
60	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	-	-	-	Objek	-	1140	1140	1140	-	-	1140	1200	1140	-	-	100	105	100	-
61	Jumlah Kajian Proyeksi Potensi Pajak Daerah	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah																			
62	Jumlah sistem informasi baru yang diadakan	-	-	-	Aplikasi	-	3	1	-	-	-	3	1	-	-	-	100	100	-	-
63	Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan	-	-	-	Aplikasi	8	8	8	8	-	8	8	8	8	-	100	100	100	100	-
64	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	-	-	-	Aplikasi	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100
65	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan	-	-	-	Berkas	2000	2000	2000	2000	-	2963	3859	3791	2000	-	148	193	190	100	-
66	Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun	-	-	-	Buku	94	94	94	94	-	93	94	94	94	-		100	100	100	-
67	Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021	-	-	-	Buku	4	4	4	4	-	4	4	4	4	-	-	100	100	100	-
68	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	-	-	-	Objek	-	-	12000	8000	-	-	-	6313	8000	-	-	-	53	100	-
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-	-	-	Objek Pajak	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	6092	-	-	-	-	102
69	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	-	-	-	Lembar	91000	93000	93000	93000	-	95680	95019	95130	93000	-	106	102	102	100	-
70	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	-	-	-	Lembar	-	19000	19000	19000	-	-	19595	20110	19000	-	-	103	106	100	-
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	115000	-	-	-	-	118103		-	-	-	103
71	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	-	-	-	Orang/bulan	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
72	Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani	-	-	-	Wajib pajak	-	14400	14400	14400	-	-	6142	18360	14400	-	-	43	128	100	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	Layanan	-	-	-	-	14400	-	-	-	-	14649	-	-	-	-	102
73	Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi	-	-	-	Berkas	1500	1500	1500	1500	-	1887	2597	2126	1500	-	125	173	142	100	-
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2500	-	-	-	-	2585	-	-	-	-	103
	Nilai SAKIP OPD	-	-	V	Nilai	92,50	85	83,50	84,50	84,35	81,12	84,82	84,95	84,35	84,50	98,33	99,79	101,73	99,82	100,18
IV	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
H	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
74	Jumlah dokumen renja yang disusun	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100	100	100	100	-
75	Jumlah dokumen renstra yang disusun	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	100	-	-	-	100
76	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
77	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	-	-	-	Dokumen	4	4	4	4	-	4	4	4	4	-	100	100	100	100	-
78	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100	100	100	100	-
79	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
80	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4	-	-	-	Dokumen	5	5	5	5	-	5	5	5	5	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	laporan pemantauan RTP) yang disusun																			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	100
81	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
82	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	-	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100	100	100	100	-
I	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
83	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Orang	-	-	-	-	56	-	-	-	-	56	100	-	-	-	100
84	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100
85	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	-	-	-	Laporan	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
V	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
J	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
86	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	Paket	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100
87	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
88	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	-	Unit	61	39	15	15	-	68	47	86	15	-	111	121	573	100	-
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	Paket	-	-	-	-	21	-	-	-	-	22	-	-	-	-	105
89	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	-
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	Paket	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100
90	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	Bulan	11	11	11	11	-	11	11	11	11	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	Paket	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	100	-	-	-	100
91	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	Paket	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
92	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	-	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Perundang-Undangan yang Disediakan																			
93	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	-	-	-	Orang/kali	200	300	200	200	-	289	384	319	200	-	144	128	160	100	-
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	250	-	-	-	-	274	-	-	-	-	110
K	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
94	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100
95	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100
96	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100
VI	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
L	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
97	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Roda 4 yang diadakan	-	-	-	Unit	-	-	2	3	-	-	-	2	3	-	-	-	100	100	-
98	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 yang diadakan	-	-	-	Unit	-	2	6	1	-	-	2	2	1	-	-	100	33	100	-
99	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 yang diadakan	-	-	-	Unit	10	-	4	15	-	14	-	6	15	-	140	-	150	100	-
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	Unit	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100
100	Jumlah Sepeda Listrik yang diadakan	-	-	-	Unit	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100	-	-
M	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
102	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	-	-	-	Unit	58	47	47	47	-	42	47	47	47	-	72	100	100	100	-
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	Unit	-	-	-	-	42	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5
103	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
104	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	-	-	-	Unit	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	Unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
105	Jumlah bulan pemeliharaan secara	-	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor																			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	Unit	-	-	-	-	70	-	-	-	-	80	100	-	-	-	114
N	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
106	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	-	-	-	Kali	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100	-
107	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	-	-	-	Kali	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	Kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100

Sumber : BPKAD, 2025

2.1.4 Kinerja Keuangan BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tabel II-5

Pencapaian Realisasi Keuangan BPKAD Kota Pekalongan

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A	BELANJA OPERASI	63.353,60	19.542,65	20.749,01	21.223,79	20.354,40	54.652,40	17.900,84	18.935,27	19.878,89	19.232,97	322,55	280,87	279,87	282,24	289,37	-16,20	-14,93
1	Belanja Pegawai	13.283,75	11.647,00	12.222,62	12.470,03	13.011,25	11.488,20	10.911,56	11.407,30	11.683,17	12.202,26	86,48	93,69	93,33	93,69	93,78	-0,25	1,60
2	Belanja Barang	5.765,28	7.156,88	8.289,63	8.188,41	7.186,15	4.707,07	6.251,81	7.294,65	7.658,54	6.873,81	81,65	87,35	88,00	93,53	95,65	6,63	11,06
3	Belanja Hibah	40.956,06	738,76	236,76	565,35	157,00	36.250,15	737,48	233,32	537,18	156,90	88,51	99,83	98,54	95,02	99,94	-24,90	-26,72
4	Belanja Bantuan Sosial	3.348,50	-	-	-	-	2.206,98	-	-	-	-	65,91	-	-	-	-	-	-
B	BELANJA MODAL	5.235,65	506,49	4.364,39	5.757,47	2.574,02	5.094,99	484,36	4.322,66	5.719,49	2.517,53	283,96	193,50	187,69	198,23	192,73	162,00	169,57
5	Belanja Peralatan dan Mesin	4.861,15	349,99	4.091,79	5.495,97	2.173,62	4.756,73	328,36	4.083,04	5.460,94	2.140,06	97,85	93,82	99,79	99,36	98,46	237,55	255,83
6	Belanja Bangunan dan Gedung	324,50	156,50	272,60	261,50	400,40	289,87	156,00	239,62	258,55	377,46	89,33	99,68	87,90	98,87	94,27	17,86	15,33
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50,00	-	-	-	-	48,39	-	-	-	-	96,78	-	-	-	-	-	-
C	BELANJA TAK TERDUGA	63.616,17	13.833,84	6.743,00	3.500,00	4.100,00	57.371,26	9.403,41	3.909,45	2.989,02	2.647,36	90,18	67,97	57,98	85,40	64,57	-40,12	-44,25
8	Belanja Tak Terduga	63.616,17	13.833,84	6.743,00	3.500,00	4.100,00	57.371,26	9.403,41	3.909,45	2.989,02	2.647,36	90,18	67,97	57,98	85,40	64,57	-40,12	-44,25

Sumber: BPKAD, 2025

Tabel II-6
Pencapaian Realisasi Keuangan Menurut Program BPKAD Kota Pekalongan

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah: Keuangan	24.156	20.035	31.856	30.481	27.028	12.929	18.372	27.170	28.587	24.399	53,52	91,70	85,29	93,79	90,27	6,58	20,14
A	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	18.283,51	14.314,61	19.100,12	21.461,29	18.225,54	7.803,83	13.386,47	18.184,21	20.580,45	17.281,33	42,68	93,52	95,20	95,90	94,82	2,25	26,13
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,50	24,25	17,00	16,00	17,74	19,96	24,08	16,81	15,94	17,14	84,93	99,30	98,88	99,64	96,60	-5,43	-1,80
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,00	11,75	2,50	2,50	3,36	6,98	11,70	2,39	2,49	3,27	69,81	99,54	95,52	99,40	97,32	-6,67	5,94
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,00	2,25	1,50	1,50	2,38	9,80	2,24	1,49	1,50	2,37	98,01	99,35	99,20	100,00	99,81	-13,08	-12,90
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,50	10,25	13,00	12,00	12,00	3,18	10,15	12,93	11,96	11,49	90,75	99,01	99,49	99,65	95,77	53,00	58,88
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.233,12	11.925,91	12.565,67	12.824,96	13.473,59	1.283,82	11.180,68	11.752,58	12.119,57	12.666,59	11,43	93,75	93,53	94,50	94,01	4,66	195,91
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.098,12	11.794,66	12.463,67	12.702,11	13.350,78	1.148,82	11.056,32	11.650,59	11.996,83	12.543,98	10,35	93,74	93,48	94,45	93,96	4,74	218,83
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135,00	129,00	100,50	120,60	120,60	135,00	122,45	100,50	120,60	120,41	100,00	94,92	100,00	100,00	99,85	-1,63	-1,84
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2,25	1,50	2,25	2,20	-	1,90	1,49	2,14	2,19	-	84,64	99,22	95,10	99,50	3,66	6,10
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5,00	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	5,00	-	-	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	5,00	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	5,00	-	-	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.247,35	1.261,81	1.475,00	1.473,73	1.405,37	1.001,74	1.177,30	1.452,59	1.387,36	1.370,11	80,31	93,30	98,48	94,14	97,49	3,33	8,79
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,00	7,50	7,50	10,00	7,50	4,13	7,27	7,45	9,99	7,42	82,67	96,89	99,29	99,88	98,99	14,58	21,68
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	542,85	654,98	727,00	686,50	587,18	509,51	631,03	721,03	645,02	573,56	93,86	96,34	99,18	93,96	97,68	2,90	4,12
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36,00	13,50	28,00	18,00	18,00	33,27	10,41	26,79	17,03	17,74	92,41	77,14	95,68	94,62	98,57	2,30	14,08
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	110,00	135,00	123,69	135,00	84,13	98,99	134,36	122,03	127,30	84,13	89,99	99,53	98,65	94,30	8,37	12,13
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00	46,54	39,47	49,38	49,81	49,94	93,09	98,68	98,76	99,61	99,87	1,25	2,76
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	1,93	1,98	2,25	2,19	2,25	77,00	79,20	90,00	87,60	90,00	0,00	4,14
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	511,00	433,33	525,00	583,04	605,20	322,23	388,15	511,32	541,30	591,90	63,06	89,57	97,39	92,84	97,80	5,20	16,85
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	4.734,00	-	3.750,91	5.258,70	1.818,00	4.634,00	-	3.743,99	5.236,03	1.794,04	-	-	99,82	99,57	98,68	-31,31	-31,47
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	898,41	2.709,20	1.237,00	-	-	898,41	2.707,65	1.231,14	-	-	100,00	99,94	99,53	36,80	36,71
2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.734,00	-	2.852,50	2.549,50	581,00	4.634,00	-	2.845,59	2.528,38	562,90	-	-	99,76	99,17	96,88	-46,96	-47,22

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599,40	717,57	739,09	887,15	821,10	557,78	679,39	708,01	841,26	803,51	93,06	94,68	95,79	94,83	97,86	8,83	10,09
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	6,00	9,00	4,59	6,00	-	5,38	6,37	4,33	5,75	-	89,66	70,75	94,18	95,88	7,91	4,82
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	506,40	506,40	514,12	634,42	520,74	467,78	471,59	502,24	614,21	514,98	92,37	93,13	97,69	96,81	98,89	1,75	3,36
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93,00	205,17	215,97	248,14	294,37	90,00	202,43	199,40	222,72	282,78	96,77	98,66	92,33	89,76	96,07	39,85	40,52
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446,14	385,08	547,46	995,75	684,73	306,53	325,02	505,24	975,29	624,94	68,71	84,40	92,29	97,95	91,27	19,78	29,65
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	166,14	145,44	182,46	153,75	143,66	88,94	103,01	155,75	149,19	131,54	53,53	70,82	85,36	97,03	91,56	-2,33	12,74
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230,00	199,64	325,00	800,00	478,59	178,32	186,68	313,89	785,25	431,78	77,53	93,51	96,58	98,16	90,22	38,89	44,50
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,00	40,00	40,00	42,00	62,48	39,27	35,34	35,59	40,85	61,63	78,55	88,35	88,99	97,27	98,64	8,44	14,08
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.135,08	2.018,38	8.771,50	5.402,31	5.810,57	1.976,36	1.752,98	5.674,06	4.753,34	4.312,03	92,57	86,85	64,69	87,99	74,21	74,57	46,72
I	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.067,57	1.225,96	1.198,74	1.092,65	938,21	1.025,22	1.072,88	1.031,43	992,70	914,30	96,03	87,51	86,04	90,85	97,45	-2,59	-2,72
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	-	50,00	19,80	19,46	15,62	-	31,01	16,66	16,83	15,35	-	62,03	84,13	86,50	98,30	-20,47	-13,51

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	50,00	49,10	20,55	8,82	-	44,24	39,28	17,75	8,30	-	88,47	80,00	86,38	94,20	-29,26	-29,81
3	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	209,47	62,00	60,45	30,37	25,94	185,60	42,29	50,46	26,50	25,10	88,61	68,21	83,47	87,25	96,75	-34,31	-27,66
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	341,00	911,32	860,16	832,35	741,56	329,82	822,67	755,88	756,77	721,83	96,72	90,27	87,88	90,92	97,34	36,87	34,20
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	359,10	126,64	185,48	97,51	78,22	354,55	106,95	147,59	91,58	76,37	98,73	84,45	79,57	93,92	97,63	-21,37	-21,60
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	158,00	26,00	23,75	92,42	68,05	155,25	25,71	21,56	83,27	67,35	98,26	98,90	90,76	90,10	98,97	42,64	41,90
II	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	321,01	368,61	364,91	424,55	397,93	283,31	288,10	310,65	401,74	384,82	88,26	78,16	85,13	94,63	96,71	5,97	8,66
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	45,00	87,20	120,16	261,55	249,72	42,90	82,54	108,81	246,48	241,21	95,32	94,66	90,55	94,24	96,59	61,18	62,16
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	35,20	32,61	39,40	23,00	15,90	30,96	30,74	36,70	22,92	15,84	87,97	94,25	93,13	99,64	99,62	-14,75	-12,44

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
3	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	34,00	100,68	25,00	25,00	22,51	30,66	46,03	23,47	21,40	22,10	90,19	45,73	93,87	85,58	98,18	27,74	-1,11
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	49,25	66,32	73,35	55,00	51,27	48,68	56,19	63,37	53,12	49,10	98,83	84,73	86,40	96,59	95,78	3,36	1,12
5	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	70,06	25,00	25,00	20,00	20,10	42,63	21,54	11,05	19,18	20,00	60,85	86,15	44,21	95,89	99,50	-20,95	-5,09
6	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	87,50	56,81	82,00	40,00	38,43	87,48	51,06	67,25	38,65	36,56	99,98	89,88	82,02	96,62	95,14	-11,47	-14,46
III	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	640,50	423,81	443,00	360,11	351,04	570,26	392,01	398,86	347,17	345,39	89,03	92,50	90,04	96,41	98,39	-12,63	-10,75
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	-	56,50	57,00	39,20	36,75	-	54,38	52,39	38,07	36,11	-	96,25	91,91	97,11	98,26	-9,15	-9,03

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																	
2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	8,00	8,00	6,40	5,63	-	7,45	6,56	6,02	5,46	-	93,13	82,00	94,00	97,14	-8,03	-7,36
3	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	92,00	89,96	95,00	81,98	94,75	90,14	86,47	86,76	78,54	92,95	97,97	96,12	91,33	95,81	98,09	1,31	1,28
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	350,00	92,25	90,00	73,59	69,25	346,03	87,80	87,63	70,59	68,48	98,86	95,17	97,37	95,92	98,89	-25,05	-24,31
5	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	30,90	10,00	10,00	8,00	6,00	25,41	9,04	9,47	7,51	6,00	82,22	90,39	94,75	93,87	100,00	-28,16	-25,11
6	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	29,10	35,00	10,00	11,25	-	23,51	28,69	9,64	11,00	-	80,79	81,97	96,39	97,77	-9,66	-7,56

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	167,60	138,00	148,00	140,94	127,41	108,70	123,36	127,35	136,81	125,39	64,85	89,39	86,05	97,07	98,41	-6,20	3,95
IV	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	106,00	-	6.764,85	3.525,00	4.123,40	97,56	-	3.933,13	3.011,73	2.667,52	-	-	58,14	85,44	64,69	-32,73	-33,71
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	106,00	-	6.764,85	3.525,00	4.123,40	97,56	-	3.933,13	3.011,73	2.667,52	-	-	58,14	85,44	64,69	-32,73	-33,71
C	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.949,15	1.741,15	2.183,88	1.496,88	1.313,35	1.493,06	1.358,16	1.609,11	1.163,42	1.209,65	76,60	78,00	73,68	77,72	92,10	-7,24	-3,57
I	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.949,15	1.741,15	2.183,88	1.496,88	1.313,35	1.493,06	1.358,16	1.609,11	1.163,42	1.209,65	76,60	78,00	73,68	77,72	92,10	-7,24	-3,57
1	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	100,00	54,90	154,90	147,00	59,65	94,31	40,60	143,38	92,14	53,80	94,31	73,96	92,56	62,68	90,19	18,13	29,71
2	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	50,00	29,13	29,13	18,00	15,80	47,70	13,01	13,08	17,26	12,86	95,40	44,67	44,88	95,88	81,36	-23,04	-16,44
3	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	620,13	800,00	828,43	271,00	241,31	385,72	644,74	394,84	145,09	210,32	62,20	80,59	47,66	53,54	87,16	-11,42	2,53
4	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	58,80	116,00	291,70	154,35	61,00	41,00	50,89	264,80	70,38	51,85	69,73	43,87	90,78	45,60	85,00	35,29	86,18
5	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	497,60	175,69	199,29	353,53	423,97	344,83	127,29	159,70	331,94	397,33	69,30	72,45	80,14	93,89	93,72	11,51	22,48
6	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan	622,62	565,43	680,43	553,00	511,62	579,51	481,62	633,31	506,62	483,50	93,07	85,18	93,07	91,61	94,50	-3,76	-2,49

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Laporan Barang Milik Daerah																	
D	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.788,51	1.960,40	1.800,91	2.120,78	1.678,96	1.655,56	1.874,25	1.702,99	2.090,20	1.595,77	92,57	95,61	94,56	98,56	95,05	-0,40	0,79
I	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.788,51	1.960,40	1.800,91	2.120,78	1.678,96	1.655,56	1.874,25	1.702,99	2.090,20	1.595,77	92,57	95,61	94,56	98,56	95,05	-0,40	0,79
1	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	125,00	77,50	3,75	-	-	118,76	76,22	3,75	-	-	95,01	98,34	99,99	-33,29	-32,73
2	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	400,27	69,60	75,00	186,64	137,28	385,90	60,92	64,50	177,86	136,87	96,41	87,53	86,00	95,30	99,71	11,89	18,59
3	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	57,00	19,00	106,70	55,30	37,50	55,55	18,08	104,35	55,13	37,42	97,46	95,13	97,79	99,69	99,79	78,64	82,64
4	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	90,80	149,63	141,00	299,90	91,62	85,49	145,43	138,46	294,31	82,79	94,15	97,19	98,20	98,14	90,36	25,57	26,50
5	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	227,70	642,50	192,00	347,23	172,95	187,33	637,88	180,49	347,02	170,76	82,27	99,28	94,01	99,94	98,73	35,68	52,57
6	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	354,22	272,55	300,00	295,20	283,50	351,99	272,31	298,96	293,36	273,18	99,37	99,91	99,65	99,38	96,36	-4,64	-5,40
7	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	105,00	379,32	395,02	337,38	380,23	101,97	363,36	367,93	329,16	348,82	97,11	95,79	93,14	97,56	91,74	65,88	63,26
8	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	98,00	62,31	55,00	55,00	35,00	87,83	57,23	53,00	54,82	34,40	89,62	91,85	96,36	99,67	98,29	-21,13	-19,01
9	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	247,00	230,25	226,55	313,00	408,79	231,64	223,02	217,05	311,84	385,24	93,78	96,86	95,81	99,63	94,24	15,09	15,20

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
10	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	208,52	135,24	184,64	110,93	100,60	167,87	96,02	159,50	109,04	96,72	80,51	71,00	86,38	98,30	96,13	-11,96	-4,91
11	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	-	-	42,70	27,75	-	-	-	41,44	25,83	-	-	-	97,04	93,08	-8,75	-9,42

Sumber: BPKAD, 2025

2.1.5 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan BPKAD Kota Pekalongan mencakup berbagai pemangku kepentingan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari pelayanan yang diberikan. Sasaran utama meliputi perangkat daerah lain sebagai pengguna layanan pengelolaan keuangan, aparatur pemerintah yang membutuhkan dukungan administratif dan teknis, serta masyarakat umum yang mengakses informasi keuangan daerah secara transparan. Selain itu, lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan Inspektorat juga menjadi bagian dari kelompok sasaran dalam rangka memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Penentuan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diselenggarakan tepat guna, tepat sasaran, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Pekalongan berkomitmen untuk memberikan layanan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok sasaran tersebut. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan sistem informasi keuangan yang mudah diakses, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan memahami karakteristik dan ekspektasi dari masing-masing kelompok sasaran, BPKAD dapat merancang strategi pelayanan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

2.1.6 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, BPKAD Kota Pekalongan menjalin kemitraan strategis dengan Bank Jateng sebagai mitra utama dalam pengelolaan transaksi keuangan daerah. Kerjasama ini mencakup berbagai layanan perbankan seperti pengelolaan kas daerah, pembayaran gaji ASN, transaksi belanja daerah, serta penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan dukungan sistem perbankan yang aman dan terintegrasi, proses transaksi keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga mendukung kelancaran operasional perangkat daerah secara menyeluruh.

Salah satu bentuk inovasi dalam kemitraan ini adalah penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan transaksi tunai dan meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Melalui ETPD, seluruh transaksi pemerintah daerah diarahkan untuk menggunakan sistem digital yang terhubung langsung dengan layanan Bank Jateng. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran dan penerimaan, tetapi juga memperkuat pengawasan dan pelaporan keuangan secara *real time*, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, BPKAD juga memanfaatkan layanan *Cash Management System* (CMS) dan *Billing Center* dari Bank Jateng sebagai bagian dari transformasi digital keuangan daerah. CMS memberikan kemudahan dalam

pengelolaan kas daerah, termasuk monitoring saldo dan mutasi rekening secara langsung, serta pengaturan jadwal pembayaran yang lebih fleksibel. Sementara *Billing Center* berfungsi sebagai platform pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik, yang memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan potensi penerimaan PAD. Kolaborasi ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam mendukung pembangunan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan.

2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis sebagai mitra pembangunan yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan. BUMD seperti PD. BPR Bank Pekalongan, PT. Bank Jateng, PT. BPR BKK Kota Pekalongan, PD. BPR BKK Jateng, dan Perumda Tirtayasa turut mendukung penyediaan layanan publik yang berkualitas serta pengelolaan usaha yang berorientasi pada profitabilitas dan keberlanjutan. Kinerja dari BUMD tersebut memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kontribusi dividen dan peningkatan nilai aset daerah, yang berdampak mendorong peningkatan PAD.

Salah satu bentuk kontribusi nyata BUMD terhadap keuangan daerah adalah melalui dividen atas penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dividen ini menjadi sumber pendapatan penting dalam mendukung pembiayaan program-program pembangunan Kota Pekalongan. Pemerintah Daerah secara aktif melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD untuk memastikan bahwa penyertaan modal yang diberikan mampu menghasilkan *return* yang optimal dan sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.

Secara khusus, Perusahaan Umum Darah Tirtayasa sebagai BUMD yang bergerak di bidang air minum juga memberikan kontribusi melalui dividen atas penyertaan modal yang telah ditanamkan oleh Pemerintah Daerah. Selain menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat, Perumda Tirtayasa diharapkan mampu mengelola operasional secara efisien dan menghasilkan keuntungan yang dapat dikembalikan kepada daerah dalam bentuk dividen. Dukungan terhadap Perumda Tirtayasa tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat struktur pendapatan daerah melalui kontribusi finansial yang berkelanjutan, sehingga turut mendorong peningkatan PAD Kota Pekalongan secara langsung.

2.1.8 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang efektif, BPKAD Kota Pekalongan menjalin berbagai bentuk kerjasama strategis dengan instansi vertikal dan lembaga mitra. Kerjasama daerah ini menjadi bagian penting dari tanggung jawab dalam memperkuat sinergi antar

lembaga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, BPKAD Kota Pekalongan dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan menciptakan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Instansi Pemerintah Daerah dan OPD Lain

- a) Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah)
Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
- b) Inspektorat Daerah
Memperkuat akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup koordinasi dalam pelaksanaan audit internal, reviu atas laporan keuangan, serta pendampingan terhadap pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik
- c) OPD Teknis lainnya dalam rangka sinergi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah

2. Instansi Vertikal

- a) BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)
pelaksanaan audit laporan keuangan daerah, di mana BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penguatan pengendalian internal yang berkelanjutan
- b) Kementerian Keuangan
koordinasi pengelolaan dana transfer pusat, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID).
- c) Kementerian Dalam Negeri
Kemendagri sebagai pembina teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui penerapan aplikasi SIPD RI untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan integrasi sistem anggaran daerah.
- d) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Dalam hal pengendalian gratifikasi, edukasi antikorupsi, dan supervisi pencegahan korupsi melalui program Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan)
- e) BPN (Badan Pertahanan Nasional)
mendukung pensertifikatan aset tanah milik pemerintah Kota Pekalongan. Melalui sinergi ini, proses pendataan dan pengamanan aset daerah menjadi lebih tertib dan terstruktur, sehingga mencegah potensi sengketa.

3. Pemerintah Daerah Lain

Pemerintah provinsi dan unit Samsat dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah melalui pengelolaan opsen pajak kendaraan bermotor. Kerjasama ini mencakup koordinasi dalam pelaporan dan distribusi dana bagi hasil pajak, peningkatan sistem informasi perpajakan, serta sinergi dalam edukasi dan

sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak. Dengan dukungan dari provinsi dan Samsat, BPKAD dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan

4. Pihak Perbankan

Salah satu bentuk kerjasama strategis antara Pemerintah Daerah Kota Pekalongan melalui BPKAD dengan Bank Jateng adalah dalam pengelolaan deposito daerah. Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana kas daerah yang belum digunakan dalam waktu tertentu, dengan menempatkannya dalam bentuk deposito di Bank Jateng. Penempatan dana dalam deposito ini memberikan manfaat berupa tambahan pendapatan daerah melalui bunga deposito, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dapat menghambat pencapaian kinerja perangkat daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah merupakan elemen krusial dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai kendala dan tantangan kerap muncul yang berdampak pada kualitas dan capaian pelayanan publik. Pada bagian ini, akan diuraikan secara sistematis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, khususnya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berdasarkan cascading Renstra BPKAD Kota Pekalongan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah telah diidentifikasi dalam tabel berikut:

Tabel II-7

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tuntutan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, tertib, transparan dan akuntabel	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi	Kerbatasan waktu di dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD
2	Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Masih rendahnya pemahaman aparatur pengelola keuangan di OPD terkait dengan penatausahaan dan pengelolaan kas, utang dan piutang daerah yang sesuai dengan ketentuan Masih kurangnya ketelitian dalam verifikasi pengeluaran daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait standar akuntansi pemerintah berbasis akrual	Perlunya menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban keuangan kepada publik Perlunya memastikan data SKPD sesuai dengan data konsolidasi Perlunya membukukan penerimaan dan pengeluaran Daerah
3	Kompleksitas dalam pengelolaan BMD	Belum Optimal pencatatan, pemanfaatan dan penatausahaan BMD untuk mendukung pembangunan daerah	Belum optimalnya Pencatatan BMD pada SKPD Belum optimalnya kepedulian SKPD selaku Pengguna Barang Belum optimalnya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD Terkendalanya pensertifikatan tanah milih pemda (Alas hak tanah tidak ditemukan, Batas tanah tidak diketahui)
4	Pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal sesuai dengan potensi yang ada	Pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah kurang optimal Penagihan pajak daerah belum optimal	Perlunya peningkatan akurasi data potensi pendapatan daerah Belum diterapkannya sangsi bagi Wajib Pajak/ Wajib Retribusi yang tidak patuh secara maksimal Masih kurangnya kepatuhan masyarakat di dalam pelaksanaan kewajibannya membayar pajak dan retribusi Tuntutan transformasi digital pada transaksi pemerintah daerah Peningkatan pajak tidak sebanding dengan peningkatan PDRB

Sumber : BPKAD, 2025

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Rumusan isu strategis ini disusun berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang telah dihadapi, serta mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal seperti perkembangan isu global, nasional, dan regional yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tata kelola keuangan daerah.

Lebih lanjut, isu strategis juga dirumuskan dengan memperhatikan potensi daerah yang berada dalam lingkup kewenangan BPKAD. Dengan pendekatan ini, diharapkan BPKAD mampu memainkan peran strategis dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta berkontribusi terhadap pembangunan di Kota Pekalongan.

Tabel II-8
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Pd	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan Keuangan Daerah	- Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi - Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah - Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait standar akuntansi pemerintah berbasis akrual	Belum optimalnya integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah	Belum optimalnya respons fiskal daerah terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan yang memerlukan integrasi aspek lingkungan dalam pengelolaan keuangan	Peningkatan tuntutan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan (green budgeting)	Mendorong peningkatan kapasitas pelaporan keuangan dan penyampaian informasi keuangan publik secara digital dan terbuka.	Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan yang mendukung lingkungan hidup atau penanganan perubahan iklim lebih berkualitas, tertib, transparan dan akuntabel.
Pengelolaan BMD	Belum Optimal pencatatan, pemanfaatan dan penatausahaan BMD untuk mendukung pembangunan daerah	Pengelolaan aset daerah belum mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan	Penting bagi BPKAD untuk mulai mendorong kebijakan fiskal daerah yang mendukung ekonomi hijau melalui pengelolaan aset berkelanjutan	Dorongan pemerintah pusat agar daerah memaksimalkan pemanfaatan BMD secara produktif dan berkelanjutan	Alih fungsi lahan dan konflik pemanfaatan ruang (termasuk aset daerah)	Peningkatan kualitas pengelolaan BMD dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan dengan melakukan verifikasi dan pengamanan aset milik daerah secara lebih ketat agar tidak hilang atau tumpang tindih dengan kepentingan privat atau proyek strategis nasional.
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal sesuai dengan potensi yang ada	Minimnya Instrumen Pajak dan Retribusi Daerah yang Berbasis Lingkungan (<i>Green Tax/ Fiskal Hijau</i>)	Masih terbatasnya integrasi aspek keberlanjutan dan respons terhadap isu lingkungan global dalam strategi optimalisasi pendapatan daerah, serta belum dikembangkannya instrumen fiskal daerah yang adaptif terhadap transisi ekonomi hijau dan risiko perubahan iklim	Optimalisasi pemanfaatan BMD melalui kerja sama pemanfaatan, sewa, dan hibah berbasis prinsip keberlanjutan	Pengembangan instrumen PAD berbasis lingkungan (green retribution, insentif pajak hijau).	Optimalisasi potensi pengembangan Pajak/ Daerah yang bisa menambah PAD.

Sumber : BPKAD, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra BPKAD Kota Pekalongan dirancang sebagai acuan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Dokumen ini memuat arah kebijakan dan sasaran kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan, khususnya dalam aspek perencanaan anggaran, pengelolaan aset, serta optimalisasi pendapatan daerah. Tujuan Renstra BPKAD Kota Pekalongan tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik”**

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra BPKAD Kota Pekalongan merupakan penjabaran dari tujuan strategis yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sasaran ini dirancang untuk memperkuat peran BPKAD sebagai pengelola keuangan yang mampu mendukung efektivitas pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan, efisiensi anggaran, pengelolaan aset yang tertib, serta penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan menetapkan sasaran yang terukur dan relevan, BPKAD diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kota Pekalongan, sekaligus menjawab tantangan pengelolaan keuangan di era digital dan dinamis. Sasaran Renstra BPKAD Kota Pekalongan tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Katego ri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	Indeks pengelolaan keuangan daerah dimensi kualitas anggaran belanja, transparansi pengelolaan keuangan, dan penyerapan anggaran	Indeks	50	50	50	50	50	50	50	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan BMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	Persen	100, 47	100	100	100	100	100	100	

Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,18	85,28	85,78	86,28	86,78	87,28	87,78	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD		84,50	84,60	84,70	84,80	84,90	85,00	85,10	

Sumber: BPKAD, 2025

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi BPKAD Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai langkah operasional yang terarah dan adaptif terhadap dinamika kebijakan serta kebutuhan pembangunan daerah. Strategi ini mencerminkan komitmen BPKAD untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun sinergi lintas sektor guna mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Melalui pendekatan strategis yang berorientasi pada hasil, BPKAD berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan mendukung pencapaian sasaran secara optimal, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel III-2
Strategi Renstra PD

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital.	Penguatan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi kinerja, integritas, manajemen talenta, transformasi arsitektur dan kolaborasi digital, BMD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)	Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan pendekatan partisipatif dan transparansi publik, pengelolaan layanan digital, mitigasi risiko korupsi, pemutakhiran data dan optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta penguatan <i>corporate university</i> dalam pengembangan ASN yang mendukung	Penguatan tata kelola SDM, keuangan daerah, dan optimalisasi pengamanan BMD untuk mendukung Pembangunan infrastruktur daerah	Optimalisasi perwujudan profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta perwujudan <i>single platform digital</i> dalam rangka perwujudan Fondasi Mina Batik

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			perwujudan ekonomi sirkular dan Pembangunan yang berkelanjutan		
Strategi Renstra OPD	Peningkatan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas untuk pengelola keuangan daerah dan pengelola BMD	Penguatan kebijakan pengelolaan BMD dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah melalui peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan digitalisasi dokumen BMD	Pemutakhiran data dan optimalisasi potensi pendapatan, pendataan BMD dan optimalisasi pemanfaatan BMD guna peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan dana transfer pusat dan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat	Optimalisasi Pengamanan BMD dan pengalokasian anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur strategis	Penyelarasan program keuangan daerah dan pengelolaan BMD serta pemanfaatan Dana Transfer untuk mendukung pengembangan mina batik

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menetapkan arah kebijakan yang bersifat strategis, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Arah kebijakan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan fokus pada peningkatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai sumber daya pembangunan.

Pada periode 2026-2030 fokus kebijakan BPKAD Kota Pekalongan akan menitik beratkan pada penahapan pada tabel 3.4.

Tabel III-3
Arah Kebijakan Renstra PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan strategi: 1. Peningkatan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas untuk pengelola keuangan daerah dan pengelola BMD 2. Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah melalui optimalisasi peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan digitalisasi dokumen BMD 3. Pemutakhiran data dan optimalisasi potensi pendapatan, pendataan BMD dan optimalisasi pemanfaatan BMD guna peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan dana transfer pusat dan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat	

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Optimalisasi Pengamanan BMD dan pengalokasian anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur strategis 5. Penyelarasan program keuangan daerah dan pengelolaan BMD serta pemanfaatan Dana Transfer untuk mendukung pengembangan mina batik.	

Sumber : BPKAD, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD sebesar 100 persen; persentase realisasi APBD (Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal) sebesar 91,67 persen; persentase laporan keuangan daerah tepat waktu sebesar 100 persen.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Fokus program adalah pengelolaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perUndang-undangan sebesar 100 persen.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Fokus program adalah kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu ketetapan pajak daerah (non opsen) dan retribusi daerah sebesar 100 persen; persentase realisasi PAD sebesar 100 persen.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel IV-1
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Keuangan							24.059.966.000		25.069.869.000		25.184.369.000		25.344.193.000		25.067.369.000	
Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan		Indeks pengelolaan keuangan daerah dimensi kualitas anggaran belanja, transparansi pengelolaan keuangan, dan penyerapan anggaran		50		50		50		50		50		50		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan berkualitas	Pesentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	persen	100	100	100	929.013.000	100	932.000.000	100	932.000.000	100	932.000.000	100	932.000.000	
Kegiatan:																
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya dokumen KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS, Dokumen Perda dan Perwal APBD, serta Perubahan Perda dan Perwal APBD yang berkualitas dan tepat waktu	Persentase ketersediaan dokumen KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS, Dokumen Perda dan Perwal APBD, serta Perubahan Perda dan Perwal APBD	persen	100	100	100	903.596.000	100	932.000.000	100	932.000.000	100	932.000.000	100	932.000.000	
Sub Kegiatan:																
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen	2	2	2	15.451.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	
Sub Kegiatan:																
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen	2	2	2	15.451.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	
Sub Kegiatan:																
	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	2	2	2	21.518.000	2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																
Sub Kegiatan:	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2	2	2	736.628.000	2	737.000.000	2	737.000.000	2	737.000.000	2	737.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																
Sub Kegiatan:	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	2	2	2	75.548.000	2	76.000.000	2	76.000.000	2	76.000.000	2	76.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																
Sub Kegiatan:	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	2	2	2	39.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan berkualitas	Persentase realisasi APBD (Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal)	persen	94,34		91,67	3.793.582.000	91,67	3.831.890.000	91,67	3.831.890.000	91,67	3.831.890.000	91,67	3.831.890.000	
Kegiatan:	Terlaksananya Penerbitan dan pencairan SP2D atas pengajuan SPM terverifikasi dari OPD, Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK, dan Verifikasi SPM yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Penerbitan dan pencairan SP2D atas pengajuan SPM terverifikasi dari OPD, Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK, dan Verifikasi SPM	persen	100	100	100	293.609.000	100	331.890.000	100	331.890.000	100	331.890.000	100	331.890.000	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	7346	7000	7000	211.900.000	7000	228.500.000	7000	228.500.000	7000	228.500.000	7000	228.500.000	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	39	24	12	7.091.000	12	12.600.000	12	12.600.000	12	12.600.000	12	12.600.000	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	dokumen	48	49	48	8.856.000	48	13.690.000	48	13.690.000	48	13.690.000	48	13.690.000	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	laporan	2	2	2	39.830.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen	1	1	1	8.890.000	1	13.700.000	1	13.700.000	1	13.700.000	1	13.700.000	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	220	220	150	17.042.000	150	23.400.000	150	23.400.000	150	23.400.000	150	23.400.000	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
Kegiatan:	Terlaksanya Penyaluran Bansos tidak terencana yang sesuai dengan peraturan perundangan Daerah	Persentase Penyaluran Bansos tidak terencana	persen	100	100	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah																
Sub Kegiatan:	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	laporan	12	12	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan berkualitas	Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD yang sesuai SAP	persen	100	100	100	278.952.000	100	396.900.000	100	396.900.000	100	396.900.000	100	396.900.000	
Kegiatan:	Tersedianya raperda dan raperwal pertanggungjawaban APBD, laporan penerimaan dan pengeluaran yang tepat waktu	Persentase ketersediaan raperda dan raperwal pertanggungjawaban APBD, laporan penerimaan dan pengeluaran yang tepat waktu	persen	100	100	100	278.840.000	100	396.900.000	100	396.900.000	100	396.900.000	100	396.900.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	dokumen	4	4	4	26.000.000	4	43.000.000,00	4	43.000.000,00	4	43.000.000,00	4	43.000.000,00	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	13	13	13	5.840.000	13	6.000.000	13	6.000.000	13	6.000.000	13	6.000.000	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	laporan	7	7	7	60.000.000	7	101.500.000,00	7	101.500.000,00	7	101.500.000,00	7	101.500.000,00	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	dokumen	2	12	12	3.000.000	12	7.300.000,00	12	7.300.000,00	12	7.300.000,00	12	7.300.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
Sub Kegiatan:	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen	2	1	1	5.000.000	1	14.600.000,00	1	14.600.000,00	1	14.600.000,00	1	14.600.000,00	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	120	120	120	99.000.000	120	144.500.000,00	120	144.500.000,00	120	144.500.000,00	120	144.500.000,00	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																
Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD		Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan BMD	persen	100	100	100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah tingkat kota yang akuntabel dan sesuai peraturan perundangan	Persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100	100	100	794.650.000	100	1.013.000.000	100	1.095.000.000	100	1.013.000.000	100	1.013.000.000	
Kegiatan:	Tersedianya Laporan Aset Tetap dan Persediaan semua OPD, Laporan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Aset Tetap dan Persediaan semua OPD, Laporan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	persen	100	100	100	794.650.000	100	1.013.000.000	100	1.095.000.000	100	1.013.000.000	100	1.013.000.000	
Pengelolaan Barang Milik Daerah																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen	2	2	2	58.000.000	2	66.000.000	2	66.000.000	2	66.000.000	2	66.000.000	
Penyusunan Standar Harga																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan:	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen	2	4	4	22.390.000	4	23.000.000	4	23.000.000	4	23.000.000	4	23.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	laporan	12	12	12	54.860.000	12	86.000.000	12	86.000.000	12	86.000.000	12	86.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	laporan	2	2	2	47.000.000	2	78.000.000	2	78.000.000	2	78.000.000	2	78.000.000	
Penilaian Barang Milik Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	dokumen	2	2	2	151.400.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	81	81	81	461.000.000	81	510.000.000	81	592.000.000	81	510.000.000	81	510.000.000	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	persen	100,47		100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel sesuai peraturan perundangan	Ketetapan Pajak Daerah (non opsen) dan Retribusi Daerah		255,88		258,44	813.108.000,00	259,73	Rp1.210.000.000	261,03	Rp1.210.000.000	262,34	Rp1.315.000.000	263,65	1.315.000.000,00	
		Persentase Realisasi PAD	persen	102,35		100	607.961.000,00	100	817.500.000,00	100	840.000.000,00	100	960.000.000,00	100	980.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kegiatan:	Terlaksananya pemutakhiran database pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola BPKAD, ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola BPKAD dan pengajuan keberatan yang diproses, jumlah tagihan pajak dan retribusi yang dibayar, pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan	Persentase Pemutakhiran database pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola BPKAD, ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola BPKAD dan pengajuan keberatan yang diproses, jumlah tagihan pajak dan retribusi yang dibayar, pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah	persen	-	Persen	43,88	1.790.042.000	43,89	2.027.500.000,00	43,9	2.050.000.000,00	43,9	2.275.000.000,00	43,91	2.295.000.000,00	
Pengelolaan Pendapatan Daerah																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	1	1	1	16.200.000	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	12	4	4	66.261.000	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	laporan	12	12	12	118.500.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	275.000.000	12	275.000.000	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	12	12	12	49.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan:	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	objek pajak	6092	3000	3000	78.000.000	3000	175.000.000	3000	175.000.000	3000	175.000.000	3000	175.000.000	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	11810 3	11500 0	11510 0	207.400.000	11510 0	300.000.000	11520 0	300.000.000	11520 0	345.000.000	11520 0	345.000.000	
Penetapan Wajib Pajak Daerah																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan	14649	14400	14400	339.758.000	14400	350.000.000	14400	350.000.000	14400	375.000.000	14400	375.000.000	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	dokumen	2585	2500	2500	20.450.000	2500	35.000.000	2500	35.000.000	2500	45.000.000	2500	45.000.000	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	dokumen	3922	4500	4500	426.000.000	4500	560.000.000,00	5000	580.000.000,00	5000	600.000.000,00	5000	620.000.000,00	
Penagihan Pajak Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksannanya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	283	160	160	72.000.000	200	110.000.000,00	200	110.000.000,00	200	150.000.000,00	200	150.000.000,00	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	laporan	2	2	2	27.500.000	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																
Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,18 Indeks		85,78		86,28		86,78		87,28		87,78		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP OPD	nilai	84,50 Nilai		84,7		84,8		84,9		85		85,1		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui perencanaan yang selaras, pelayanan administrasi yang andal, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	14.648.326.000	100	14.639.079.000	100	14.639.079.000	100	14.645.903.000	100	14.639.079.000	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	1.399.055.000	100	1.519.500.000	100	1.529.500.000	100	1.539.500.000	100	1.549.500.000	
		Persentase pengadaan/pemeliharaa n barang milik daerah	persen	100	0	100	357.254.000	100	710.000.000	100	710.000.000	100	710.000.000	100	410.000.000	
Kegiatan:	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	15.513.000	100	15.513.000	100	15.513.000	100	22.337.000	100	15.513.000	
perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perangkat daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan															
Sub Kegiatan:	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	3	2	3.176.000	2	3.176.000	2	3.176.000	3	10.000.000	2	3.176.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan:	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	dokumen	2	2	2	2.337.000	2	2.337.000	2	2.337.000	2	2.337.000	2	2.337.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	15	15	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Kegiatan:	Terwujudnya administrasi keuangan		persen	100	100	100	13.975.813.000	100	14.623.566.000	100	14.623.566.000	100	14.623.566.000	100	14.623.566.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah														
Sub Kegiatan:	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56	56	56	13.852.247.000	56	14.500.000.000	56	14.500.000.000	56	14.500.000.000	56	14.500.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	12	121.400.000	12	121.400.000	12	121.400.000	12	121.400.000	12	121.400.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
Sub Kegiatan:	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1	2.166.000	1	2.166.000	1	2.166.000	1	2.166.000	1	2.166.000	
Koordinasi dan Pneyusunan LAPORAN Keuangan Akhir Tahun SKPD																
Kegiatan:	Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daetah																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																
Kegiatan:	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	662.038.000	100	676.500.000	100	676.500.000	100	676.500.000	100	676.500.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	4	7.500.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	
Penyediaan Kompon Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
Sub Kegiatan:		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	paket	22	4	4	192.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan														
Sub Kegiatan:	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	4	4	13.995.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	4	4	113.000.000	4	115.000.000	4	115.000.000	4	115.000.000	4	115.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	13	13	36.500.000	13	36.500.000	13	36.500.000	13	36.500.000	13	36.500.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2	2	1.775.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	274	300	200	297.268.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
Kegiatan:	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sesuai ketentuan	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	828.816.000	100	838.000.000	100	848.000.000	100	858.000.000	100	868.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	514.816.000	12	515.000.000	12	515.000.000	12	515.000.000	12	515.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan:	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	311.000.000	12	320.000.000	12	330.000.000	12	340.000.000	12	350.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
Kegiatan:	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundangan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	0	100	734.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	2	0	3	734.000.000	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	3	3	0	0	1	300.000.000	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
Kegiatan:	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundangan	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	407.214.000	100	410.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Sub Kegiatan:	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	laporan	42	42	37	151.214.000	37	150.000.000	37	150.000.000	37	150.000.000	37	150.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	laporan	1	1	1	2.000.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET .
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan:	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	laporan	80	70	70	56.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

Sumber : BPKAD, 2025

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV-2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan berkualitas		
1			Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			Sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			Sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
2			Kegiatan: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Sub kegiatan: Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Sub kegiatan: Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			Sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
			Sub kegiatan: Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
			Sub kegiatan: Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
3			Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Sub kegiatan: Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
4			Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub kegiatan: Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			Sub kegiatan: Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
			Sub kegiatan: Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah tingkat kota yang akuntabel dan sesuai peraturan perundangan		
5			Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Sub kegiatan: Penyusunan Standar Harga	
			Sub kegiatan: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Sub kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah	
			Sub kegiatan: Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			Sub kegiatan: Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
C	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel sesuai peraturan perundangan		
6			Kegiatan: Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Sub kegiatan: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			Sub kegiatan: Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Sub kegiatan: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Sub kegiatan: Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Sub kegiatan: Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub kegiatan: Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Sub kegiatan: Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			Sub kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Sub kegiatan: Penagihan Pajak Daerah	
			Sub kegiatan: Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Sub kegiatan: Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
D	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui perencanaan yang selaras, pelayanan administrasi yang andal, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		
7			Kegiatan: Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
8			Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pneyusunan LAPORAN Keuangan Akhir Tahun SKPD	
9			Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
10			Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
11			Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
12			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
13			Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan ajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : BPKAD, 2025

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel IV-3
Indikator Utama Pembangunan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0,76	0,88	0,85	0,79	0,74	0,69	0,64	

Sumber : BPKAD, 2025

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel IV-4
Indikator Kinerja Umum PD

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks pengelolaan keuangan daerah dimensi kualitas anggaran belanja, transparansi pengelolaan keuangan, dan penyerapan anggaran	Indeks	50	50	50	50	50	50	50	
2	Persentase realisasi pendapatan daerah	Persen	100,47	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian laporan BMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai SAKIP OPD	Nilai	84,50	84,60	84,70	84,80	84,90	85,00	85,10	

Sumber : BPKAD, 2025

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV-5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio PAD	Persen	26,68	28,95	29,36	29,47	29,72	29,98	30,27	
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	Persen	89,06	83,54	85,63	86,17	85,95	86,81	89,00	
3	Akses publik terhadap informasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	keuangan daerah (Public access to fiscal information)									
4	Opini Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber : BPKAD, 2025

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-6

Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			NIHIL							

Sumber : BPKAD, 2025

4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel IV-7

Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Persen	94,30	92	92	92	92	92	92	
2	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Persen	1,84	1,87	1,77	1,65	1,54	1,45	1,36	
4	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB (IUP)	Persen	0,76	0,85	0,79	0,74	0,69	0,64	0,85	
5	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen	10,92	13,34	13,83	14,33	14,20	14,06	14,16	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan yang digunakan sebagai panduan bagi para pengelola Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini merupakan pedoman/panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja BPKAD Kota Pekalongan di masa-masa mendatang.

Di tengah keterbatasan potensi sumber daya yang dimiliki BPKAD Kota Pekalongan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi prioritas utama dalam meningkatkan efektivitas kinerja instansi. Keterlibatan seluruh elemen di dalam instansi, termasuk koordinasi yang baik antarunit kerja, diharapkan dapat memperkuat efisiensi operasional serta memastikan keberlanjutan program dan kebijakan yang telah dirancang untuk mendukung tugas dan fungsi BPKAD secara maksimal.

Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan memuat arah kebijakan dan rencana program serta kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun mendatang. Oleh karena sifatnya masih indikatif maka setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Pekalongan, 19 September 2025

Plt. Kepala Badan pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Pekalongan


RUSMANI BUDIHARJO, AKS.,M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 197209131998031001



PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN

2025-2029



RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN



dinkominfo.pekalongankota.go.id



diskominfo@gafe.pekalongankota.go.id



(0285) 421243 / 420223 fax (0285) 421243



Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan untuk periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, serta memperhatikan perkembangan dan tantangan yang dihadapi di bidang komunikasi dan informatika.

Kami menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berlangsung sangat pesat. Hal ini menuntut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami berkomitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih maju, modern, dan berdaya saing.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan.

Pekalongan, 19 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.1.5 Kelompok sasaran layanan	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	28
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.2.2 Isu Strategis	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	38
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.....	39
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	41
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	42
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	43
4.1 Uraian Program.....	43
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	45

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	56
4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan	60
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	61
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	62
BAB V PENUTUP.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan	16
Tabel II-2 Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan	17
Tabel II-3 Prasarana dan Sarana Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2025	18
Tabel II-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan	20
Tabel II-5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan	23
Tabel II-6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	28
Tabel II-7 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	32
Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD	40
Tabel III-2 Strategi Renstra PD	41
Tabel III-3 Arah Kebijakan Renstra PD	42
Tabel IV-1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	45
Tabel IV-2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	56
Tabel IV-3 Indikator Utama Pembangunan	60
Tabel IV-4 Indikator Kinerja Utama PD	61
Tabel IV-5 Indikator Kinerja Kunci	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam hal pelayanan publik. Teknologi informasi kini tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan yang modern. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki peran kunci dalam mendukung penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan, yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, tren global yang mengarah pada keterbukaan informasi publik memerlukan upaya yang lebih intensif dalam memastikan bahwa informasi yang dikelola oleh pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Keterbukaan informasi publik ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi Diskominfo untuk mengembangkan sistem dan platform yang mendukung prinsip-prinsip keterbukaan ini, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat.

Dalam hal ini, keamanan informasi menjadi isu yang tak kalah penting. Dengan semakin berkembangnya ancaman terhadap dunia maya, seperti serangan siber yang semakin canggih, Diskominfo dituntut untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi yang dikelola oleh pemerintah. Upaya penguatan sistem keamanan informasi menjadi prioritas agar data dan informasi yang dimiliki tetap terlindungi, serta dapat diakses dengan aman oleh masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan data statistik sektoral yang semakin berkembang juga membuka peluang baru dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data yang akurat dan relevan menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi kinerja pemerintah. Oleh karena itu, Diskominfo perlu terus memperkuat kapasitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral, agar dapat menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan lebih responsif terhadap kebutuhan

masyarakat.

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, tantangan dalam melaksanakan pelayanan publik digital semakin kompleks. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, serta mengatasi kendala dalam adopsi teknologi di daerah-daerah dengan akses terbatas. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai perkembangan dan tantangan tersebut, serta merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya.

Dengan latar belakang ini, penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung penerapan teknologi informasi yang efisien, aman, dan transparan, serta memastikan pelayanan publik digital yang dapat memenuhi harapan masyarakat di masa depan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinkominfo adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota- Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024 – 2026;
 13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menyediakan arah dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasarkan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan pelayanan publik digital, serta tantangan dalam keterbukaan informasi publik dan pengelolaan keamanan data. Dokumen ini juga berfungsi sebagai landasan bagi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo, guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, serta aman.

Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
2. Menerjemahkan visi dan misi Walikota ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

pada bab ini akan berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub Bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah akan berisi :

- a. Tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
- b. Sumber daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan

2. Sub Bab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah akan berisi:

- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Isu Strategis.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan akan berisi :

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025;

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
5. penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan akan berisi :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah:
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : Penutup

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pekalongan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi informasi. Tugas utama Diskominfo adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Diskominfo Kota Pekalongan menyediakan berbagai layanan publik, di antaranya pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan infrastruktur dan layanan teknologi informasi, pengelolaan data dan statistik sektoral, layanan informasi publik, penguatan literasi digital masyarakat, serta pengamanan informasi dan komunikasi melalui sistem persandian.

Sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari aparatur berkompeten di bidang TIK, anggaran yang bersumber dari APBD, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan fiber optic, pusat data, command center, dan aplikasi layanan publik. Kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, mitra swasta, serta komunitas digital juga menjadi kekuatan penting dalam mengembangkan layanan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat.

Pada periode Renstra sebelumnya, Diskominfo Kota Pekalongan berhasil mencapai sejumlah capaian penting, antara lain peningkatan indeks SPBE, perluasan jaringan internet publik (WiFi publik), serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang dibuktikan dengan penghargaan dalam keterbukaan informasi. Selain itu, program literasi digital untuk masyarakat dan pelatihan teknologi informasi bagi ASN juga telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kapasitas digital di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur TIK, kesenjangan literasi digital antar kelompok masyarakat, serta tantangan dalam integrasi sistem informasi antar perangkat daerah. Untuk itu, Renstra Diskominfo Kota Pekalongan periode ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas SDM, dan mendorong integrasi layanan berbasis data guna mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan berbasis teknologi.

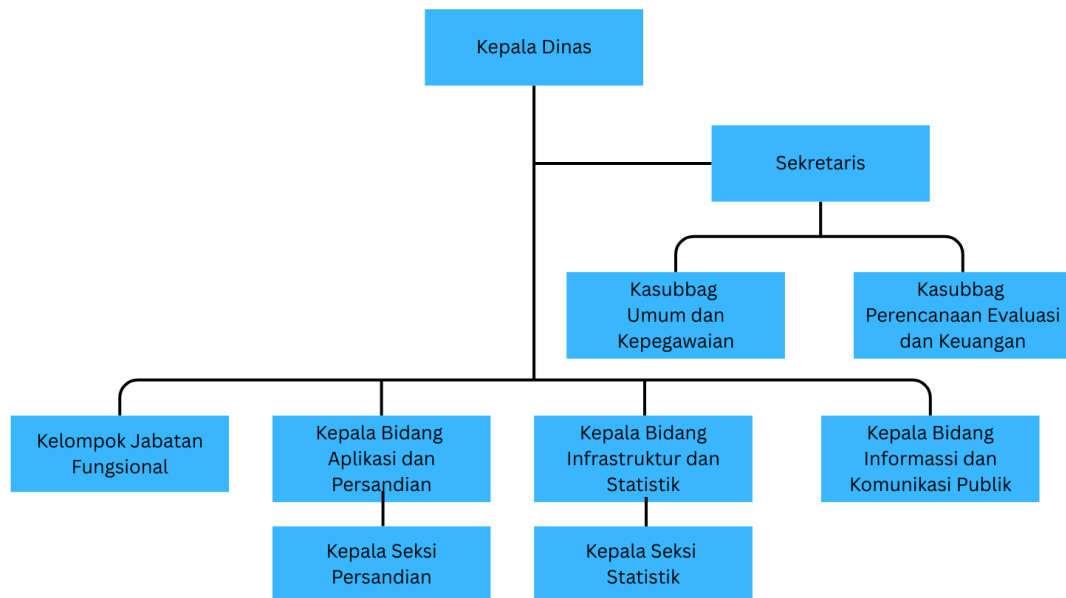
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016. Kemudian dalam rangka pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dikeluarkan Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta mempunyai fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang komunikasi dan informatika;
- 2) perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
- 3) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik;
- 4) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang infrastruktur dan statistik;
- 5) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang aplikasi dan persandian;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- 7) penyelenggaraan Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi / Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah;
- 8) pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- 9) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan terdiri dari Kepala Dinkominfo yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang infrastruktur dan Statistik, Bidang Aplikasi dan Persandian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Dinkominfo Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Sekretariat

Tugas :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Fungsi:

- 1) Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- 3) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- 4) Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- 5) Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- 6) Pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang

keuangan;

- 7) Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- 8) Pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 9) pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- 10) Pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- 11) Pengendalian, pembinaan, [engevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Tugas

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Fungsi

- 1) menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- 2) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 3) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran
- 4) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- 5) melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- 6) melaksanakan fungsi akuntansi;
- 7) menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
- 8) menyusun bahan profil perangkat daerah;
- 9) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- 10) menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 11) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
- 12) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Fungsi

- 1) menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- 2) melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- 3) melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- 4) melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- 5) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- 6) mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- 7) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik.

Fungsi

- 1) perumusan program kerja sesuai bidang informasi dan komunikasi publik;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik;
- 4) penyelenggaraan monitoring opini dan aspirasi publik;
- 5) penyelenggaraan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;

- 6) pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
- 7) pengelolaan Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah;
- 8) penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik;
- 9) penyelenggaraan layanan hubungan media;
- 10) penyelenggaraan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- 11) penyelenggaraan manajemen komunikasi krisis;
- 12) penyelenggaraan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- 13) penyelenggaraan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;
- 14) penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- 15) penyelenggaraan penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik;
- 16) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) sesuai bidang tugasnya;
- 17) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 18) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

e. Bidang Infrastruktur dan Statistik

Tugas

Bidang Infrastruktur dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang infrastruktur dan penyelenggaraan statistik sektoral.

Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang infrastruktur dan statistik;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang infrastruktur dan statistik;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan statistik;
- 4) pengoordinasian pendaftaran dan penggunaan nama domain Pemerintah Daerah;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan Pusat Data/Data Center dan Pusat Pemulihan Bencana/ Disaster Recovery Center (DRC) Pemerintah

Daerah;

- 7) pengoordinasian penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- 8) pengoordinasian penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
- 9) pengoordinasian penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- 10) pengoordinasian pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;
- 12) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 13) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Seksi Statistik

Tugas

- 1) menyusun rencana kegiatan bidang statistik;
- 2) menyusun bahan kebijakan bidang statistik;
- 3) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang statistik;
- 4) menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- 5) melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- 6) melaksanakan pembangunan metadata statistik sektoral;
- 7) melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- 8) melaksanakan pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
- 9) melaksanakan otorisasi statistik sektoral di Daerah;
- 10) melaksanakan kerjasama publikasi data statistik;
- 11) menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 12) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan;

g. Bidang Aplikasi dan Persandian

Tugas

Bidang Aplikasi dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang aplikasi dan persandian.

Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang aplikasi dan persandian;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang aplikasi dan persandian;
- 3) pengoordinasian pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi dan proses bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 4) pengoordinasian pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- 5) pengoordinasian pengelolaan data, dokumen, dan informasi elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain;
- 6) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- 7) Daerah;
- 8) penyelenggaraan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- 9) pengoordinasian penyediaan ekosistem kota cerdas (smart city);
- 10) penyelenggaraan pengelolaan Pejabat Pengelola Teknologi dan Informasi/ Government Chief Information Officer (GCIO);
- 11) pengoordinasian monitoring dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 12) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- 13) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

h. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Tugas

- 1) menyusun rencana kegiatan bidang persandian dan keamanan informasi;
- 2) menyusun bahan kebijakan bidang persandian dan keamanan informasi;

- 3) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang persandian dan keamanan informasi;
- 4) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- 5) melaksanakan keamanan informasi Pemerintahan Daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
- 6) melaksanakan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- 7) melaksanakan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- 8) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 9) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sampai dengan Desember 2024, tercatat sebanyak 30 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan kondisi Agustus 2025 sebagaimana Tabel II-1.

Tabel II-1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							GENDER		TOTAL (Orang)
		SD	SMP	SMA	D3	S-1	S-2	S-3	L	P	
1.	Sekretariat	0	0	6	2	8	1	0	10	7	17
2.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	0	3	2	7	2	0	9	6	14
3.	Bidang Infrastruktur dan Statistik	0	0	0	0	6	0	0	5	1	6
4.	Bidang Aplikasi dan Persandian	0	0	1	2	8	0	1	11	1	12

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							GENDER		TOTAL (Orang)
		SD	SMP	SMA	D3	S-1	S-2	S-3	L	P	
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	0	0	0	4	13	0	0	14	3	17
Jumlah (Orang)		1	0	10	10	42	3	1	49	18	67

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan per Agustus 2025

Berdasarkan Tabel II-1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah **SD (1,49%)**, **SMA (14,93%)**, **D3 (14,93%)**, **S-1 (62,69%)**, **S-2 (4,48%)**, serta **S-3 (1,49%)**.

b. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan kondisi Juni 2025 terbanyak adalah pegawai Golongan III (70,3%). Secara lengkap komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II-2
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pekalongan Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)						Total (Orang)
		I	II	III	IV	PPPK	non ASN	
1.	Sekretariat	0	1	3	2	0	11	16
2.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0	0	2	0	1	12	15
3.	Bidang Infrastruktur dan Statistik	0	0	3	0	0	3	6
4.	Bidang Aplikasi dan Persandian	0	0	4	1	0	7	13
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	0	2	13	0	2	0	17
Jumlah (Orang)		0	3	25	3	3	33	67
Persentase (%)		-	4,48%	37,31%	4,48%	4,48%	49,25%	100%

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan per Agustus 2025

Tabel II-3

Prasarana dan Sarana Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
	Tanah	2	
1	TANAH	2	
	Peralatan dan Mesin	1.573	
1	ALAT BESAR	6	
2	ALAT ANGKUTAN	24	
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	5	
4	ALAT PERTANIAN	2	
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2	
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCARAN	1.573	
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6	
8	ALAT LABORATORIUM	24	
9	ALAT PERSENJATAAN	5	
10	KOMPUTER	1	
11	ALAT EKSPLORASI	509	
12	ALAT PENGEBORAN	326	
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN	0	
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	100	
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	
16	ALAT PERAGA	602	
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	
18	RAMBU - RAMBU	0	
19	PERALATAN OLAH RAGA	0	
20	GEDUNG DAN BANGUNAN	0	
21	BANGUNAN GEDUNG	0	

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
22	MONUMEN	0	
23	BANGUNAN MENARA	0	
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	
1	JALAN DAN JEMBATAN	9	
2	BANGUNAN AIR	8	
3	INSTALASI	0	
4	JARINGAN	1	
	Aset Tetap Lainnya	67	
1	Bahan Perpustakaan	42	
2	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	25	
3	HEWAN	0	
4	BIOTA PERAIRAN	0	
5	TANAMAN	0	
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan per Juni 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk Tahun 2023, 2024 dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2024 serta evaluasi s.d. triwulan IV 2024 untuk gambaran kinerja Tahun 2025-2029. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II-4

Tabel II-4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Nilai SAKIP OPD				Nilai	85,00	85,00	86,00	87,00	87,60	87,80	-	86,16	87,00	87,60	83,40	-	-	101,3	101,1	96	95.2	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
	Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				persen	100	100	100	100	100	100	100	100	91.56	100	100	-	100	100	91.56	100	100	-
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah				persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
2	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik				Mutu Pelayanan	Baik (nilai 76,61-88,30)	Baik (Nilai 76,61 - 88,30)	Baik (Nilai 76,61 - 88,30)	Baik (Nilai 76,61 - 88,30)	Sangat Baik (Nilai 88,31 - 100)	Sangat Baik (88,31 -100)	-	-	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (88,31-100)	-	-	-	100	100	100	-
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																						

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik				persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
3	Indeks domain tata kelola SPBE				Indeks	3.05	2,75	2,85	2,95	3,3	3,4	-	2.10	2.40	3.20	3.30	-		76,3	73	108	100	-
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA																						
	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi				Indeks	-	-	2,9	3,00	3.10	3.20	-	-	3.02	3.00	3.25	-	-	-	104	100	104,14	-
4	Persentase ketersediaan data statistik sektoral				Persen	66	66	68	70	98,50	98,50	-	97,12	90,22	98,22	97,87	-	-	-	132	140	99,3	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																						
	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral				persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	100	100	-
5	Indeks tata kelola KAMI				Indeks	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	III+		100	100	100	101	101	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																						
	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan				persen	-	-	1,87	2,8	2,8	2,8	-	-	1,87	2,8	2,8	-	-	-	100	100	100	-

Tabel ini menyajikan gambaran kinerja perangkat daerah dalam urusan pemerintahan yang diampu oleh dinas komunikasi dan informatika, termasuk komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Secara umum, target kinerja yang ditetapkan cukup tinggi, yaitu 100 untuk sebagian besar indikator.

Dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah, capaian realisasi mendekati target, menunjukkan kinerja yang baik dalam administrasi dan pengelolaan barang milik daerah. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik mencapai target dalam penyelesaian permohonan informasi publik. Indeks teknologi informasi dan komunikasi juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Di bidang statistik, perangkat daerah berhasil menyediakan data statistik sektoral sesuai target. Sementara itu, program persandian menunjukkan capaian yang baik dalam pengujian kerentanan sistem elektronik.

Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan:

- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah:
 - Pada beberapa tahun, realisasi capaian di bawah 100%, menunjukkan bahwa target penuh belum tercapai. Hal ini mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan dalam efisiensi dan efektivitas layanan administrasi.
- Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi:
 - Meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, terdapat perbedaan antara target dan realisasi, menunjukkan bahwa masih ada upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan.
- Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan:
 - walau telah mencapai 100% pada rasio capaian, tetap ada perbedaan angka antara target dan realisasi, yang menunjukan bahwa ada naik turun, dan belum sepenuhnya stabil.

Tabel II-5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

No	Indikator belanja keuangan perangkat daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pendapatan	250,000,000	330,000,000	350,000,000	420,000,000	450,000,000	251,759,243	280,527,245	318,942,870	355,352,386	481,341,565	101%	85%	91%	85%	107%	15,74%	17,40%
	Belanja Langsung																	
	Belanja Pegawai	3,172,442,000	3,413,466,000	3,128,082,000	3,423,343,000	3,984,379,000	2,593,952,214	2,528,841,551	2,981,533,498	3,294,412,380	3,776,133,452	82%	74%	95%	96%	95%	5,83%	9,71%
	Belanja Barang / Jasa	7,206,748,000	7,373,242,000	9,077,378,000	9,392,727,000	9,766,465,000	6,785,952,183	7,184,954,327	8,409,195,801	9,301,686,467	9,506,710,950	94%	97%	93%	99%	97%	7,88%	8,73%
	Belanja Modal	1,025,828,000	2,031,408,000	1,480,118,000	982,896,000	442,860,000	1,009,041,550	1,849,493,700	1,465,663,811	978,562,443	437,611,636	98%	91%	99%	100%	99%	-18,42%	-18,32%

berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil analisis Rasio Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Secara umum, rasio realisasi anggaran terhadap anggaran yang ditetapkan menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

- **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:**
 - Rasio berada di kisaran 92 - 98%, menunjukkan pengelolaan yang cukup baik.
 - Tahun 2020 memiliki rasio terendah (69,30%), mengindikasikan adanya tantangan dalam penyerapan anggaran pada tahun tersebut.
- **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika:**
 - Rasio stabil di kisaran 92 - 98%, menunjukkan konsistensi dalam penyerapan anggaran.
- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:**
 - Rasio meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan anggaran.
 - Tahun 2020 dan 2021 memiliki rasio di bawah 90%, mengindikasikan perlunya perbaikan pada periode tersebut.
- **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:**
 - Rasio sangat bervariasi, dengan tahun 2020 dan 2023 mencapai di atas 99%. Namun, tahun 2021 dan 2022 berada di kisaran 91 - 92%. Hal ini menandakan adanya fluktuasi dalam penyerapan anggaran.
- **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika:**
 - Rasio stabil di kisaran 91 - 98%, menunjukkan pengelolaan yang cukup baik.
- **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik:**
 - Rasio bervariasi, dengan tahun 2020 sangat rendah (62,15%). Tahun-tahun berikutnya menunjukkan perbaikan dengan rasio di atas 96%.
- **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian:**
 - Rasio bervariasi, dengan tahun 2022 mencapai 111,66%, yang menandakan adanya pengeluaran yang melebihi anggaran.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Pendanaan

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

- **Prosedur/Mekanisme:**
 - Prosedur yang rumit atau birokratis dapat memperlambat penyerapan anggaran.
 - Perubahan regulasi atau kebijakan keuangan juga dapat mempengaruhi proses penganggaran dan realisasi.
- **Jumlah dan Kualitas Personel (Sumber Daya Manusia):**
 - Kapasitas SDM yang kurang memadai dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dapat menghambat kinerja.
 - Rotasi atau pergantian personel yang sering juga dapat mempengaruhi kontinuitas dan efektivitas pengelolaan keuangan.
- **Progres Pelaksanaan Program:**
 - Keterlambatan dalam pelaksanaan program atau proyek dapat menyebabkan penyerapan anggaran yang tidak optimal.
 - Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, bencana alam, atau pandemi juga dapat memengaruhi progres pelaksanaan program.
- **Perencanaan Anggaran:**
 - Perencanaan anggaran yang kurang matang, seperti kurangnya data yang akurat, dan kurangnya antisipasi terhadap perubahan yang akan terjadi, dapat menyebabkan terjadinya perbedaan yang besar antara anggaran dan realisasi.
- **Faktor Eksternal:**
 - Kondisi ekonomi nasional dan daerah.
 - Perubahan kebijakan pemerintah pusat.
 - Bencana alam atau kondisi darurat lainnya.

Dengan memahami faktor-faktor ini, Perangkat Daerah dapat mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendanaan pelayanan.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinkominfo kurun waktu 5 tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinkominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Peningkatan Indeks SPBE berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020,.

- b. Meningkatkan pelayanan intranet baik aplikasi , DRC maupun infrastruktur jaringan berbasis Fiber Optic;
- c. Sesuai Perwal Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 4c Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Media Komunikasi Elektronik dengan melayani semua permohonan harus diselesaikan secara cepat.
- d. Meningkatkan layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik secara bertahap (pencarian informasi, pengunggahan, pengunduhan dokumen, otomasi pertukaran data, basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data.
- e. Berdasarkan Peraturan BSSN (Badan Siber Sandi Negara) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam penyelenggaraan elektronik secara bertahap meningkatkan Indeks Kami menuju ISO 27001.

2. Peluang

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.
- b. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Pekalongan.
- c. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kota Pekalongan.
- d. Kesadaran masyarakat Kota Pekalongan akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi.
- e. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintahan Kota Pekalongan

2.1.5 Kelompok sasaran layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan merancang dan menyediakan layanan yang menyasar berbagai kelompok sasaran secara terarah dan berkesinambungan. Kelompok sasaran layanan ini merupakan bagian penting dari strategi pelayanan publik yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika teknologi informasi.

Kelompok sasaran utama layanan Diskominfo meliputi:

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Sebagai fasilitator dan pengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Diskominfo menyediakan dukungan teknis dan sistem informasi untuk seluruh perangkat daerah. Layanan ini mencakup pengelolaan jaringan intra pemerintah, penyediaan aplikasi administrasi pemerintahan, integrasi data sektoral, serta dukungan keamanan informasi dan persandian.

2. Masyarakat Umum

Masyarakat menjadi kelompok sasaran yang sangat penting dalam layanan informasi publik, literasi digital, serta akses internet publik. Diskominfo menyediakan layanan informasi melalui media digital, layanan aduan publik, serta penyediaan akses internet gratis di ruang publik guna mendorong kesetaraan akses terhadap teknologi dan informasi.

3. Pelaku Usaha dan Komunitas Digital

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital lokal, Diskominfo memberikan perhatian kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta komunitas digital. Dukungan diberikan dalam bentuk promosi melalui kanal digital, pelatihan pemasaran digital, serta fasilitasi penggunaan platform teknologi untuk meningkatkan daya saing usaha.

4. Pelajar dan Kalangan Pendidikan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi digital, Diskominfo juga menyasar kalangan pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik melalui program pelatihan, seminar, dan konten edukatif berbasis digital. Layanan ini bertujuan untuk membentuk generasi yang melek digital, produktif, dan aman dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Dengan mengenali dan merumuskan layanan berdasarkan kelompok sasaran secara spesifik, Diskominfo Kota Pekalongan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, berbasis teknologi, dan berkelanjutan. Strategi ini juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan disajikan secara ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya Dinkominfo Kota Pekalongan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinkominfo selama kurun waktu 2 tahun ke belakang (Tahun 2023-2024) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinkominfo. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinkominfo Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel II-6.

Tabel II-6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kematangan layanan jaringan intra pemerintah	Belum optimalnya pemerataan jaringan berkualitas untuk unit kerja	Belum tercapainya pembangunan jaringan kabel <i>fiber optic</i> untuk seluruh unit kerja
		Belum optimalnya akses uniterja terhadap jaringan intra pemerintah	Belum optimalnya kapasitas bandwidth yang sesuai dengan beban kebutuhan
			Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan intra pemerintah
2	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	Belum optimalnya pengumpulan data statistik sektoral	Belum optimalnya kompetensi pengelola data sektoral pada perangkat daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan data statistik sektoral
3	belum optimalnya layanan komunikasi publik	Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah terkait keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya komitmen perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik
		Belum optimalnya tema informasi yang dipublikasikan	Belum adanya pedoman strategi komunikasi publik
		Belum optimalnya kualitas transmisi siaran LPPL	Belum optimalnya sarana dan prasarana pemancar siaran pada LPPL
		Terbatasnya mitra media lokal dalam penyebaran informasi publik	Adanya media lokal yang belum memenuhi ketentuan dewan pers
		Belum optimalnya publikasi informasi publik	Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis bidang komunikasi publik
			Belum optimalnya sarana dan prasarana komunikasi publik
4	Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE	Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) SPBE	Terbatasnya kepemimpinan SPBE yang kolaboratif dan inovatif
			Terbatasnya kompetensi teknis SPBE yang dimiliki oleh ASN yang terlibat dalam penerapan SPBE
		perencanaan strategis belum sepenuhnya terintegrasi	rencana dan anggaran SPBE belum terkoordinasikan dengan unit pengelola TIK
			dokumen perencanaan strategis belum sepenuhnya menyeluruh,

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			terutama dalam hal keterpaduan rencana dan anggaran SPBE
		infrastruktur TIK belum diterapkan secara merata	kapasitas infrastruktur jaringan masih terbatas di beberapa daerah
		audit TIK belum dilakukan secara menyeluruh sesuai pedoman	kurangnya sumberdaya dan tenaga ahli yang fokus dalam audit sistem SPBE
			audit aplikasi SPBE belum mengikuti standar yang ditetapkan
			audit infrastruktur SPBE belum dilakukan secara terstruktur dan berkala
5	belum optimalnya layanan persandian dan implementasi keamanan informasi	Tingginya Risiko Kebocoran Data dan Serangan Siber	Infrastruktur keamanan informasi (firewall, enkripsi, sistem deteksi intrusi) yang usang dan tidak terintegrasi.
			Minimnya audit keamanan informasi berkala dan pemutakhiran sistem untuk mengidentifikasi kerentanan.
			Masih minimnya implementasi teknologi kriptografi modern untuk integritas data.
		Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten	Keterbatasan program pelatihan/sertifikasi teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM.
		Infrastruktur Teknologi yang Belum Memadai	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan dan upgrade perangkat keras serta perangkat lunak keamanan
			Tidak ada sistem pemantauan keamanan siber (cybersecurity)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			monitoring) real-time.
		Belum Optimalnya Implementasi Regulasi dan Kebijakan Keamanan Informasi	Ruang lingkup regulasi internal masih terbatas. Belum menyeluruh tingkat kota
		Belum optimalnya peran serta Stakeholder	Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang risiko serta pentingnya keamanan siber
			Minimnya perangkat daerah yang memanfaatkan layanan persandian
			Belum adanya forum lintas OPD untuk membahas keamanan informasi

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Kota Pekalongan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Kota Pekalongan yaitu:

1. Belum optimalnya Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan tata kelola keamanan informasi Pemerintah Kota Pekalongan ;

3. Belum optimalnya penyelenggaraan e-Government yang sesuai dengan karakteristik daerah di Kota Pekalongan dalam mendukung implementasi SPBE;
4. Belum optimalnya kesadaran masyarakat Kota Pekalongan akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;

Tabel II-7
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur dan layanan TIK pemerintahan	Pemanfaatan TIK untuk mendukung pelayanan publik belum optimal	Akses layanan publik yang inklusif dan efisien	Peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi	Percepatan SPBE nasional	Keterbatasan kapasitas infrastruktur TIK daerah	Fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik belum optimal
Infrastruktur dan SDM TIK	Kebutuhan TIK untuk mendukung tata kelola pemerintahan belum optimal	Tata kelola yang adaptif terhadap perkembangan TIK	Transformasi digital pemerintahan	Digitalisasi layanan publik dan interoperabilitas sistem	Kesiapan SDM dan sistem pendukung daerah	Belum optimalnya kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Pekalongan
Sistem informasi pemerintahan	Belum optimalnya e-Government yang sesuai dengan karakteristik lokal	Keadilan dan relevansi akses teknologi berbasis kebutuhan lokal	Lokalisasi teknologi dan layanan e-Gov	Implementasi e-Government adaptif	muatan lokal dalam e-Government belum optimal	Belum optimalnya muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kota Pekalongan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kanal informasi publik dan statistik sektoral	literasi informasi, komunikasi, dan statistik sektoral belum optimal	Partisipasi publik dan keterbukaan informasi	Disinformasi global, belum optimalnya literasi data	Keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya kesadaran literasi digital di masyarakat	Belum optimalnya kesadaran masyarakat Kota Pekalongan akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi
Keamanan informasi dan sistem	Belum optimalnya implementasi sistem keamanan informasi daerah	Keamanan dan privasi dalam layanan publik	Ancaman siber dan perlindungan data pribadi	Penguatan keamanan informasi dan manajemen risiko SPBE	Keterbatasan implementasi manajemen keamanan informasi	Belum optimalnya dukungan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintahan Kota Pekalongan

Penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dilakukan melalui telaah terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah, baik secara internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut direview secara sistematis untuk memahami akar permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

a. gambaran pelayanan perangkat daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik, pengelolaan data dan statistik sektoral, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penyelenggaraan infrastruktur TIK, serta layanan komunikasi publik. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital, disparitas literasi TIK, dan kebutuhan peningkatan keamanan informasi.

b. sasaran jangka menengah pada renstra Kementerian Komunikasi Digital

Sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menjadi acuan penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam merumuskan kebijakan dan arah pembangunan sektoral. Terdapat sejumlah sasaran strategis nasional yang berimplikasi langsung terhadap pelayanan Dinkominfo daerah, di antaranya:

1. **Percepatan Transformasi Digital Nasional**, melalui pengembangan infrastruktur TIK, penguatan layanan digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat.
2. **Perluasan Akses dan Konektivitas TIK**, termasuk penyediaan layanan internet yang merata dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
3. **Penguatan Tata Kelola Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** untuk mendukung efisiensi birokrasi dan pengambilan keputusan berbasis data.
4. **Keamanan Informasi dan Kedaulatan Data Digital**, dalam rangka perlindungan informasi publik serta stabilitas layanan komunikasi.

Berdasarkan keselarasan dengan sasaran tersebut, berikut adalah faktor-faktor pelayanan Dinkominfo Kota Pekalongan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan:

1. Kesenjangan Infrastruktur TIK

Meskipun layanan jaringan dan internet telah menjangkau sebagian besar wilayah perkotaan, masih terdapat wilayah tertentu di Kota Pekalongan yang belum sepenuhnya terlayani secara optimal. Hal ini menyebabkan disparitas akses informasi dan pelayanan digital di masyarakat.

2. Keterbatasan SDM dan Literasi Digital

Kualitas SDM di bidang TIK, baik di kalangan ASN maupun masyarakat umum, masih belum sepenuhnya mendukung agenda transformasi digital. Hal ini berdampak pada efektivitas implementasi SPBE, pelayanan berbasis aplikasi, serta pengelolaan data sektoral.

3. Belum Optimalnya Integrasi Layanan SPBE

Beberapa sistem informasi di perangkat daerah masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga belum mampu mendukung efisiensi tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan teknologi.

4. Keamanan Informasi yang Masih Perlu Diperkuat

Tingkat keamanan siber dan pengelolaan persandian masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks perlindungan data layanan publik dan mitigasi terhadap potensi serangan siber.

5. Keterbatasan Anggaran dan Investasi Teknologi

Keterbatasan anggaran daerah dalam pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur TIK menyebabkan beberapa inisiatif strategis belum bisa dilaksanakan secara maksimal, terutama terkait peningkatan kapasitas pusat data, Command Center, dan layanan digital masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penyelarasan antara sasaran strategis nasional dengan konteks kebutuhan dan kapasitas daerah, agar program-program transformasi digital di Kota Pekalongan dapat berjalan lebih efektif dan merata.

c. sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kominfo provinsi Jawa Tengah

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menetapkan sejumlah sasaran jangka menengah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang berbasis digital, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sasaran tersebut menjadi rujukan penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan provinsi.

Adapun sasaran strategis jangka menengah yang dimaksud antara lain:

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Pemerataan Infrastruktur TIK di wilayah Jawa Tengah.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Kehumasan Pemerintah Daerah.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi dan Efisien.
4. Meningkatkan Literasi Digital dan Kapasitas SDM TIK di Lingkungan Pemerintah dan Masyarakat.
5. Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah secara Terstruktur dan Sistematis.

Dari sasaran tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah faktor pelayanan Dinkominfo Kota Pekalongan yang turut mempengaruhi permasalahan pelayanan, yaitu:

1. Keterbatasan Pemerataan Infrastruktur TIK

Masih terdapat wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh jaringan internet maupun layanan komunikasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini menjadi kendala dalam menjangkau layanan digital secara merata, khususnya untuk mendukung pengembangan smart city dan SPBE.

2. Kurangnya Kapasitas Layanan Informasi Publik yang Inklusif

Pelayanan informasi publik, baik melalui media konvensional maupun digital, masih menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Perluasan kanal komunikasi dan penguatan konten informasi yang mudah dipahami oleh publik menjadi kebutuhan mendesak.

3. Belum Maksimalnya Integrasi SPBE antar Perangkat Daerah

Kota Pekalongan masih menghadapi hambatan dalam hal interoperabilitas data dan sistem, sehingga efektivitas pelaksanaan SPBE lintas perangkat daerah belum sepenuhnya tercapai. Hal ini berpengaruh terhadap efisiensi pelayanan publik dan pengambilan kebijakan berbasis data.

4. Kesenjangan Kompetensi SDM di Bidang TIK

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan masih memiliki tingkat kemampuan TIK yang beragam. Keterbatasan pelatihan dan pendampingan teknis menyebabkan rendahnya pemanfaatan sistem digital dalam pekerjaan sehari-hari.

5. Penguatan Keamanan Informasi yang Belum Komprehensif

Kebutuhan terhadap sistem pengamanan data yang memadai, termasuk penerapan standar pengelolaan keamanan informasi, masih menjadi pekerjaan rumah. Keamanan siber harus diperkuat seiring meningkatnya digitalisasi layanan publik.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan perlunya Dinkominfo Kota Pekalongan untuk terus bersinergi dengan kebijakan provinsi, khususnya dalam hal pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM, dan percepatan implementasi SPBE. Penyelarasan ini akan memastikan bahwa pelayanan komunikasi

dan informatika di Kota Pekalongan tidak tertinggal dalam arus transformasi digital yang digagas secara nasional maupun regional.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Rumusan Pernyataan Tujuan Jangka Menengah Dinkominfo Kota Pekalongan dirumuskan sebagai berikut : **Mewujudkan transparansi pelayanan publik berbasis digital dengan mengoptimalkan implementasi SPBE serta meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral.** Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terpercaya melalui:

1. Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):
 - Menerapkan SPBE secara terintegrasi dan menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
 - Memastikan keberlanjutan dan pengembangan SPBE sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
2. Mewujudkan Keamanan Informasi Daerah:
 - Membangun sistem keamanan informasi yang kuat untuk melindungi data dan informasi pemerintah daerah dari ancaman siber.
 - Meningkatkan kesadaran dan kapasitas aparatur pemerintah dalam bidang keamanan informasi.
3. Mewujudkan Transparansi Pelayanan Publik Berbasis Digital:
 - Mengembangkan dan menyediakan layanan publik berbasis digital yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel.
 - Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral:
 - Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, relevan, dan tepat waktu.
 - Memanfaatkan data statistik sektoral untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
5. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik:
 - Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang komunikasi dan informatika melalui inovasi dan peningkatan kompetensi aparatur.

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan

Dengan rumusan ini, Dinkominfo Kota Pekalongan menegaskan fokusnya pada transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan untuk masyarakat.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

1. Meningkatnya kematangan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SPBE
2. Meningkatnya kematangan penerapan manajemen keamanan informasi
3. Meningkatnya layanan informasi publik
4. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
terwujudnya sistem birokrasi yang efektif akuntabel inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Mewujudkan transparansi pelayanan publik berbasis digital dengan mengoptimalkan implementasi SPBE serta meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral	Meningkatnya kematangan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SPBE	Indeks SPBE (IUP)	3,76	3,87	3,87	4,07	4,07	4,22	Data rilis Kemenpan, jika pada tahun N tidak dilakukan evaluasi maka akan menggunakan data evaluasi tahun terakhir
		Meningkatnya kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	Indeks keamanan informasi (KAMI)	n/a	715	730	745	760	775	1) Nilai maksimal 126 2) Mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta fungsi, tugas dan tanggungjawab pengelola keamanan informasi
		Meningkatnya layanan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	96,1	96,25	96,5	96,75	97	97,25	rata rata nilai keterbukaan informasi publik pada seluruh opd, jumlah OPD 29 (kominfo tidak dihitung karena sebagai opd penyelenggara)
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,62	2,63	2,63	2,65	2,65	2,7	dihitung berdasarkan peraturan BPS nomor 3 tahun 2022
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,72	89,82	89,92	90,02	90,12	90,22	Nilai SKM OPD yang diterbitkan oleh bagian organisasi

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel III-2
Strategi Renstra PD

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan literasi digital.	Penguatan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi kinerja, integritas, manajemen talenta, transformasi arsitektur dan kolaborasi digital, BMD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).	Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan pendekatan partisipatif dan transparansi publik, pengelolaan layanan digital, mitigasi risiko korupsi, pemutakhiran data dan optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta penguatan corporate university dalam pengembangan ASN yang mendukung perwujudan ekonomi sirkular dan pembangunan yang berkelanjutan.	Penguatan tata kelola SDM, keuangan daerah, dan optimalisasi pengamanan BMD untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah	Optimalisasi perwujudan profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta perwujudan single platform digital dalam rangka perwujudan fondasi Mina Batik
Strategi Renstra OPD	Peningkatan SDM, Kepemimpinan, dan Literasi Digital	Penerapan Transformasi, Arsitektur, dan Kolaborasi Digital	Pengelolaan Layanan, Data, dan Kecerdasan Buatan	Pengelolaan Aplikasi, Keamanan, dan Infrastruktur Digital	Peningkatan Layanan, Integrasi, dan Kepuasan Pengguna

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel III-3
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	• Penguatan Kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika; • Peningkatan Profesionalitas SDM Aparatur (ASN) Bidang TIK; • Penyusunan dan Penyesuaian Regulasi Bidang Kominfo yang Tepat Fungsi; • Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Berbasis Teknologi; • Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Keterbukaan Informasi; • Transformasi Digital Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik sebesar 25 Persen.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Fokus program adalah pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE sebesar 5,00; tingkat kematangan layanan pusat data sebesar 5,00; tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah daerah sebesar 5,00.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Fokus program adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketersediaan data statistik sektoral sebesar 98 persen.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota; penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu nilai kematangan penerapan manajemen keamanan informasi sebesar 5,00.

4. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan perangkat daerah; administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; administrasi kepegawaian perangkat daerah; administrasi umum perangkat daerah; penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah sebesar 100 persen; persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen; persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen;

Berikut adalah rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kota Pekalongan:

Tujuan :

Mewujudkan transparansi pelayanan publik berbasis digital dengan mengoptimalkan implementasi SPBE serta meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral.

Sasaran :

1. Meningkatnya kematangan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SPBE;
2. Meningkatnya kematangan penerapan manajemen keamanan informasi;
3. Meningkatnya layanan informasi publik;
4. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel IV-1

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Presentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp5.840.5 80.000	100	Rp5.992.7 53.000	100	Rp6.078.2 67.000	100	Rp6.166.4 96.000	100	Rp6.255.5 07.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp16.257. 000	100	Rp19.257. 000	100	Rp19.957. 000	100	Rp21.057. 000	100	Rp21.457. 000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	2	Rp2.494.0 00	2	Rp2.694.0 00	2	Rp2.894.0 00	2	Rp3.194.0 00	2	Rp3.294.0 00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	2	Rp1.763.0 00	2	Rp2.063.0 00	2	Rp2.363.0 00	2	Rp2.963.0 00	2	Rp3.063.0 00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15	15	15	Rp12.000. 000	15	Rp14.500. 000	15	Rp14.700. 000	15	Rp14.900. 000	15	Rp15.100. 000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp4.345.605.000	100	Rp4.348.905.000	100	Rp4.348.905.000	100	Rp4.348.905.000	100	Rp4.348.905.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	30	34	34	Rp4.300.101.000	34	Rp4.300.101.000	34	Rp4.300.101.000	34	Rp4.300.101.000	34	Rp4.300.101.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	12	Rp43.870.000	12	Rp47.170.000	12	Rp47.170.000	12	Rp47.170.000	12	Rp47.170.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1	Rp1.634.000	1	Rp1.634.000	1	Rp1.634.000	1	Rp1.634.000	1	Rp1.634.000	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen													
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian	persen	100	100	100	Rp148.110.000	100	Rp148.610.000	100	Rp149.110.000	100	Rp149.610.000	100	Rp150.110.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	2	2	Rp10.000.000	2	Rp10.500.000	2	Rp11.000.000	2	Rp11.500.000	2	Rp12.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	100	100	100	Rp138.11 0.000	100	Rp138.11 0.000	100	Rp138.11 0.000	100	Rp138.11 0.000	100	Rp138.11 0.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp346.57 0.000	100	Rp421.90 0.000	100	Rp444.80 0.000	100	Rp468.70 0.000	100	Rp492.70 0.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	4	Rp6.000.0 00	4	Rp6.300.0 00	4	Rp6.600.0 00	4	Rp6.900.0 00	4	Rp7.200.0 00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	4	Rp116.46 0.000	4	Rp120.00 0.000	4	Rp125.00 0.000	4	Rp130.00 0.000	4	Rp135.00 0.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	4	4	Rp10.000. 000	4	Rp11.000. 000	4	Rp12.000. 000	4	Rp13.000. 000	4	Rp14.000. 000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	4	4	Rp82.460. 000	4	Rp121.00 0.000	4	Rp125.00 0.000	4	Rp130.00 0.000	4	Rp135.00 0.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	2	Rp29.200. 000	2	Rp30.600. 000	2	Rp32.200. 000	2	Rp33.800. 000	2	Rp35.500. 000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2	2	Rp12.150. 000	2	Rp13.000. 000	2	Rp14.000. 000	2	Rp15.000. 000	2	Rp16.000. 000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBOUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	-	80	80	Rp90.300.000	80	Rp120.000.000	80	Rp130.000.000	80	Rp140.000.000	80	Rp150.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	Rp631.840.000	100	Rp664.081.000	100	Rp695.495.000	100	Rp728.224.000	100	Rp762.335.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	4	4	Rp2.700.000	4	Rp2.800.000	4	Rp2.900.000	4	Rp3.000.000	4	Rp3.100.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	Rp501.220.000	12	Rp526.281.000	12	Rp552.595.000	12	Rp580.224.000	12	Rp609.235.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	Rp127.920.000	12	Rp135.000.000	12	Rp140.000.000	12	Rp145.000.000	12	Rp150.000.000	
	terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pengadaan /pemeliharaan barang milik daerah	persen													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	Rp352.198.000	100	Rp390.000.000	100	Rp420.000.000	100	Rp450.000.000	100	Rp480.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	24	24	24	Rp209.98 4.000	24	Rp220.00 0.000	24	Rp230.00 0.000	24	Rp240.00 0.000	24	Rp250.00 0.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	3	3	Rp54.614. 000	3	Rp75.000. 000	3	Rp90.000. 000	3	Rp105.00 0.000	3	Rp120.00 0.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	50	50	50	Rp87.600. 000	50	Rp95.000. 000	50	Rp100.00 0.000	50	Rp105.00 0.000	50	Rp110.00 0.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik	Persen	-	20	21	Rp4.174.8 67.000	22	Rp4.131.7 33.400	23	Rp4.327.0 54.000	24	Rp4.522.3 75.000	25	Rp4.717.6 96.200	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	persen	100	100	100	Rp4.174.8 67.000	100	Rp4.131.7 33.000	100	Rp4.327.0 54.000	100	Rp4.522.3 75.000	100	Rp4.717.6 96.000	
Relasi Media	terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	laporan	-	12	12	Rp709.44 0.000	12	Rp240.00 0.000	12	Rp250.00 0.000	12	Rp260.00 0.000	12	Rp270.00 0.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif Mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	komunitas	-	2	2	Rp43.660.000	2	Rp45.843.000	2	Rp48.026.000	2	Rp50.209.000	2	Rp52.392.000	
Pelayanan Informasi Publik	terlaksananya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai \ peraturan perundangan	permohonan	-	30	30	Rp112.328.000	30	Rp159.579.000	30	Rp167.178.000	30	Rp174.777.000	30	Rp182.376.000	
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	rekomendasi	-	12	12	Rp442.172.000	12	Rp455.395.000	12	Rp477.081.000	12	Rp498.766.000	12	Rp520.452.000	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	media	-	2	2	Rp2.739.284.000	2	Rp3.094.946.000	2	Rp3.242.324.000	2	Rp3.389.703.000	2	Rp3.537.081.000	
Penyusunan Konten	terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten informasi Publik	konten	-	9500	9600	Rp127.983.000	9700	Rp135.970.000	9800	Rp142.445.000	9900	Rp148.920.000	10000	Rp155.395.000	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kematangan SPBE, layanan pusat data, dan jaringan intra pemerintah daerah	1.tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE			4,00	4,00	2.306.178.000	4,00	2.761.697.000	4,00	2.893.186.000	4,00	3.024.896.000	5,00	3.156.853.000	
		2.Tingkat kematangan layanan pusat data			4,00	4,00		4,00		4,00		5,00				
		3.tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintahan daerah			3,00	4,00		4,00		4,00		5,00				

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang menggunakan domain yang disediakan Dinas Kominfo (opd = 30+ puskesmas=14+ kelurahan=27+ rsud=1)	persen	100	Rp20.000.000	100	Rp21.000.000	100	Rp22.000.000	100	Rp23.000.000	100	Rp24.000.000	100	Rp20.000.000	
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	dokumen	3	3	Rp20.000.000	3 dokumen	Rp21.000.000	3 dokumen	Rp22.000.000	3 dokumen	Rp23.000.000	3 dokumen	Rp24.000.000	3 dokumen	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	persen	9,35	9,35	24,36	Rp2.286.178.000	28,63	Rp2.740.697.000	32,91	Rp2.871.186.000	37,18	Rp3.001.896.000	41,45	Rp3.132.853.000	
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	aplikasi	1	2	1	Rp79.420.000	1	Rp90.741.000	1	Rp95.278.000	1	Rp100.041.000	1	Rp105.044.000	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	perangkat daerah	181	181	181	Rp1.092.100.000	181	Rp1.474.567.000	181	Rp1.544.785.000	181	Rp1.615.000.000	181	Rp1.685.220.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	terlaksananya Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	dokumen	2	-	3	Rp94.280.000	3	Rp98.994.000	3	Rp103.708.000	3	Rp108.422.000	3	Rp113.136.000	
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	dokumen	2	-	3	Rp107.850.000	3	Rp113.242.000	3	Rp118.635.000	3	Rp124.027.000	3	Rp129.420.000	
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	layanan	3	5	5	Rp49.470.000	5	Rp51.943.000	5	Rp54.417.000	5	Rp56.890.000	5	Rp59.364.000	
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	dokumen	-	-	1	Rp100.000.000	1	Rp110.000.000	1	Rp115.000.000	1	Rp120.000.000	1	Rp125.000.000	
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	terlaksananya Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	aplikasi	3	3	3	Rp395.158.000	3	Rp414.915.000	3	Rp434.673.000	3	Rp454.431.000	3	Rp474.189.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	laporan	8	10	10	Rp167.90 0.000	10	Rp176.29 5.000	10	Rp184.69 0.000	10	Rp193.08 5.000	10	Rp201.48 0.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	dokumen	2	-	1	Rp100.00 0.000	1	Rp105.00 0.000	1	Rp110.00 0.000	1	Rp115.00 0.000	1	Rp120.00 0.000	
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	dokumen	-	-	2	Rp100.00 0.000	2	Rp105.00 0.000	2	Rp110.00 0.000	2	Rp115.00 0.000	2	Rp120.00 0.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya akurasi data statistik sektoral	Presentasi ketersediaan data statistik sektoral	persen	98,48	95,00	95,5	Rp107.46 0.000	96,00	Rp114.00 0.000	96,50	Rp120.50 0.000	97,00	Rp132.50 0.000	98,00	Rp140.50 0.000	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral	dokumen	1	1	1	Rp107.46 0.000	1	Rp114.00 0.000	1	Rp120.50 0.000	1	Rp132.50 0.000	1	Rp140.50 0.000	
pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	persen	-	0,00	0,90	Rp107.46 0.000	0,91	Rp114.00 0.000	0,92	Rp120.50 0.000	0,93	Rp132.50 0.000	0,94	Rp140.50 0.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
PROGRAM	Terwujudnya keamanan	Nilai kematangan	nilai	4,00	4,00	4	Rp179.77	4	Rp193.20	4	Rp202.20	4	Rp211.20	5	Rp221.20	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	informasi	penerapan manajemen keamanan informasi					3.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	presentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen		8,41	11,18	Rp149.77 3.000	12,35	Rp163.20 0.000	13,53	Rp172.20 0.000	14,17	Rp181.20 0.000	15,88	Rp191.20 0.000	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	laporan	2	2	2	Rp16.227. 000	2	Rp17.200. 000	2	Rp18.200. 000	2	Rp19.200. 000	2	Rp20.200. 000	
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	dokumen	-	2	2	Rp50.000. 000	2	Rp53.000. 000	2	Rp56.000. 000	2	Rp59.000. 000	2	Rp62.000. 000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	4	4	4	Rp33.000. 000	4	Rp35.000. 000	4	Rp37.000. 000	4	Rp39.000. 000	4	Rp42.000. 000	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	perangkat daerah	30	30	30	Rp50.546. 000	30	Rp58.000. 000	30	Rp61.000. 000	30	Rp64.000. 000	30	Rp67.000. 000	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	persen	100	100	100	Rp30.000. 000	100	Rp30.000. 000	100	Rp30.000. 000	100	Rp30.000. 000	100	Rp30.000. 000	
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	jumlah operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah	kegiatan	-	1	1	Rp30.000. 000	1	Rp30.000. 000	1	Rp30.000. 000	1	Rp30.000. 000	1	Rp30.000. 000	

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV-2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Relasi Media	
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Penyusunan Konten	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kematangan SPBE, layanan pusat data, dan jaringan intra pemerintah daerah	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
			Koordinasi penyusunan proses bisnis	
			Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	
			Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya akurasi data statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan kegiatan data statistik dalam sistem statistik nasional	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya Keamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel IV-3

Indikator Utama Pembangunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,76	3,76	3,87	3,87	4,07	4,07	4,22	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel IV-4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi	indeks	3,25	3,35	3,35	3,45	3,45	3,65	3,65	3,85	Data rilis Kemenpan, jika pada tahun N tidak dilakukan evaluasi maka akan menggunakan data evaluasi tahun terakhir
2	Indeks tata kelola KAMI	indeks	95	95	95,00	95,00	95,00	95,00	100	105	1) Nilai maksimal 126 2) Mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta fungsi, tugas dan tanggungjawab pengelola keamanan informasi
3	Kinerja unit pelayanan informasi publik	persen	82,84	8.290	82,90	83,00	83,25	83,50	83,75	84,00	rata rata nilai keterbukaan informasi publik pada seluruh opd, jumlah OPD 29 (kominfo tidak dihitung karena sebagai opd penyelenggara)
4	Indeks Domain Proses Bisnis Statistik	indeks	2,9	2,9	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,30	didapat dari hasil penilaian BPS pusat dengan nilai sebagai berikut <1,8 : kurang, 1,8 - <2,6 cukup, 2,6 - <3,5 baik, 3,5 - <4,2 sangat baik, 4,2 - 5,0 Memuaskan
5	Nilai Sakip OPD	Nilai	83,40	83,50	83,5	83,7	83,9	84,1	84,3	84,5	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Kota Pekalongan

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV-5

Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Perangkat Daerah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo / Jumlah Perangkat Daerah x 100 %
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah layanan publik x 100 %
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	29,46	30,08	30,74	31,63	32,53	33,42	34,31	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya / Jumlah Penduduk x 100 %
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah Perangkat Daerah x 100%
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah Perangkat Daerah x 100%

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	71,04	74,86	75,96	76,50	77,60	78,69	79,78	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x 100 %
7	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	persen	94	100	100	100	100	100	100	Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda / Anggaran Belanja untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda x 100%
8	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah dokumen yang dipublikasi di website pemda / Total jumlah dokumen yang telah dirinci x 100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, memuat arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat, serta kebutuhan masyarakat Kota Pekalongan akan layanan informasi dan komunikasi yang berkualitas.

Pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, yaitu "Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang Modern dan Inovatif untuk Mendukung Kota Pekalongan yang Lebih Maju dan Sejahtera," memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh jajaran dinas, serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

Kami menyadari bahwa Renstra ini bukanlah dokumen yang statis. Oleh karena itu, evaluasi dan monitoring secara berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kami yakin dapat mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih maju, modern, dan berdaya saing di bidang komunikasi dan informatika.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini.

RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN

2025-2029



DINSOSP2KB KOTA PEKALONGAN

📍 Jalan Sriwijaya No. 40 Kota Pekalongan

🌐 dinsosp2kb.pekalongankota.go.id

☎ (0285) 422868

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) DinsosP2KB Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan dan pedoman bagi DinsosP2KB untuk 5 (lima) periode ke depan sebagai perwujudan tujuan yang sudah ditetapkan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

Renstra memuat tujuan, sasaran, serta Program dan Kegiatan yang menjadi kewajiban DinsosP2KB sebagai leading sektor dalam urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Pekalongan. Dokumen Renstra ini disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra dan mengakomodir kebijakan pusat dan/ atau Provinsi Jawa Tengah, penyesuaian terhadap RPJMD Kota Pekalongan, penyesuaian indikator serta penyesuaian hasil review Inspektorat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik, saran dan masukan-masukan untuk perbaikan senantiasa kami harapkan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini, semoga ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan sosial serta pelayanan KB kepada masyarakat ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Pekalongan, 19 September 2025
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP2KB) KOTA PEKALONGAN.....	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan struktur organisasi.....	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	28
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	32
2.2.1. Permasalahan Pelayanan DinsosP2KB	32
2.2.2. Isu Strategis.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1 Tujuan Renstra DinsosP2KB Tahun 2025 - 2029.....	37
3.2 Sasaran Renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029.....	37
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DinsosP2KB Tahun 2025 - 2029	40
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029	42
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
4.1 Uraian Program.....	44

4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendanaan	45
4.3	Daftar SubKegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76
4.4.	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui Indikator Utama Pembangunan	76
4.5.	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	77
4.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	77
4.7	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	79
BAB V PENUTUP		84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai DinsosP2KB Kota Pekalongan..	21
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai DinsosP2KB Kota Pekalongan	21
Tabel 2. 3 Prasarana dan Sarana DINSOSP2KB Kota Pekalongan	22
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja DinsosP2KB Kota Pekalongan.....	23
Tabel 2. 5 Pencapaian Realisasi Keuangan DinsosP2KB Kota Pekalongan.....	27
Tabel 2. 6 Capaian SPM DinsosP2KB Tahun 2024.....	28
Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan	33
Tabel 2. 8 Isu Strategis DinsosP2KB.....	35
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra DinsosP2KB 2025 – 2029	38
Tabel 3. 2 Strategi Renstra DinsosP2KB 2025 - 2029.....	40
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra DinsosP2KB 2025 - 2029	42
Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	46
Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76
Tabel 4. 3 Indikator Utama Pembangunan (IUP) DinsosP2KB.....	76
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) DinsosP2KB	77
Tabel 4. 5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	77
Tabel 4. 6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) DinsosP2KB ..	79
Tabel 4. 7 Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi .	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi DINSOSP2KB Kota Pekalongan	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk merupakan dua aspek krusial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kota Pekalongan, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di Jawa Tengah, menghadapi tantangan dalam optimalisasi kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk. Oleh karena itu, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Secara regulatif, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang mencakup anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia, keluarga miskin, dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, dalam aspek pengendalian penduduk, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi pedoman dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk yang lebih terkendali dan berkualitas.

Namun, di Kota Pekalongan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dari sisi kesejahteraan sosial, masih banyak kelompok rentan yang belum memperoleh akses perlindungan sosial secara optimal. Data dari DinsosP2KB menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah utama yang memerlukan intervensi berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, turut menjadi faktor penghambat peningkatan kesejahteraan sosial di Kota Pekalongan.

Sementara itu, dalam aspek pengendalian penduduk, laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekalongan masih cukup tinggi dibandingkan dengan daya dukung wilayah. Hal ini diperburuk oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB), tingginya angka pernikahan usia dini, serta meningkatnya angka stunting yang menjadi indikasi belum optimalnya pemenuhan gizi bagi ibu dan anak. Tantangan ini menuntut pendekatan strategis yang lebih terarah untuk menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan berdaya.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan perencanaan strategis yang komprehensif dan berbasis data guna memastikan efektivitas program dan kebijakan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DinsosP2KB Kota Pekalongan menjadi langkah penting dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang dapat menjawab tantangan kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk di Kota Pekalongan.

Renstra ini akan berfokus pada:

1. Peningkatan kesejahteraan sosial melalui penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, serta peningkatan akses layanan dasar.
2. Optimalisasi pengendalian penduduk dengan memperkuat layanan KB, edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, serta percepatan penurunan stunting.
3. Kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung program kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan kebijakan dan program yang diimplementasikan dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pekalongan secara menyeluruh. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, inklusif, dan memiliki pertumbuhan penduduk yang terkendali. Selanjutnya bersamaan dengan penyusunan RPJMD

Kota Pekalongan tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 159);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 26)
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 5); dan
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJM Daerah Tahun 2025 – 2029.
35. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud memberikan penjabaran RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 guna memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan strategi program dan kegiatan yang berkesinambungan dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta sebagai acuan resmi bagi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sedangkan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan strategi program dan kegiatan yang berkesinambungan dalam 5 (lima) tahun kedepan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Menyediakan acuan resmi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Pekalongan;
4. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta kelompok sasaran pelayanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat Permasalahan pelayanan Perangkat daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan mengenai Tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029, Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029, Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran PD tahun 2025 – 2029, dan arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD tahun 2025 – 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) PD serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DINSOSP2KB) KOTA PEKALONGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 26), yang menyebutkan bahwa DinsosP2KB adalah OPD tipe B yang mengampu urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Diatur pula dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa DinsosP2KB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. DinsosP2KB dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

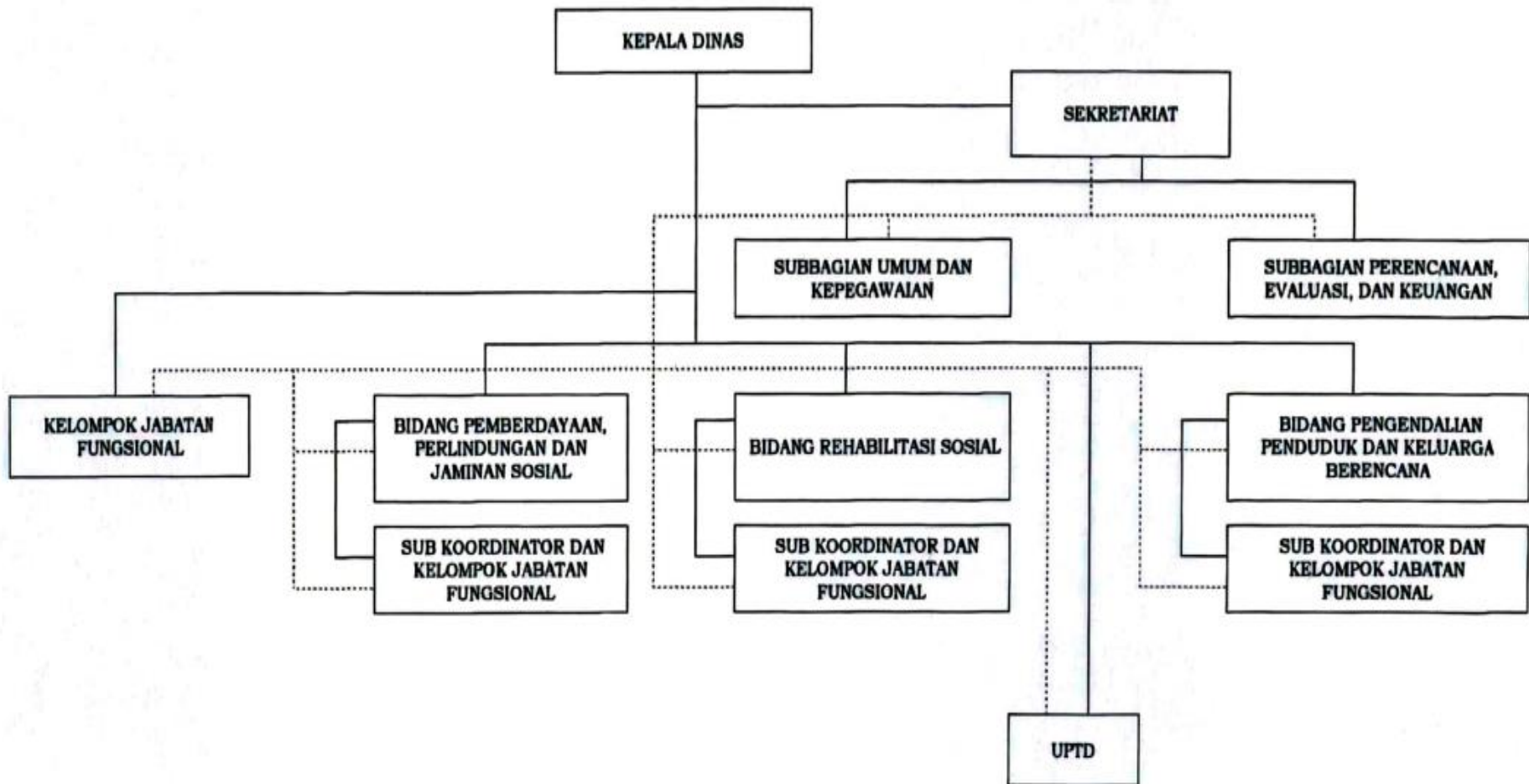
Struktur Organisasi DinsosP2KB

Adapun susunan Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial

- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi DinsosP2KB dapat digambarkan pada bagan sebagaimana berikut :



Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi DINSOSP2KB Kota Pekalongan

Pada Struktur eselonering DinsoP2KB terdiri atas beberapa jenjang jabatan struktural. Kepala dinas dengan jabatan struktural Eselon II b berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu Sekretaris yang memiliki Jabatan Struktural Eselon III a membawahi Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan masing masing memiliki jabatan struktural Eselon IV a. Sedangkan para Kabid pada DinsosP2KB memiliki Jabatan Struktural Eselon III b dan tidak membawahi jabatan struktural Eselon IV a dimana pelaksanaan kegiatan dibantu oleh pejabat fungsional sesuai bidang tugas masing masing.

Secara lebih rinci tugas pokok dan dan fungsi dari masing-masing tersebut diatas diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1) Kepala DINSOSP2KB,

Tugas pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan sasaran, program urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- e) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- f) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
- g) Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standart Operational Prosedur (SOP) dan atau Standart Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h) Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

2.a) Sekretaris

Tugas pokok :

Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengorganisasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Fungsi :

- a) Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b) Pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d) Pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e) Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan Kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f) Pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g) Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;

- h) Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i) Pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Staandard pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial per semester;
- j) Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standart Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standart Pelayanan (SP);
- k) Pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- l) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

2.b.) Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Tugas pokok Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan :

- a) Menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- d) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian kinerja
- e) Melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- f) Melaksanakan fungsi akuntansi;
- g) Menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
- h) Menyusun bahan profil perangkat daerah;

- i) Mengelola dan dan informasi;
- j) Menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- k) Menyusun laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial;
- l) Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- m) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2.c) Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok Sub bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) Menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b) Melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan Kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c) Melaksanakan kegiatan tata Kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- d) Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- e) Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f) Mengelola dna menyusun laporan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

3.1) Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial.

Fungsi :

- a) Perumusan program kerja bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- b) Perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- d) Pengoordinasian pengumpulan sumbangan dalam daerah;
- e) Pengoordinasian pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
- f) Pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah;
- g) Pengoordinasian pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
- h) Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standard Pelayanan 9SP) bidang tugasnya;
- i) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4) Bidang Rehabilitasi Sosial.

4.1) Kabid Rehabilitasi Sosial

Tugas pokok:

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial.

Fungsi :

- a) Perumusan program kerja bidang rehabilitasi sosial;

- b) Perumusan bahan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
- d) Pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- e) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang pengemis di luar panti sosial;
- f) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
- g) Penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- h) Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- i) Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5.1) Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana..

Fungsi :

- a) Perumusan program kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b) Perumusan bahan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d) Penyelenggaraan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e) Penyelenggaraan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- f) Penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya local;
- g) Pengoordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- h) Penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, serta pelaksanaan pelayanan KB;
- i) Penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran, serta organisasi kemasyarakatan Tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- j) Penyelenggaraan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k) Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- l) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan didukung dengan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya perangkat daerah, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana yang dimiliki. Ketersediaan dan kualitas sumber daya ini menjadi salah satu faktor penentu dalam mendukung tercapainya visi, misi, serta tujuan strategis perangkat daerah.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki ASN yang tersebar di berbagai bidang dan subbagian, dengan komposisi yang mencerminkan kebutuhan fungsional dan teknis. Adapun kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai sebagian besar telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, meskipun dalam beberapa bidang kekurangan pegawai dan masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimtek, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan.

Distribusi pegawai mencakup tenaga fungsional seperti Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, dan Pranata Komputer, serta tenaga administrasi yang mendukung proses manajerial dan operasional. Upaya peningkatan kinerja aparatur terus dilakukan melalui sistem evaluasi berbasis kinerja, penguatan budaya kerja, dan pengembangan karir sesuai peraturan perundang-undangan.

ASN pada DinsosP2KB Kota Pekalongan sampai dengan bulan Agustus 2025 sebanyak 20 orang yang diuraikan sesuai dengan tingkat pendidikan dan komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai DinsosP2KB Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN						GENDER		TOTAL (ORANG)
		SD	SMP	SLTA	D3	S-1	S-2	L	P	
1	Sekretariat	1	0	1	2	5	2	7	4	11
2	Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	0	0	0	0	2	1	2	0	3
3	Rehabilitasi Sosial	0	0	0	1	1	1	1	2	3
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	1	0	1	1	0	3	3

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai DinsosP2KB Kota Pekalongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	NON ASN	
1	Sekretariat	4	4	2	1	8	19
2	Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	0	2	1	0	19	22
3	Rehabilitasi Sosial	1	2	0	0	32	35
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	2	1	0	15	18

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

Aset/Modal Kerja

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki aset yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan. Adapun aset pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan per Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Prasarana dan Sarana DINSOSP2KB Kota Pekalongan

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Tanah	11	Bidang
2	Alat Besar	1	Unit
3	Alat Angkutan	68	Unit
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Unit
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	618	Unit
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	126	Unit
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	102	Unit
8	Alat Laboratorium	200	Unit
9	Komputer	222	Unit
10	Bangunan Gedung	27	Unit
11	Monumen	2	Unit
12	Jalan dan Jembatan	2	Unit
13	Bangunan Air	1	Unit
14	Jaringan	9	Unit
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	Unit
16	Aset Tidak Berwujud	4	Unit
17	Aset Lain-lain (RB)	120	Unit

Sumber : DinsosP2KB Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester I Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas Sosial , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM sosial, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan indikator kinerja kunci (IKK) yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja DinsosP2KB Kota Pekalongan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra DinsosP2KB Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Nilai SAKIP OPD		√			70,00	70,00	71,50	73,00	74,65	68,46	71,53	71,75	74,40	75,90	97,80	102,19	100,35	101,92	101,67
2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,01
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	65,71	100,00	100,13	100,00	100,00	65,71	100,00	100,13
4	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah				persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			√	persen	6,95	6,95	3,32	3,43	4,00	8,56	11,69	18,39	17,64	16,68	123,17	168,20	553,92	514,29	417,00
6	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan				persen	66,67	75,00	50,00	58,00	67,00	75,00	75,00	42,86	65,41	100,00	112,49	100,00	85,72	112,78	149,25
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	√			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,16	100,00	126,14	100,00	100,00	25,16	100,00	126,14
8	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial				persen	30,22	37,02	58,46	56,69	55,12	46,72	58,41	67,91	57,38	27,64	154,60	157,78	116,16	101,22	50,15

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra DinsosP2KB Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	√			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan				persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			√	persen	64,00	66,00	67,45	67,50	67,55	69,02	68,37	64,27	61,46	64,41	107,84	103,59	95,29	91,05	95,35
12	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga				persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,68	70,28	82,60	100,00	100,00	99,68	70,28	82,60
13	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun				persen	88,89	55,55	8,00	7,80	12,00	101,11	13,11	5,37	14,44	11,28	87,91	423,72	148,98	54,02	106,38
14	Unmeet need KB				perseribu	-	-	16,00	15,00	14,00	-	-	13,08	14,95	8,48	-	-	122,32	100,33	165,09

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

Dalam urusan sosial, Kementerian Sosial berperan dalam merumuskan kebijakan, menyediakan anggaran, dan memastikan adanya standar nasional untuk kesejahteraan sosial. Berkaitan hal tersebut kementerian sosial mengamanatkan Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) menjadi salah satu indikator daerah pada RPJMD RENSTRA PD 2025 – 2029. Ikesos menjadi indikator yang mendukung indikator renstra kementerian Sosial. Ikesos digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial suatu wilayah atau kelompok masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial objektif dan subyektif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, berfungsi juga sebagai panduan dalam merumuskan arah kebijakan.

Ikesos diperoleh dari 3 dimensi yaitu dimensi kebutuhan dasar , dimensi peranan sosial dan dimensi keberdayaan ekonomi. Dimensi kebutuhan dasar terdiri dari 7 variabel dan 18 indikator. Dimensi Peranan Sosial terdiri dari 3 variabel dan 11 indikator. Sedangkan Dimensi keberdayaan ekonomi terdiri dari 3 variabel dan 9 indikator. Dari beberapa variabel tersebut, 60 persen diambilkan dari data sekunder Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diolah ke dalam indeks kesejahteraan sosial dengan sumber data bisa dipertanggungjawabkan dari Badan Pusat Statistik.

Dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Indeks Lansia berdaya menjadi salah satu indikator daerah pada RPJMD 2025 – 2029. Indeks Lansia Berdaya menjadi salah satu indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam sistem Perencanaan Daerah.

Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan. Indeks Lansia Berdaya menunjukkan tingkat ketangguhan/ keberdayaan lansia, dimana semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin tangguh/ berdaya lansia tersebut.

Dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat Pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP), merupakan salah satu intervensi strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan sosial dan efektivitas pengendalian penduduk. KB PP memastikan bahwa setiap ibu yang baru melahirkan memperoleh akses kontrasepsi modern secara cepat dan aman, sehingga dapat mencegah kehamilan yang tidak direncanakan serta mengatur jarak kelahiran secara ideal.

KB Pasca Persalinan berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pengurangan risiko kesehatan ibu dan anak yang sering menjadi pemicu timbulnya masalah sosial di masyarakat. Jarak kelahiran yang lebih panjang memungkinkan keluarga mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar anak, mengelola ekonomi rumah tangga dengan lebih stabil, serta meminimalkan kerentanan sosial seperti keterlantaran, kemiskinan, dan rendahnya kualitas pengasuhan.

KB Pasca Persalinan berkontribusi signifikan dalam menekan *Total Fertility Rate* (TFR), mengurangi *unmet need*, serta memperbaiki struktur pertumbuhan penduduk melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran. Momentum pasca persalinan merupakan *window of opportunity* yang efektif karena tingkat kesiapan pasangan untuk merencanakan kehamilan berikutnya relatif tinggi. Peningkatan cakupan KB PP secara langsung mendukung efisiensi pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan indikator kinerja KB di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, penerapan KB Pasca Persalinan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Integrasi layanan ini dalam sistem kesehatan dan pelayanan sosial dasar memberikan kontribusi jangka panjang terhadap stabilitas sosial, efektivitas pengendalian penduduk, serta keberhasilan pembangunan keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan.

2.1.4. Kinerja Keuangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 – 2024

Dari sisi kinerja keuangan selama kurun waktu tahun 2020 -2024 yang dicapai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Pencapaian Realisasi Keuangan DinsosP2KB Kota Pekalongan

No.	Indikator Kinerja Keuangan Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Langsung	6.857,6 930	9.911,3 220	12.969, 1850	12.929, 7700	11.876, 1950	6.226,0 80275	8.261,7 67797	11.623, 207870	12.143, 050113	11.052, 180180	90,79	83,36	89,62	93,92	93,06	16,73	17,22
2	Belanja Pegawai	2.649,4 410	2.835,7 560	2.802,9 440	2.524,8 350	2.641,1 110	2.160,8 25071	2.541,6 85305	2.570,9 46953	2.345,0 30937	2.309,8 72162	81,56	89,63	91,72	92,88	87,46	0,14	2,12
3	Belanja Barang/Jasa	5.384,6 930	6.134,1 660	8.304,3 670	8.597,4 300	8.313,6 650	4.812,4 39350	4.834,1 01392	7.491,5 60637	5.054,9 81576	7.874,4 38518	89,37	78,81	90,21	58,80	94,72	12,38	19,67
4	Belanja Modal	1.265,4 900	518,36 70	189,78 80	2.124,3 310	584,72 10	1.226,6 80925	487,74 0600	185,89 5000	2.113,5 70500	577,04 3630	96,93	94,09	97,95	99,49	98,69	206,10	210,54

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

Penerapan SPM Sosial Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

SPM menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan sosial yang berkualitas. SPM berfungsi sebagai tolok ukur kinerja bagi DinsosP2KB dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dengan menerapkan SPM, dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pelayanan, sehingga mendorong perbaikan kinerja secara keseluruhan. Penerapan SPM juga mempengaruhi alokasi anggaran daerah, karena SPM dapat dijadikan dasar dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih terukur. Hal ini memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif untuk mencapai standar pelayanan yang ditetapkan, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja OPD. Capaian SPM tahun 2024 DinsosP2KB disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Capaian SPM DinsosP2KB Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	207
		Layanan data dan pengaduan	orang	115
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	orang	90
		Penyediaan permakanan	orang	207
		Penyediaan sandang	orang	207
		Penyediaan alat bantu	orang	6
		Penyediaan perbekalan kesehatan	orang	207
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	orang	207
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	orang	95
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang	99
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	207
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	orang	207

		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	95
		Layanan rujukan	orang	4
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	26
		Layanan data dan pengaduan	Orang	1
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	25
		Penyediaan permakanan	Orang	26
		Penyediaan sandang	Orang	26
		Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	26
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	26
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	26
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	4
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	26
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	26
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	26
		Layanan rujukan	Orang	0
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	39
		Layanan data dan pengaduan	Orang	22
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	16
		Penyediaan permakanan	Orang	39
		Penyediaan sandang	Orang	39
		Penyediaan alat bantu	Orang	12
		Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	39
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	39
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	8
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	13
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	39
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	39
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8
		Layanan rujukan	Orang	11

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	32
		Layanan data dan pengaduan	Orang	11
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	21
		Penyediaan permakanan	Orang	32
		Penyediaan sandang	Orang	32
		Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	32
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	32
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	29
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	32
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	32
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	29
		Layanan rujukan	Orang	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2120
		Penyediaan permakanan	Orang	2120
		Penyediaan sandang	Orang	2120
		Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	3
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1070
		Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2120

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

2.1.1 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sebagaimana menurut urusan yang diampu, terdiri dari urusan sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Urusan sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki fokus utama pada pemenuhan hak dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan undang undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kelompok sasaran utama dari layanan ini mencakup :

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Termasuk di dalamnya:

- Anak terlantar
- Lanjut usia terlantar
- Penyandang disabilitas terlantar
- Gelandangan dan pengemis
- Korban tindak kekerasan dan perdagangan orang
- Korban bencana alam dan bencana sosial
- Fakir miskin dan keluarga rentan miskin

2. Penerima Bantuan Sosial

Sasaran ini mencakup keluarga dan individu miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Kesejahteraan Sosial dan/atau hasil verifikasi lapangan. Mereka menerima berbagai program seperti:

- Bantuan pangan
- Bantuan rehabilitasi sosial
- Bantuan sosial tunai/non-tunai
- Program perlindungan dan jaminan sosial lainnya

3. Kelompok Rentan dan Marginal

Yaitu individu atau komunitas yang berada dalam situasi sosial ekonomi yang terpinggirkan, seperti:

- Komunitas adat terpencil
- Masyarakat urban miskin
- Keluarga yang terdampak konflik sosial
- Pekerja sektor informal yang tidak terlindungi

4. Pekerja Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pekerja sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Mereka adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pelayanan, pendampingan, dan

pemberdayaan sosial kepada kelompok rentan dan masyarakat miskin, termasuk kedalamnya adalah :

- Pekerja Sosial
- TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
- Pendamping sosial program Bansos
- Karang taruna
- Lembaga kesejahteraan sosial (LKS)
- Tagana (Taruna Siaga Bencana)
- Relawan sosial yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan dan pelayanan sosial.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada DinsosP2KB memiliki mandat untuk menyelenggarakan pelayanan kependudukan yang berkelanjutan serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, program dan kegiatannya menasar berbagai kelompok strategis di masyarakat yang memiliki peran kunci dalam keberhasilan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Kelompok sasaran pelayanan meliputi :

1. PUS (Pasangan Usia subur)
2. Remaja dan Calon Pengantin
3. Keluarga dengan anak
4. Ibu hamil, menyusui dan balita
5. Lansia dan keluarga lansia
6. Tokoh masyarakat dan kader

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan DinsosP2KB

Setelah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pada urusan sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, masih ditemukan permasalahan yang tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Belum optimalnya keberfungsian sosial bagi penduduk miskin dan rentan	Belum memadainya pelayanan sosial bagi PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) d luar panti
		Belum optimalnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Belum Optimalnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
		belum optimalnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Belum optimalnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
2.	Masih rendahnya kualitas keluarga	Belum optimalnya data kependudukan yang tersedia dalam pengambilan kebijakan	Belum optimalnya ketersediaan dokumen kependudukan per keluarga
		Masih tingginya unmeedneed KB	Masih tingginya angka kelahiran pada usia Remaja
		Masih rendahnya pemakaian kontrasepsi modern	Belum optimalnya kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia
			Belum optimalnya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik	Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja dan layanan administrasi penunjang urusan sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Belum optimalnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun 2. Belum optimalnya kualitas layanan publik urusan sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan yang ada pada DinsosP2KB antara lain :

a) Faktor Eksternal

- 1) Kemiskinan yang tinggi menyebabkan meningkatnya jumlah PPKS
- 2) Keterbatasan lapangan kerja dan penghasilan tidak tetap menimbulkan kerentanan sosial dan menunda akses pelayanan KB atau pendidikan reproduksi
- 3) Norma atau nilai sosial yang mulai luntur serta meningkatnya individualisme
- 4) Kepercayaan/adat yang menolak penggunaan alat kontrasepsi
- 5) Disfungsi keluarga (perceraian, kekerasan, pengasuhan tidak memadai) dapat menimbulkan anak terlantar atau lansia terlantar
- 6) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat KB dan kesehatan reproduksi
- 7) Rendahnya pendidikan masyarakat menyebabkan minimnya kesadaran terhadap hak dan kewajiban sosial serta kurangnya kemampuan meningkatkan kesejahteraan
- 8) Kondisi rawan bencana dapat memicu masalah sosial seperti anak jalanan, gelandangan dan kemiskinan perkotaan

b) Faktor Internal

- 1) Keterbatasan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus untuk menangani permasalahan sosial
- 2) Keterbatasan daya tampung tempat rehabilitasi sosial/rumah singgah
- 3) Kurangnya penegakan peraturan daerah urusan sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 4) Keterbatasan anggaran penanganan urusan sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

2.2.2. Isu Strategis

Tabel 2. 8 Isu Strategis DinsosP2KB

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peran serta masyarakat, PSKS dan LKS dalam meningkatkan kesejahteraan PPKS	masih rendahnya kesejahteraan PPKS	Belum meratanya akses pemenuhan kualitas hidup sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	Mengakhir segala bentuk kemiskinan dimanapun	Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan	Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan data kesejahteraan sosial yang akurat dan terverifikasi untuk mendukung penyediaan basis data intervensi penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Data dan sistim informasi keluarga yang mendukung program dan kebijakan peningkatan kualitas keluarga	masih rendahnya kualitas keluarga	Belum meratanya akses pemenuhan kualitas hidup sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesenjangan Gender	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;	Peningkatan kemandirian, ketentraman dan kebahagiaan keluarga mendukung perwujudan keluarga berkualitas

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dukungan Pemerintah dalam perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif untuk semua masyarakat	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik	Perlunya meningkatkan reformasi birokrasi dalam keamanan, pelayanan publik dan kapasitas keuangan daerah	Mengakhir segala bentuk kemiskinan dimanapun	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesenjangan Gender	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan kualitas dan mutu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur dalam pemenuhan pelayanan dasar bagi PPKS.

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra DinsosP2KB Tahun 2025 - 2029

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara urusan sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada renstra 2025 – 2029 merumuskan tujuan yaitu **“Menurunkan Populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan Mewujudkan Keluarga Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik”**, dengan indikator terdiri dari :

1. Persentase populasi PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial)
2. Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.2 Sasaran Renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029

Dalam mewujudkan tujuan Renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sasaran renstra sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS
2. Menurunnya populasi PPKS fakir miskin
3. Terkendalinya angka kelahiran
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Keterkaitan sasaran RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029 dengan tujuan dan sasaran Renstra DinsosP2KB tahun 2025 – 2029 ditunjukkan dalam tabel tujuan dan sasaran Renstra DinsosP2KB 2025 – 2029 dibawah ini :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra DinsosP2KB 2025 – 2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 4.1 Menurunnya Populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Menurunkan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan mewujudkan keluarga berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik		Indikator Tujuan : Persentase populasi PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial)	7,52	7,50	7,38	7,27	7,16	7,04	6,92	
		Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Indikator Sasaran : Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100	100	100	
		Menurunnya populasi PPKS fakir miskin	Indikator Sasaran : Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	240	230	230	230	230	230	230	
			Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Keluarga /ibangga (IUP)	65,92	65,91 - 65,92	66,68 - 66,71	67,46 - 67,49	68,23 - 68,28	69,00 - 69,06	69,77 - 69,85	
		Terkendalinya Angka Kelahiran	Indikator Sasaran : Total	2,19	2,18	2,18	2,17	2,17	2,16	2,16	

			Fertility Rate (IKK)								
			Indikator Tujuan : Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD	92,78	92,88	92,98	93,08	93,18	93,28	93,38	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP OPD	75,90	75,92	75,94	75,96	75,98	76,00	76,02	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029

Strategi yang dilakukan DinsosP2KB dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dijelaskan dalam tabel Strategi Renstra Perangkat Daerah dibawah ini :

Tabel 3. 2 Strategi Renstra DinsosP2KB 2025 - 2029

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik”
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong	Penguatan tata kelola untuk memperluas jaminan perlindungan	Peningkatan akses PPKS, calon tenaga kerja dan perempuan terhadap	Kolaborasi stakeholder dalam penyediaan infrastruktur yang	Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan,

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender	sosial bagi masyarakat rentan, perlindungan termasuk Perempuan dan anak serta peningkatan pemberdayaan LPKS dan BLKK dalam peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	sumber daya ekonomi sirkular, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	mendukung penanggulangan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif	penurunan angka pengangguran terbuka, serta pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif
Strategi Renstra OPD	Sinkronisasi data kesejahteraan sosial untuk mewujudkan data tunggal yang reliabel dan mudah diakses serta penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong perwujudan kemandirian.	Penguatan kelembagaan, tata kelola serta kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah	Peningkatan akses berusaha bagi PPKS	Kolaborasi stakeholder dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029

DinsosP2KB menyusun arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Dinsos2KB Tahun 2025 – 2029 yang disusun dalam tabel arah kebijakan Renstra DinsosP2KB sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra DinsosP2KB 2025 - 2029

NO.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, optimalisasi upaya menurunkan angka pengangguran terbuka, serta peningkatan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif	Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender	
		Penguatan tata kelola untuk memperluas jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, perlindungan termasuk Perempuan dan anak serta peningkatan pemberdayaan LPKS dan BLKK dalam peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	
		Peningkatan akses PPKS, calon tenaga kerja dan perempuan terhadap sumber daya ekonomi sirkular, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	
		Kolaborasi stakeholder dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung penanggulangan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pemenuhan	

NO.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		layanan berperspektif gender yang inklusif	
		Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, penurunan angka pengangguran terbuka, serta pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengampu 9 Program sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)

2. Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (SPM)

3. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase lembaga potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase keluarga miskin berhak mendapat intervensi sosial yang mendapat intervensi sosial

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

6. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contrceptive Prevalance Rate/ mCPR*) (IKK)

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase kebutuhan ber – KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed* KB) (IKK)
8. Program Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase Angka kelahira pada Remaja umur 15 – 19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR* 15 – 19)
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu (1) Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah (2) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (3) Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029 mengampu 9 Program yang terdiri dari 17 Kegiatan dan 57 Sub kegiatan dengan perincian rencana penganggaran untuk masing masing sub kegiatan, kegiatan serta program diuraikankan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
TOTAL							9.779.380.000		10.927.361.000		11.456.557.000		11.952.237.000		12.528.524.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							3.570.572.000		4.173.109.000		4.474.049.000		4.739.209.000		5.075.667.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terwujudnya lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Indidkator Program : Persentase lembaga potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan	persen	NA	74,67	74,67	186.900.000	80	354.086.000	85,33	379.020.000	90,67	406.098.000	94,67	435.468.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	persen	90	90	91	186.900.000	92	354.086.000	93	379.020.000	94	406.098.000	95	435.468.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1	1	7	30.000.000	7	176.550.000	7	188.908.000	7	202.150.000	7	216.300.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan		Jumlah Warakawuri/K eluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	35	15	19	22.500.00 0	19	42.750.00 0	19	42.750.00 0	19	42.750.000	19	42.750.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	0	0	40	134.400.0 00	40	134.786.0 00	40	147.362.0 00	40	161.198.00 0	40	176.418.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar PPKS di luar panti	Indikator Program :Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	persen	100	100	100	1.696.992. 000	100	1.728.391 .000	100	1.886.418 .000	100	1.959.118.0 00	100	2.048.049.00 0	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tercapainya PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) diluar panti yang mendapat pelayanan sosial	Indikator Kegiatan : Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	persen	100	100	100	1.187.612. 000	100	1.219.011 .000	100	1.365.638 .000	100	1.438.338.0 00	100	1.514.269.00 0	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Permakanan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	80	65	60	458.472.000	60	459.871.000	60	568.471.000	60	628.471.000	60	674.402.000	
Penyediaan Sandang		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	0	0	60	11.215.000	60	11.215.000	60	11.215.000	60	11.215.000	60	21.215.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	80	65	60	657.325.000	60	657.325.000	60	680.352.000	60	693.052.000	60	713.052.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Kewenangan Kabupaten/Kot a														
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	0	0	0	0	15	10.000.00 0	30	20.000.00 0	30	20.000.000	30	20.000.000	
Pemberian Layanan Rujukan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	0	0	0	0	20	20.000.00 0	25	25.000.00 0	25	25.000.000	25	25.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Perbekalan Kesehatan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan	Orang	0	0	60	60.600.00 0	60	60.600.00 0	60	60.600.00 0	60	60.600.000	60	60.600.000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Tercapainya PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	Indikator Kegiatan : Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	persen	8.80	3.82	100	509.380.0 00	100	509.380.0 00	100	520.780.0 00	100	520.780.00 0	100	533.780.000	
Penyediaan Permakanan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	907	903	757	358.800.0 00	757	358.800.0 00	757	358.800.0 00	757	358.800.00 0	757	358.800.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Alat Bantu		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	18	10	10	26.700.000	10	25.700.000	10	26.000.000	10	26.000.000	10	36.000.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	0	0	50	11.800.000	50	11.800.000	50	11.800.000	50	11.800.000	50	11.800.000	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependuduka n, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau	Orang	10	10	20	52.000.000	20	52.000.000	20	62.000.000	20	62.000.000	20	62.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kot a														
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	127	83	100	50.180.000	100	50.180.000	100	50.180.000	100	50.180.000	100	50.180.000	
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	Orang	0	0	100	10.900.000	100	10.900.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Sosial (PPKS) Lainnya														
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terwujudnya keluarga miskin berhak mendapat intervensi sosial yang mendapat intervensi sosial	Indikator Program :Persentase keluarga miskin berhak mendapat mendapat intervensi sosial yang mendapat intervensi sosial	persen	35,2	51,83	51,83	1.318.780. 000	51,8 3	1.457.624 .000	51,83	1.508.080 .000	51,83	1.604.529.0 00	51,83	1.752.214.00 0	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya data fakir miskin yang terverifikasi dan validasi	Indikator Kegiatan : Persentase usulan data fakir miskin yang terverifikasi dan validasi	persen		100	100	1.318.780. 000	100	1.457.624 .000	100	1.508.080 .000	100	1.604.529.0 00	100	1.752.214.00 0	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a yang Didata	Orang	2287	6000	2287	331.080.0 00	2287	469.924.0 00	2287	469.924.0 00	2287	469.924.00 0	2287	469.924.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembanga n Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	0	0	10	242.700.000	10	242.700.000	10	293.156.000	15	389.605.000	20	537.290.000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	950	950	500	745.000.000	500	745.000.000	500	745.000.000	500	745.000.000	500	745.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat	Indikator Program :Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	persen	100	100	100	310.540.000	100	379.620.000	100	429.620.000	100	479.620.000	100	529.620.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		kabupaten/kot a (SPM)														
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tercapainya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Indikator Kegiatan : Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	persen	102.33	100	100	310.540.0 00	100	379.620.0 00	100	429.620.0 00	100	479.620.00 0	100	529.620.000	
Penyediaan Makanan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	2120	500	500	300.540.0 00	500	369.620.0 00	500	419.620.0 00	500	469.620.00 0	500	519.620.000	
Pelayanan Dukungan Psikososial		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan	Orang	2120	500	500	10.000.00 0	500	10.000.00 0	500	10.000.00 0	500	10.000.000	500	10.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Kabupaten/Kota														
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terwujudnya Pemeliharaan taman makam pahlawan	Indikator Program :Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	persen	100	100	100	57.360.000	100	253.388.000	100	270.911.000	100	289.844.000	100	310.316.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terselenggara Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman makam Pahlawan	Indikator Kegiatan : Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	persen	100	100	100	57.360.000	100	253.388.000	100	270.911.000	100	289.844.000	100	310.316.000	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	0	0	1	160.500.000	1	171.735.000	1	183.750.000	1	196.612.500	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharann ya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kot a	Makam	1	1	1	57.360.00 0	1	92.888.00 0	1	99.176.00 0	1	106.094.00 0	1	113.703.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2.609.665. 000		2.769.145 .000		2.821.801 .000		2.876.821.0 00		2.934.350.00 0	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatny a pemakaian kontrasepi modern (Modern Contraceptiv e Prevalence Rate/mCPR)	Indikator Program :Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (IKK)	persen	64,41	64,48	64,55	142.580.0 00	64,6 2	179.400.0 00	64,69	185.400.0 00	64,76	191.900.00 0	64,83	198.900.000	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kampung keluarga berkualitas Mandiri	Indikator Kegiatan : Persentase kampung keluarga berkualitas Mandiri	persen	37	38,3	40,8	142.580.0 00	42,6	179.400.0 00	44	185.400.0 00	45	191.900.00 0	45,8	198.900.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokume n	1	1	1	50.180.00 0	1	87.000.00 0	1	93.000.00 0	1	99.500.000	1	106.500.000	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	27	27	1	63.600.00 0	1	63.600.00 0	1	63.600.00 0	1	63.600.000	1	63.600.000	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokume n	8	8	8	28.800.00 0	8	28.800.00 0	8	28.800.00 0	8	28.800.000	8	28.800.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Terwujudnya kebutuhan ber -KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed)	Indikator Program :Persentase kebutuhan ber -KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) (IKK)	persen	8,48	9,5	9,25	778.865.0 00	9	841.885.0 00	8,75	868.541.0 00	8,5	897.061.00 0	8,4	927.590.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersedianya dokumen Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Indikator Kegiatan : Persentase ketersediaan dokumen Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persen	n/a	n/a	100	176.000.000	100	184.120.000	100	192.800.000	100	202.096.000	100	202.096.000	
Pengendalian Program KKBPK		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan	Laporan	16	16	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Keluarga Berencana)														
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	48	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokume n	1	1	1	116.000.000	1	124.120.000	1	132.800.000	1	142.096.000	1	142.096.000	
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders	Organis asi	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		dan Mitra Kerja														
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	Indikator Kegiatan : Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	83,5	84,4	86	602.865.000	87,6	657.765.000	88,8	675.741.000	89,8	694.965.000	90	725.494.000	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1026	1137	1044	400.965.0 00	1044	400.965.0 00	1044	400.965.0 00	1044	400.965.00 0	1044	400.965.000	
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	1	1	1	201.900.0 00	1	256.800.0 00	1	274.776.0 00	1	294.000.00 0	1	324.529.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terwujudnya Angka kelahiran pada Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Indikator Program :Persentase Angka kelahiran pada Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	persen	9,5	8,3	7,4	1.688.220. 000	6,6	1.747.860 .000	5,9	1.767.860 .000	5,3	1.787.860.0 00	4,9	1.807.860.00 0	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Tercapainya kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraa	Indikator kegiatan : Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan	persen	0	0	100	20.260.00 0	100	20.260.00 0	100	20.260.00 0	100	20.260.000	100	20.260.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Kesejahteraan Keluarga	n keluarga yang memberikan pembinaan keluarga	kesejahteraan keluarga yang memberikan pembinaan keluarga														
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	kelompo k	0	0	6	20.260.00 0	6	20.260.00 0	6	20.260.00 0	6	20.260.000	6	20.260.000	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Terwujudnya pengasuhan orangtua/kelu arga yang memiliki remaja	Indikator Kegiatan : Indeks Pengasuhan Keluarga yang memilki remaja	indeks	87	87,8	88,8	1.667.960. 000	89,5	1.727.600 .000	90,2	1.747.600 .000	90,9	1.767.600.0 00	91,5	1.787.600.00 0	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Indikator Sub Kegiatan : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Cal on PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran , Baduta/Balita)	Laporan	10	10	10	354.000.0 00	10	354.000.0 00	10	354.000.0 00	10	354.000.00 0	10	354.000.000	
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Cal on PUS, Ibu Hamil, Pasca	Laporan	11	11	10	1.203.600. 000	10	1.203.600 .000	10	1.203.600 .000	10	1.203.600.0 00	10	1.203.600.00 0	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		salin/kelahiran , Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan														
Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan	5	5	5	110.360.000	5	170.000.000	5	190.000.000	5	210.000.000	5	230.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.599.143.000		3.985.107.000		4.160.707.000		4.336.207.000		4.518.507.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan yang	Indikator Program :Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	2.584.452.000	100	2.731.567.000	100	2.831.567.000	100	2.931.567.000	100	3.038.367.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
	akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	659.432.0 00	100	663.400.0 00	100	663.400.0 00	100	663.400.00 0	100	874.200.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	2	3	2	3.132.000	2	3.200.000	2	3.200.000	2	3.200.000	3	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokume n	2	2	2	5.720.000	2	5.750.000	2	5.750.000	2	5.750.000	2	5.750.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokume n	15	15	15	12.420.00 0	15	12.450.00 0	15	12.450.00 0	15	12.450.000	15	12.450.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	76.938.08 3.000	100	81.347.71 0.000	100	84.347.71 0.000	100	87.347.710. 000	100	90.347.710.0 00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	19	20	20	2.520.497. 000	20	2.667.467 .000	20	2.767.467 .000	20	2.867.467.0 00	20	2.967.467.00 0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri	Dokume n	12	12	12	39.300.00 0	12	39.300.00 0	12	39.300.00 0	12	39.300.000	12	39.300.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		fikasi Keuangan SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokume n	1	1	1	3.383.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	
	Tercapainya layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	652.441.0 00	100	721.600.0 00	100	732.100.0 00	100	742.600.00 0	100	753.100.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100		150.000.0 00		150.000.0 00		150.000.0 00		150.000.00 0		150.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	7.923.000. 000	100	9.556.900 .000	100	9.866.900 .000	100	10.176.900. 000	100	10.486.900.0 00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	7.300.000	4	10.000.00 0	4	10.000.00 0	4	10.000.000	4	10.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	60.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	4	10.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	75.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4	7.500.000	4	8.500.000	4	8.500.000	4	8.500.000	4	8.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		yang Disediakan														
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	150	150	100.000.0 00	150	120.000.0 00	150	130.000.0 00	150	140.000.00 0	150	150.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sesuai ketentuan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	11.391.15 0.000	100	11.847.50 0.000	100	11.862.00 0.000	100	11.876.500. 000	100	11.891.000.0 00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	1.000.000	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	12	12	177.561.0 00	12	185.000.0 00	12	185.000.0 00	12	185.000.00 0	12	185.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	208.080.0 00	12	212.500.0 00	12	213.000.0 00	12	213.500.00 0	12	214.000.000	
	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Program :Persentase pengadaan/pe meliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	362.250.0 00	100	531.940.0 00	100	597.040.0 00	100	662.040.00 0	100	727.040.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggar anya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundangan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	10.717.50 0.000	100	15.578.20 0.000	100	17.511.20 0.000	100	19.441.200. 000	100	21.371.200.0 00	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCAME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	67	69	67	237.250.000	67	286.940.000	67	337.040.000	67	387.040.000	67	437.040.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8	8	75.000.000	8	190.000.000	8	200.000.000	8	210.000.000	8	220.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	43	63	65	50.000.000	65	55.000.000	65	60.000.000	65	65.000.000	65	70.000.000	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada Renstra DinsosP2KB tahun 2025 – 2029 tidak terdapat program, kegiatan maupun sub kegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan Daerah. Namun seluruh Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029 mendukung misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan periode 2025 – 2029 pada misi ke 5 yaitu Peningkatan layanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCAME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	N I H I L			

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel 4. 3 Indikator Utama Pembangunan (IUP) DinsosP2KB

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN							KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) / IUP	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) / IUP	65,92	65,91 -	66,68 -	67,46 -	68,23 -	69,00 -	69,77 -	
				65,92	66,71	67,49	68,28	69,06	69,85	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) DinsosP2KB

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	keluarga	230	230	230	230	230	230	
3	Nilai SAKIP OPD	angka	75,92	75,94	75,96	75,98	76,00	76,02	
4	Total Fertility Rate	angka	2,18	2,18	2,17	2,17	2,16	2,16	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4. 5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	

3	TFR (Angka Kelahiran Total	angka	2,18	2,18	2,17	2,17	2,16	2,16	
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	64,48	64,55	64,62	64,69	64,76	64,83	
5	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i> KB)	persen	9,50	9,25	9,00	8,75	8,50	8,40	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 4. 6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) DinsosP2KB

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2024	TARGET TAHUNAN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2120	480	480	480	480	480	480	
		Penyediaan permakanaan	Orang	2120	480	480	480	480	480	480	
		Penyediaan sandang	Orang	2120	480	480	480	480	480	480	
		Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	3	2	100	100	100	100	100	
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1070	9	50	50	50	50	50	
		Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2120	480	480	480	480	480	480	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Layanan data dan pengaduan	Orang	11	1	1	1	1	1	1	
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	21	1	1	1	1	1	1	
		Penyediaan permakanaan	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Penyediaan sandang	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	29	1	1	1	1	1	1	

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2024	TARGET TAHUNAN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	1	1	1	1	1	1	
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	29	1	1	1	1	1	1	
		Layanan rujukan	Orang	0	1	1	1	1	1	1	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	39	10	10	10	10	10	10	
		Layanan data dan pengaduan	Orang	22	3	3	3	3	3	3	
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	16	5	5	5	5	5	5	
		Penyediaan permakanan	Orang	39	10	10	10	10	10	10	
		Penyediaan sandang	Orang	39	10	10	10	10	10	10	
		Penyediaan alat bantu	Orang	12	3	3	3	3	3	3	
		Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	39	10	10	10	10	10	10	
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	39	10	10	10	10	10	10	
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter	Orang	8	3	3	3	3	3	3	
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	13	3	3	3	3	3	3	
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	39	10	10	10	10	10	10	

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2024	TARGET TAHUNAN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	39	10	10	10	10	10	10	
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8	4	5	5	5	5	5	
		Layanan rujukan	Orang	11	3	3	3	3	3	3	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	1	1	1	1	1	
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	25	1	1	1	1	1	1	
		Penyediaan permakanan	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Penyediaan sandang	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	4	1	2	2	2	2	2	
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Layanan rujukan	Orang	0	1	1	1	1	1	1	

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2024	TARGET TAHUNAN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Layanan data dan pengaduan	orang	115	10	10	10	10	10	10	
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	orang	90	10	10	10	10	10	10	
		Penyediaan permakanan	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Penyediaan sandang	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Penyediaan alat bantu	orang	6	1	1	1	1	1	1	
		Penyediaan perbekalan kesehatan	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	orang	95	5	5	5	5	5	5	
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang	99	3	3	3	3	3	3	
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	95	5	5	5	5	5	5	
		Layanan rujukan	orang	4	5	10	10	10	10	10	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel 4. 7 Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
1	IKESOS (Indeks Kesejahteraan Sosial)	angka	-	62	63	64	65	66	67	Rilis data dari Kemensos
2	Indeks Lansia Berdaya	angka	-	58,4	58,9	59,3	59,7	60,1	60,5	Rilis data dari Kemendukbangga / BKKBN
3	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	persen	39,60	54,44	54,56	54,67	54,79	54,91	55,02	Rilis data dari Kemendukbangga / BKKBN

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk di Kota Pekalongan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terarah, efektif, serta selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.

Namun, dalam implementasi Renstra ini, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Prioritas Program – Mengutamakan program yang memiliki dampak langsung dan berkelanjutan bagi kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk, dengan fokus pada kelompok rentan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Efisiensi dan Optimalisasi Sumber Daya – Memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, termasuk kerja sama dengan sektor swasta, CSR, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat. Fleksibilitas dan Adaptasi Kebijakan – Menyesuaikan kebijakan dan program dengan kondisi sosial-ekonomi yang dinamis, serta memastikan adanya langkah mitigasi dalam menghadapi kendala anggaran atau perubahan regulasi. Penguatan Kolaborasi – Meningkatkan sinergi dengan OPD terkait, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna memperkuat implementasi program dan menciptakan solusi inovatif terhadap keterbatasan sumber daya. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan – Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis data agar pelaksanaan program dapat dikendalikan dengan baik, serta melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi Renstra 2025–2029, kaidah pelaksanaan yang diterapkan mencakup prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap program yang dijalankan. Pelaksanaan program harus berorientasi pada hasil yang nyata serta mengutamakan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyusunan program kerja tahunan yang selaras dengan target dan indikator kinerja, penguatan kapasitas SDM agar lebih profesional dan responsif, serta strategi pendanaan alternatif untuk

mengatasi keterbatasan anggaran. Selain itu, evaluasi berkala akan dilakukan guna memastikan program berjalan sesuai rencana serta memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang, sehingga kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk di Kota Pekalongan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Pekalongan, 19 September 2025
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 198603 1 007

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PEKALONGAN**

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 01. Kota Pekalongan

Telepon: (0285) 432086

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 dapat tersusun. Dokumen ini menjadi pedoman bagi DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan, sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan.

Renstra ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama Renstra DPMPTSP adalah meningkatkan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua tujuan strategis ini menjadi komitmen kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih dapat disempurnakan seiring dinamika pembangunan. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Pekalongan.

Pekalongan, 19 September 2025

Plt. Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19711017 199903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.1.4. Kinerja Keuangan DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.....	30
2.1.5. Kelompok sasaran layanan	33
2.1.6. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan.....	34
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	35
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.2.2. Isu Strategis	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	47
3.1 Tujuan Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.....	47
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.....	47
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	50
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	53
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	54

4.1	Uraian Program	54
4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	55
4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	68
4.4	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui Indikator Utama Pembangunan	69
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	69
4.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	70
4.7	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	71
4.8	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi.....	72
BAB V PENUTUP		73
5.1.	Catatan Penting	73
5.2.	Kaidah Pelaksanaan	74
5.3.	Rencana Tindak Lanjut.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Kota Pekalongan	14
Tabel II-2 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan	14
Tabel II-3 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai non ASN DPMPTSP Kota Pekalongan	15
Tabel II-4 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025	16
Tabel II-5 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan	20
Tabel II-6 Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal PMDN dan PMA 2020-2024	24
Tabel II-7 Rekapitulasi Pelayanan Perizinan Tahun 2020-2024	26
Tabel II-8 Daftar Inovasi DPMPTSP	27
Tabel II-9 Pencapaian Realisasi Keuangan DPMPTSP Kota Pekalongan	30
Tabel II-10 Pemetaan Masalah pada DPMPTSP Kota Pekalongan	35
Tabel II-11 Isu Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029	45
Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Pekalongan 2025-2029	49
Tabel III-2 Penahapan Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan	51
Tabel III-3 Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	53
Tabel IV-1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	56
Tabel IV-2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	68
Tabel IV-3 Indikator Utama Pembangunan	69
Tabel IV-4 Indikator Kinerja Utama PD	70
Tabel IV-5 Indikator Kinerja Kunci	70
Tabel IV-6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	72
Tabel IV-7 Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Peta Jabatan DPMPTSP Kota Pekalongan	10
Gambar II-2 Peta Proses Bisnis DPMPTSP Kota Pekalongan	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan memerlukan landasan perencanaan yang kuat, terarah, dan terukur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendorong peningkatan investasi serta mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima. Kinerja DPMPTSP secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mendukung Misi ke-6 Wali Kota Pekalongan, yaitu “Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal”.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan pembangunan, sekaligus instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara periodik.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 merupakan amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen ini juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025–2029, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Renstra Kementerian Investasi/BKPM, sehingga terjamin konsistensi dan keterpaduannya dengan arah pembangunan nasional maupun daerah.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pekalongan, Renstra ini selaras dengan visi daerah “Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah” serta arah pembangunan jangka panjang yang dirumuskan dalam RPJPD Kota Pekalongan, yaitu “Pekalongan Kota MINA BATIK yang Berkelanjutan”. MINA BATIK merupakan akronim dari pokok visi: Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan.

Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 memiliki nilai strategis yang sangat penting. Selain sebagai pedoman bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Melalui Renstra ini, DPMPTSP berkomitmen untuk memfokuskan program dan kegiatan pada dua tujuan utama: meningkatkan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah,

- serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan Renja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024;
 24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);
 25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 41);
28. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DPMPTSP (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 72);
29. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 55).

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang menjadi pedoman dan arah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP. Dengan adanya Renstra ini, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terencana secara sistematis, terukur, dan akuntabel selama periode 2025–2029.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

- 1) Mensinergikan visi, misi, dan tujuan pembangunan Kota Pekalongan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program prioritas DPMPTSP;
- 2) Menetapkan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan akuntabel sebagai instrumen evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan strategis;
- 3) Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 4) Memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis DPMPTSP, yaitu meningkatkan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dengan uraian sebagai berikut::

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menyajikan profil DPMPTSP Kota Pekalongan, mencakup tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta kinerja pelayanan yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Analisis isu strategis juga disajikan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang ke depan.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tujuan yang ingin dicapai, sasaran sebagai target capaian tahunan, serta strategi dan arah kebijakan yang akan memandu DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan secara rinci program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah. Bab ini juga memuat target keberhasilan yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah setiap tahun periode 2025–2029.

BAB V : Penutup

Memuat kesimpulan substansial dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta panduan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

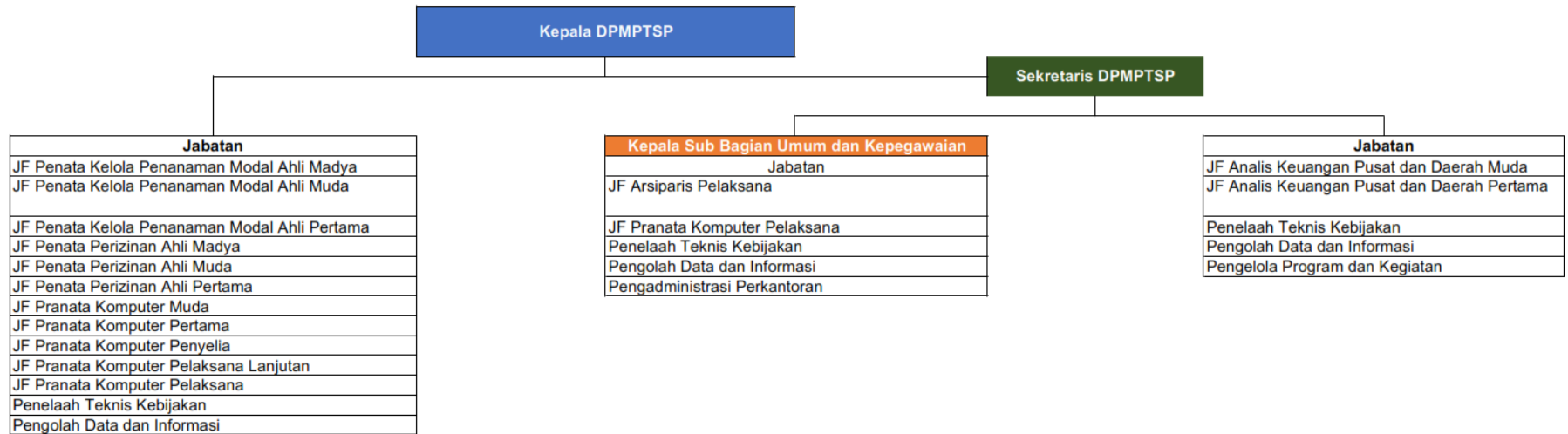
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dicabut sebagian dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, DPMPTSP memiliki tugas pokok untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPTD

Gambar II-1 Peta Jabatan DPMPTSP Kota Pekalongan



- a. DPMPTSP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 2. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 3. Penyelenggaraan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
 4. Penyelenggaraan pembuatan peta potensi investasi Daerah.
 5. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
 8. Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.
 9. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan.
 10. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya.
 11. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas.
 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan

kinerja serta administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
 2. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
 3. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
 4. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
 5. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
 6. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
 7. pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang kepegawaian;
 8. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
 9. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
 11. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
 12. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.
- c. Pada DPMPTSP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Visi-Misi DPMPTSP Kota Pekalongan

Visi :

Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi Daerah Melalui Pelayanan Prima

Misi :

1. Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi Kota Pekalongan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi dan pengembangan kerjasama;
3. Mengembangkan sistem pengendalian penanaman modal/investasi;
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima;
5. Mewujudkan efektifitas pelayanan berbasis teknologi informasi;
6. Megembangkan kualitas dan profesionalisme SDM.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan didukung oleh berbagai sumber daya, antara lain:

1. **Sumber Daya Manusia (SDM):** DPMPTSP memiliki sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten, terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf pelaksana. Seluruh personel memiliki peran krusial dalam memberikan pelayanan publik, memfasilitasi investasi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. **Sarana dan Prasarana:** DPMPTSP didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ini mencakup gedung kantor DPMPTSP, fasilitas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terpadu, gedung Unit Kerja Khusus (UKK) Imigrasi serta

perangkat teknologi informasi (komputer, jaringan, dan server) yang menunjang operasional harian. Keberadaan sarana digital seperti sistem *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS) dan aplikasi New SAKPORE menjadi aset penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan per 1 Agustus 2025 dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori sebagai berikut:

Tabel II-1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Kota Pekalongan

No	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN					GENDER		TOTAL (ORANG)
		SLTA	D3	S-1	S-2	S3	L	P	
1	DPMPTSP	0	5	10	1	0	8	8	16
2	Sekretariat	0	0	0	1	0	1	0	1
3	Subbagian Umum dan Kepegawaian	3	2	0	0	0	3	2	5
	Total	3	7	10	2	0	12	10	22

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, Agustus 2025

Tabel II-2 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)				TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	
1	DPMPTSP	4	8	2	2	16
2	Sekretariat	0	0	1	0	1
3	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	3	0	1	5
	TOTAL	5	11	3	3	22

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, Agustus 2025

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, kinerja DPMPTSP Kota Pekalongan juga didukung oleh tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN ini berperan penting dalam mendukung operasional baik di kantor DPMPTSP maupun di unit-unit pelayanan yang menjadi bagian dari perluasan akses layanan publik.

Secara umum, keterlibatan tenaga non-ASN mencakup:

- (1) Operasional Perkantoran DPMPTSP – membantu kelancaran administrasi, teknis perkantoran, serta pelayanan di *back office*.
- (2) Mal Pelayanan Publik (MPP) – memperkuat lini pelayanan langsung kepada masyarakat, baik dalam hal penerimaan permohonan, konsultasi, maupun pendampingan penggunaan aplikasi pelayanan.
- (3) Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Imigrasi – mendukung penyelenggaraan pelayanan keimigrasian yang merupakan bagian dari layanan lintas sektor yang terintegrasi di Kota Pekalongan.

Keberadaan tenaga non-ASN ini memberikan fleksibilitas dan mempercepat respons pelayanan publik, khususnya dalam menghadapi beban kerja yang tinggi serta tuntutan peningkatan kualitas layanan. Namun, di sisi lain juga perlu diperhatikan aspek pembinaan, pengembangan kapasitas, serta kepastian hukum dan kesejahteraan mereka agar kinerja yang dihasilkan tetap optimal dan berkesinambungan.

Komposisi Tenaga Non ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan per 1 Agustus 2025 dapat dirinci ke dalam tabel II-3 berikut:

Tabel II-3 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai non ASN DPMPTSP Kota Pekalongan

PENEMPATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							GENDER		TOTAL (ORANG)
	SD	SLTP	SLTA	D3	S-1	S-2	S3	L	P	
DPMPTSP	1	0	7	2	11	0	0	13	8	21
UKK Imigrasi	0	1	6	2	2	0	0	7	4	11
MPP	0	1	2	0	1	0	0	4	0	4
Total	1	2	15	4	14	0	0	24	12	36

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pada DPMPTSP Kota Pekalongan berdasarkan hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II-4 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Station Wagon	4	Unit
2	AC Split	43	Unit
3	Sepeda Motor Dinas	11	Unit
4	Lemari Besi/Metal	14	Unit
5	Rak Kayu	1	Unit
6	<i>Filing Cabinet</i> Besi	20	Unit
7	Brankas	1	Unit
8	<i>White Board</i>	2	Unit
9	Papan Nama Instansi	2	Unit
10	Papan Pengumuman	1	Unit
11	Meja Rapat	16	Unit
12	Kursi Tamu	9	Unit
13	Bangku Tunggu	44	Unit
14	Kursi Pengunjung	12	Unit
15	Meja Komputer	20	Unit
16	Kursi Tangan	4	Unit
17	Meja Tulis	1	Unit
18	Televisi	11	Unit
19	<i>Unit Power Supply</i>	1	Unit
20	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
21	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Unit
22	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit
23	Pesawat Telepon	4	Unit
24	P.C Unit	36	Unit
25	Printer	27	Unit
26	Router	1	Unit
27	Server	15	Unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
28	Hub	3	Unit
29	Kursi Putar	50	Unit
30	Note Book	10	Unit
31	Lemari Kaca	1	Unit
32	Alat Pemadam/ <i>Portable</i>	11	Unit
33	LCD Proyektor	1	Unit
34	Scanner	3	Unit
35	Lemari Kayu	10	Unit
36	Rak Besi	1	Unit
37	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
38	Meja Resepsionis	8	Unit
39	Dispenser	7	Unit
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit
42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	19	Unit
43	Kursi Rapat	44	Unit
44	<i>Microphone</i>	3	Unit
45	Mesin Absensi	1	Unit
46	<i>AC Window</i>	1	Unit
47	<i>Sound System</i>	3	Unit
48	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	9	Unit
49	Lemari Es	2	Unit
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
52	Mesin Antrian	1	Unit
53	CCTV	1	Unit
54	Meja kerja kayu	25	Unit
55	Partisi	17	Unit
56	<i>Portable Generating Set</i>	18	Unit
57	Mesin Fotocopy <i>Electronic</i>	1	Unit
58	Mesin Laminating	2	Unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
59	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Unit
60	Kursi Besi/Metal	16	Unit
61	Meja 1/2 Biro	5	Unit
62	Kursi Lipat	30	Unit
63	kipas angin	8	Unit
64	<i>Air Curtain</i>	4	Unit
65	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	8	Unit
66	Meja Tamu Biasa	1	Unit
67	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	1	Unit
68	<i>Camera Digital</i>	3	Unit
69	Personal Komputer Lain-lain	1	Unit
70	<i>Printer</i> (Peralatan Personal Komputer)	8	Unit
71	<i>Scanner</i> (Peralatan Personal Komputer)	10	Unit

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester 1 Tahun 2025, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 12 ayat (2) dinyatakan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 30 menegaskan bahwa pemerintah provinsi dapat menyelenggarakan urusan penanaman modal apabila mendapatkan pelimpahan kewenangan mengenai penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota, atau pelimpahan dari pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kota Pekalongan juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan. Pelaksanaan pelayanan publik tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga penyelenggaraan layanan tetap sesuai peraturan perundang-undangan serta menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Pekalongan selama periode Renstra 2021–2026 pada umumnya telah memenuhi sasaran dan target yang ditetapkan. Data dan informasi capaian kinerja tersebut memberikan gambaran atas permasalahan, potensi, dan pencapaian yang diraih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Indikator capaian kinerja yang digunakan mengacu pada tujuan, sasaran, dan program Renstra periode sebelumnya, serta selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan urusan, dan indikator lain yang ditetapkan secara nasional seperti SDGs (*Sustainable Development Goals*) dan indikator sektoral Kementerian/Lembaga terkait.

Secara rinci, capaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Pekalongan periode Renstra sebelumnya disajikan pada Tabel II-6 berikut:

Tabel II-5 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra DPMPTSP Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SAKIP OPD			□	N/A	74	75,5	77	77,6	N/A	75,52	76,05	77,6	77,9	N/A	1,02	1,01	1,01	1,00
a	Persentase ketersediaan laporan kinerja				N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00
b	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				N/A	100	100	100	100	N/A	100,00	99,27	103,58	100,87	N/A	1,00	0,99	1,04	1,01
c	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah				N/A	100	100	100	100	N/A	1,00	100,00	100,00	105,72	N/A	0,01	1,00	1,00	1,06
2	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana			□	N/A	196,35	200,28	204,28	212,54	N/A	418,36	570,79	1.208,61	1.446,65	N/A	2,13	2,85	5,92	6,81
a	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	N/A	1,00	2,00	1,00	3,00	N/A	1,00	2,00	1,00	3,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra DPMPTSP Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
b	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	50,00	100,00	100,00	100,00	N/A	0,50	1,00	1,00	1,00
a	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal				N/A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.750,00	N/A	2.500,00	3.847,00	4.878,00	5.038,00	N/A	1,00	1,54	1,95	1,83
d	Nilai Invetasi Baru pertahun				N/A	N/A	6,55	6,68	6,96	N/A	418,35	152,43	637,81	238,04	N/A	N/A	23,27	95,48	34,20
e	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2025

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan pada periode Renstra sebelumnya telah menunjukkan capaian yang signifikan, sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam perumusan strategi pembangunan periode 2025–2029.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Nilai IKM secara konsisten melampaui target setiap tahunnya. Pada tahun terakhir (tahun ke-5), nilai IKM tercatat 91,21 dari target 87,12 dengan rasio capaian 1,05. Rentang rasio capaian selama periode evaluasi berada di 1,08–1,02, dengan penguatan pada tahun terakhir 1,05, mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang lebih cepat, transparan, dan sesuai harapan masyarakat. Kontribusi signifikan ditunjukkan oleh beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) serta inovasi layanan, disertai konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Perbaikan tata kelola mulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas layanan publik termasuk menciptakan inovasi layanan.

Nilai SAKIP OPD: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan tren positif dengan capaian 77,9 pada tahun ke-5, melampaui target 77,6. Rasio capaian yang relatif stabil pada angka 1,00 menandakan konsistensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pertumbuhan Investasi: Pertumbuhan Investasi. Indikator pertumbuhan investasi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Dengan target pertumbuhan tahunan sebesar 2%, realisasi capaian bervariasi, mulai dari 117% pada tahun pertama hingga hanya 10% pada tahun kelima. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi pengendalian dan stabilisasi agar tren pertumbuhan investasi lebih berkesinambungan.

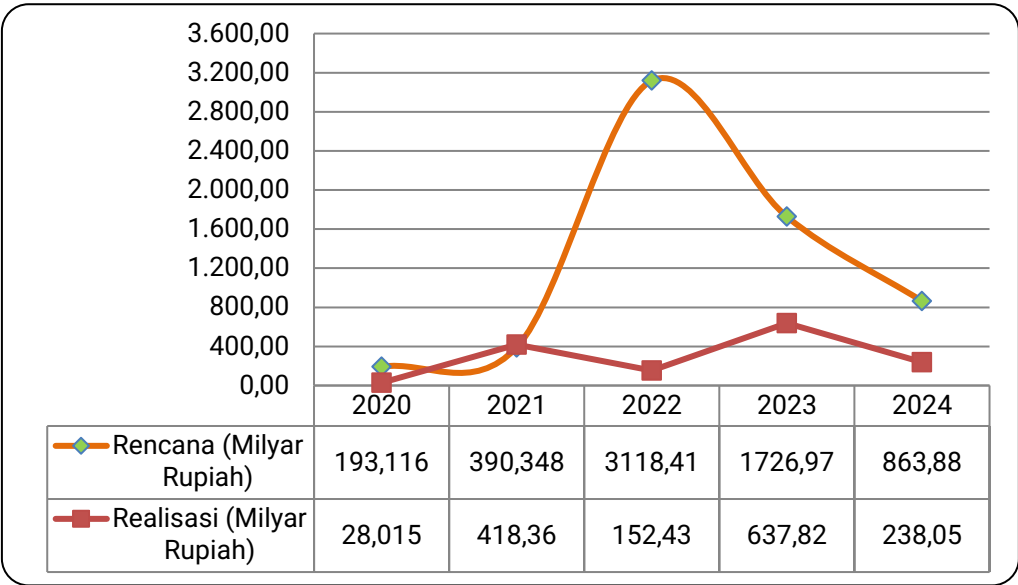
Nilai Investasi: Capaian nilai investasi kumulatif jauh melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun ke-5, nilai investasi tercatat sebesar 1.446,65 dari target 212,54, dengan rasio capaian mencapai 6,81. Hal ini menunjukkan keberhasilan

besar DPMPTSP dalam menarik modal investasi, meskipun pencapaiannya belum sepenuhnya stabil dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, kinerja DPMPTSP Kota Pekalongan pada periode Renstra 2021–2026 dapat dikategorikan **memuaskan**. Indikator pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja secara konsisten melampaui target, sementara capaian nilai investasi menunjukkan keberhasilan luar biasa. Namun demikian, dinamika pertumbuhan investasi tahunan menjadi catatan penting yang perlu dijawab dengan strategi penguatan kebijakan investasi yang lebih terarah dan berkelanjutan pada periode Renstra 2025–2029.

Perbandingan rencana investasi dan realisasi investasi pada periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik II-1 Perkembangan Rencana dan Realisasi Investasi Kota Pekalongan Tahun 2020–2024 (Rp Miliar)



Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2025

**Tabel II-6 Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal PMDN dan PMA
2020-2024**

Tahun	Nilai Penanaman Modal				Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal (PMA & PMDN) (%)
	PMA	PMDN		Jumlah	
		LKPM	Non LKPM		
2020	1,02	27,00	0,00	28,02	N/A
2021	7,76	410,59	0,00	418,36	1393,32%
2022	32,35	69,18	50,91	152,43	-63,56%
2023	34,27	502,45	101,1	637,82	318,43%
2024	30,11	136,64	71,29	238,05	-62,68%

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan

Perkembangan nilai rencana dan realisasi investasi Kota Pekalongan periode 2021–2024 dapat dilihat pada Grafik II-1. Nilai rencana investasi yang diinputkan melalui sistem OSS-RBA menunjukkan tren fluktuatif, dengan peningkatan paling signifikan pada tahun 2022 mencapai Rp3.118,41 miliar. Namun, realisasi investasi pada tahun yang sama justru mengalami penurunan, yaitu hanya Rp152,43 miliar. Kondisi ini antara lain disebabkan belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Lebih lanjut, Tabel II-8 menunjukkan perkembangan nilai realisasi penanaman modal berdasarkan asal modal (PMA dan PMDN). Pada tahun 2021 terjadi lonjakan realisasi investasi yang cukup tinggi dengan pertumbuhan mencapai 1.393,32% dibanding tahun 2020, didorong oleh peningkatan signifikan pada sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun, pada tahun 2022 pertumbuhan investasi menurun drastis hingga -63,56%.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 42 Tahun 2023 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan juga mencatat angka realisasi investasi UMK yang bernilai Rp 1 Miliar ke bawah. Realisasi investasi UMK perlu

dicatat karena besaran nilai tersebut tidak wajib dilaporkan melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Meskipun realisasinya kecil, namun jumlahnya signifikan dan mempengaruhi perekonomian daerah karena kegiatan usaha di Kota Pekalongan didominasi oleh sektor UMK.

Pada tahun 2023, nilai penanaman modal kembali meningkat tajam menjadi Rp637,82 miliar dengan pertumbuhan mencapai 318,43%, yang sebagian besar ditopang oleh peningkatan investasi UMK hingga Rp101,09 miliar. Akan tetapi, pada tahun 2024 tren kembali mengalami penurunan signifikan dengan nilai realisasi Rp238,05 miliar atau tumbuh negatif -62,68%.

Dalam rangka memperkuat iklim investasi, Pemerintah Kota Pekalongan telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada DPMPTSP. Kehadiran PTSP memberikan kemudahan dan kepastian bagi investor dalam pengurusan perizinan dan non-perizinan. Lebih lanjut, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagai dasar hukum pelayanan investasi. Dukungan sistem juga diperkuat dengan pemanfaatan OSS-RBA serta aplikasi New SAKPORE, yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam berusaha yang semakin dinamis.

Dengan berbagai kebijakan dan inovasi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif di tingkat regional maupun nasional.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mengakomodir perkembangan regulasi perizinan, maka telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2024 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Adapun rekapitulasi perizinan Tahun 2021-2024 di Kota Pekalongan sebagaimana tabel II-8 berikut ini:

Tabel II-7 Rekapitulasi Pelayanan Perizinan Tahun 2020-2024

No	Bidang / Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	616	628	425	565	453
2	Sektor Perdagangan	372	84	1510	3392	2893
3	Sektor Pertanian & Peternakan	0	0	0	0	0
4	Sektor Lingkungan dan Kehutanan	25	11	0	0	0
5	Sektor Perhubungan	37	16	10	10	9
6	Sektor Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0
7	Sektor Perindustrian	13	4	7	0	0
8	Sektor Pariwisata	14	4	0	0	0
9	Sektor Ketenagakerjaan	2	1	0	0	0
10	Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)	7201	33	0	0	0
11	Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	0	0	0	0	0
12	Sektor Kesehatan	840	1072	1828	1168	1468
13	Sektor Komunikasi dan Informatika	0	1	0	0	0
14	Sektor Pendidikan	0	0	67	608	453
	JUMLAH	9120	1854	3847	5743	5276

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan

Rekapitulasi perizinan pada tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan adanya peningkatan kualitas layanan, layanan jemput bola, penyederhanaan proses perizinan, dan penerapan OSS RBA sehingga proses perizinan yang menjadi semakin cepat, mudah, murah, dan transparan.

DPMPTSP Kota Pekalongan juga senantiasa melakukan inovasi dan terobosan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan. Berbagai inovasi layanan baik *IT based* maupun *non IT based* terus dikembangkan. Inovasi yang bersifat *IT based* tidak hanya berorientasi pelayanan kepada masyarakat, tetapi

juga mendukung kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan DPMPTSP Kota Pekalongan. Pengembangan sistem ini terus dikembangkan guna menjawab tuntutan masyarakat dan dinamika pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Inovasi *non IT based* juga dikembangkan melalui kolaborasi dengan stakeholder terkait.

Tabel II-8 Daftar Inovasi DPMPTSP

No	Nama Inovasi	Fungsi
1	New SAKPORE	Sistem Aplikasi perizinan yang menjadi kewenangan Kota Pekalongan
2	SIAPPEM	Aplikasi yang dirancang untuk mendukung berbagai aspek penting dalam pengelolaan dan promosi penanaman modal di Kota Pekalongan
3	PUSAT PENA Bergerak	Layanan perizinan dan penanaman modal bergerak termasuk layanan pendampingan LKPM
4	Antrian MPP Online	Layanan antrian pada Mal Pelayanan Publik yang dapat diambil dari manapun

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan

Kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Pekalongan pada periode sebelumnya tidak hanya tercermin dari capaian indikator kinerja, tetapi juga dari berbagai penghargaan dan pengakuan yang berhasil diraih, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tahun 2020, DPMPTSP memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB, sebagai bukti komitmen dalam membangun integritas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pengakuan tersebut kemudian diperkuat dengan diraihnya predikat A- (Sangat Baik) sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun 2021 dari Kementerian PANRB, yang menegaskan kualitas pelayanan publik yang semakin prima.

Pada tahun 2023, DPMPTSP berhasil meraih Predikat Terbaik I sebagai Unit Pengelola Pengaduan dengan nilai 95 dari Pemerintah Kota Pekalongan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dinas dalam membangun mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Di tahun yang sama, inovasi

pelayanan berbasis digital juga mendapatkan apresiasi tinggi, di mana aplikasi New SAKPORE berhasil meraih Juara I Inovasi Tahap Penerapan. Selain itu, DPMPTSP juga dinobatkan sebagai Juara Kreator Inovasi Tingkat OPD Kota Pekalongan, menegaskan peran aktif dalam menciptakan terobosan pelayanan yang kreatif dan adaptif.

Penghargaan lain yang berhasil diraih adalah sebagai Instansi yang melaksanakan Perizinan SIP Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis terintegrasi melalui SISDMK Non MPP Digital, yang menunjukkan komitmen DPMPTSP dalam mendukung sistem perizinan tenaga kesehatan secara modern dan terintegrasi. Pada tahun 2024, DPMPTSP kembali menorehkan prestasi dengan mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Pekalongan sebagai OPD dengan kategori Memuaskan dalam Monitoring Kearsipan Internal, yang menegaskan konsistensi pengelolaan administrasi dan tata kelola arsip secara baik.

Selain itu, upaya keterbukaan informasi publik juga menunjukkan perkembangan positif. DPMPTSP Kota Pekalongan berhasil mencapai nilai 85,55 dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kategori Menuju Informatif. Hal ini menandakan komitmen dinas dalam menyediakan akses informasi yang transparan, mudah dijangkau, dan akuntabel bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, deretan penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa DPMPTSP Kota Pekalongan mampu menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong inovasi, serta memperkuat akuntabilitas. Prestasi-prestasi ini sekaligus menjadi modal penting bagi DPMPTSP untuk terus berbenah dan melangkah lebih maju dalam periode Renstra 2025–2029.

Penerimaan penghargaan tersebut, tentunya didukung oleh pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang tersedia secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan data, realisasi anggaran DPMPTSP Kota Pekalongan tahun 2020-2024 cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang berkualitas. Anggaran yang tersedia digunakan untuk

melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Pagu anggaran dan realisasi pendanaan DPMPTSP Kota Pekalongan dijelaskan dalam tabel II-10 berikut ini:

2.1.4. Kinerja Keuangan DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tabel II-9 Pencapaian Realisasi Keuangan DPMPTSP Kota Pekalongan

Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	2.993,01	3.494,78	3.220,12	2.948,12	3.199,64	2.753,24	3.045,16	2.965,78	2.805,06	2.576,12	91,99	87,13	92,10	95,15	80,51	2,25	-
Belanja Barang/Jasa	2.238,98	2.322,15	2.783,37	2.676,64	2.780,48	1.854,66	2.129,17	2.661,93	2.600,24	2.588,25	82,83	91,69	95,64	97,15	93,09	5,91	
Belanja Modal	2.224,48	660,03	1.693,81	1.654,74	468,13	2.059,92	596,94	1.693,81	1.643,63	441,64	92,60	90,44	100,00	99,33	94,34	3,07	

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2025

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

- **Prosedur/Mekanisme:**
 - Prosedur yang rumit atau birokratis dapat memperlambat penyerapan anggaran.
 - Perubahan regulasi atau kebijakan keuangan juga dapat mempengaruhi proses penganggaran dan realisasi.
- **Jumlah dan Kualitas Personel (Sumber Daya Manusia):**
 - Kapasitas SDM yang kurang memadai dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dapat menghambat kinerja.
 - Rotasi atau pergantian personel yang sering juga dapat mempengaruhi kontinuitas dan efektivitas pengelolaan keuangan.
- **Progres Pelaksanaan Program:**
 - Keterlambatan dalam pelaksanaan program atau proyek dapat menyebabkan penyerapan anggaran yang tidak optimal.
 - Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, bencana alam, atau pandemi juga dapat memengaruhi progres pelaksanaan program.
- **Perencanaan Anggaran:**
 - Perencanaan anggaran yang kurang matang, seperti kurangnya data yang akurat, dan kurangnya antisipasi terhadap perubahan yang akan terjadi, dapat menyebabkan terjadinya perbedaan yang besar antara anggaran dan realisasi.
- **Faktor Eksternal:**
 - Kondisi ekonomi nasional dan daerah.
 - Perubahan kebijakan pemerintah pusat.
 - Bencana alam atau kondisi darurat lainnya.

Dengan memahami faktor-faktor ini, Perangkat Daerah dapat mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendanaan pelayanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tentu tidak dapat lepas dari tantangan dan peluang. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi DPMPTSP Kota Pekalongan juga cukup kompleks, antara lain:

Tantangan

Beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pencapaian target kinerja DPMPTSP Kota Pekalongan guna mendukung kemandirian ekonomi pada Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penyediaan layanan perizinan secara mudah, cepat, transparan dan akuntabel serta responsif dalam penanganan pengaduan;
2. Meningkatkan antusiasme pelaku usaha dalam pengajuan insentif penanaman modal daerah;
3. Meningkatkan realisasi investasi meskipun pelaku usaha di Kota Pekalongan didominasi oleh Usaha Menengan Kecil (UMK);
4. Terbatasnya lahan investasi;
5. Meningkatnya status Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus;
6. Daya saing peluang dan potensi investasi Kota Pekalongan dengan daerah sekitar;
7. Dinamika pengembangan sistem OSS RBA;
8. Dinamika kebijakan di tingkat daerah dan pusat yang perlu penyesuaian;
9. Kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM melalui sistem OSS RBA;

Peluang

1. Penerbitan regulasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha;
2. Ketersediaan Mal Pelayanan Publik dan kegiatan PUSAT PENA Bergerak, memudahkan pelaku usaha dalam kepengurusan perizinan dan pelaporan penanaman modal;

3. Rencana operasionalisasi Pasar Banjarsari yang membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan skala usahanya;
4. Potensi dan peluang investasi yang beragam, terutama di sektor jasa dan perdagangan, minat pelaku usaha masih tinggi dibuktikan dengan banyaknya hotel dan mal di Kota Pekalongan;
5. Pengembangan kawasan Pekalongan baru.

2.1.5. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan mencakup berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung, mendapatkan manfaat dari tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan. Kelompok sasaran ini dikategorikan menjadi tiga kelompok utama:

1. **Pelaku Usaha:** Ini merupakan kelompok sasaran terbesar, meliputi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta usaha non-UMK, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). DPMPTSP menyediakan layanan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai, mengembangkan, dan mengoperasikan kegiatan usaha mereka.
2. **Masyarakat:** Kelompok ini mencakup perorangan yang membutuhkan layanan perizinan non-berusaha. Layanan yang dimaksud, antara lain **Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)** dan **Surat Izin Praktik (SIP)** yang setiap tahunnya memiliki volume penerbitan yang signifikan. Selain itu, masyarakat juga menjadi sasaran dalam hal transparansi informasi dan kemudahan akses terhadap data dan kebijakan investasi di Kota Pekalongan.
3. **Instansi Pemerintah:** DPMPTSP menjalin koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ini mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, serta instansi vertikal yang terkait dengan proses perizinan.

2.1.6. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan fasilitasi investasi, DPMPTSP Kota Pekalongan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Mitra-mitra ini berperan penting dalam mendukung proses pelayanan perizinan, promosi investasi, dan pengembangan ekosistem usaha.

Mitra DPMPTSP dalam pemberian pelayanan, antara lain:

1. **Kementerian/Lembaga:** DPMPTSP berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam hal kebijakan investasi, promosi, dan pelaporan realisasi penanaman modal. Kemitraan juga terjalin dengan kementerian teknis lainnya untuk memfasilitasi perizinan sektoral.
2. **Perbankan dan Lembaga Keuangan:** Kerja sama dengan perbankan memfasilitasi investor dalam hal pembiayaan modal dan transaksi keuangan terkait investasi.
3. **Asosiasi Pengusaha:** Kemitraan dengan asosiasi seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atau asosiasi pengusaha lainnya bertujuan untuk mendapatkan masukan, menjembatani komunikasi, dan memahami kebutuhan pelaku usaha.
4. **Profesi dan Lembaga Pendukung:** DPMPTSP bekerja sama dengan notaris dan konsultan perizinan untuk mempercepat proses legalitas usaha bagi para investor.
5. **Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset:** Kemitraan dengan akademisi dapat dimanfaatkan untuk kajian potensi investasi, pemetaan peluang, serta inovasi dalam pelayanan.
6. **Pemerintah Daerah Lain:** Kerja sama lintas daerah, khususnya dengan kota/kabupaten di sekitar Kota Pekalongan, dapat dilakukan untuk mempromosikan potensi regional secara bersama-sama.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah didefinisikan sebagai kesenjangan atau gap antara kondisi riil capaian pembangunan yang ada saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya kendala atau hambatan yang menghalangi pencapaian target dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut, pemetaan masalah merupakan tahap krusial yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara terperinci akar-akar permasalahan yang dihadapi. Pemetaan ini bersumber dari evaluasi kinerja DPMPTSP periode sebelumnya dan analisis kondisi eksternal. Hasil dari pemetaan ini akan menjadi landasan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus utama DPMPTSP dalam lima tahun ke depan.

Masalah pokok Kota Pekalongan yang menjadi urusan DPMPTSP Kota Pekalongan ialah belum optimalnya investasi di Kota Pekalongan, yang diukur dengan nilai Realisasi Investasi UMK dan Non UMK. Data menunjukkan bahwa di Tahun 2024 total realisasi investasi di Kota Pekalongan 238,05 miliar rupiah, mengalami penurunan dibanding Tahun 2023 yang mencapai 637,82 miliar rupiah.

Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) masalah yang dijabarkan lagi ke dalam akar masalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel II-10 Pemetaan Masalah pada DPMPTSP Kota Pekalongan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Investasi di Kota Pekalongan	Belum optimalnya upaya peningkatan nilai investasi daerah.	Belum optimalnya penyediaan dan implementasi regulasi penanaman modal.
		Belum optimalnya informasi potensi investasi yang tersedia.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya promosi investasi
	Belum optimalnya kemudahan dan kepastian pelayanan perizinan.	Proses pelayanan yang belum sepenuhnya efisien.
		Kurangnya pemahaman pelaku usaha atas legalitas perizinan
	Rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pelaporan LKPM.	Kurangnya pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha.
	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi.	Data dan informasi perizinan belum terintegrasi secara optimal.
Belum optimalnya kualitas layanan publik.	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.	Belum optimalnya sistem manajemen kinerja internal.
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja.	Belum optimalnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum.
		Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah.

2.2.2. Isu Strategis

Penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Pekalongan tidak dapat terlepas dari analisis isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan dinamis, baik

secara global, nasional, maupun regional. Isu-isu ini secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kinerja dan arah kebijakan pemerintah daerah.

a. Gambaran Pelayanan DPMPTSP Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa DPMPTSP Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Susunan Organisasi DPMPTSP Kota Pekalongan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional. DPMPTSP Kota Pekalongan telah melakukan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kelompok jabatan fungsional yang ada akan melaksanakan program dan kegiatan yang tergabung dalam beberapa tim kerja.

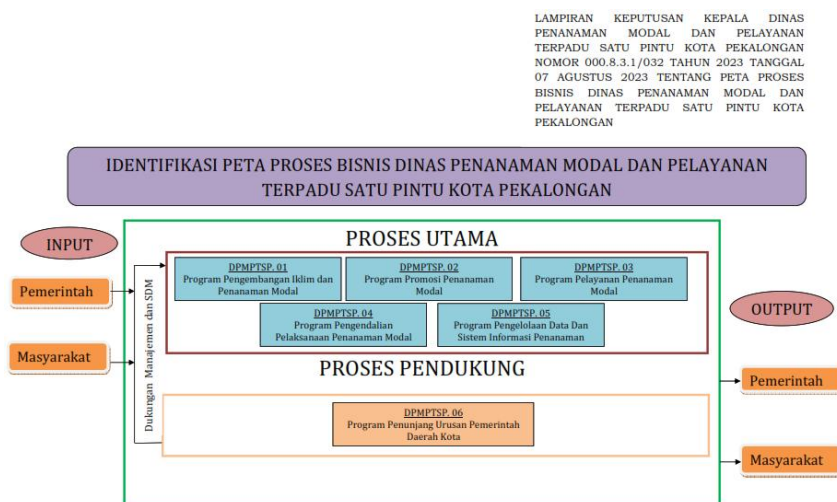
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang teridir atas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Selanjutnya, program-program tersebut terintegrasi dalam satu peta proses bisnis yang menggambarkan alur pelayanan dan mekanisme kerja yang ada di DPMPTSP Kota Pekalongan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentan Penyusunan Peta Preses Bisnis Instansi Pemerintah, DPMPTSP Kota Pekalongan telah memiliki

peta proses, peta subprocess, peta hubungan dan peta lintas fungsi. Penyusunan peta proses bisnis tersebut merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Gambar II-2 Peta Proses Bisnis DPMPTSP Kota Pekalongan



b. Isu Strategis Lingkungan Dinamis (Isu Global, Nasional, dan Regional)

1) Sasaran Jangka Menengah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Visi RPJPN 2025-2045 adalah “Negara Nusantara Bedaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Negara Nusantara merupakan negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai proses maritim dunia. Berdaulat memiliki makna ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju memiliki makna berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan memiliki makna lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029, Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Pencapaian visi Presiden melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik

Cepat (Quick Wins), dan 320 Program Kerja. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN

2025-2029, yaitu:

- a) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- h) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025-2029 berperan dalam mendukung pencapaian Misi (Prioritas Nasional) ke-5 pada RPJMN yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”, pada Sasaran Prioritas Nasional (PN) “Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”, dengan indikator PN “Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDB)”.

Penanaman modal didorong bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Dan mendukung pencapaian Misi (Prioritas Nasional) ke-7, yaitu: “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”, terutama memperkuat birokrasi diantaranya penguatan tata kelola OSS RBA. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya birokrasi penanaman modal yang adaptif dan melayani.

Visi Penanaman Modal 2045 berdasarkan RUPM 2025-2045 yaitu “Penanaman Modal yang Produktif dan Berkualitas melalui Perbaikan Iklim Investasi untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Produktif dimaknai bahwa penanaman modal berkontribusi terhadap aspek-aspek perekonomian seperti: (i) menciptakan lapangan kerja; (ii) mendukung hilirisasi; (iii) mendorong transfer teknologi; (iv) mendorong penelitian dan pengembangan (RnD); dan (v) mendukung industri berorientasi ekspor dan pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun di daerah (*spillover effect*).

Berkualitas dimaknai bahwa penanaman modal dilakukan secara berkelanjutan serta mendukung *green economy dan blue economy*; dan meningkatkan stok infrastruktur di berbagai wilayah, inklusif antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Iklim Investasi dimaknai perbaikan penanaman investasi mengarah pada berbagai hal seperti: (i) kepastian hukum (ii) transparansi kebijakan; (iii) ketersediaan sumberdaya input; (iv) kemudahan berusaha; (v) layanan dan pendampingan; (vi) insentif yang mudah dan menarik; dan (vii) stabilitas ekonomi dan politik.

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam tiga Misi yaitu: (1) mendukung iklim investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing; (2) mendukung penanaman modal pada sektor dan aktivitas yang memiliki efek pengganda paling besar terhadap perekonomian; dan (3) mendorong penanaman modal yang merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan data *United Nations Trade and Development*, tren *Foreign Direct Investment (FDI)* atau Penanaman Modal Asing (PMA) global yang cenderung turun. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu FDI Global tahun 2023 yang turun sebesar -2% (US\$ 1,33 Triliun), FDI ke negara berkembang yang turun sebesar -7%, ekonomi global turun sebesar -2.7%, kondisi geopolitik belum mereda dan persaingan menarik investasi global semakin ketat. Negara-negara Eropa dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mulai banyak melirik Vietnam dan negara-negara di benua Afrika sebagai tujuan investasi.

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis di jalur Pantura serta dukungan akses tol dan pelabuhan yang memperkuat peran kota sebagai simpul perdagangan dan logistik regional. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi masuknya investasi di bidang jasa, perdagangan, dan transportasi.

Di tingkat daerah, Kota Pekalongan memiliki potensi khas yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut mencakup branding Kota Batik Dunia, kekuatan UMKM dan ekonomi kreatif, serta potensi sektor kelautan dan maritim. Selain itu, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan inovasi digital New SAKPORE memperkuat daya saing pelayanan perizinan dan menjadi magnet bagi investor.

Dukungan SDM wirausaha muda dan tumbuhnya entrepreneur lokal juga merupakan aset penting dalam memperluas basis investasi yang inklusif. Hal ini sejalan dengan kecenderungan bahwa investasi padat modal semakin dominan, sehingga peran pelaku usaha lokal dan UMKM dapat menyeimbangkan dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Dengan demikian, isu strategis DPMPSTSP Kota Pekalongan tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika global dan kebijakan nasional, tetapi juga oleh kekuatan potensi daerah dan kondisi regional. Integrasi antara faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam merumuskan strategi peningkatan investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan pada periode 2025–2029.

2) Implikasi KLHS bagi pelayanan DPMPSTSP Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.

Selain itu, KLHS juga wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta rencana rincinya, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu untuk pulau-pulau kecil terluar serta rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan.

Pengembangan investasi dan perizinan tentunya tidak dapat terlepas dari keterkaitan penerapan KLHS tersebut. Dokumen lingkungan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum suatu usaha berjalan. Hal ini dimaksudkan agar keberlangsungan usaha tidak mengganggu aspek kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan perizinan yang memanfaatkan ruang dan/ atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko lingkungan hidup yang meliputi:

- a) perubahan iklim;
- b) kerusakan, kemerosotan, dan/ atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c) peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

- e) peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/ atau peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Kondisi geografis Kota Pekalongan sebagai kota pesisir menjadikan isu-isu tersebut semakin relevan, terutama terkait ancaman banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah. Oleh karena itu, penerapan KLHS dalam pelayanan perizinan DPMPTSP menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap investasi memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan dan keputusan perizinan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup serta menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat Kota Pekalongan

Dengan demikian, KLHS menjadi penting karena sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/ atau program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan Pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, rencana, dan/atau program termasuk perizinan terhadap lingkungan hidup dapat dihindari.

c. Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif melalui penguatan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan berusaha. Upaya ini diawali dengan penerbitan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang mengatur penyelenggaraan penanaman modal di Kota Pekalongan secara komprehensif serta mengamanatkan pembentukan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut, dengan muatan materi sebagai berikut:

- 1) Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), dokumen perencanaan jangka panjang sebagai pedoman dan arah kebijakan penanaman modal pemerintah daerah;
- 2) Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal;
- 3) Peta Potensi dan Peluang Investasi;
- 4) Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Dengan rangkaian regulasi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan menegaskan komitmennya dalam membangun iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, serta sejalan dengan kebijakan nasional di bidang penanaman modal.

Guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelaku usaha, Pemerintah Kota Pekalongan juga berupaya menyederhanakan pelayanan perizinan. Regulasi yang mengatur tentang perizinan terus disempurnakan sesuai dengan regulasi di atasnya, dan terakhir telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Seluruh pelayanan perizinan dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan sistem informasi baik Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (New SAKPORE). Dengan demikian pelayanan perizinan dapat dilaksanakan secara cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Tabel II-11 Isu Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Branding Kota Batik Dunia, UMKM kreatif, potensi maritim, posisi strategis jalur Pantura, keberadaan MPP & inovasi digital (New SAKPORE)	Pertumbuhan investasi fluktuatif; kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM masih rendah; koordinasi pengawasan lintas sektor belum optimal	Ancaman banjir rob, abrasi pantai, penurunan muka tanah, dan degradasi lingkungan pesisir	Penurunan tren FDI dunia, persaingan investasi makin ketat, kondisi geopolitik tidak stabil	Arah RPJMN 2025–2029 (hilirisasi SDA, ekonomi hijau & biru, penguatan OSS-RBA)	Posisi Pekalongan sebagai simpul perdagangan Pantura; potensi UMKM, batik, maritim belum optimal	Mewujudkan iklim investasi kondusif, inklusif, dan berdaya saing dengan tetap menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan
Regulasi penanaman modal: Perda No. 9/2022, Perda No. 2/2024, OSS-RBA	Belum tersedia RUPM terbaru; regulasi insentif masih merujuk Perwal 95/2018 yang perlu review	Alih fungsi lahan, potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat investasi	Perubahan iklim, green economy jadi tren investasi	Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko; target peningkatan nilai tambah hilirisasi	Tuntutan investor pada kemudahan perizinan yang cepat dan transparan	Optimalisasi regulasi dan fasilitasi investasi untuk mendukung hilirisasi, green economy, dan OSS-RBA

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SDM wirausaha muda, entrepreneur lokal, ekosistem UMKM yang kuat	Kesadaran pelaku UMKM terhadap legalitas usaha masih rendah; masih banyak UMKM yang belum memiliki NIB	Potensi lemahnya pengawasan lingkungan pada usaha mikro kecil yang belum berizin	Tren peningkatan standar legalitas & keberlanjutan untuk akses pasar	Program percepatan penerbitan NIB bagi UMK melalui OSS-RBA	Masih dominannya UMKM informal di Pekalongan yang butuh pendampingan legalitas	Peningkatan kesadaran dan fasilitasi legalitas UMKM melalui percepatan penerbitan NIB untuk memperkuat daya saing dan akses pembiayaan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Tujuan Rencana Strategis adalah pernyataan tentang hasil akhir yang ingin dicapai oleh DPMPTSP dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan. Tujuan perangkat daerah juga menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap perangkat daerah dan merupakan ultimate outcome yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2025-2030 adalah **Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah**, yang didukung oleh 9 (sembilan) misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. DPMPTSP mendukung pencapaian misi keenam **Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal**. Maka DPMPTSP menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, antara lain:

Tujuan	:	Meningkatkan investasi atau penanaman modal dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik;
Indikator	:	1. Nilai Realisasi Investasi Tahun N 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran DPMPTSP Kota Pekalongan telah memperhatikan tujuan yang ditetapkan dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi, profil layanan serta

kelompok sasaran (stakeholder) yang akan dilayani. Selain itu, perumusan sasaran juga telah mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis Pembangunan daerah . untuk mendukung pencapaian indikator tujuan, maka perlu ditetapkan indikator sasaran.

DPMPTSP Kota Pekalongan menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, antara lain:

Sasaran	: 1. Meningkatnya investasi baru; 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
Indikator	: 1. Nilai Realisasi Investasi Non UMK 2. Nilai SAKIP OPD

Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran DPMPSTSP Kota Pekalongan 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 3.1 Meningkatnya investasi daerah	Meningkatkan investasi atau penanaman modal dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik;		Nilai Realisasi Investasi Tahun N	Miliar Rupiah	238,05	491,75	180,00	181,80	183,62	185,45	187,31	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91,04	91,14	91,24	91,34	91,44	91,54	91,64	
		Meningkatnya investasi baru;	Nilai Realisasi Investasi Non UMK	Miliar Rupiah	166,00	487,00	150,00	151,50	153,02	154,55	156,09	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	77,90	77,92	78,12	78,14	78,16	78,18	78,20	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Pekalongan akan dicapai secara terarah. Untuk itu, diperlukan penahapan pembangunan yang disusun guna memberikan gambaran prioritas tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud. Setiap tahapan pembangunan mengacu pada strategi serta arah kebijakan yang telah dirumuskan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan. Penahapan strategi tersebut selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III-2 Penahapan Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik”
Strategi Tahunan RPJMD	Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Penguatan kebijakan pro investasi berbasis digital dan berorientasi pasar serta keberpihakan kepada UMKM	Implementasi green industry, penciptaan produk unggulan berdaya saing global dan penguatan daya tarik investasi ramah lingkungan	Peningkatan infrastruktur untuk mendukung realisasi investasi ramah lingkungan	Pengoptimalan potensi Mina Batik untuk meningkatkan realisasi investasi dan penggerak ekonomi kreatif

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Strategi Renstra OPD	Penguatan kapasitas aparaturn dan SDM pendukung layanan perizinan dan penanaman modal	Penyempurnaan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan dan penanaman modal yang adaptif dan berbasis digital sesuai dengan peraturan yang berlaku	Penguatan promosi investasi green industry	Penguatan sarana dan prasarana layanan penanaman modal berbasis teknologi dan ramah lingkungan	Penggalian potensi dan peluang investasi berbasis potensi lokal berbasis nilai-nilai “MINA BATIK”

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkret, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan memperhatikan pohon kinerja dan cascading yang sudah disusun, dan selanjutnya dituangkan dalam tabel III-3 sebagai berikut:

Tabel III-3 Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan realisasi investasi daerah melalui penguatan daya saing produk unggulan, implementasi ekonomi sirkular, menurunkan ketergantungan impor, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi serta mendorong pertumbuhan PDRB pada sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi	Penguatan iklim investasi berbasis potensi lokal, Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha berbasis digital, Peningkatan daya tarik investasi melalui regulasi insentif dan kemudahan, Penguatan kolaborasi dan branding investasi daerah, Peningkatan pengendalian dan kepatuhan pelaku usaha dan Pengembangan sistem data dan informasi penanaman modal	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam rangka mendukung pencapaian **Sasaran 1.1 Meningkatnya Investasi Baru**, DPMPTSP Kota Pekalongan menetapkan sejumlah program yang disusun selaras dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025–2029:

- 1) **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, yang diarahkan untuk meningkatkan nilai realisasi investasi daerah. Program ini didukung melalui kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif, sub kegiatan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan regulasi perizinan berbasis risiko, serta penyusunan dan publikasi peta potensi penanaman modal. Dengan adanya regulasi dan dokumen teknis yang memadai, diharapkan tercipta iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor.
- 2) **Program Promosi Penanaman Modal**, yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah investor baru di Kota Pekalongan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan promosi potensi investasi, penyusunan dokumen hasil promosi, serta pelaksanaan kegiatan tindak lanjut promosi. Upaya ini menjadi sarana strategis untuk memperluas jaringan investasi dan memperkenalkan potensi daerah kepada calon investor, baik domestik maupun luar daerah.
- 3) **Program Pelayanan Penanaman Modal**, yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan perizinan dan non-perizinan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penerbitan perizinan secara terpadu satu pintu, koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif, penyediaan layanan melalui OSS-RBA, hingga pengelolaan layanan konsultasi perizinan. Program ini mendukung prinsip kepastian hukum, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.
- 4) **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, yang diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Kegiatan dalam program ini

mencakup kunjungan lapangan, validasi perusahaan, penyelesaian permasalahan dan hambatan investasi, bimbingan teknis dan sosialisasi LKPM, serta evaluasi kepatuhan melalui inspeksi lapangan. Program ini sekaligus menjadi instrumen pengawasan agar investasi yang direalisasikan benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memberi manfaat nyata bagi daerah.

- 5) Kelima, **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data investasi. Melalui program ini, DPMPTSP mengembangkan ragam data yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder, termasuk pemanfaatan data OSS-RBA untuk perencanaan, kebijakan, dan peningkatan pelayanan publik.

Selain sasaran di bidang investasi/penanaman modal, DPMPTSP memiliki **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** untuk mendukung **Sasaran 2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**, yang mencakup penguatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, serta penyediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, jasa penunjang, dan pemeliharaan barang milik daerah. Program penunjang ini dioperasikan ke dalam kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan sarana pendukung kantor, serta pemeliharaan sarana dan prasarana agar pelayanan publik dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dengan struktur program dan kegiatan tersebut, Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 diharapkan mampu mewujudkan iklim investasi yang kondusif, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2026-2030 tersaji dalam Tabel IV-1 berikut:

Tabel IV-1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5.054.216.000		5.617.034.000		5.883.126.000		6.184.392.000		6.524.803.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya realisasi investasi terhadap total realisasi investasi selama periode RPJMD (Tahun 2026- 2030)	Persentase realisasi investasi terhadap total realisasi investasi selama periode RPJMD (Tahun 2026- 2030)	Persen	N/A	N/A	19,6	26.300.000	39,4	85.473.000	59,4	38.342.000	79,6	42.695.000	100	105.992.000	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya regulasi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal di Kota Pekalongan	Jumlah Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah / Keputusan Kepala Daerah / Keputusan Perangkat Daerah dalam rangka pemberian fasilitas/insent if dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	3	1	1	4.800.000	1	24.236.000	1	10.392.000	1	11.950.000	1	26.383.000	
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya terharmonisasi terkait Perizinan	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi	Dokumen	0	0	1	4.800.000	1	24.236.000	1	10.392.000	1	11.950.000	1	26.383.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Berusaha Berbasis Resiko	Berusaha Berbasis Risiko.	terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya dan terpublikasinya peta potensi penanaman modal daerah	Peta potensi Penanaman Modal yang dipublikasikan	Dokumen	1	1	1	21.500.000	1	61.237.000	1	27.950.000	1	30.745.000	1	79.609.000	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	21.500.000	1	61.237.000	1	27.950.000	1	30.745.000	1	79.609.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investor	Pertumbuhan investor	Persen	47,45	22,46	13,62	15.000.000	12,39	81.839.000	11,38	101.895.000	10,53	108.560.000	9,82	119.839.000	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kegiatan	2	1	1	15.000.000	2	81.839.000	2	101.895.000	2	108.560.000	2	119.839.000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut promosi investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	1	15.000.000	2	81.839.000	2	101.895.000	2	108.560.000	2	119.839.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	91,63	91,73	91,83	709.871.000	91,93	795.472.000	92,03	814.482.000	92,13	829.852.000	92,23	842.812.000	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan berusaha secara efektif dan akuntabel	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha	Dokumen	2894	3025	3086	709.871.000	3240	795.472.000	3402	814.482.000	3500	829.852.000	3550	842.812.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal sesuai kewenangan daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	15	7.888.000	20	16.560.000	25	22.870.000	30	24.940.000	35	27.700.000	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	2894	3025	1500	441.699.000	1550	480.503.000	1600	484.203.000	1650	487.903.000	1700	489.203.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terintegrasi secara Elektronik														
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui OSS-RBA	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	259	300	325	46.500.000	334	73.069.000	345	76.069.000	350	74.869.000	365	75.069.000	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Meningkatnya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan lintas daerah atas kegiatan usaha yang berizin berbasis risiko.	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	103	40	60	213.784.000	65	225.340.000	70	231.340.000	75	242.140.000	80	250.840.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Meningkatnya Pelaku usaha	Persentase Pelaku usaha yang	Persen	38,46	44	45	99.016.000	46	216.656.000	47	235.726.000	48	267.166.000	49	309.866.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENANAMAN MODAL	yang melaporkan LKPM	melaporkan LKPM														
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan dan validasi perusahaan melalui kegiatan kunjungan lapangan	Jumlah Perusahaan yang Tervalidasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pelaku Usaha	511	100	100	99.016.000	100	216.656.000	100	235.726.000	100	267.166.000	100	309.866.000	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Tertindakannya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam realisasi kegiatan usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	3	50	25	35.000.000	25	33.740.000	30	35.440.000	35	45.610.000	40	47.160.000	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam bimbingan teknis/sosialisasi implementasi dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	540	150	100	44.016.000	150	89.846.000	225	99.216.000	300	112.486.000	400	137.636.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya verifikasi, inspeksi lapangan, serta evaluasi kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko.	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Usaha	511	100	100	20.000.000	110	93.070.000	120	101.070.000	130	109.070.000	150	125.070.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	100	93.356.000	100	119.485.000	100	124.185.000	100	133.585.000	100	147.685.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya data dan informasi yang terverifikasi dan terkelola	Jumlah data dan Informasi Perizinan yang terverifikasi dan terkelola	Dokumen			4	93.356.000	4	119.485.000	4	124.185.000	4	133.585.000	4	147.685.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terwujudnya pemanfaatan data dan informasi perizinan berusaha berbasis OSS- RBA untuk perencanaan, kebijakan, dan pelayanan investasi.	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	12	12	4	93.356.000	4	119.485.000	4	124.185.000	4	133.585.000	4	147.685.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui perencanaan yang selaras, pelayanan administrasi yang andal, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	2.938.866.000	100	2.962.544.000	100	3.053.313.000	100	3.152.389.000	100	3.274.670.000	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100,8 7	100	100	1.039.239.000	100	1.193.505.000	100	1.353.123.000	100	1.442.085.000	100	1.536.879.000	
		Persentase pengadaan/pe meliharaan barang milik daerah	Persen	105,7 2	100	100	132.568.000	100	162.060.000	100	162.060.000	100	208.060.000	100	187.060.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara terpadu	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	37.965.000	100	45.989.000	100	37.965.000	100	37.965.000	100	60.892.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	2	4.198.000	2	5.097.000	2	5.097.000	2	5.097.000	3	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	1.271.000	2	2.542.000	2	2.542.000	2	2.542.000	2	2.542.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	15	15	32.496.000	15	38.350.000	15	30.326.000	15	30.326.000	15	48.350.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara transparan dan akuntabel	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	2.900.901.000	100	2.916.555.000	100	3.015.348.000	100	3.114.424.000	100	3.213.778.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	22	22	2.863.423.000	22	2.879.077.000	22	2.977.870.000	22	3.076.946.000	22	3.176.300.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	36.300.000	12	36.300.000	12	36.300.000	12	36.300.000	12	36.300.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	1	1.178.000	1	1.178.000	1	1.178.000	1	1.178.000	1	1.178.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib dan efektif	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	28.083.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	33.350.000	100	5.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1 Paket	2 Paket	28.083.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	2 Paket	33.350.000	1 Paket	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah secara tertib, efisien, dan akurat	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	102,62	100	100	233.500.000	100	309.155.000	100	368.773.000	100	409.385.000	100	452.529.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	4	4 Paket	4 Paket	2.000.000	4 Paket	3.395.000	4 Paket	3.430.000	4 Paket	5.970.000	4 Paket	7.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4 Paket	4 Paket	55.000.000	4 Paket	91.110.000	4 Paket	149.693.000	4 Paket	125.265.000	4 Paket	166.379.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4 Paket	4 Paket	3.000.000	4 Paket	4.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	7.500.000	4 Paket	8.500.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4 Paket	4 Paket	45.000.000	4 Paket	65.000.000	4 Paket	65.000.000	4 Paket	75.000.000	4 Paket	75.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	13 Paket	4 Paket	41.000.000	4 Paket	43.150.000	4 Paket	43.150.000	4 Paket	43.150.000	4 Paket	43.150.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	71	40	50	85.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas OPD	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	777.656.000	100	879.350.000	100	979.350.000	100	999.350.000	100	1.079.350.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	3.000.000	4	4.350.000	4	4.350.000	4	4.350.000	4	4.350.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	435.000.000	12	435.000.000	12	435.000.000	12	435.000.000	12	435.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	339.656.000	12	440.000.000	12	540.000.000	12	560.000.000	12	640.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah untuk mendukung	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	105,7 1	100	100	132.568.000	100	162.060.000	100	162.060.000	100	208.060.000	100	187.060.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	keberlanjutan layanan															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	8	14	100.000.000	14	89.060.000	14	89.060.000	14	89.060.000	14	89.060.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	2	3	17.968.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	66.000.000	3	65.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	41	26	35	14.600.000	35	23.000.000	35	23.000.000	35	53.000.000	35	33.000.000	

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025–2029, tidak terdapat program prioritas yang secara langsung diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini dikarenakan urusan penanaman modal lebih berfungsi sebagai *enabler* atau pendukung pencapaian sasaran program prioritas perangkat daerah lainnya, khususnya pada aspek peningkatan iklim investasi, penyederhanaan perizinan, serta penguatan pelayanan publik.

Meskipun demikian, DPMPTSP tetap memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program prioritas daerah melalui kegiatan fasilitasi investasi, pelayanan perizinan berbasis OSS-RBA, penguatan Mal Pelayanan Publik, serta pembinaan pelaku usaha dan UMKM. Dengan demikian, walaupun tidak terdapat program prioritas spesifik yang diampu, keberadaan DPMPTSP berkontribusi secara lintas sektor dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah

Tabel IV-2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nihil	-	-	Tidak terdapat program prioritas yang diampu DPMPTSP sesuai RPJMD 2025–2029

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) merupakan kerangka indikator kinerja yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta diselaraskan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IUP berfungsi sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah secara agregat dan berjangka panjang, memastikan seluruh upaya Perangkat Daerah (PD) terintegrasi menuju Visi Pembangunan Nasional dan Daerah.

Berdasarkan dokumen RPJMD yang memuat total 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP), telah dilakukan penelaahan mendalam terhadap tugas dan fungsi pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang tertuang dalam Renstra ini.

Hasil penelaahan ini secara tegas menyimpulkan bahwa DPMPTSP tidak secara langsung mengampu satu pun dari 45 IUP yang ditetapkan. Artinya, tugas dan fungsi DPMPTSP tidak menempatkannya sebagai leading sector yang bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian indikator-indikator tersebut.

Tabel IV-3 Indikator Utama Pembangunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nihil									

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. IKU sebagai ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi/ unit kerja dalam

mencapai tujuan. IKU DPMPTSP Kota Pekalongan untuk Tahun 2025-2030 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV-4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai Realisasi Investasi Non UMK	Rp Milyar	166,00	487,00	150,00	151,5	153,02	154,55	156,09	
2	Nilai SAKIP OPD	Nilai	77,9	77,85	78,12	78,14	78,16	78,18	78,2	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain IKU, juga ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan Penanaman Modal yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut ditampilkan dalam tabel IV.5 berikut ini

Tabel IV-5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten /kota	Persen	-62,68	106,6	-63,4	1	1	1	1	

Target persentase peningkatan investasi DPMPTSP Kota Pekalongan pada periode 2025–2030 disusun dengan mempertimbangkan dinamika realisasi investasi dan tren masuknya proyek PMDN maupun PMA. Pada tahun 2025, realisasi investasi diperkirakan mencapai lebih dari Rp500 miliar, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, terutama karena adanya satu proyek PMA berskala besar yang mendongkrak capaian.

Dengan tingginya realisasi tahun 2025, maka target tahun 2026 secara persentase ditetapkan sebesar –63,4%. Angka minus ini bukan mencerminkan

penurunan kinerja, melainkan konsekuensi logis dari basis pembandingan tahun 2025 yang sangat tinggi (*outlier*). Pada tahun 2026, target investasi ditetapkan sebesar Rp180 miliar yang secara substansi tetap positif dan realistis, sesuai dengan potensi investasi riil yang diproyeksikan masuk ke Kota Pekalongan.

Selanjutnya, mulai tahun 2027 hingga 2030, target pertumbuhan investasi ditetapkan pada kisaran 1% setiap tahunnya. Penetapan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi tren pertumbuhan sekaligus menunjukkan upaya DPMPTSP dalam mempertahankan stabilitas iklim investasi, meskipun tidak selalu dalam angka yang spektakuler.

Dengan demikian, meskipun terjadi penetapan target minus pada tahun 2026, hal ini dapat dijelaskan secara rasional dan tidak mengurangi makna komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Pekalongan tidak termasuk dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi objek SPM.

Enam urusan wajib pelayanan dasar tersebut meliputi:

- 1) Pendidikan,
- 2) Kesehatan,
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
- 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,
- 6) Sosial.

Dengan demikian, DPMPTSP Kota Pekalongan tidak memiliki indikator SPM yang harus dilaporkan dalam dokumen Renstra 2025–2029. Meskipun tidak

mengampu SPM, DPMPTSP tetap berkomitmen memberikan pelayanan publik yang prima melalui pemenuhan indikator kinerja kunci (IKK) dan indikator kinerja perangkat daerah yang relevan dengan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tabel IV-6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Nihil									

4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel IV-7 Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Nihil									

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen ini berlandaskan pada berbagai regulasi dan dokumen perencanaan, antara lain RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, RPJPD Kota Pekalongan 2025–2045, RPJMD Kota Pekalongan 2025–2029, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra PD. Selain itu, Renstra ini memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPMPTSP periode sebelumnya (2021–2026), yang menunjukkan capaian signifikan di bidang pelayanan publik dan penanaman modal, namun juga mengungkap tantangan berupa fluktuasi investasi dan belum optimalnya pelaporan LKPM.

Penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra ini mengacu pada nomenklatur urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan perubahannya, serta selaras dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, sebagai acuan teknis dalam penyusunan Renja tahunan dan RKA-SKPD.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam implementasi Renstra ini antara lain:

- 1) Memprioritaskan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja perangkat daerah (IKD) sesuai sasaran Renstra;

- 2) Mengoptimalkan potensi SDM, sarana prasarana, dan sistem digital (OSS-RBA, New SAKPORE, MPP) untuk mendukung target kinerja;
- 3) Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan stakeholder eksternal agar kebijakan investasi lebih terintegrasi;
- 4) Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) dengan dokumen tahunan (Renja dan APBD).

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 meliputi:

- 1) Konsistensi perencanaan: Renstra menjadi acuan utama penyusunan Renja tahunan, yang wajib berpedoman pada arah kebijakan RPJMD dan target pembangunan daerah.
- 2) Koordinasi internal dan eksternal: Seluruh unit kerja di lingkungan DPMPTSP harus menjalin sinergi yang kuat dengan perangkat daerah lain, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, dunia usaha, serta masyarakat.
- 3) Pengendalian dan evaluasi: Pelaksanaan Renstra dikawal melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- 4) Efisiensi dan efektivitas: Program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan keterbatasan anggaran, sehingga perlu efisiensi penggunaan sumber daya dan fokus pada kegiatan prioritas.
- 5) Fleksibilitas adaptif: Jika terjadi perubahan regulasi nasional, daerah, atau dinamika lingkungan strategis (misalnya krisis ekonomi global, perubahan iklim, atau perubahan struktur investasi), Renstra dapat direvisi sesuai kaidah peraturan perundang-undangan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut implementasi Renstra DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 meliputi:

- 1) Penjabaran ke dalam Renja tahunan sebagai dokumen operasional, yang kemudian dituangkan dalam RKA-SKPD dan APBD;

- 2) Monitoring capaian kinerja melalui indikator kinerja utama, indikator kinerja perangkat daerah;
- 3) Evaluasi periodik terhadap pencapaian sasaran, dengan mekanisme reviu internal dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah, serta evaluasi kinerja oleh BAPPERIDA Kota Pekalongan;
- 4) Penguatan sistem informasi untuk mendukung transparansi data, baik melalui OSS-RBA, New SAKPORE, maupun sistem pelaporan internal;
- 5) Kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi) untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, inovatif, dan berkelanjutan;
- 6) Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) melalui pembelajaran dari hasil evaluasi, inovasi pelayanan, dan adaptasi terhadap kebijakan baru.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen tinggi seluruh pemangku kepentingan, implementasi Renstra DPMPPTSP Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kontribusi Kota Pekalongan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Pekalongan, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekalongan


ARIF KARYADI, S.Sos
Pemuda Utama Muda
NIP. 19711017 199903 1 007